



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan daya saing daerah diperlukan penyelenggaraan pembangunan daerah berdasarkan perencanaan yang berkualitas;
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024 sehingga untuk mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional perlu disusun rencana pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, menyatakan rencana pembangunan daerah tahun 2025-2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025-2026 sebagai dokumen transisi pasca berakhirnya periodisasi RPJMD.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

12. Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Kebijakan Pembangunan adalah arah/Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah /Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPD berkedudukan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang indikatif.
- (2) RPD disusun berdasarkan RPJPD.
- (3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. RKPD; dan
 - b. Renstra PD.

Pasal 3

- (1) RPD digunakan oleh Penjabat Walikota sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan RPD melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan RPD melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Dokumen RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;

- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pejabat Walikota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian target Tujuan dan Sasaran RPD;
 - b. capaian target Indikator Kinerja Daerah RPD;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
 - d. efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERUBAHAN RPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan/atau
 - c. terjadi sesuatu hal terkait kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi sesuatu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi RPD.
- (3) Perubahan RPD menjadi pedoman dalam menyusun perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Sebelum RPJMD Periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih

berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-3
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-11
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI.....	II-1
2.1.2 DEMOGRAFI.....	II-40
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-50
2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI.....	II-50
2.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA.....	II-61
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-78
2.3.1 DAYA SAING EKONOMI.....	II-78
2.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA.....	II-88
2.3.3 DAYA SAING IKLIM INVESTASI.....	II-89
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-94
2.4.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR.....	II-94
2.4.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR.....	II-166
2.4.3 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN.....	II-212
2.4.4 FOKUS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-221
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2019-2023.....	III-1
3.1.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	III-1
3.1.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	III-19
3.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025-2026.....	III-27
3.2.1 KERANGKA PENDANAAN.....	III-27

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.1 PERMASALAHAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.1.2 ASPEKGEOGRAFIS.....	IV-4
4.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	IV-4
4.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	IV-5
4.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM	IV-7
4.2 ISU STRATEGIS.....	IV-16
4.2.1 Isu Internasional.....	IV-16
4.2.2 Isu Nasional.....	IV-19
4.2.3 Isu Regional.....	IV-20
4.2.4 Isu Kota Kediri	IV-21
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.....	V-1
5.2 CASCADING KINERJA	V-6
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-13
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP.....	IX-1
9.1 Pedoman Transisi	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Keterkaitan Antar Dokumen	I-3
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Kediri	II-1
Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Kediri	II-7
Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Kediri.....	II-8
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kota Kediri	II-11
Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kota Kediri.....	II-12
Gambar 2.6 Peta Persebaran Sumber Mata Air di Kota Kediri	II-16
Gambar 2.7 Peta Daya Dukung Kota Kediri.....	II-19
Gambar 2.8 Peta Tutupan Lahan di Kota Kediri	II-21
Gambar 2.9 Peta Risiko Banjir Kota Kediri.....	II-34
Gambar 2.10 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Kediri	II-35
Gambar 2.11 Peta Risiko Kekeringan Kota Kediri	II-37
Gambar 2.12 Peta Risiko Tanah Longsor Kota Kediri	II-38
Gambar 2.13 Peta Risiko Gempa Bumi Kota Kediri	II-40
Gambar 2.14 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Kediri.....	II-42
Gambar 2.15 Peta Kepadatan Penduduk Kota Kediri.....	II-44
Gambar 2.16 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Kediri.....	II-176
Gambar 2.17 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).....	II-217
Gambar 5.1 Cascading Kinerja Pemerintah Kota Kediri	V-6

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keselarasan Dengan Tujuan RPD Provinsi Jatim	I-4
Tabel 1. 2 Keterkaitan Sasaran Pokok dari RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 dengan RPD Tahun 2025-2026.....	I-5
Tabel 1. 3 Keterkaitan Tujuan RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021-2026	I-9
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan dan Kelurahan.....	II-2
Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan dan Jumlah RT/RW di Kota Kediri	II-4
Tabel 2.3 Kondisi Topografi Kota Kediri	II-4
Tabel 2.4 Kondisi Topografi Tiap Kelurahan di Kota Kediri.....	II-5
Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kota Kediri.....	II-9
Tabel 2. 6 Daftar Sungai Utama di Kota Kediri	II-12
Tabel 2.7 Jenis Sumber Mata Air Kota Kediri Tahun 2022.....	II-13
Tabel 2.8 Tutupan Lahan di Kota Kediri	II-20
Tabel 2.9 Rencana Struktur Peruntukan Lahan Kawasan GOR Jayabaya	II-25
Tabel 2. 10 Luas Eksisting RTH Kota Kediri Tahun 2022	II-27
Tabel 2. 11 Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Kediri	II-28
Tabel 2. 12 Tingkat Risiko Bencana di Kota Kediri Tahun 2023	II-32
Tabel 2. 13 Potensi Luas Risiko Banjir Per Kecamatan di Kota Kediri	II-33
Tabel 2. 14 Potensi Risiko Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Kediri.....	II-34
Tabel 2. 15 Potensi Risiko Bencana Kekeringan Per Kecamatan	II-36
Tabel 2. 16 Potensi Risiko Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Kediri.....	II-37
Tabel 2.17 Risiko Gempa Bumi Per Kecamatan di Kota Kediri.....	II-39
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Kediri Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022	II-41
Tabel 2. 19 Sex Ratio Berdasarkan Kecamatan di Kota Kediri Tahun 2018-2022.....	II-43
Tabel 2. 20 Kepadatan Penduduk Kota Kediri Berdasarkan kecamatan Tahun 2018-2022	II-43
Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang, dan Pindah di Kota Kediri Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022	II-45
Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Kediri Tahun 2018-2022.....	II-49
Tabel 2. 23 Indikator Ketenagakerjaan Kota Kediri Tahun 2018- 2022.....	II-60
Tabel 2.24 Kriteria Komponen Pembangunan Manusia Berdasarkan BPS	II-62

Tabel 2. 25 Prevalensi Stunting Kota Kediri	II-76
Tabel 2. 26 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Kediri Tahun 2018-2022.....	II-79
Tabel 2. 27 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Kediri Tahun 2018-2022	II-80
Tabel 2. 28 Nilai PDRB Kota Kediri Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Kediri Tahun 2018-2022.....	II-82
Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	II-83
Tabel 2. 30 Pertumbuhan PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Kota Kediri Tahun 2018-2022	II-84
Tabel 2. 31 Jumlah dan Persentase Pengeluaran Perkapita Penduduk Per Bulan di Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-86
Tabel 2. 32 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Per Bulan) Menurut Kelompok Komoditas di Kota Kediri Tahun 2023	II-87
Tabel 2. 33 Nilai Investasi Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-93
Tabel 2. 34 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Kota Kediri Tahun 2019-2022	II-94
Tabel 2. 35 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	II-94
Tabel 2. 36 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan	II-95
Tabel 2. 37 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Kediri Tahun 2019-2023....	II-96
Tabel 2. 38 Angka Melek Huruf Kota Kediri.....	II-97
Tabel 2. 39 Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-97
Tabel 2. 40 Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-98
Tabel 2. 41 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	II-99
Tabel 2. 42 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-99
Tabel 2. 43 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-100
Tabel 2. 44 Angka Kelulusan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-101
Tabel 2. 45 Angka Melanjutkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-101
Tabel 2. 46 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Kediri.....	II-102
Tabel 2. 47 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun.....	II-103
Tabel 2. 48 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan.....	II-105
Tabel 2. 49 Angka Kematian Bayi di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-106

Tabel 2. 50 Angka Kematian Ibu di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-108
Tabel 2. 51 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan.....	II-109
Tabel 2. 52 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-110
Tabel 2. 53 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	II-111
Tabel 2. 54 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Kediri Tahun 2019-2023 ..	II-112
Tabel 2. 55 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Kediri.....	II-112
Tabel 2. 56 Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-113
Tabel 2. 57 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar	II-114
Tabel 2. 58 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-115
Tabel 2. 59 Cakupan Pelayanan Kesehatan Hipertensi Sesuai Standar	II-116
Tabel 2. 60 Cakupan Pelayanan Kesehatan Diabetes Militus (DM) Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-116
Tabel 2. 61 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-117
Tabel 2. 62 Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-118
Tabel 2. 63 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengeue (DBD) di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-119
Tabel 2. 64 Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Orang dengan Resiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-120
Tabel 2. 65 Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-121
Tabel 2. 66 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kota Kediri	II-122
Tabel 2. 67 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-123
Tabel 2. 68 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-124
Tabel 2. 69 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023	II-126
Tabel 2. 70 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023	II-127
Tabel 2. 71 Indeks Infrastruktur Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-128
Tabel 2. 72 Tingkat Pelayanan Jalan Kota Kediri Tahun 2023	II-129

Tabel 2. 73 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap/ Baik.....	II-130
Tabel 2. 74 Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023.....	II-131
Tabel 2. 75 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2019-2023.....	II-132
Tabel 2. 76 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan	II-133
Tabel 2. 77 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap	II-134
Tabel 2. 78 Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Persawahan	II-135
Tabel 2. 79 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019-2023	II-136
Tabel 2. 80 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	II-137
Tabel 2. 81 Rasio Bangunan Ber-IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) per Satuan Bangunan Tahun 2019-2023	II-137
Tabel 2. 82 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dengan Trotoar.....	II-138
Tabel 2. 83 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023	II-139
Tabel 2. 84 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023	II-140
Tabel 2. 85 Rasio Rumah Layak Huni Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-141
Tabel 2. 86 Persentase Pemukiman yang Tertata di Kota Kediri	II-141
Tabel 2. 87 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2019-2023	II-142
Tabel 2. 88 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).....	II-143
Tabel 2. 89 Rasio Lampu Penerangan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik.....	II-144
Tabel 2. 90 Persentase Jaringan Drainase Lingkungan yang Berfungsi dengan Baik Tahun 2019-2023	II-145
Tabel 2. 91 Persentase Rusunawa yang Dikelola Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023	II-146
Tabel 2. 92 Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-146
Tabel 2. 93 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Kediri.....	II-147
Tabel 2. 944 Realisasi indikator kinerja penatagunaan tanah yang berkualitas tahun 2019-2023	II-147
Tabel 2. 955 Realisasi indikator kinerja penatagunaan tanah yang berkualitas tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2. 96 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023	II-149

Tabel 2. 97 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023	II-150
Tabel 2. 98 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023	II-151
Tabel 2. 99 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Kediri Tahun 2019-2023 ...	II-153
Tabel 2. 100 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023	II-153
Tabel 2. 101 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023	II-154
Tabel 2. 102 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023	II-155
Tabel 2. 103 Potensi Konflik yang Tertangani Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2. 104 Penegakan Peraturan Daerah (%) Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2. 105 Tingkat Penyelesaian K3 (%) Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-157
Tabel 2. 106 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-158
Tabel 2. 107 Response Time Penanganan Bencana Tahun 2019 - 2023	II-159
Tabel 2. 108 Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Tahun 2019-2023	II-160
Tabel 2. 109 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	II-160
Tabel 2. 110 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2019 - 2023	II-162
Tabel 2. 111 PPKS yang Tertangani Tahun 2019 - 2023	II-162
Tabel 2. 112 PPKS Skala Kota yang Menerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2019 - 2023	II-163
Tabel 2. 113 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial tahun 2019 - 2023	II-164
Tabel 2. 114 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat tahun 2019 - 2023	II-165
Tabel 2. 115 Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial tahun 2019 - 2023	II-166
Tabel 2. 116 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Kediri Tahun 2019-2023 ...	II-167
Tabel 2. 117 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2019-2023	II-168
Tabel 2. 118 Tenaga Kerja Terbina Kompetensi di Kota Kediri	II-168
Tabel 2. 119 Persentase Jumlah Wanita Kawin Usia dibawah 20 tahun	II-172
Tabel 2. 120 Rasio KDRT di Kota Kediri Tahun 2018-2022	II-172

Tabel 2. 121 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Terlayani di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Kediri Tahun 2018-2022	II-173
Tabel 2. 122 Skor Pola Pangan Harapan Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-174
Tabel 2. 123 Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-175
Tabel 2. 124 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-176
Tabel 2. 125 Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-177
Tabel 2. 126 Hasil Penghitungan CPPD-Beras Kota Kediri	II-178
Tabel 2. 127 Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri.....	II-179
Tabel 2. 128 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri	II-181
Tabel 2. 129 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Kediri.....	II-182
Tabel 2. 130 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Kediri Tahun 2018-2023	II-182
Tabel 2. 131 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Kediri.....	II-183
Tabel 2. 132 Timbulan sampah yang terkelola di Kota Kediri Tahun 2018-2022..	II-184
Tabel 2. 133 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-185
Tabel 2. 134 Rasio Penduduk Ber-Akta Kelahiran di Kota Kediri Tahun 2019-2023	186
Tabel 2. 135 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-186
Tabel 2. 136 Kepemilikan Akta Kelahiran Per-1000 Penduduk Usia Anak Tahun 2019-2023	II-187
Tabel 2. 137 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-189
Tabel 2. 138 Rasio Ijin Trayek Angkutan Kota Tahun 2018-2023.....	II-192
Tabel 2. 139 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Kediri Tahun 2018-2023	II-193
Tabel 2. 140 Persentase Layanan Angkutan Perkotaan Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-193
Tabel 2. 141 Indeks Fasilitas Perlengkapan LLAJ.....	II-194
Tabel 2. 142 Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-195
Tabel 2. 143 Persentase Koperasi Sehat Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-201
Tabel 2. 144 Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kota Kediri.....	II-201

Tabel 2. 145 Jumlah Usaha Mikro berdasarkan Peningkatan Omzet Kota Kediri Tahun 2020-2023	II-202
Tabel 2. 146 Jumlah Atlet Berprestasi Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-204
Tabel 2. 147 Jumlah Kegiatan Olahraga yang Diselenggarakan	II-204
Tabel 2. 148 Prestasi Kepemudaan Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-205
Tabel 2. 149 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	II-205
Tabel 2. 150 Persentase Kegiatan Seni & Budaya Daerah yang Diselenggarakan Tahun 2019-2023	II-206
Tabel 2. 151 Jumlah Kunjungan Museum Tahun 2019-2023	II-206
Tabel 2. 152 Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2022-2023	II-207
Tabel 2. 153 Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2023	II-208
Tabel 2. 154 Nilai Indeks Kegemaran Membaca Kota Kediri pada tahun 2023	II-209
Tabel 2. 155 Perkembangan Indeks Kearsipan Kota Kediri Tahun 2019-2022.....	II-211
Tabel 2. 156 Produksi Perikanan (dalam Kwintal) Tahun 2018-2023	II-212
Tabel 2. 157 Angka Konsumsi Ikan (dalam Kg/Kapita/Tahun)	II-213
Tabel 2. 158 Jumlah Wisatawan Tahun 2019-2023	II-214
Tabel 2. 159 Produktivitas Tanaman Pangan Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-215
Tabel 2. 160 Produktivitas Tanaman Perkebunan Kota Kediri.....	II-215
Tabel 2. 161 Produktivitas Peternakan Kota Kediri (dalam Ton).....	II-216
Tabel 2. 162 Penggunaan Lahan Sawah Kota Kediri Tahun 2019 dan 2023.....	II-217
Tabel 2. 163 Neraca Perdagangan Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-218
Tabel 2. 164 Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku Tahun 2023	II-219
Tabel 2. 165 Indeks Tertib Ukur Kota Kediri Tahun 2020-2023.....	II-219
Tabel 2. 166 Jenis dan Jumlah Industri Tahun 2023.....	II-220
Tabel 2. 167 Tabel Pertumbuhan Industri Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-220
Tabel 2. 168 Indikator Kinerja Perencanaan.....	II-222
Tabel 2. 169 Pengukuran Kinerja Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-223
Tabel 2. 170 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2018-2022	II-226
Tabel 2. 171 Hasil pengukuran IPKD Kota Kediri	II-228
Tabel 2. 172 Skor EKPPD Pemerintah Kota Kediri Tahun 2018-2023.....	II-239

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2020.....	III-2
Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023.....	III-3
Tabel 3. 3 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	III-4
Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023	III-4
Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019-2020	III-7
Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2021-2023	III-7
Tabel 3. 7 Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023	III-9
Tabel 3. 8 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023.....	III-9
Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020	III-11
Tabel 3. 10 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023	III-12
Tabel 3.11 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Tahun 2019-2020	III-13
Tabel 3. 12 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2019-2020 ...	III-13
Tabel 3. 13 Komponen Belanja Operasi Tahun 2021-2023.....	III-13
Tabel 3. 14 Komponen Belanja Modal Tahun 2021-2023.....	III-14
Tabel 3. 15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023	III-14
Tabel 3. 16 Rata-rata Peningkatan Neraca Daerah Kota Kediri.....	III-16
Tabel 3. 17 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Kediri Tahun 2019-2023	III-22
Tabel 3. 18 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Kediri Tahun 2019-2023	III-24
Tabel 3.19 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Kediri.....	III-24
Tabel 3. 20 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Kediri Tahun 2018-2022	III-25
Tabel 3.21 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Kediri Tahun 2025-2026	III-27
Tabel 4. 1 Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional dan Kota Kediri	IV-21
Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026	V-2
Tabel 6. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi Kota dan Arah Kebijakan Kota Kediri Tahun 2025-2026	VI-2

Tabel 6. 2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas	VI-14
Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri.....	VII- <u>1</u>
Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	VII- <u>2</u>
Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Kediri Tahun 2024-2026.....	VIII-1
Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kota Kediri Tahun 2025-2026.....	VIII-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Curah Hujan di Kota Kediri (mm ³) Tahun 2018-2022	II-17
Grafik 2. 2 Jumlah Hari Hujan di Kota Kediri Tahun 2018-2022	II-17
Grafik 2. 3 Indeks Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-31
Grafik 2. 4 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Kediri Tahun 2023	II-31
Grafik 2. 5 Persentase Sebaran Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022	II-44
Grafik 2. 6 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2022	II-47
Grafik 2. 7 Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022	II-48
Grafik 2. 8 Persentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kota Kediri Tahun 2022	II-50
Grafik 2. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-51
Grafik 2. 10 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Kediri Tahun 2019 – 2023	II-52
Grafik 2. 11 Persentase Penduduk Miskin di Kota Kediri Tahun 2019 – 2023	II-53
Grafik 2. 12 Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Kediri Tahun 2019 – 2023	II-54
Grafik 2. 13 Garis Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2019 – 2023.....	II-55
Grafik 2. 14 Indeks Gini Kota Kediri Tahun 2018 – 2022.....	II-56
Grafik 2. 15 Perbandingan Indeks Gini Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022	II-56
Grafik 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2020-2023.....	II-58
Grafik 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2020-2023.....	II-58
Grafik 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2020-2023	II-59
Grafik 2. 19 Jumlah Penduduk Semua Umur, Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja Kota Kediri, Tahun 2018-2022.....	II-60
Grafik 2. 20 Perkembangan IPM Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-63
Grafik 2. 21 Perkembangan Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-64
Grafik 2. 22 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023	II-65

Grafik 2. 23 Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-65
Grafik 2. 24 Perkembangan RLS dan HLS Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-66
Grafik 2. 25 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2018-2022	II-67
Grafik 2. 26 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023	II-67
Grafik 2. 27 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2018-2022	II-68
Grafik 2. 28 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023	II-69
Grafik 2. 29 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2018-2022	II-70
Grafik 2. 30 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023	II-70
Grafik 2. 31 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-71
Grafik 2. 32 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-73
Grafik 2. 33 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022	II-74
Grafik 2. 34 Indeks Keluarga Sehat Kota Kediri Tahun 2020-2023.....	II-76
Grafik 2. 35 Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita di Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-77
Grafik 2. 36 Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional (yoy) tahun 2019-2023	II-85
Grafik 2. 37 Indeks Pendidikan Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-88
Grafik 2. 38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kediri Tahun 2018-2022	II-89
Grafik 2. 39 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-90
Grafik 2. 40 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-92
Grafik 2. 41 Persentase Anggaran Responsif Gender Kota Kediri.....	II-171
Grafik 2. 42 Persentase Kelurahan Swasembada Tahun 2020-2023.....	II-188
Grafik 2. 43 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-189
Grafik 2. 44 Peningkatan kualitas Kampung KB Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-190
Grafik 2. 45 Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri	II-191
Grafik 2. 46 Indeks SPBE Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-196

Grafik 2. 47 Persentase Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-199
Grafik 2. 48 Realisasi Nilai Investasi Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-203
Grafik 2. 49 Perbandingan Tingkat Kegemaran Membaca Kota Kediri dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023	II-210
Grafik 2. 50 Perkembangan Persentase Audit Internal Kearsipan Kota Kediri Tahun 2019-2023	II-212
Grafik 2. 51 Nilai SAKIP Kota Kediri Tahun 2019-2023.....	II-221
Grafik 2. 52 Indeks Sistem Merit Tahun 2020-2023.....	II-230
Grafik 2. 53 Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan	II-231
Grafik 2. 54 Indeks Inovasi Daerah Kota Kediri Tahun 2021-2023.....	II-232
Grafik 2. 55 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri Tahun 2019-2022	II-238
Grafik 3. 1 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023	III-5
Grafik 3. 2 Proporsi Dana Perimbangan Tahun 2019-2020.....	III-5
Grafik 3. 3 Proporsi Pendapatan Transfer Tahun 2021-2023.....	III-8
Grafik 3. 4 Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 -2023	III-10
Grafik 3. 5 Proporsi Belanja Daerah Tahun 2019-2020	III-11
Grafik 3. 6 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023	III-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013. Sedangkan Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, Daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan menengah. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai RPD Tahun 2025-2026 diamanatkan untuk disusun sebagai dokumen transisi sebagai acuan penyusunan RKPD Tahun 2025.

Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4248 tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, dokumen RPD Tahun 2025-2026 juga akan digunakan oleh Pj. Wali Kota Kediri sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026. Untuk penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Tahun 2025-2026 memperhatikan:

1. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025;
2. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 hingga tahun 2023;
3. RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional, dan
6. Regulasi yang berlaku

RPD Tahun 2025-2026 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) paling lambat minggu ke empat Bulan Januari.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPD Kota Kediri Tahun 2025–2026, sebagai berikut:

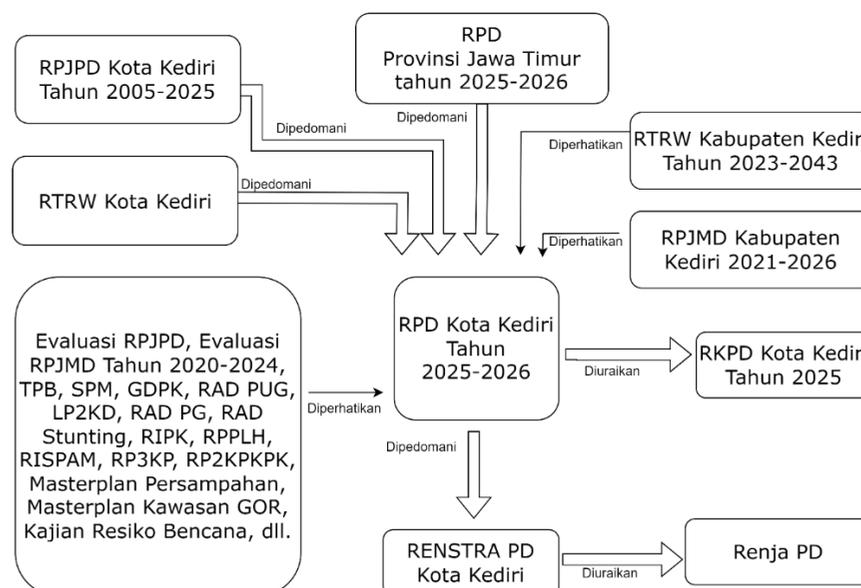
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPD Tahun 2025-2026 menjadi dokumen transisi untuk menjaga keberlanjutan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang terjeda dari perodesasi RPJMD Tahun 2020-2024 dengan periode RPJMD selanjutnya. Meskipun demikian, dokumen RPD tetap menjadi bagian sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi dan memastikan kolaborasi para pelaku pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang selaras dengan permasalahan dan isu strategis yang berkembang. Keterkaitan antara RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar berikut ini

Gambar 1. 1 Diagram Keterkaitan Antar Dokumen



Secara detail, hubungan antar dokumen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterkaitan RPD Kota Kediri dengan RPD Provinsi Jawa Timur

RPD Provinsi Jawa Timur menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 agar pembangunan berjalan selaras dengan arah Provinsi Jawa Timur. tujuan RPD Kota Kediri selaras dengan tujuan RPD Provinsi Jawa Timur sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Keselarasan Dengan Tujuan RPD Provinsi Jatim

RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026	RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026
Tujuan 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah.	Tujuan 4. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.
Tujuan 5. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis.	
Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.	Tujuan 3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
Tujuan 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan.	Tujuan 1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.
Tujuan 4. Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	Tujuan 2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran.
Tujuan 6. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Tujuan 5. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan.

b. Keterkaitan RPD Kota Kediri dengan RPJPD

RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kota Kediri Tahun 2005–2025. RPD Kota Kediri berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025. Adapun keterkaitan antara sasaran pokok dari RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 dengan RPD Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Keterkaitan Sasaran Pokok dari RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025
dengan RPD Tahun 2025-2026**

SASARAN POKOK RPJPD	TUJUAN RPD	
Terwujudnya pelayanan publik yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal serta berbasis teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang mantap.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah	
Terwujudnya peningkatan efektifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan		
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang baik (good govemance), dan (clean government) didukung oleh SDM aparatur yang berkualitas		
Terwujudnya Kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntable, transparan, efektif dan efisien		
Meningkatnya kecerdasan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan non formal dan luar sekolah	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas		
Terwujudnya peningkatan peran, kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak		
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan		
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat		
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan
Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang sehat dan mandiri		

SASARAN POKOK RPJPD	TUJUAN RPD
Optimalnya Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan	
Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kota Kediri	
Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing berbasis agrobisnis	
Terwujudnya penguatan Struktur Industri yang berdaya saing	
Terwujudnya pengembangan Sumber Daya Pariwisata yang unggul dan berdaya saing	
Meningkatnya daya saing komoditas perdagangan dan jasa di skala nasional maupun internasional	
Terwujudnya Ketahanan Pangan	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Terwujudnya peningkatan unit-unit perekonomian masyarakat dan Pembangunan Ketenagakerjaan	
Terwujudnya peningkatan kerukunan dan kemantapan kehidupan beragama di Kota Kediri	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis
Terwujudnya pembangunan sosialpolitik untuk menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis	
Terbinanya kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat dengan wawasan kebangsaan	
Terwujudnya peningkatan kerukunan dan kemantapan kehidupan beragama di Kota Kediri	

SASARAN POKOK RPJPD	TUJUAN RPD
Terlaksananya pencegahan dan penanganan bencana	
Terwujudnya sistem, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
Terwujudnya Pengembangan dan Perumahan yang berkualitas dan layak huni	
Terwujudnya Pengembangan Wilayah demi percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah	
Terwujudnya penataan ruang kota yang optimal	
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air	
Terwujudnya sistem sanitasi dan pengelolaan sampah kota yang terpadu	
Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	
Meningkatnya Pemanfaatan energi yang ramah lingkungan	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Lindung dan Ruang terbuka Hijau	

c. RPD Kota Kediri dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri dan RTRW Kabupaten Kediri

Penetapan RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 1 Tahun 2012. Saat ini RTRW Kota Kediri sedang dalam tahap perubahan dengan tahapan yang telah dilalui adalah pembahasan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPD memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pengembangan struktur ruang, pola ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis kota dalam substansi perubahan RTRW Kota Kediri. Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah meliputi:

- a. Kebijakan pengembangan kota sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
- b. Kebijakan pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan andalan Kediri – Tulungagung – Blitar
- c. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan; dan
- d. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana.

Kebijakan pola ruang mencakup pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan lindung mencakup:

- a. Pengendalian dan perlindungan Badan Air;
- b. Pengendalian dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Pengendalian dan perlindungan kawasan perlindungan setempat; dan
- d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dari luas kota untuk Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% dari luas kota untuk Ruang Terbuka Hijau privat.

Pengembangan kawasan budidaya mencakup:

- a. Pengembangan kawasan budi daya;
- b. Pengelolaan dan penataan sektor informal; dan
- c. Pengembangan tempat evakuasi bencana.

Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis kota berupa pengembangan kawasan strategis dari sudut ekonomi. Selanjutnya, untuk memastikan sinergi pembangunan dan keterpaduan dengan wilayah yang berdekatan, maka perlu memperhatikan RTRW Kabupaten Kediri yang berbatasan langsung dengan Kota Kediri.

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Pengembangan kawasan agropolitan;
- b. Pengembangan pariwisata dan industri, yang mendukung sektor pertanian;
- c. Pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat;
- d. Pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
- e. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;
- f. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
- g. Pengendalian fungsi kawasan lindung;
- h. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan
- i. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup.

d. RPD Kota Kediri dengan RPJMD Kabupaten Kediri

Secara geografis, wilayah Kota Kediri berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kediri. Pembangunan Kota Kediri tidak dapat dilepaskan dari rencana pembangunan di Kabupaten Kediri. Fungsi Kota Kediri sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, akan mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Kediri. Salah satunya melalui integrasi transportasi antar moda. Bandara Dhojo yang berlokasi di Kabupaten Kediri perlu untuk diintegrasikan dengan Stasiun yang berlokasi di Kota Kediri serta perlu untuk mengintegrasikan sarana transportasi publik lainnya untuk dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kota Kediri sebagai *The Service City* juga mendukung kegiatan-kegiatan perekonomian di Kabupaten Kediri. Pasar Grosir Ngronggo di Kota Kediri menjadi sarana distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari Kabupaten Kediri dan kabupaten lain. Kolaborasi dan kerja sama Pemerintah Kota dan Kabupaten Kediri akan menjadi akseleran dalam pencapaian tujuan pembangunan wilayah sehingga penting untuk memperhatikan keselarasan tujuan pembangunan antara Kota Kediri dengan Kabupaten Kediri. Kolaborasi yang penting untuk dilakukan terutama dalam hal transportasi dan pengelolaan persampahan. Adapun keterkaitan antara tujuan RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Keterkaitan Tujuan RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021-2026

Tujuan RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026	Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026
Tujuan 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah	Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
Tujuan 5. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	
Tujuan 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	Misi 6. Optimalisasi Kepariwisata berbasis Kearifan Lokal
	Misi 3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah

Tujuan RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026	Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026
	Misi 4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
	Misi 8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
Tujuan 4. Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Misi 9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan 6. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Misi 5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
	Misi 7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana

e. RPD Kota Kediri dengan dokumen-dokumen evaluasi dan kelitbangan

Penentuan permasalahan dan isu strategis untuk keperluan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah digunakan berbagai dokumen evaluasi, kelitbangan dan rencana induk yang telah disusun di Kota Kediri antara lain:

1. Evaluasi RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025
2. Evaluasi RPJMD Kota Kediri 2020-2024
3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
4. Capaian Standar Pelayanan Minimal
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2048
6. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
7. Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
8. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
9. Rencana Aksi Daerah Penanganan Stunting
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2022-2032
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2049
12. Kajian Indeks Kota Layak Huni
13. Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Tahun 2020-2040
14. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043
15. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
16. Masterplan Persampahan

17. Masterplan Pengembangan Kawasan Strategis GOR Jayabaya
18. Kajian Resiko Bencana Kota Kediri
19. Evaluasi dan Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
20. Kajian Indeks Minat Baca Kota Kediri
21. Kajian Penyusunan Indeks Infrastruktur dan Pelayanan Jalan
22. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tol Kediri-Tulungagung
23. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat
24. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus
25. Kajian Indikator Ekonomi Daerah
26. Kajian Ekonomi Kreatif
27. Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPD Kota Kediri Tahun 2025–2026 disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan yang berlaku, dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjaga hirarki perencanaan sesuai UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 yakni dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang baik secara skala periodisasi (jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD)), maupun secara substansinya.
2. Menjaga sinkronisasi pencapaian tujuan dan sasaran dokumen perencanaan pembangunan daerah yang masih berlaku yakni RPJPD Tahun 2005-2025
3. Menyelaraskan dengan RPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan RPJMD dan RTRW Kabupaten Kediri sebagai daerah terdekat dengan Kota Kediri;
4. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat;

Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPD Tahun 2025–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud Dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019-2023
 - 3.1.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2026
 - 3.2.1. Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.

- 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
- 4.2. Isu Strategis

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun selama periode 2025–2026.

5.1. Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025-2026

5.2. *Cascading* Kinerja

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi-strategi yang dipilih. Adapun struktur bab ini adalah:

6.1. Strategi

6.2. Arah Kebijakan

6.3. Program Prioritas

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penetapan indikator kinerja daerah setiap tahunnya sampai akhir periode masa jabatan, bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) dan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

BAB IX. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI

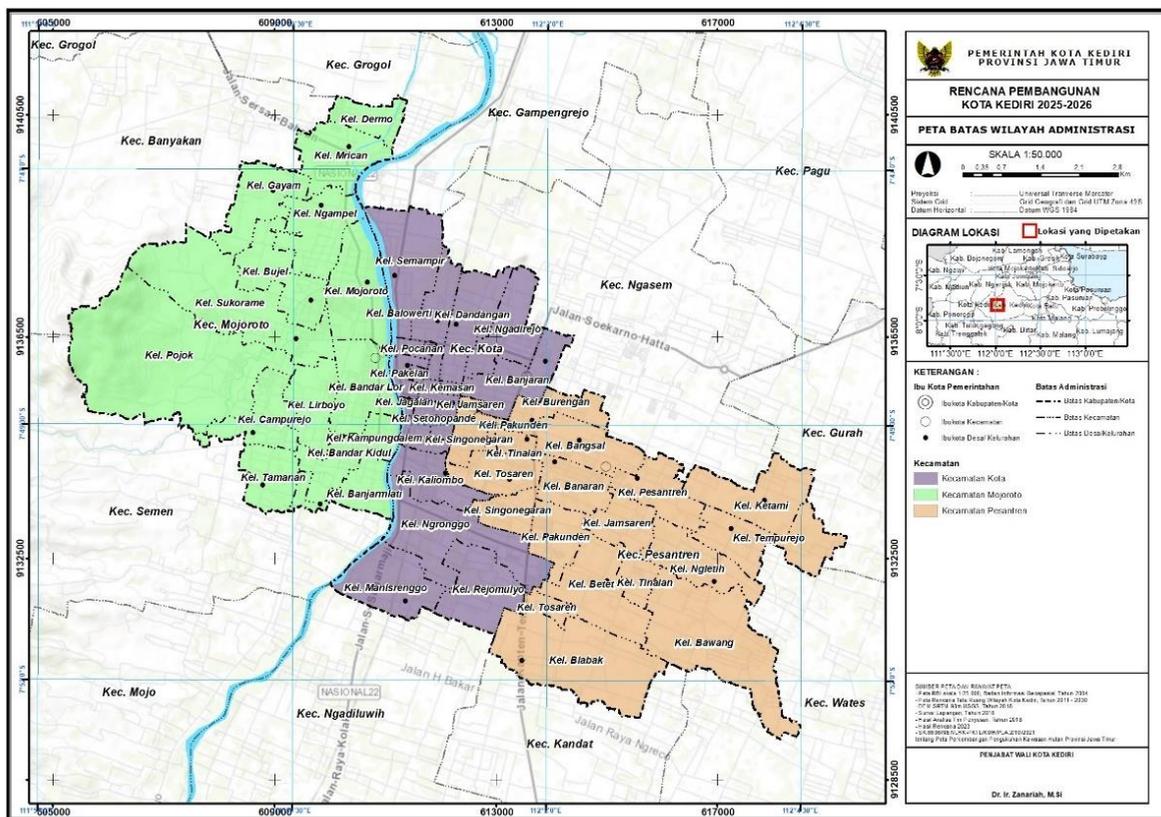
2.1.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

1) Kondisi Geografis

Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Kota Kediri dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kediri dan terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa. Kota Kediri berada di antara 111,050 – 112,030 Bujur Timur dan 7,450 – 7,550 Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo, Ngasem, dan Banyakan
2. Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih
4. Sebelah Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Kediri



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2022

Secara administrasi, Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, serta 46 kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 2.693,35 Ha terdiri dari 14 kelurahan, Kecamatan Kota dengan luas wilayah 1.595,01 Ha terdiri dari 17 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 2.431,59 Ha terdiri dari 15 kelurahan. Rincian nama kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kota	Manisrenggo	169,61	2,52
		Rejomulyo	167,46	2,49
		Ngronggo	254,9	3,79
		Kaliombo	103,28	1,54
		Kampungdalem	37,37	0,56
		Setonopande	40,95	0,61
		Ringinanom	7,74	0,12
		Pakelan	36,35	0,54
		Setonogedong	7,86	0,12
		Kemasan	15,71	0,23
		Jagalan	12,79	0,19
		Banjaran	138,72	2,06
		Ngadirejo	139,29	2,07
		Dandangan	136,65	2,03
		Balowerti	96,03	1,43
		Pocanan	23,83	0,35
		Semampir	206,48	3,07
2	Pesantren	Blabak	355,49	5,29
		Bawang	378,45	5,63
		Betet	199,49	2,97
		Tosaren	130,72	1,95
		Banaran	104,81	1,56
		Ngletih	145,59	2,17
		Tempurejo	178,64	2,66
		Ketami	181,5	2,7
		Pesantren	119,91	1,78

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
		Bangsals	138,2	2,06
		Burengan	86,37	1,29
		Tinalan	77,7	1,16
		Pakunden	104,57	1,56
		Singonegaran	119,97	1,79
		Jamsaren	110,12	1,64
3	Mojoroto	Pojok	689,24	10,26
		Campurejo	128,14	1,91
		Tamanan	105,35	1,57
		Banjarmlati	104,25	1,55
		Bandar Kidul	135,73	2,02
		Lirboyo	118,66	1,77
		Bandar Lor	159,04	2,37
		Mojoroto	199,68	2,97
		Sukorame	363,45	5,41
		Bujel	159,67	2,38
		Ngampel	164,57	2,45
		Gayam	143,48	2,14
		Mrican	150,23	2,24
		Dermo	71,85	1,07
Kota Kediri			6.719,95	100

Sumber : RDTRK Kota Kediri Tahun 2021-2041

Luas wilayah Kota Kediri mencapai 6.719,95 Ha. Kecamatan Mojoroto merupakan kecamatan terbesar di Kota Kediri dengan luas wilayah mencapai 2.693,35 Ha atau sekitar 40,1% dari luas keseluruhan Kota Kediri. Kecamatan terbesar kedua adalah Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah mencapai 2.431,59 Ha atau sekitar 36,2% dari luas keseluruhan Kota Kediri. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kota dengan luas mencapai 1.595,01 Ha atau sekitar 23,7% dari luas keseluruhan Kota Kediri.

Kota Kediri memiliki 327 Rukun Warga (RW) dan 1.477 Rukun Tetangga (RT) dengan masing-masing rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan dan Jumlah RT/RW di Kota Kediri

No	Kecamatan	Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Kecamatan Mojaroto	14	100	492
2	Kecamatan Kota	17	101	488
3	Kecamatan Pesantren	15	126	497
Kota Kediri		46	327	1.477

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2023 (data diolah)

2) Topografi

Di Kota Kediri terdapat 2 gunung, yaitu gunung Klotok dan Maskumambang. Kedua gunung ini memiliki karakteristik wilayah sebagai berikut:

- Wilayah Tanah Usaha Utama I c (WTUU Ic), dengan ketinggian 63-100 meter di atas permukaan laut seluas 5.083 Ha (80,17%).
- Wilayah Tanah Usaha Utama I d (WTUU Id), dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut seluas 1.257 Ha (18,83%).

Secara keseluruhan, kondisi topografi Kota Kediri relatif datar dengan kemiringan lereng antara 0-40%. Sebagian besar wilayah Kota Kediri atau sekitar 90,49% dari wilayahnya merupakan dataran rendah dengan kemiringan lereng antara 0-2%, wilayah ini terletak di sepanjang sisi kiri dan kanan Sungai Brantas. Kemiringan lereng antara 15-40% berada di kawasan Gunung Maskumambang (ketinggian 300 mdpl) dan Gunung Klotok (ketinggian 672 mdpl) di bagian barat Kecamatan Mojaroto. Kondisi topografi Kecamatan Kota mayoritas berada pada kemiringan lereng antara 0-2%. Sedangkan Kecamatan Pesantren kondisi topografinya relatif datar dengan kemiringan lereng antara 0-15% dengan ketinggian lebih kurang 67 mdpl. Kondisi kemiringan dan ketinggian wilayah Kota Kediri berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Kondisi Topografi Kota Kediri

Nama Kecamatan	Kemiringan Lereng	Ketinggian Lahan
Mojaroto	Antara 15-40%	Kawasan Gunung Maskumambang 300 mdpl dan Gunung Klotok 672 mdpl
Kota	0-2%	60-80 mdpl
Pesantren	Antara 0 s/d 15%	70-130 mdpl

Sumber : RTRW Kota Kediri 2011-2030

Sedangkan kondisi kemiringan lereng Kota Kediri berdasarkan Kelurahan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Kondisi Topografi Tiap Kelurahan di Kota Kediri

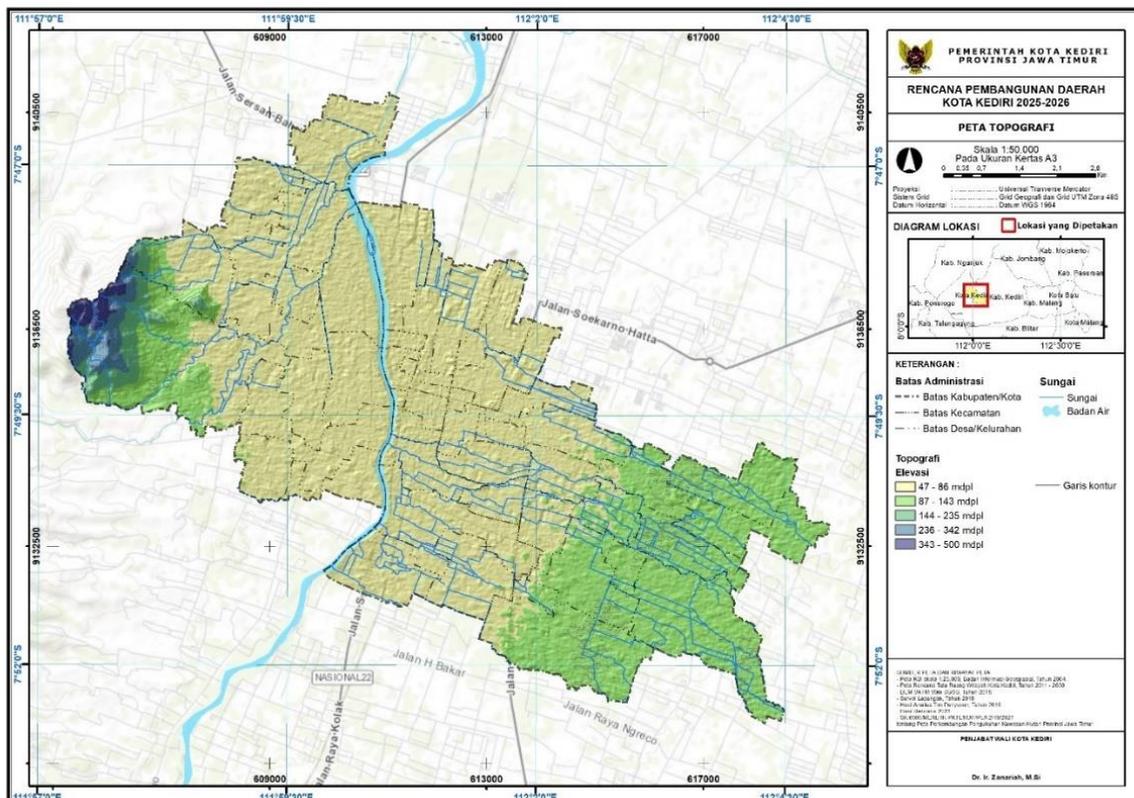
WILAYAH		KEMIRINGAN LERENG			
KELURAHAN	KECAMATAN	0-2%	2-15%	15-40%	>40%
Semampir	Kota	21,37	152,38	26,80	5,93
Balowerti	Kota	10,84	76,83	8,36	0,00
Ngadirejo	Kota	11,88	112,39	15,01	0,01
Dandangan	Kota	9,41	106,01	21,11	0,12
Banjaran	Kota	13,43	112,84	12,33	0,12
Pocanan	Kota	1,76	18,15	3,06	0,86
Pakelan	Kota	2,33	26,96	5,09	1,97
Setonogedong	Kota	0,70	6,93	0,23	0,00
Kemasan	Kota	1,49	13,06	1,17	0,00
Jagalan	Kota	0,90	11,30	0,59	0,00
Setonopande	Kota	3,95	35,80	1,19	0,00
Ringinanom	Kota	0,50	4,37	1,91	0,96
Kampungdalem	Kota	3,24	28,49	4,38	1,27
Kaliombo	Kota	10,80	86,26	4,78	1,45
Ngronggo	Kota	25,27	209,94	18,19	1,49
Manisrenggo	Kota	15,78	139,68	11,87	2,28
Rejomulyo	Kota	18,06	140,62	8,77	0,00
Dermo	Mojooroto	7,39	60,43	4,03	0,00
Mrican	Mojooroto	15,10	123,49	11,15	0,49
Gayam	Mojooroto	11,96	122,53	8,98	0,01
Ngampel	Mojooroto	17,04	138,65	8,83	0,05
Bujel	Mojooroto	17,21	138,63	3,84	0,00
Mojooroto	Mojooroto	26,98	155,62	16,52	0,56
Sukorame	Mojooroto	28,85	259,56	53,58	21,46
Pojok	Mojooroto	24,76	341,05	208,64	114,79
Bandar Lor	Mojooroto	17,44	129,68	11,67	0,25
Lirboyo	Mojooroto	9,76	100,91	7,99	0,00
Campurejo	Mojooroto	11,34	109,71	7,09	0,00

WILAYAH		KEMIRINGAN LERENG			
KELURAHAN	KECAMATAN	0-2%	2-15%	15-40%	>40%
Bandar Kidul	Mojoaroto	13,01	111,42	10,79	0,52
Tamanan	Mojoaroto	8,07	88,41	8,79	0,08
Banjarmlati	Mojoaroto	8,24	85,79	10,01	0,22
Burengan	Pesantren	12,30	72,13	1,94	0,00
Jamsaren	Pesantren	8,98	95,56	5,58	0,00
Singonegaran	Pesantren	12,03	103,79	4,16	0,00
Bangsals	Pesantren	13,75	117,44	7,02	0,00
Pakunden	Pesantren	8,73	85,82	10,01	0,01
Tinalan	Pesantren	7,78	65,89	4,08	0,00
Tosaren	Pesantren	12,66	107,39	10,51	0,16
Banaran	Pesantren	9,99	89,75	5,07	0,00
Ketami	Pesantren	11,35	154,60	15,55	0,00
Pesantren	Pesantren	10,16	98,45	11,29	0,00
Tempurejo	Pesantren	12,42	154,83	15,52	0,00
Ngletih	Pesantren	14,67	121,51	5,28	0,00
Betet	Pesantren	19,23	171,25	9,01	0,00
Bawang	Pesantren	35,95	324,48	18,02	0,00
Blabak	Pesantren	30,91	300,97	23,54	0,07
Total		589,76	5311,75	663,31	155,12

Sumber: Bappeda Kota Kediri 2024

Gambaran peta topografi Kota Kediri dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Kediri



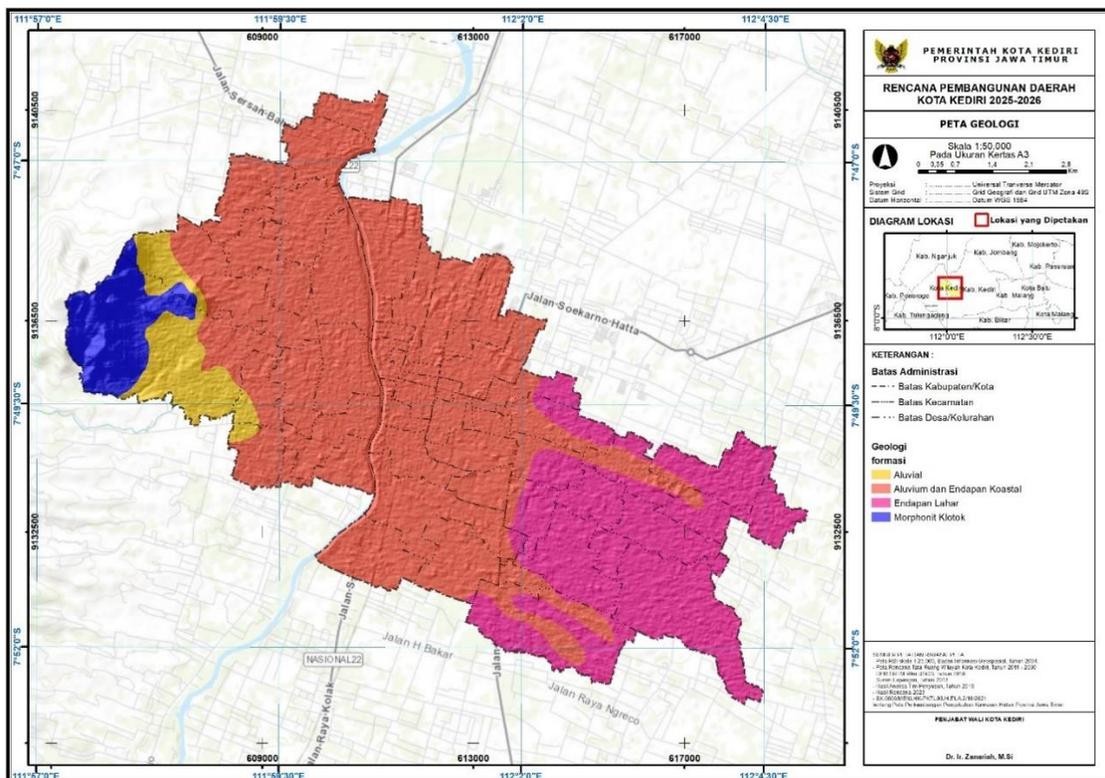
Sumber: Demnas BIG, 2022

3) Geologi

Secara geologi wilayah Kota Kediri terdiri atas berbagai macam jenis batuan dan tanah. Berdasarkan peta geologi lembar Kediri yang disusun oleh Departemen Pertambangan dan Energi, dinyatakan bahwa tataan stratigrafi Kota Kediri tersusun dari batuan sedimen, batuan gunung api dan aluvium yang diperkirakan berumur Pleistosen awal hingga recent.

Pada sebagian wilayah Kecamatan Mojoroto, yaitu Kelurahan Dermo, Mrican, Gayam, Bujel, Sukorame, Pojok, Ngampel, Mojoroto, Bandar Lor, Bandar Kidul, Banjarnlati dan Tamanan memiliki endapan aluvium yang terdiri atas elemen kerakal, kerikil, pasir lempung, lumpur, dan sisa tumbuhan. Bahannya berwarna kelabu-kuning keruh-kehitaman, mudah lepas atau gembur. Pada wilayah Kecamatan Kota, jenis batuan yang ada adalah tufa vulkan intermedier dengan kedalaman lebih dari 25 cm dan bertekstur tanah halus. Sementara itu, wilayah Kecamatan Pesantren, berdasarkan jenis batuan termasuk dalam jenis batuan endapan lahar yang sebagian besar berasal dari Gunungapi Kelud dan sebagian kecil dari Gunung Anjasmara serta Gunung Kawi-Butak. Endapan lahar ini terhampar pada kaki gunungapi, lereng gunung dan lembah sungai dan diduga berupa lahar panas, lahar dingin, dan lahar longsoran. Jenis batuan ini memiliki ketebalan puluhan sampai ratusan meter. Memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 25 cm dan bertekstur halus. Kondisi peta geologi Kota Kediri dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Kediri



Sumber: Peta Geologi Indonesia Lembar Kediri, Kementerian ESDM

Berdasarkan jenis tanah, wilayah Kota Kediri didominasi oleh tanah alluvial coklat kelabu dan mediteran. Sesuai dengan karakteristik jenis tanah tersebut, yaitu tanah aluvial, memiliki sifat fisik diantaranya memiliki daya adsorpsi tinggi, permeabilitas rendah dan kepekaan erosinya besar. Disamping itu, tanah aluvial banyak dijumpai di kawasan datar (kemiringan rendah), jadi erodibilitasnya yang tinggi tidak berpengaruh pada kemungkinan terjadinya erosi. Namun karena memiliki permeabilitas rendah, maka pembangunan di atas tanah alluvial memerlukan perencanaan sistem drainase yang cermat agar tidak terjadi genangan yang dapat merugikan. Jenis tanah mediteran juga dijumpai di wilayah ini, dengan daya adsorpsi yang sedang, permeabilitas tinggi dan kepekaan erosinya besar. Tanah mediteran sesuai untuk kawasan terbangun, namun harus dicermati erodibilitasnya yang besar. Jika berada di wilayah yang memiliki sumber air cukup, tanah mediteran sesuai untuk pertanian padi, palawija, tebu, tembakau dan kapas. Jenis tanah di wilayah Kota Kediri dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kota Kediri

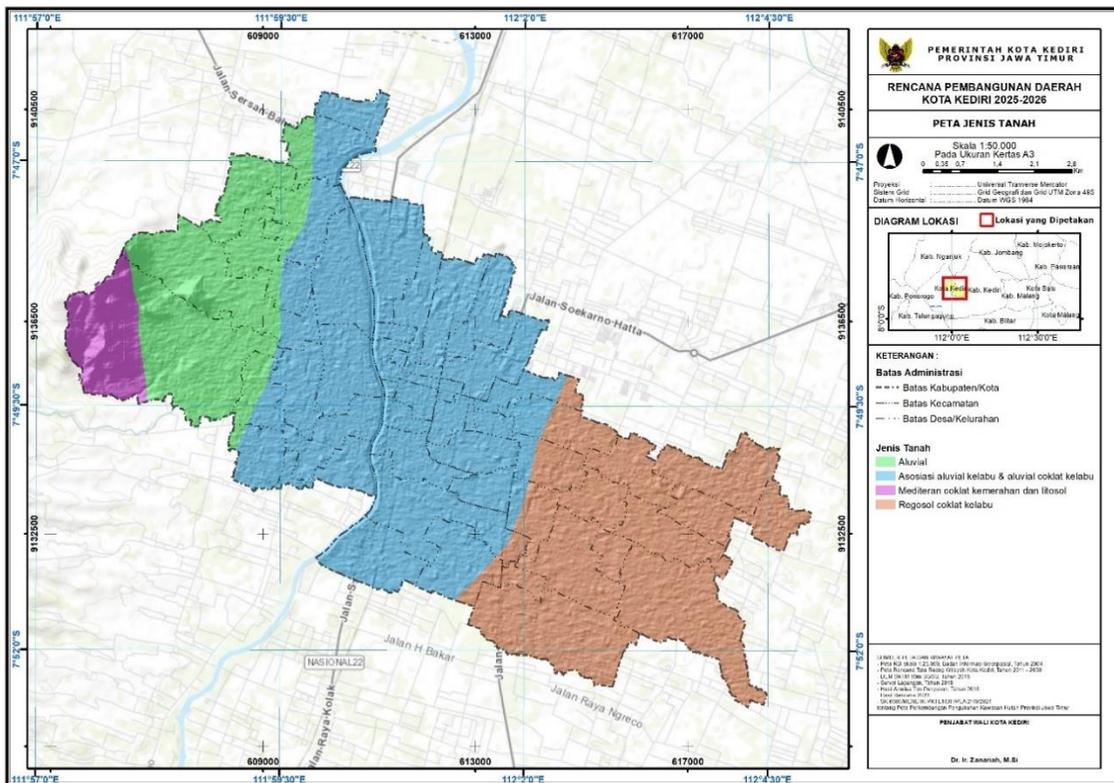
KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS PER JENIS TANAH			
		Aluvial	Asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabu	Mediterranean coklat kemerahan dan litosol	Regosol coklat kelabu
Pojok	Mojoroto	401,19	3,06	284,99	0,00
Sukorame	Mojoroto	309,93	51,96	1,56	0,00
Bujel	Mojoroto	109,09	50,58	0,00	0,00
Campurejo	Mojoroto	82,08	46,06	0,00	0,00
Dermo	Mojoroto	0,04	71,81	0,00	0,00
Gayam	Mojoroto	143,48	0,00	0,00	0,00
Mrican	Mojoroto	55,00	95,24	0,00	0,00
Ngampel	Mojoroto	72,07	92,50	0,00	0,00
Tamanan	Mojoroto	9,71	95,64	0,00	0,00
Banaran	Pesantren	0,00	28,69	0,00	76,12
Bangsals	Pesantren	0,00	52,40	0,00	85,80
Bawang	Pesantren	0,00	0,00	0,00	378,45
Betet	Pesantren	0,00	0,00	0,00	199,49
Blabak	Pesantren	0,00	0,00	0,00	355,49
Burengan	Pesantren	0,00	66,46	0,00	19,91
Jamsaren	Pesantren	0,00	16,12	0,00	93,99
Ketami	Pesantren	0,00	0,00	0,00	181,50
Ngletih	Pesantren	0,00	0,00	0,00	141,46
Ngronggo	Kota	0,00	232,88	0,00	22,01
Pakunden	Pesantren	0,00	31,78	0,00	72,78
Pesantren	Pesantren	0,00	0,00	0,00	119,91
Rejomulyo	Kota	0,00	137,94	0,00	29,52
Tempurejo	Pesantren	0,00	0,00	0,00	182,77
Tinalan	Pesantren	0,00	30,76	0,00	46,99
Tosaren	Pesantren	0,00	100,05	0,00	30,67
Balowerti	Kota	0,00	96,03	0,00	0,00

KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS PER JENIS TANAH			
		Aluvial	Asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabu	Mediteran coklat kemerahan dan litosol	Regosol coklat kelabu
Bandar Kidul	Mojoroto	0,00	135,73	0,00	0,00
Bandar Lor	Mojoroto	0,00	159,04	0,00	0,00
Banjaran	Kota	0,00	138,72	0,00	0,00
Banjarmlati	Mojoroto	0,00	104,25	0,00	0,00
Dandangan	Kota	0,00	136,65	0,00	0,00
Jagalan	Kota	0,00	12,79	0,00	0,00
Kaliombo	Kota	0,00	103,28	0,00	0,00
Kampungdalem	Kota	0,00	37,37	0,00	0,00
Kemasan	Kota	0,00	15,71	0,00	0,00
Lirboyo	Mojoroto	0,00	118,66	0,00	0,00
Manisrenggo	Kota	0,00	169,61	0,00	0,00
Mojoroto	Mojoroto	0,00	199,68	0,00	0,00
Ngadirejo	Kota	0,00	139,29	0,00	0,00
Pakelan	Kota	0,00	36,35	0,00	0,00
Pocanan	Kota	0,00	23,83	0,00	0,00
Ringinanom	Kota	0,00	7,74	0,00	0,00
Semampir	Kota	0,00	206,48	0,00	0,00
Setonogedong	Kota	0,00	7,86	0,00	0,00
Setonopande	Kota	0,00	40,95	0,00	0,00
Singonegaran	Pesantren	0,00	119,97	0,00	0,00
Total		1182,60	3213,92	286,55	2036,88

Sumber: Bappeda Kota Kediri Tahun 2024

Wilayah Kota Kediri didominasi oleh jenis tanah Asosiasi Aluvial Kelabu & Aluvial Coklat Kekelabuan dengan luas mencapai 3.041,18 Ha, jenis tanah ini banyak ditemui di Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan sebagian wilayah Kecamatan Pesantren. Jenis tanah dengan luas terbesar kedua di Kota Kediri yaitu regosol coklat kekelabuan yaitu sebesar 2.090,6 Ha, yang mana banyak ditemui di Kecamatan Pesantren. Peta sebaran jenis tanah di Kota Kediri dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kota Kediri



Sumber: RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030

4) Hidrologi

a. Sungai

Keberadaan Sungai Brantas di tengah-tengah Kota Kediri yang mengalir dari arah selatan ke arah utara, seolah-olah membelah Kota Kediri menjadi wilayah barat (Kecamatan Mojoroto) dan wilayah timur (Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren). Kota Kediri juga dilalui beberapa sungai yang mengalir menuju Sungai Brantas sebagai saluran primer. Sungai tersebut antara lain : Sungai Brantas sepanjang 7,11 km, Sungai Ngampel sepanjang 1,38 km, Sungai Kedak sepanjang 5,84 km, Sungai Kresek sepanjang 5,87 km, Sungai Parang sepanjang 3 km, Sungai Tawang sepanjang 7,48 km dan Sungai Bruno sepanjang 1,93 Km. Daftar Sungai utama di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

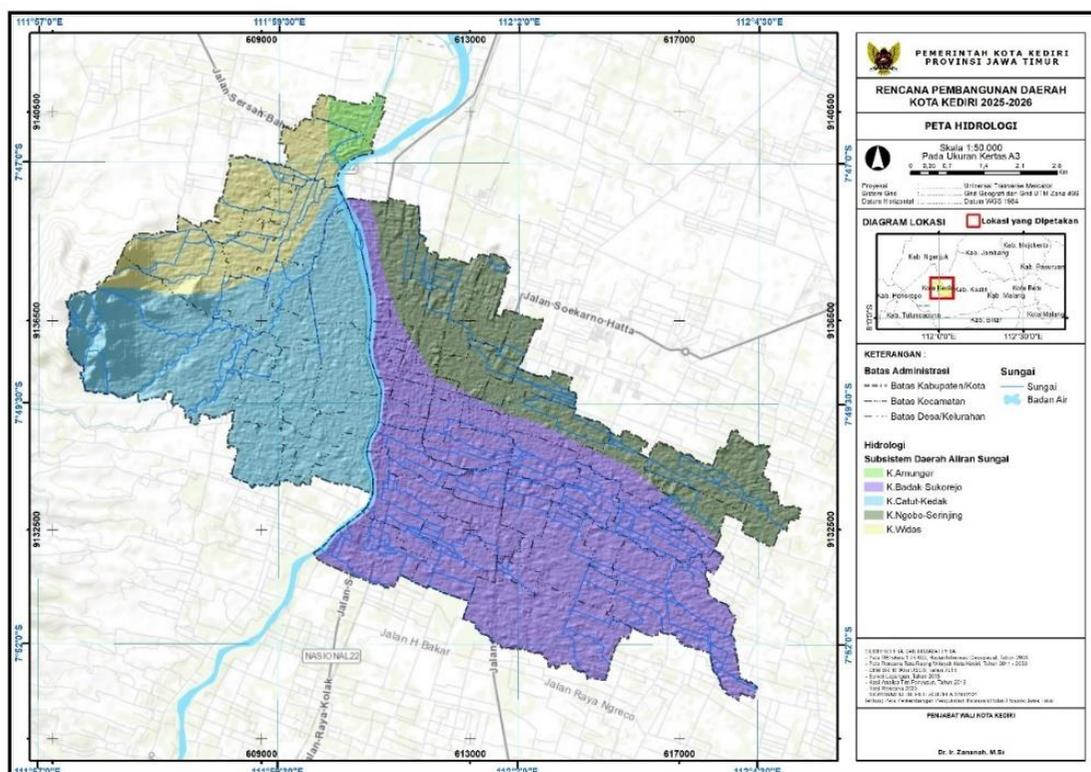
Tabel 2. 6 Daftar Sungai Utama di Kota Kediri

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Debit (m ³ /dtk)	
			Maks	Min
1	Kresek	5,87	20	2
2	Parang	3	124	12
3	Kedak	5,84	223	5
4	Brantas	7,11	314	14
5	Ngampel	1,38	45	10
6	Tawang	7,46	800	200
7	Bruno	1,93	130	17

Sumber: UPT PSDAWS Puncu Seladono Kota Kediri, 2019

Sedangkan berdasarkan peta hidrologi Kota Kediri dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 5 Peta Hidrologi Kota Kediri



Sumber : RTRW Kota Kediri 2011-2030

b. Sumber Mata Air

Kota Kediri juga memiliki banyak sumber mata air bersih yang potensial. Di Kecamatan Mojoroto terdapat 7 sumber mata air, dan yang memiliki debit paling besar adalah Sumber Sendang (0-60 liter/detik). Potensi tersebut sangat mendukung kegiatan pertanian di Kota Kediri terutama sebagai sumber air pada jaringan irigasi. Di Kecamatan Pesantren memiliki 14 sumber mata air, dan yang memiliki debit paling besar adalah

sumber mata air Banteng (10-112 liter/detik). Sedangkan di Kecamatan Pesantren memiliki sumur dengan kedalaman air berkisar antara 6-9 meter, yang paling dangkal (6 meter) berada pada Kelurahan Bawang, Tempurejo dan Ketami. Berikut ini jenis sumber mata air dan besaran debit air yang ada di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Jenis Sumber Mata Air Kota Kediri Tahun 2022

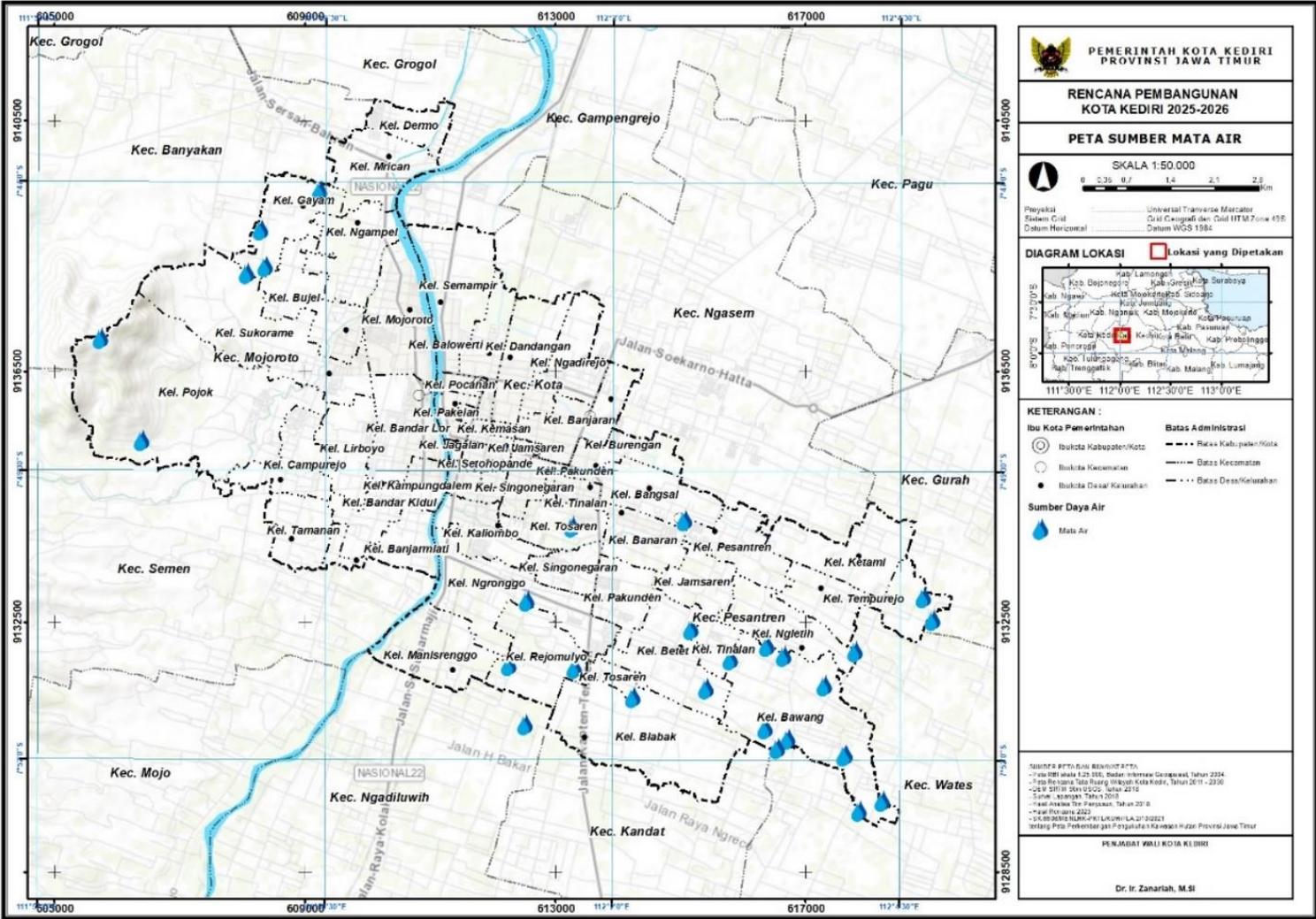
NO.	SUMBER / MATA AIR	LOKASI	KETERANGAN
1	SUMBER JIPUT	KEL. REJOMULYO	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Sudah Ada Bangunan Pengaman di Lingkungan Sumber - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Jiput
2	SUMBER NGASINAN	KEL. REJOMULYO	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Sudah Ada Bangunan di Aliran Bawah Sumber - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Ngasinan
3	SUMBER NGRONGGO	KEL. NGRONGGO	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Belum Ada Bangunan Pengaman - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Ngronggo
4	SUMBER CAKARWESI	KEL. BLABAK	- Kondisi Baik - Air Mengalir Kurang Normal (Mata Air Kecil) - Belum Ada Bangunan Pengaman - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Cakarwesi
5	SUMBER REMPI	KEL. BETET	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Belum Ada Bangunan Pengaman - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Rempi
6	SUMBER JASEM	KEL. BETET	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal di Musim Hujan - Belum Ada Bangunan Pengaman - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Jasem
7	SUMBER DENDENG	KEL. NGLETIH	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Belum Ada Bangunan Pengaman - Mengairi Daerah Irigasi Sbr. Dendeng
8	SUMBER BANTENG	KEL. TEMPUREJO	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Sudah Ada Bangunan Pengaman - Mengairi Daerah Irigasi Sbr. Banteng
9	SUMBER KWANGKALAN	KEL. TEMPUREJO	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Sudah Ada Bangunan Pengaman - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Kwangkalan

NO.	SUMBER / MATA AIR	LOKASI	KETERANGAN
10	SUMBER BENTIS	KEL. TOSAREN	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Sudah Ada Bangunan Pengaman
11	SUMBER GANDE	KEL. BAWANG	- Kondisi Kurang Baik - Air Tidak Normal - Belum Ada Bangunan Pengaman - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Gande
12	SUMBER SOYO	KEL. BAWANG	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Sebagian Sudah Ada Bangunan Pengaman - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Soyo
13	SUMBER TLASAH	KEL. BAWANG	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Belum Ada Bangunan Pengaman
14	SUMBER TENGIS	KEL. BAWANG	- Kondisi Alami - Debit Air Kecil - Belum Ada Bangunan Pengaman
15	SUMBER MANGUN	KEL. BAWANG	- Kondisi Hilang (Mati) - Tidak Ada Air Mengalir dikarenakan Pohon Besar yang Menahan Air Tumbang
16	SUMBER IPRIK - IPRIK	KEL. BAWANG	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal (Kecil) - Belum Ada Bangunan Pengaman
17	SUMBER GREJENG	KEL. BAWANG	- Kondisi Hilang (Mati)
18	SUMBER MOJO	KEL. BAWANG	- Kondisi Baik - Aliran Air Normal (Kecil) - Sudah Ada Bangunan di Saluran Bawah Sumber
19	SUMBER JEDOG	KEL. BAWANG	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Belum Ada Bangunan Pengaman
20	SUMBER BULUS	KEL. TOSAREN	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Sudah Ada Bangunan Pengaman
21	SUMBER NGEMBAK	KEL. GAYAM	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal - Mengairi Daerah Irigasi Sb. Ngembak
22	SUMBER TRETES	KEL. POJOK	- Kondisi Kering - Air Mengalir Ketika Musim Hujan - Sudah Ada Bangunan Pengaman di Bawah Sumber
23	SUMBER WEDANG	KEL. GAYAM	- Kondisi Mati - Tidak Ada Air Mengalir

NO.	SUMBER / MATA AIR	LOKASI	KETERANGAN
24	SUMBER BEGENDANG	KEL. GAYAM	- Kondisi Air Menggenang - Jaringan / Saluran Tidak Ada / Menghilang
25	SUMBER SIRAH / SENDANG KEMBAR	KEL. GAYAM	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal Ketika Musim Hujan - Sudah Ada Bangunan Pengaman
26	SENDANG GAYAM	KEL. GAYAM	- Kondisi Baik - Air Mengalir Normal Ketika Musim Hujan - Sudah Ada Bangunan Pengaman

Sumber : Bappeda Kota Kediri (2023)

Gambar 2. 6 Peta Persebaran Sumber Mata Air di Kota Kediri

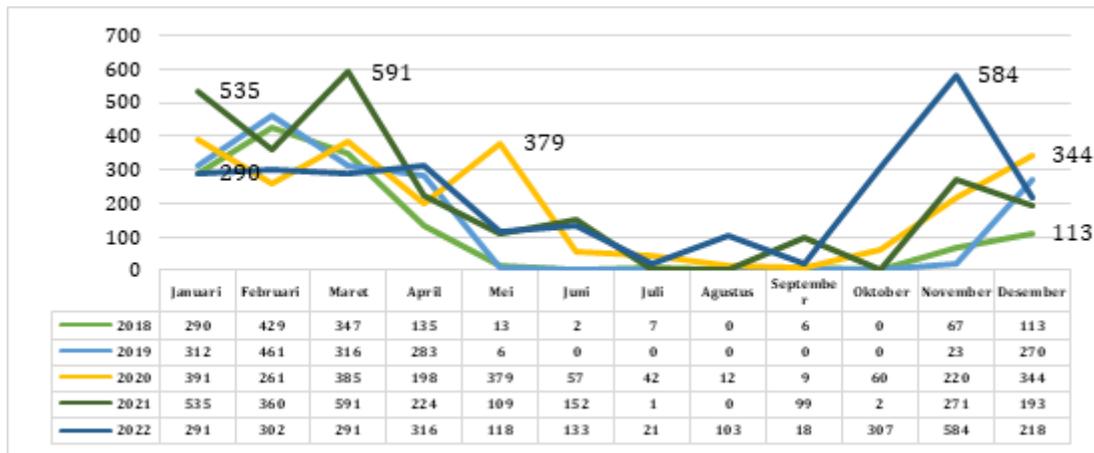


Sumber: DPUPR Bidang SDA Tahun 2023

5) Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Kediri dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Letak astronomis dan ketinggian wilayah yang ada di Kota Kediri akan berpengaruh terhadap keadaan iklim. Hanya terdapat 2 musim di Kota Kediri, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan di Kota Kediri sepanjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

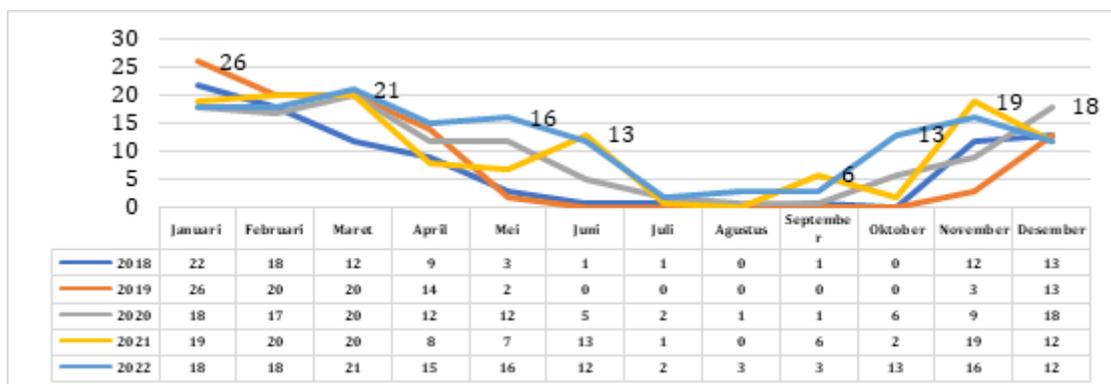
Grafik 2.1 Curah Hujan di Kota Kediri (mm³) Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Kediri, 2023

Rata-rata curah hujan di Kota Kediri pada periode tahun 2018-2022 adalah 2.135 mm³, dengan jumlah curah hujan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.409 mm³ dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2.702 mm³. Secara umum, curah hujan pada tahun 2022 dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli dan September, sedangkan curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Oktober hingga April tahun berikutnya. Lain halnya pada tahun 2018, curah hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Mei hingga Oktober, sedangkan curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Januari hingga Maret. Jumlah curah hujan akan memberikan *impact* terhadap ketersediaan air tanah dan air permukaan (sungai).

Grafik 2. 2 Jumlah Hari Hujan di Kota Kediri Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Kediri, 2023

Bulan Januari hingga Mei dalam 5 tahun terakhir hujan cukup sering terjadi, kemudian bulan Juni hingga Oktober cenderung jarang hujan. Pada bulan November dan Desember mulai sering hujan kembali. Jumlah total hari hujan dalam setahun yang paling tinggi

terjadi pada tahun 2022 yaitu 149 hari dalam setahun, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 92 hari dalam setahun.

6) Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung dan daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung menjadi salah satu dasar dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup. Untuk mendukung pembangunan daerah perlu memperhatikan hasil kajian daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem, sebagai berikut:

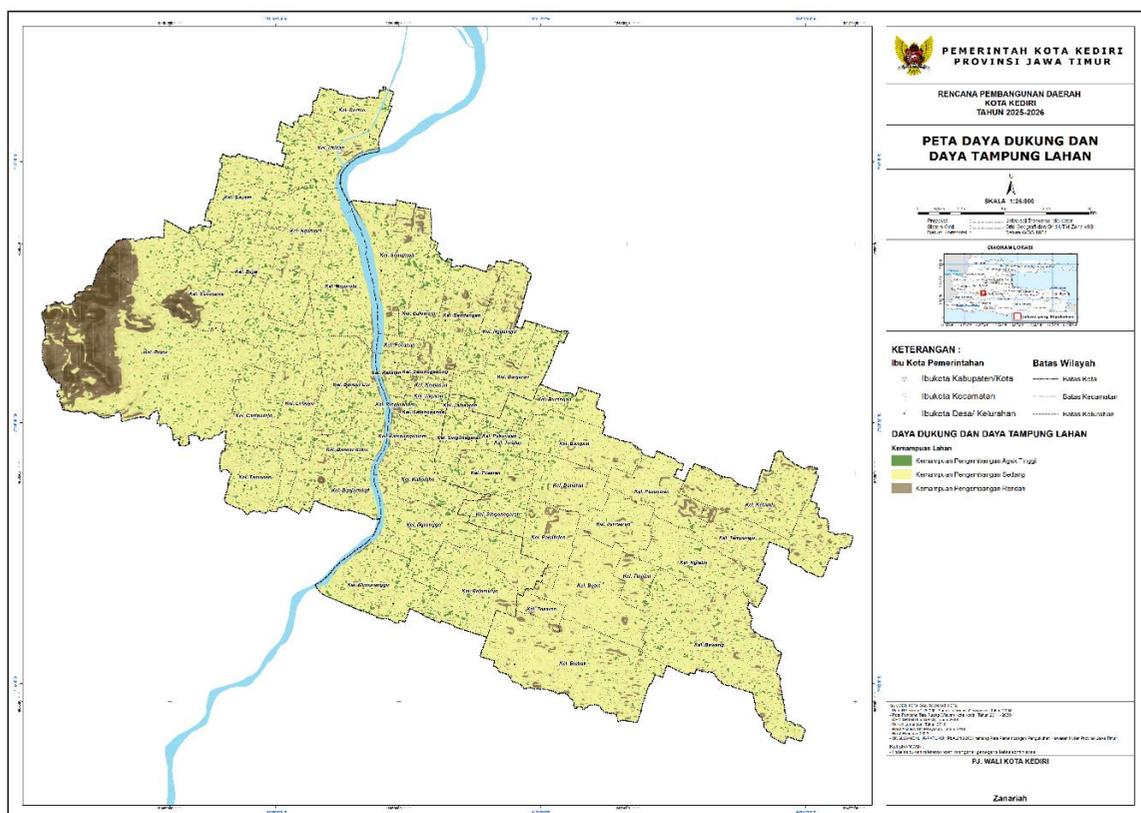
- a. Jasa Ekosistem dipengaruhi oleh dua komponen penting yakni ekoregion dan tutupan lahan. Ekoregion yang mendominasi di Kota Kediri adalah Dataran Fluvio Gunung api sebesar 6,028,39 Ha. Penutup/ penggunaan lahan di Kabupaten Kediri yang mendominasi adalah pertanian yang luasnya mencapai 2.441,16 ha dari total luas wilayah Kota Kediri.
- b. Jasa ekosistem penting dapat digunakan untuk mengetahui potensi daya dukung dan daya tampung pada suatu wilayah. Kecamatan yang memiliki wilayah kategori I atau prioritas pertama paling besar adalah Kecamatan Mojoroto yang memiliki luasan wilayah prioritas I sebesar 596,26 hektar. Dengan demikian untuk wilayah yang mendapatkan prioritas dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan adalah Kecamatan Mojoroto.
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem penyedia (penyedia pangan, penyedia air bersih, penyedia serat fiber, penyedia bahan bakar, dan penyedia sumber daya genetik) memiliki nilai jasa ekosistem yang bervariasi. Jasa ekosistem penyedia pangan dominan pada kelas sangat tinggi, jasa ekosistem penyedia air bersih dominan pada kelas sangat tinggi, jasa ekosistem penyedia serat fiber dominan pada kelas sedang, dan jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik dominan pada kelas sedang.
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem pengaturan memiliki dominan nilai sebagai berikut: pengaturan iklim memiliki nilai jasa ekosistem pada dominan kelas tinggi, pengaturan tata aliran air dan banjir pada kelas sedang, pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana pada kelas tinggi, pengaturan pemurnian air pada kelas tinggi, pengaturan pengolahan dan pengurai limbah pada kelas sangat tinggi, pengaturan

pemeliharaan kualitas udara pada kelas sedang, pengaturan penyerbukan alami pada kelas sangat tinggi, dan pengaturan pengendalian hama penyakit pada kelas sangat tinggi.

- e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem budaya memiliki dominan nilai sebagai berikut: jasa ekosistem budaya untuk permukiman dominan pada kelas sedang, untuk ekowisata pada kelas sangat rendah, untuk estetika alam pada kelas sedang, pembentukan tanah dan pemeliharaan kesuburan pada kelas sedang, pendukung siklus hara pada kelas sangat tinggi, produksi primer pada kelas tinggi, dan pendukung keanekaragaman hayati pada kelas tinggi.

Peta daya dukung Kota Kediri untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.7 Peta Daya Dukung Kota Kediri



Sumber : : FA RDTR Kota Kediri, 2023

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kota Kediri didominasi oleh lahan terbangun. Kota Kediri terbagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Perkembangan untuk lahan terbangun belum tersebar secara merata. Dominasi penggunaan lahan kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kota dengan sebaran perkantoran, perdagangan jasa, industri, pemukiman kepadatan tinggi, dan

wisata kota. Penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojojoto didominasi oleh pendidikan, *home industry*, industri, pariwisata dan pertanian serta pemukiman kepadatan sedang dan rendah. Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya adalah perkantoran, industri, *home industry*, permukiman kepadatan sedang dan rendah serta pertanian. Tutupan lahan Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

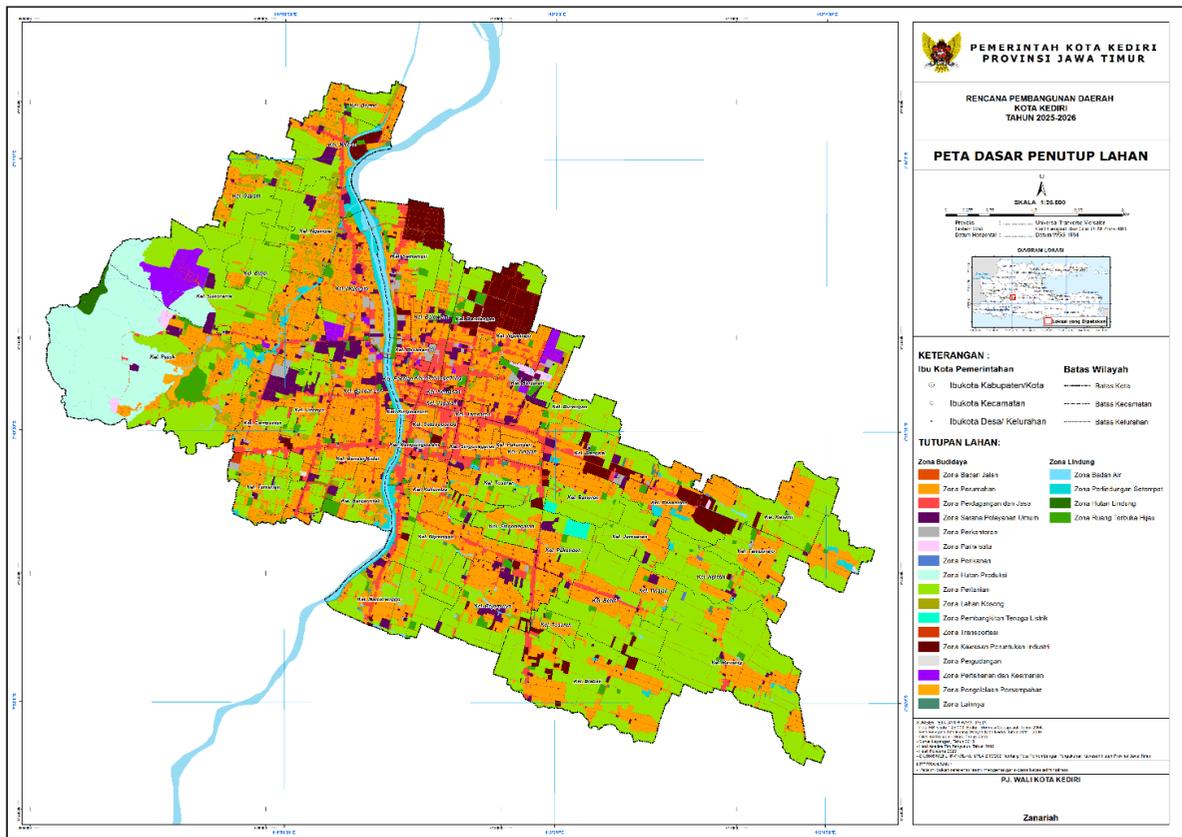
Tabel 2.8 Tutupan Lahan di Kota Kediri

ZONA	Ha
Zona Badan Air	129,42
Zona Badan Jalan	214,39
Zona Ruang Terbuka Hijau	150,96
Zona Kawasan Peruntukan Industri	261,45
Zona Lahan Kosong	146,40
Zona Perdagangan dan Jasa	360,61
Zona Perkantoran	60,12
Zona Sarana Pelayanan Umum	243,57
Zona Pertanian	2503,96
Zona Transportasi	7,57
Zona Perumahan	1950,78
Zona Pengelolaan Persampahan	11,09
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	13,97
Zona Pergudangan	1,35
Zona Perlindungan Setempat	90,93
Zona Perikanan	4,94
Zona Pertahanan dan Keamanan	85,78
Zona Lainnya	16,42
Zona Pariwisata	16,09
Zona Hutan Produksi	438,38
Zona Hutan Lindung	15,07
Kota Kediri	6.723,24

Sumber : FA RDTR Kota Kediri, 2023

Untuk mengetahui lebih jelasnya terkait detail peta tutupan lahan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.8 Peta Tutupan Lahan di Kota Kediri



Sumber : : FA RDTR Kota Kediri, 2023

Penggunaan lahan terbesar di Kota Kediri digunakan untuk perumahan dengan luasan sebesar 14.813,60 Ha atau 37,58 persen dari luas tutupan lahan yang mencapai 39.416,84 Ha. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah lahan pertanian seluas 7.877,54 Ha atau sebesar 19,99 persen. Sedangkan penggunaan lahan dengan proporsi paling kecil adalah lindung setempat seluas 0,07 ha dan penggunaan lahan IPAL sebesar 0,41 ha.

2.1.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Kota Kediri berada di jalur transportasi regional yang menghubungkan antara Kota Surabaya dengan Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan Malang. Sehingga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk mendorong sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder. Pusat pelayanan kota mempunyai skala pelayanan regional dalam wilayah Kota Kediri, yang harus mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Kediri dan mendukung kegiatan skala regional pada hirarki di atasnya. Deliniasi untuk penentuan pusat pelayanan kota yakni berdasarkan dominasi kegiatan. Adapun fungsi pusat pelayanan kota ini adalah sebagai berikut:

a. Pusat Pemerintahan Kota

Pusat pemerintahan Kota Kediri ditandai dengan adanya kantor wali kota dan kantor-kantor pemerintahan lainnya yang terdapat di kawasan pusat pelayanan kota ini.

b. Pusat Perdagangan Jasa Skala Regional

Kota Kediri memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa skala regional yakni dengan adanya beberapa pusat perbelanjaan (*Kediri Mall*, *Kediri Town Square*); kawasan pertokoan (sepanjang Jalan Erlangga – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Dhoho – Jalan Patimura – Jalan HOS Cokroaminoto dan sepanjang Jalan P. Sudirman – Jalan Yos Sudarso); pasar rakyat (Pasar Setonobetek dan Pasar Pahing); dan Pasar Grosir yang terdapat di kawasan pusat kota yang mempunyai skala pelayanan regional. Hal tersebut terjadi karena menjadi orientasi pemenuhan kebutuhan penduduk di wilayah luar Kota Kediri seperti dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek.

c. Pusat Kegiatan Industri

Terdapat industri besar berupa industri pengolahan tembakau di Kelurahan Semampir, Kelurahan Dandangan, dan Kelurahan Balowerti yang terletak di Kecamatan Kota. Selain itu terdapat juga sentra industri kecil makanan berupa *home industry* tahu, getuk pisang, kain tenun, kain batik dan lain sebagainya.

d. Pusat Pendidikan

Pusat pelayanan pendidikan yang berada di kawasan Kota Kediri merupakan sarana pendidikan formal tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah favorit/unggulan. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan skala regional berupa perguruan tinggi dan akademi diarahkan ke wilayah Kota Kediri bagian Barat (Kecamatan Mojoroto) dan sebagian kecil di wilayah timur (Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Pesantren). Sarana pelayanan pendidikan berbasis agama yang berupa pesantren juga tersebar di wilayah barat (Pondok Pesantren Lirboyo di Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto) dan di wilayah lainnya (Pondok Pesantren Wali Barokah di Kelurahan Banjaran, dan lainnya).

e. Pusat Pelayanan Kesehatan Skala Regional

Sarana pendukung fungsi pusat pelayanan kesehatan skala regional di Kota Kediri berada di RSUD Gambiran di Kelurahan Pakunden, RSUD Daha Husada di Kelurahan Mojoroto, RS Bhayangkara di Kelurahan Dandangan, RS DKT di Kelurahan Semampir, RS Baptis di Kelurahan Bangsal, dan RS Muhammadiyah di Kelurahan Ngampel.

f. Pusat Pelayanan Pariwisata

Kegiatan pariwisata antara lain pengembangan pariwisata Selomangleng, wisata belanja di pusat-pusat perbelanjaan yang ada, wisata kuliner dan pengembangan akomodasi pariwisata berupa hotel atau penginapan.

Pengembangan Kawasan Strategis

Kota Kediri merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata secara regional sehingga Kota Kediri memiliki kawasan-kawasan strategis yang dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan potensinya masing-masing, sebagai berikut:

1. Kawasan *Central Business District* (CBD)

Kawasan CBD yang merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yakni kawasan perdagangan dan jasa berskala regional dan kawasan perkantoran berskala lokal dan regional di pusat kota yang berada di Kecamatan Kota. Kawasan perdagangan dan jasa ini meliputi:

- a. Keberadaan Pasar Setonobetek, Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, serta Pasar Pahing dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kebutuhan pokok, sayuran, ikan dan sejenisnya.
- b. Pertokoan di sepanjang Jalan Pattimura dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kelontong, tekstil, dan alat perlengkapan sehari-hari.
- c. Pertokoan di sepanjang Jalan Dhoho – Jalan Panglima Sudirman - Jalan Urip Sumoharjo dan sekitarnya dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang campuran seperti garmen, elektronika, jasa bank, showroom motor-mobil, dan lainnya.
- d. Pertokoan dan pusat perbelanjaan yang terdapat di sepanjang Jalan Brawijaya dan Jalan Diponegoro.
- e. Perkantoran terdapat di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Brawijaya, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Basuki Rachmat.

Selain pengembangan kawasan CBD juga terdapat rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi pengembangan pasar rakyat yang tersebar di tiap kecamatan/bagian wilayah kota dan pada pusat-pusat permukiman, pengembangan pusat perbelanjaan berupa *shopping centre*, pertokoan, *showroom*, bank dan grosir pada kawasan pusat kota dan koridor sepanjang Jalan Dhoho, Jalan Patimura, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Erlangga dan Jalan P. Kusuma Bangsa. Pengembangan toko modern yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kediri juga telah direncanakan. Selain itu kawasan perdagangan dan jasa juga akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan pariwisata seperti pembangunan pasar wisata di Kelurahan Campurejo, pembangunan pasar penjualan *souvenir*

Selomangleng di Kelurahan Pojok, pembangunan sentra pemasaran produk Industri Kecil Menengah (IKM) di Kelurahan Banjarmlati; dan pengembangan sentra oleh-oleh dan produk IKM di Kelurahan Pocanan. Kawasan perdagangan dan jasa baru yang akan dikembangkan adalah pasar sembako di Kelurahan Bandar Lor, pasar grosir elektronik di Kelurahan Ketami dan pasar *showroom* di Kelurahan Blabak.

2. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan industri di Kota Kediri meliputi kawasan peruntukan industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM). Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi industri besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar yaitu industri rokok PT Gudang Garam di Kelurahan Semampir, Dandangan dan Ngadirejo serta industri pengolahan tebu (pabrik gula) di Kelurahan Mrican dan Pesantren. Industri menengah berupa industri pergudangan di Kelurahan Bangsal, pabrik pengolahan kayu di Kecamatan Pesantren dan Kota, industri pengolahan makanan di Kecamatan Pesantren dan Kota. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Betet dan Blabak, Kecamatan Pesantren. Industri kecil tersebar di beberapa wilayah Kota Kediri.

Pengembangan SIKM meliputi sentra kerajinan batik di Kelurahan Dermo, Mrican, Dandangan dan Rejomulyo. Sentra kerajinan tenun di Kelurahan Bandar Kidul. Sentra tahu di Kelurahan Pakelan, Pocanan, Tinalan, Banaran dan Bawang. Sentra stik tahu di Kelurahan Tinalan dan Kampung Dalem. Sentra madumongso dan getuk pisang di Kelurahan Kampung Dalem, Tinalan dan Dandangan; dan sentra makanan ringan di Kelurahan Blabak dan Bangsal.

Arah pengembangan baru untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan di Kota Kediri meliputi Kecamatan Kota (Kelurahan Balowerti, Kelurahan Dandangan, kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Semampir) dan Kecamatan Pesantren (Kelurahan Bangsal, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak). Karena sektor industri pengolahan memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri, keberadaan industri ini tetap dipertahankan. Arah yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Blabak, Betet dan Bawang. Rencana penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, untuk kawasan industri meliputi:

- a. Industri besar, terdapat Industri Rokok di Kelurahan Semampir, Balowerti dan Dandangan di Kecamatan Kota, Industri Pabrik Gula di Kelurahan Mrican, Industri Pabrik Gula di Kelurahan Pesantren.
- b. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Blabak – Betet – Bawang.

- c. Pengembangan dan penataan sentra industri rumah tangga (*home industry*) yakni *home industry* tenun di Kelurahan Bandar Kidul; *home industry* batik di Kelurahan Dermo, Rejomulyo dan Dandangan; *home industry* pengolahan makanan (tahu) di Jalan Pattimura.

3. Kawasan Terpadu Mrican

Pengembangan kawasan akibat dampak pintu tol dan rencana bandara di Kabupaten Kediri akan menyebabkan perubahan dan perkembangan kegiatan pada Kelurahan Mrican (Jalan Sersan Bahrin – Jalan Gatot Subroto).

Pengembangan kegiatan yang berkembang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah:

- Industri (Pabrik Gula Mrican dan industri kecil batik);
- Pendidikan (Universitas Brawijaya);
- Perdagangan Jasa;
- Perumahan dan kost-kost an;
- Dekat *exit* tol;
- Dekat bandara.

4. Kawasan GOR Jayabaya

Kawasan GOR Jayabaya merupakan lokasi yang strategis karena berada pada persimpangan pengembangan kawasan Gunung Wilis. Selain itu pengembangan etalase seni budaya yang terletak pada kawasan GOR Jayabaya juga menambah keistimewaan lokasi tersebut. Adapun rencana pengembangan kawasan GOR Jayabaya berdasarkan masterplan yang telah disusun sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rencana Struktur Peruntukan Lahan Kawasan GOR Jayabaya

Zona	Rencana Peruntukan Lahan	Luas (ha)
A	Campuran kawasan komersial skala kota, ruang terbuka publik, kawasan olahraga, dan rekreasi	3.93
B	Pusat UMKM, pusat pengembangan IPTEKS, dan convention hall	3.49
C	Parkir umum dan terminal wisata	3.44
D	Permukiman kepadatan rendah-sedang, pendidikan, pusat kuliner, komersial skala kawasan, dan peribadatan	3.58
E	Kawasan olahraga dan rekreasi	3.50
F	Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang publik	2.05
G	Campuran kawasan komersial skala regional, hotel, dan apartemen	5.46
H	Campuran kawasan, komersial, perkantoran, mall layanan publik, RTH/ruang publik, dan rekreasi.	6.25
	Total	31.69

Sumber : Masterplan GOR Jayabaya, 2021

5. Kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok;

Kawasan strategis Goa Selomangleng – Gunung Klotok terdiri dari Pelestarian Kawasan Gunung Klotok yang terdiri dari Situs/Candi Klotok, Goa Selomangleng, Makam Mbah Boncolono dan Museum Airlangga.

6. Kawasan kota lama

Kawasan strategis kawasan Kota Lama terdiri dari pelestarian kawasan untuk menjaga fungsi kawasan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kota Lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso) yang terdapat Pertokoan lama, Makam Islam Kuno Mbah Wasil Kel. Setono Gedong, Bank Indonesia Kel. Pocanan, Hotel Merdeka Kel. Balowerti, Masjid Aulia Kel. Setono Gedong, Klenteng Tjoe Hwie Kiong Kel. Ringinanom, Makam Aulia Sunan Geseng Kel. Singonegaran.

Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau RTH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota perlu dipertahankan keberadaannya minimal 30% (20% RTH publik dan 10% RTH privat). Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Kediri tahun 2021 sebesar 1.043,29 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah kota dikurangi luas kawasan lindung seluas 6.154,04 Ha (6.340 Ha – 185.96 Ha), RTH yang seharusnya yaitu : $20\% \times 6.154,04 \text{ Ha} = 1.230,81 \text{ Ha}$, maka persentase luasan RTH dari luas Kota Kediri sebesar 16,95%. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menetapkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi seluas 509,96 Ha. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan komponen dari RTH, sehingga persentase luasan RTH Kota Kediri tahun 2021 menjadi 16,95% (1.043,29 Ha).

Luasan RTH publik yang ada di Kota Kediri secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Luas Eksisting RTH Kota Kediri Tahun 2022

No	RTH Kota Kediri	Luas (Ha)	Persentase (%)	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Tempat Rekreasi	12.000	0.19%	-	-
2	Hutan Kota	309.000	5.02%	-	-
3	Makam	59.279	0.96%	-	-
4	Sempadan Sungai	34.000	0.55%	-	-
5	Jalur Hijau	16.000	0.26%	-	-
6	Pulau dan Median	8.500	0.14%	-	-
7	Kebun Bibit	15.000	0.24%	-	-
8	Sempadan Rel	10.000	0.16%	-	-
9	Taman	41.696	0.68%	-	-
10	taman KMP	0.240	0.00%	-	-
11	Taman perluasan Ngronggo	1.020	0.02%	-	-
12	Taman Tempurejo	1.670	0.03%	-	-
13	Eks Lokalisasi	1.300	0.02%	2015	-
14	sumber mata air	14.919	0.24%	2016	-
TOTAL LUAS		5.246.237	8.52%		-
15	RTH Rusunawa	6.910	0.11%	2017	-
TOTAL LUAS		5.315.337	8.64%		-
16	RTH Balowerti	0.1159	0.00%	2018	-
17	Taman Gajah Mada	0.05	0.00%	2018	-
TOTAL LUAS		5.316.996	8.64%		-
18	LP2B	509.96	8.29%	2019	perda 8 2019 (LP2B)
19	RTH Kelurahan	0.11	0.00%	2019	apbd (DBHCHT)8 kel
TOTAL LUAS		10.417.696	16.93%		-
20	RTH Taman Brantas	1.5	0.02%	2020	Mutasi aset dari PUPR
TOTAL LUAS		10.432.696	16.95%		
21	RTH Kelurahan	0.02	0.00%	2021	rth kel dermo
TOTAL LUAS		10.432.896	16.95%		
22	Kel Kampung Dalem	120.00	1.95%	2022	-
23	Kel Bandar Kidul	679.45	11.04%	2022	-
24	Kel Blabak	321.48	5.22%	2022	-
25	Kel Pojok	445.50	7.24%	2022	-
26	Kel Jamsaren	400.00	6.50%	2022	-
27	Kel Mrican	288.47	4.69%	2022	-
28	Kel Bujel	240.00	3.90%	2022	-
29	Kel Campurejo	302.00	4.91%	2022	-
30	Kel Semampir	520.00	8.45%	2022	-
31	Kel Lirboyo	315.64	5.13%	2022	-
32	Kel Banaran	259.50	4.22%	2022	-
33	Kel Bandar Lor	668.05	10.86%	2022	-
34	Kel Ketami	300.00	4.87%	2022	-
35	Kel Dandangan	800.76	13.01%	2022	-
36	Kel Tinalan	1021.80	16.60%	2022	-
37	Kel Kampungdalem (Prodamas)	117.60	1.91%	2022	RT 02 RW 04
38	Kel Dandangan (Prodamas)	800.00	13.00%	2022	RT 01 RW 09
39	Kel Setonopande (Prodamas)	268.75	4.37%	2022	BALAI KEL. LAMA DEPAN GEDUNG GOR RT 01 RW 04
40	Kel Rejomulyo (Prodamas)	1188.00	19.30%	2022	LAP REJOMULYO

No	RTH Kota Kediri	Luas (Ha)	Persentase (%)	Tahun Perolehan	Keterangan
41	Kel Ngronggo (Prodamas)	2784.00	45.24%	2022	LAP NGRONGGO
42	Kel Banjaran (Prodamas)	20.00	0.32%	2022	RT 02 RW 02
43	Kel Bujel (Prodamas)	231.00	3.75%	2022	RT 03 RW 03
44	Kel Dermo (Prodamas)	877.50	14.26%	2022	RT 07 RW 03
45	Kel Banjarmlati (Prodamas)	290.00	4.71%	2022	RT 07 RW 03
46	Kel Mrican (Prodamas)	668.30	10.86%	2022	RT 01 RW 09
47	Kel Jamsaren (Prodamas)	934.00	15.18%	2022	DEPAN LAP. MRICAN
48	Kel Jamsaren (Prodamas)	10.58	0.17%	2022	PENGADAAN MAINAN ANAK
49	Kel Blabak (Prodamas)	15.75	0.26%	2022	PENGADAAN BUTORANTAS
50	Kel Tempurejo (Prodamas)	270.00	4.39%	2022	LAP JOKOBANDUNG BLABAK
51	Kel Banaran (Prodamas)	2244.00	36.46%	2022	DEPAN KELURAHAN
52	Kel Ngletih (Prodamas)	1375.00	22.34%	2022	LAP BANARAN RT 15 RW 06
53	Kel Bangsal (Prodamas)	992.00	16.12%	2022	RT 01 RW 01
RTH Kelurahan 2022		1.977			
TOTAL LUAS		10.452.665	16.99%		

Sumber : DLHKP 2023

Sedangkan berdasarkan perhitungan dari Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, bahwa Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 11,3% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Kediri

TIPOLOGI	JENIS	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	Luas (ha)	Nilai	%
A	KAWASAN RTH					
A.1	Rimba Kota	100	3	35	105	1,56%
A.2	Taman Kota	100	2,5	34	85	1,26%
A.3	Taman Kecamatan	100	2	58	116	1,73%
A.4	TamanKelurahan	100	1,8	51	91,8	1,37%
A.5	Taman RW	100	1,6	0	0	0,00%
A.6	Taman RT	100	1,5	0	0	0,00%
A.7	Pemukaman	100	1,3	64	83,2	1,24%
A.8	Jalur Hijau	100	1,5	17	25,5	0,38%
JUMLAH				259	506,5	7,53%
B	KAWASAN LAINNYA					
B.1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	30	1	42	12,6	0,19%
B.2	Kawasan Perlindungan	50	1	10	5	0,07%

TIPOLOGI	JENIS	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	Luas (ha)	Nilai	%
	Setempat					
B.3	Kawasan Konservasi	30	1	0	0	0,00%
B.4	Kawasan Hutan Adat	30	1	0	0	0,00%
B.5	Kawasan Lindung Geologi	20	1	0	0	0,00%
B.6	Kawasan Cagar Budaya	10	1	0	0	0,00%
B.7	Kawasan Ekosistem Mangrove	20	1	0	0	0,00%
B.8	Kawasan Hutan Produksi	15	1	254	38,1	0,57%
B.9	Kawasan Perkebunan Rakyat	15	1	0	0	0,00%
B.10	Kawasan Pertanian	10	1	1751	175,1	2,60%
JUMLAH				2057	230,8	3,43%
C	OBJEK RUANG BERFUNGSI RTH					
C.1	Objek Ruang Pada Bangunan					
C.1.1	Taman Atap	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.2	Taman Podium	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.3	Taman Balkon	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.4	Taman Koridor	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.5	Taman Vertikal	100	0,5	0	0	0,00%
C.1.6	Taman dalam Pot	100	0,4	0	0	0,00%
C.1.7	Taman dalam Kontainer	100	0,5	0	0	0,00%
C.2	Objek Ruang pada Kavling					
C.2.1	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Perumahan	100	1	0	0	0,00%
C.2.2	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa	100	1	0	0	0,00%
C.2.3	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Perkantoran	100	1	0	0	0,00%
C.2.4	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Peruntukan Industri	100	1	0	0	0,00%

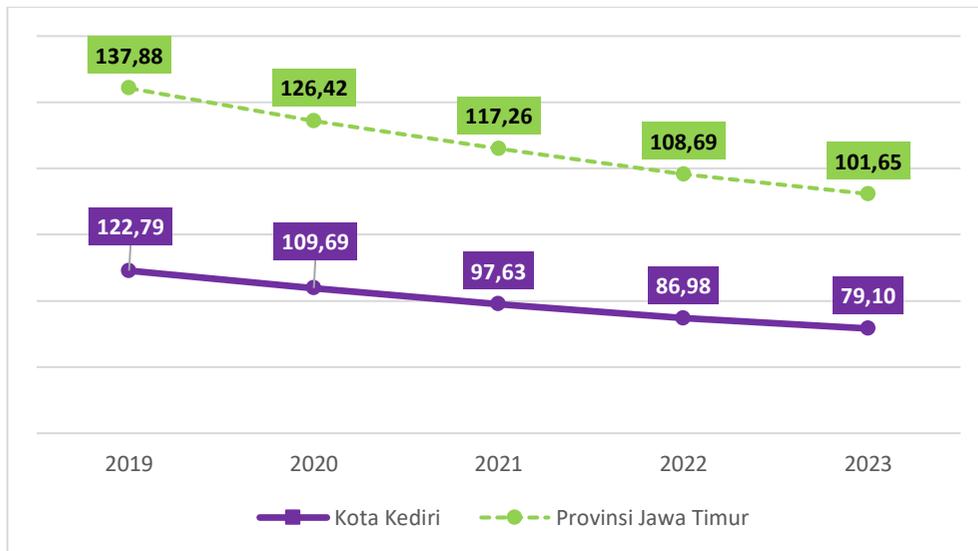
TIPOLOGI	JENIS	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	Luas (ha)	Nilai	%
C.2.5	Pekarangan Rumah	50	1	0	0	0,00%
C.3	Ruang Terbuka Biru					
C.3.1	Danau	20	1	0	0	0,00%
C.3.2	Waduk	20	1	0	0	0,00%
C.3.3	Sungai	20	1	114	22,8	0,34%
C.3.4	Embung	20	1	0	0	0,00%
C.3.5	Situ	20	1	0	0	0,00%
C.3.6	Mata Air (termasuk sempadan)	50	1	7	3,5	0,05%
C.3.7	Rawa	20	1	0	0	0,00%
C.3.8	Biopori	100	0,2	0	0	0,00%
C.3.9	Sumur Resapan	100	0,5	0	0	0,00%
C.3.10	Bioswale	100	1,2	0	0	0,00%
C.3.11	Kebun Hujan	100	1,2	0	0	0,00%
C.3.12	Kolam Retensi dan Detensi	100	1,3	0	0	0,00%
C.3.13	Rawa Buatan	100	1,5	0	0	0,00%
JUMLAH				121	26,3	0,39%
IHBI KOTA KEDIRI				2437	763,6	11,36%

Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

2.1.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA

Tingkat kerawanan dan risiko bencana Kota Kediri dapat dilihat melalui Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027. Dokumen ini memberikan informasi mengenai perbandingan antara besarnya potensi ancaman, kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Sedangkan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) menunjukkan kemampuan daerah dalam upaya penanggulangan bencana. Semakin tinggi nilai IRB menggambarkan rendahnya upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya semakin rendah nilai IRB menggambarkan upaya peningkatan kapasitas yang semakin tinggi oleh pemerintah. Kondisi IRB Kota Kediri dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

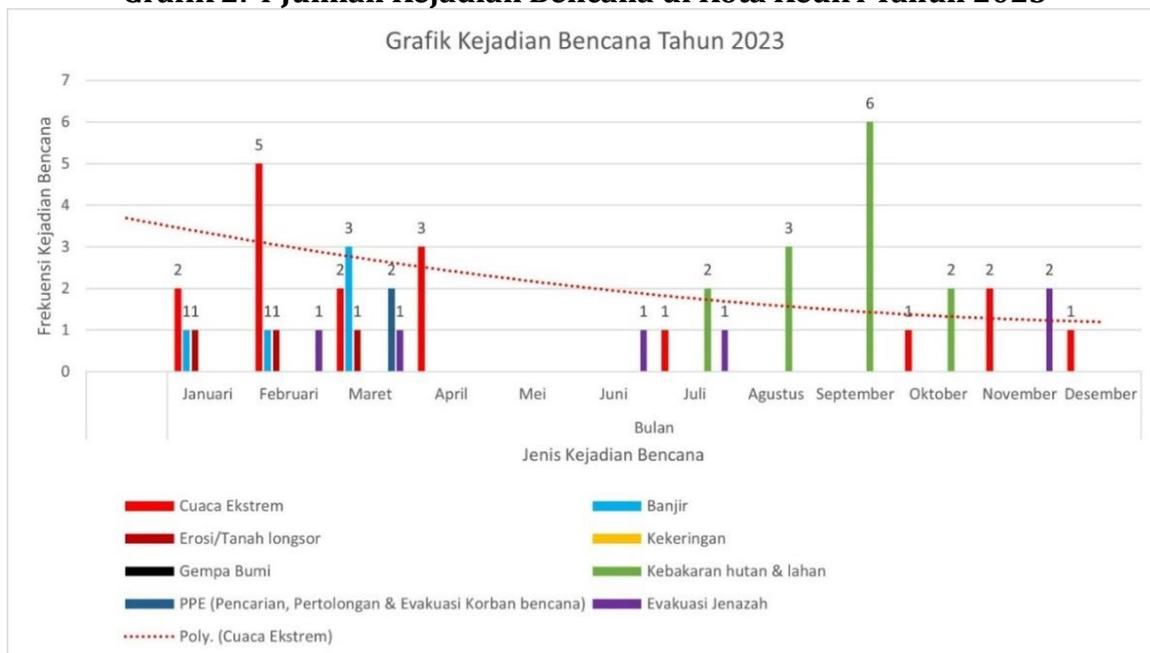
Grafik 2. 3 Indeks Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : BPBD Kota Kediri

Berdasarkan grafik diatas Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 Kota Kediri memiliki indeks risiko 79,10 (sedang), dari tahun 2019-2023 IRBI Kota Kediri selalu dibawah Provinsi Jawa Timur dan konsisten mengalami penurunan, sehingga semakin rendah nilai indeks risiko bencana maka upaya pemerintah untuk peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana semakin tinggi dan semakin baik. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027, terdapat lima potensi bencana alam yang dapat menjadi bahaya, Adapun potensi bencana alam tersebut meliputi : Banjir, cuaca ekstrem, Kekeringan, Tanah longsor dan Gempa bumi. Kejadian bencana Kota Kediri tahun 2023 per bulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 2. 4 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Kediri Tahun 2023



Sumber : BPBD Kota Kediri, diolah (2024)

Berdasarkan data dari BPS Kota Kediri dan data dari DIBI kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Kediri adalah cuaca ekstrem dan banjir. Kejadian Bencana banjir yang sering terjadi diakibatkan oleh meluapnya air di sungai, selokan, atau aliran air yang lainnya. Volume air meningkat disebabkan karena hujan yang terjadi secara terus - menerus yang mengakibatkan aliran air tidak dapat tertampung dalam sistem saluran atau penampung air lainnya. Secara fisik kepadatan penduduk yang terpusat di wilayah perkotaan diiringi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menyebabkan daerah perkotaan rawan terhadap kejadian bencana kebakaran dan banjir, sedangkan wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam serta jenis tanah alluvial berisiko mengalami erosi dan cuaca ekstrem (angin puting beliung) juga merupakan salah satu kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Kediri. Secara keseluruhan risiko bencana di Kota Kediri, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 12 Tingkat Risiko Bencana di Kota Kediri Tahun 2023

No	Bencana	Bahaya	
		Luas(Ha)	Tingkat
1	Banjir	2994,74	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	6719,95	Tinggi
3	Kekeringan	6719,95	Sedang
4	Gempa Bumi	6719,95	Tinggi
5	Tanah Longsor	353,52	Tinggi

Sumber: KRB Kota Kediri Tahun 2023

1) Kawasan Rawan Banjir

Risiko bencana banjir tersebar pada semua kecamatan yang berada di Kota Kediri. Secara keseluruhan semua kecamatan di Kota Kediri termasuk dalam kelas risiko sedang hingga tinggi. Uraian kelas risiko bencana banjir pada tingkat kecamatan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 13 Potensi Luas Risiko Banjir Per Kecamatan di Kota Kediri

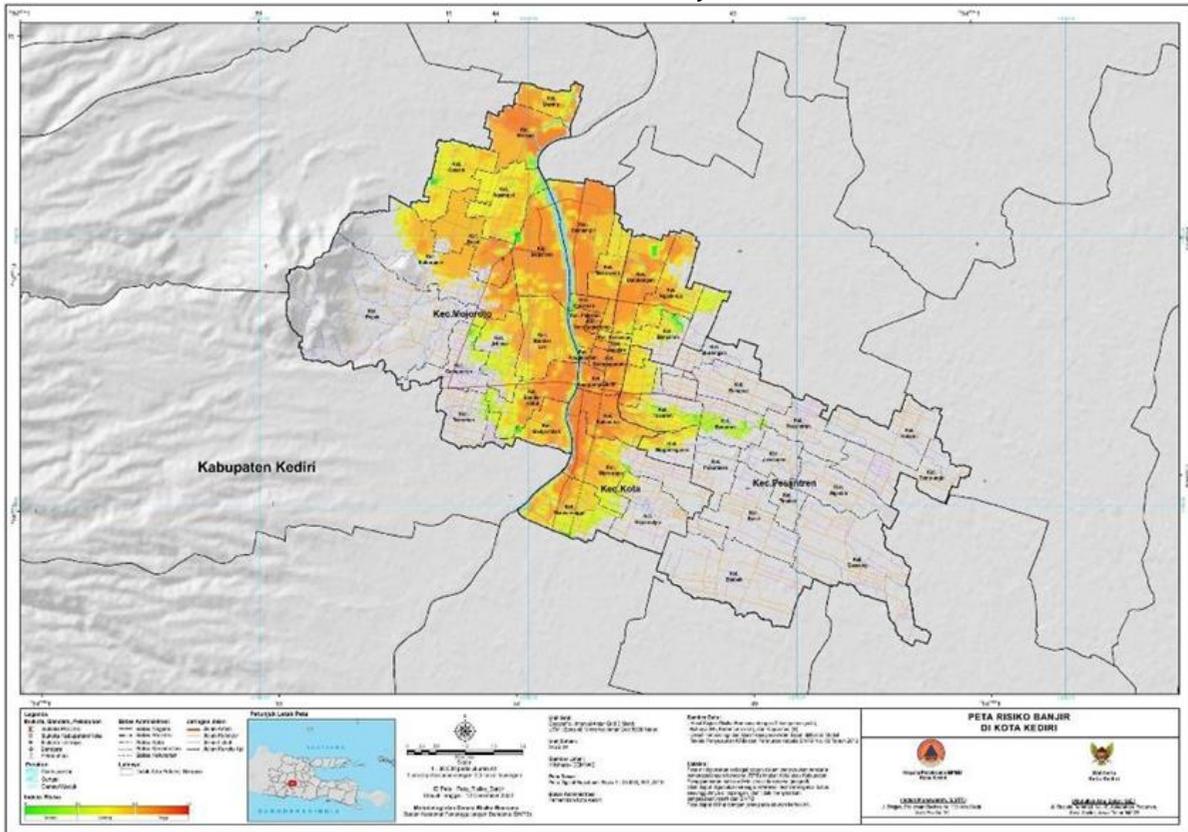
No	Kecamatan	Potensi Luas Risiko (Ha)				Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Kecamatan Kota	52,73	582,57	599,57	1.234,87	Tinggi
2	Kecamatan Mojoroto	83,71	849,84	609,81	1.543,36	Tinggi
3	Kecamatan Pesantren	39,81	156,28	20,42	216,51	Sedang
Kota Kediri		176,25	1.588,69	1.229,80	2.994,74	Tinggi

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, 2023

Potensi banjir di Kota Kediri sering terjadi pada wilayah sempadan sungai seperti Sungai Brantas dan beberapa wilayah lain pada posisi yang lebih rendah. Karakter banjir lebih disebabkan oleh luapan air sungai pada saat awal dan pertengahan musim hujan dengan intensitas hujan di atas rata-rata atau hujan terjadi dengan durasi yang lama. selain itu perencanaan penyediaan drainase yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebab kejadian banjir tersebut. Upaya pengurangan risiko bencana banjir dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi mitigasi antara lain sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran drainase maupun sungai; penyediaan serta peningkatan jumlah serta kapasitas saluran drainase permukiman; penempatan serta penyediaan sistem peresapan air di tengah wilayah permukiman, yakni dengan penyediaan sumur resapan dan ruang terbuka hijau dan; penyediaan serta penguatan sarana sistem pengaturan serta pemantauan debit aliran sungai.

Peta risiko banjir Kota Kediri dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 9 Peta Risiko Banjir Kota Kediri



Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

2) Kawasan Rawan Cuaca Ekstrem

Risiko bencana cuaca ekstrem tersebar pada seluruh kecamatan yang berada di Kota Kediri secara keseluruhan, semua kecamatan di Kota Kediri termasuk dalam kelas risiko sedang. Uraian kelas risiko bencana cuaca ekstrem pada tingkat administrasi kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 14 Potensi Risiko Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Kediri

No	Kecamatan	Potensi Luas Risiko (Ha)				Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Kecamatan Kota	62,91	1.532,10	-	1.595,01	Sedang
2	Kecamatan Mojoroto	152,91	2.540,44	-	2.693,35	Sedang
3	Kecamatan Pesantren	36,45	2.395,14	-	2.431,59	Sedang
Kota Kediri		252,27	6.467,68	-	6.719,95	Sedang

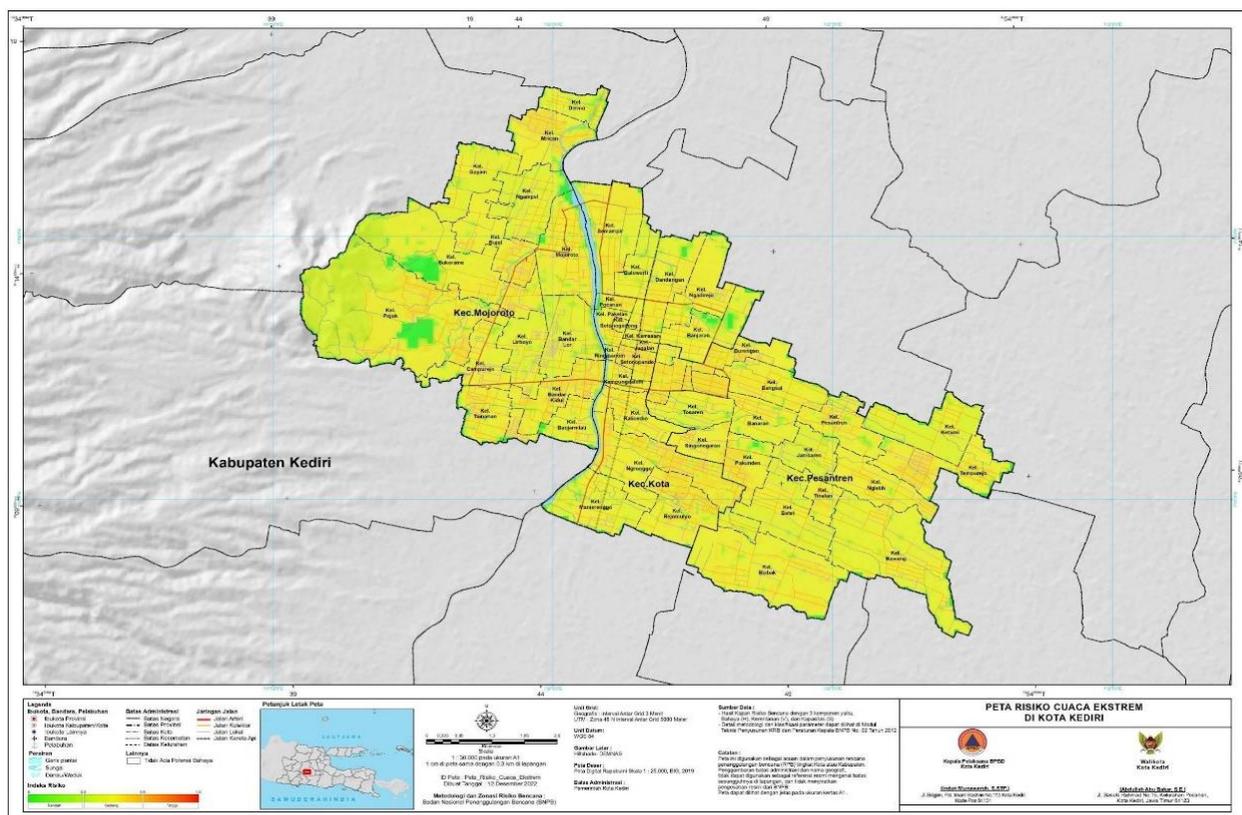
Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya cuaca ekstrem terlihat pada bangunan yang dibuat oleh masyarakat yang kurang mempertimbangkan kemampuan untuk menahan hembusan angin yang terjadi. Sebagian besar area terbangun

menggunakan atap dari seng khususnya pada bangunan-bangunan jasa, perdagangan, dan industri. Perbedaan keterbukaan lahan yang cukup signifikan di Kota Kediri menyebabkan perubahan tekanan udara dalam suatu sistem cuaca di area pemukiman dan pertanian, sehingga dapat memicu angin puting beliung.

Secara cakupan regional yang lebih luas, kota Kediri berada di tengah Gunung Wilis dan Gunung Api Kelud sehingga menjadi jalur lorong angin dari utara ke selatan. Berdasarkan kondisi tersebut perubahan tekanan udara yang signifikan antara bagian atas dan bawah kota dapat berlangsung dengan cepat dan berpotensi menjadi angin puting beliung. Perubahan iklim global serta pembangunan yang pesat dapat mempengaruhi kondisi iklim lokal di Kota Kediri. Upaya pengurangan risiko bencana cuaca ekstrem antara lain dengan pemantauan dan penebangan pohon yang rapuh dan berpotensi roboh; penerapan metode penjarangan pohon perindang dengan teknik potong meja untuk memecah konsentrasi kekuatan angin; penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting di daerah aman bencana cuaca ekstrem; pengamanan/ perkuatan bagian-bagian bangunan yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya; penyusunan standar struktur bangunan yang dapat menahan angin di wilayah rawan cuaca ekstrem dan peningkatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana angin puting beliung (Proses penyelamatan diri). Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Kediri dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.10 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Kediri



Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

3) Kawasan Rawan Kekeringan

Risiko bencana kekeringan tersebar pada semua kecamatan yang berada di Kota Kediri. Secara keseluruhan, semua kecamatan di Kota Kediri termasuk dalam kelas risiko sedang. Uraian kelas risiko bencana kekeringan pada tingkat administrasi kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 15 Potensi Risiko Bencana Kekeringan Per Kecamatan

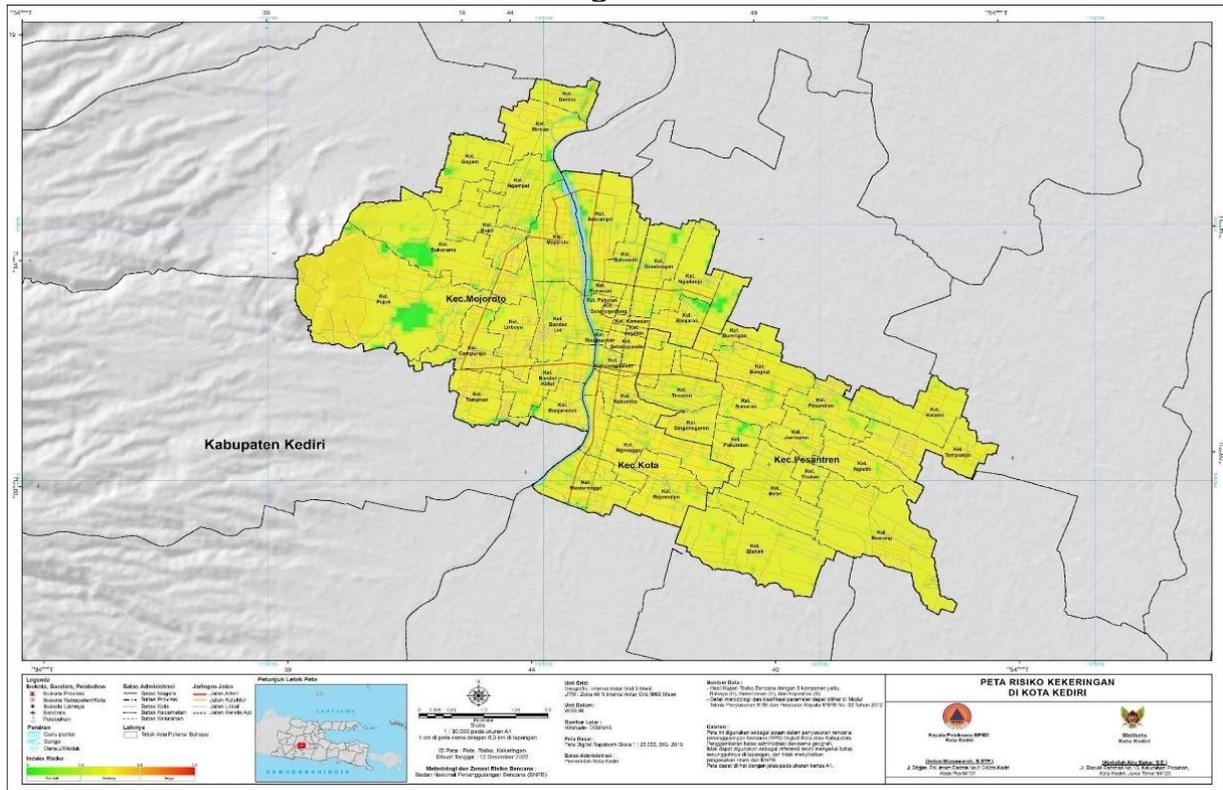
No	Kecamatan	Potensi Luas Risiko (Ha)				Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Kecamatan Kota	138,24	1.456,77	-	1.595,01	Sedang
2	Kecamatan Mojoroto	216,54	2.476,81	-	2.693,35	Sedang
3	Kecamatan Pesantren	62,73	2.431,59	-	2.431,59	Sedang
Kota Kediri		417,51	6.302,44	-	6.719,95	Sedang

Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Bencana kekeringan di Kota Kediri termasuk ke dalam kelas bahaya sedang, sedangkan berdasarkan kondisi eksisting hingga tahun 2023 belum pernah terdapat bencana kekeringan yang dilaporkan dan ditangani oleh BPBD Kota Kediri. Ketersediaan air di Kota Kediri relatif memadai karena posisi Kota Kediri yang berada diantara Sungai Brantas. Hanya terdapat satu Kelurahan di Kota Kediri yang mengalami kekurangan air bersih namun setelah pembangunan sumur pompa permasalahan kekurangan air bersih sudah diatasi. Upaya pengurangan risiko bencana kekeringan dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan waduk penampungan guna menyimpan air pada saat musim hujan melanda Kota Kediri; pembangunan penampungan air hujan untuk sarana irigasi pertanian; menyusun regulasi terkait dengan pengaturan pemanfaatan air tanah; konservasi dan rehabilitasi sumber mata air; sosialisasi dan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan air secara efektif dan efisien; meningkatkan jumlah sambungan jaringan PDAM dan; koordinasi antar wilayah untuk mengelola daerah aliran sungai.

Peta Risiko Kekeringan Kota Kediri dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 11 Peta Risiko Kekeringan Kota Kediri



Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

4) Kawasan Rawan Tanah Longsor

Tanah longsor hanya terdapat pada kecamatan Mojoroto, yang memiliki potensi kelas risiko bencana tanah longsor terbesar dengan luas sebesar 353,53 Ha. Bencana tanah longsor di Kota Kediri memiliki kombinasi kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi dan kelas kapasitas rendah untuk bencana tanah longsor. Dengan demikian, Kota Kediri memiliki kelas risiko tinggi terhadap bencana tanah longsor yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 16 Potensi Risiko Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Kediri

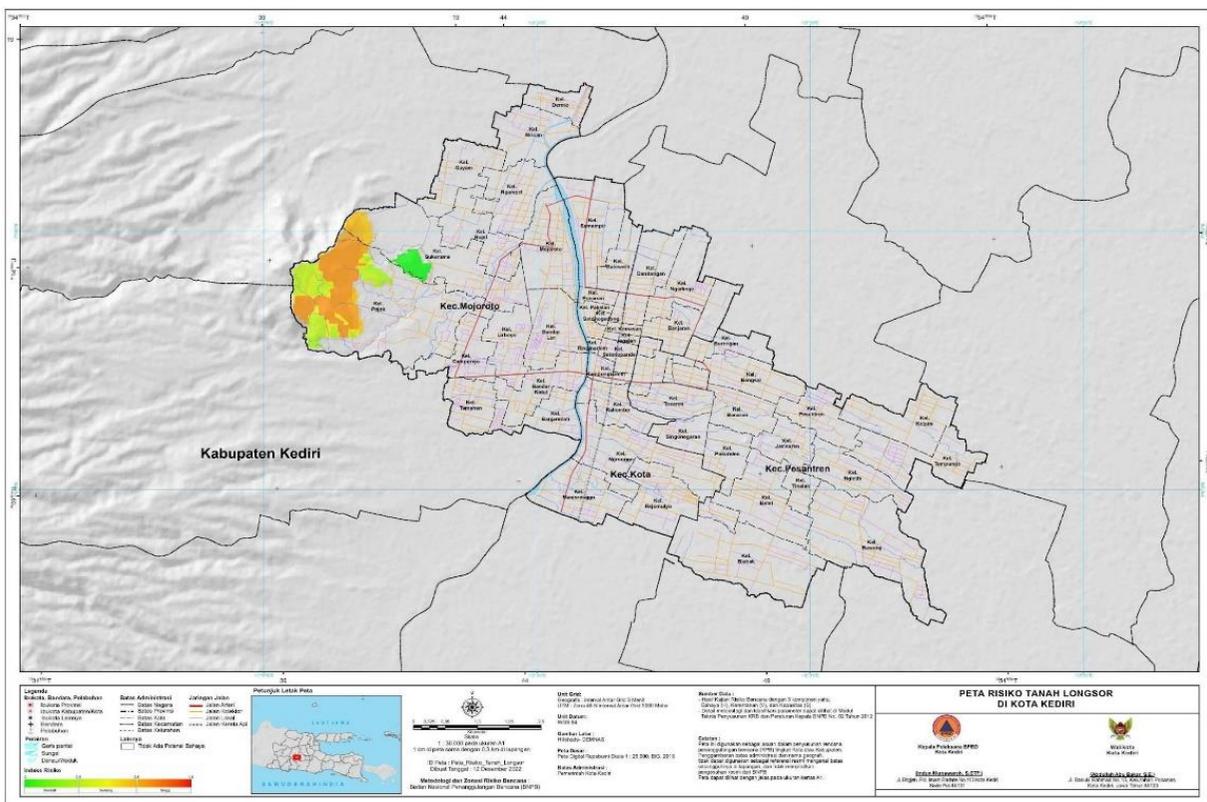
No	Kecamatan	Potensi Risiko				Kelas
		Potensi Luas Risiko (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Kecamatan Mojoroto	60,64	134,83	158,05	353,53	Tinggi
	Kota Kediri	60,64	134,83	158,05	353,53	Tinggi

Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Ancaman bencana tanah longsor di Kota Kediri berada sekitar di Gunung Klotok. Wilayah yang berada di zona bahaya tanah longsor berada di Desa Pojok dan Desa Sukorame. Frekuensi kejadian tanah longsor tergolong kecil. Meskipun bencana ini masih jarang terjadi, akan tetapi potensi bencana tanah longsor tetap perlu diwaspadai khususnya beberapa bangunan yang berada di sekitar lereng Gunung Klotok.

Meningkatnya kebutuhan lahan mendorong pembangunan ekspansif hingga ke daerah yang berlereng. Upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi antara lain dengan sosialisasi tentang bahaya tanah longsor pada masyarakat yang berada di area bahaya; pembuatan bronjong lereng dengan menambahkan saluran air agar tanah tidak mudah jenuh; pemasangan *Early Warning System (EWS)* pada daerah bahaya tanah longsor; pembuatan jalur drainase yang memperhatikan kontur untuk mengendalikan limpasan dan; pembuatan regulasi pembangunan pada daerah lereng terjal dan berpotensi terjadi longsor. Peta Risiko Tanah Longsor Kota Kediri dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.12 Peta Risiko Tanah Longsor Kota Kediri



Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

5) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Risiko bencana gempa bumi tersebar pada semua kecamatan yang berada di Kota Kediri. Secara keseluruhan, semua kecamatan di Kota Kediri termasuk dalam kelas risiko sedang. Kecamatan dengan potensi luas risiko bencana gempa bumi terbesar berada di Kecamatan Mojoroto dengan luas sebesar 2.693,35 Ha. Uraian kelas risiko bencana gempa bumi pada tingkat administrasi kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17 Risiko Gempa Bumi Per Kecamatan di Kota Kediri

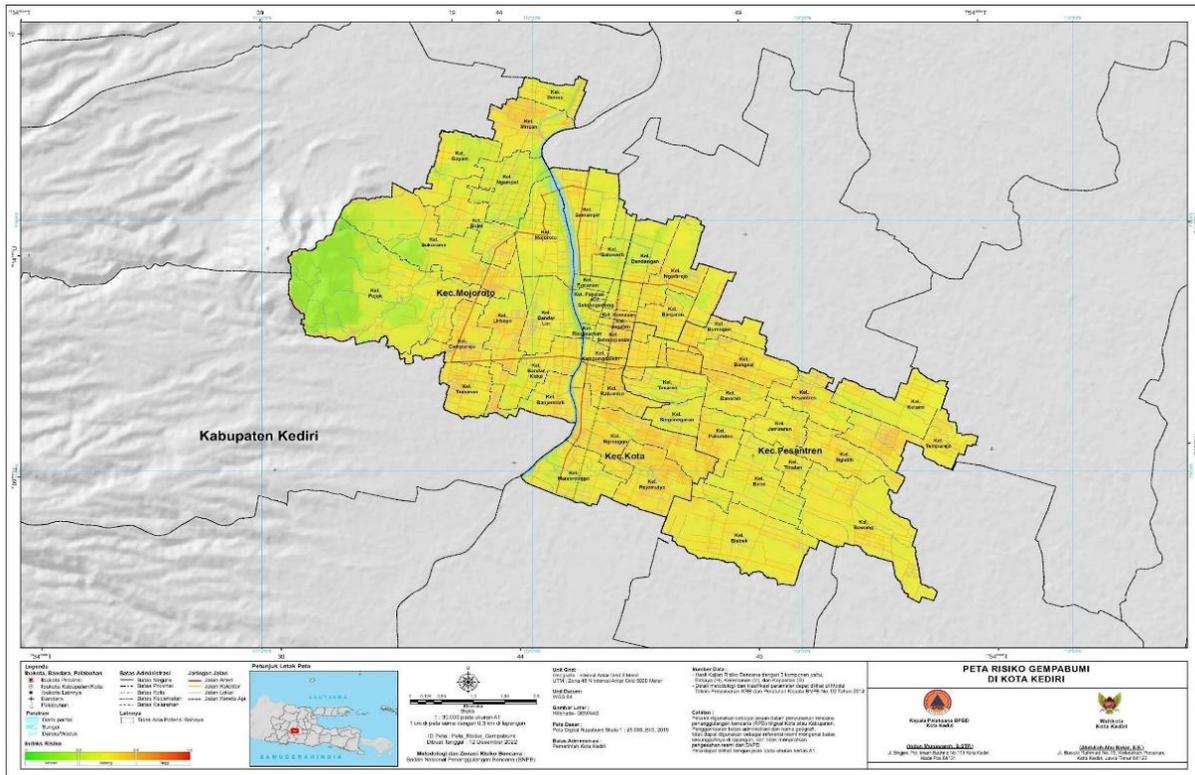
No	Kecamatan	Potensi Luas Risiko (Ha)				Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Kecamatan Kota	47,07	1.547,94	-	1.595,01	Sedang
2	Kecamatan Mojoroto	486,92	2.206,43	-	2.693,35	Sedang
3	Kecamatan Pesantren	3,96	2.427,63	-	2.431,59	Sedang
Kota Kediri		537,95	6.181,99	-	6.719,95	Sedang

Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Data BMKG tahun 2016 - 2022 mencatat telah terjadi gempa sebanyak 24 kali akibat aktivitas sesar lokal yang terdeteksi di Kota Kediri. Kejadian gempa terakhir terjadi pada 26 Agustus 2022 dengan magnitudo 3,7 SR. Gempa bumi tersebut merupakan gempa dengan skala terbesar yang pernah tercatat di Kota Kediri dan sekitarnya. Hingga saat ini kejadian gempa bumi belum menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat di Kota Kediri. Intensitas kejadian dan dampak gempa bumi yang rendah menjadikan masyarakat menganggap gempa bumi sebagai kejadian yang tidak mengancam. Hal tersebut berpengaruh pada faktor kesiapsiagaan masyarakat menjadi rendah, sehingga abai terhadap potensi bencana gempa bumi. Meskipun hasil analisis risiko bencana gempa bumi menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki kelas risiko sedang.

Upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi mitigasi antara lain dengan penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang aman dari bahaya gempa bumi; penyusunan standar struktur bangunan yang tahan terhadap bahaya gempa bumi; mengaplikasikan sistem peringatan dini gempa bumi melalui telepon genggam/ handphone pribadi dengan pelatihan dan peningkatan kesiapsiagaan; melakukan kegiatan sosialisasi, gladi, simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan; pembuatan jalur evakuasi penyelamatan dan titik kumpul di setiap gedung dan lingkungan permukiman. Peta Risiko Gempa Bumi Kota Kediri dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 2.13 Peta Risiko Gempa Bumi Kota Kediri



Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

2.1.2 DEMOGRAFI

Penduduk merupakan sekumpulan individu yang berdomisili atau tinggal dan menetap di satu wilayah dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Data kependudukan penting karena dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan program, optimalisasi pelayanan publik, perencanaan pembangunan di masa mendatang, hingga alokasi anggaran dalam suatu wilayah. Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Pendataan jumlah penduduk dilakukan untuk melihat karakteristik kuantitas kondisi penduduk di suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan yang merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki suatu wilayah akan menentukan pula maju dan mundurnya pembangunan wilayah terkait.

Besarnya jumlah penduduk dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi suatu wilayah. Sisi positif dari besarnya jumlah penduduk yaitu semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan perekonomian wilayah. Namun demikian, pertambahan penduduk yang berlebihan bisa juga menjadi permasalahan dalam pembangunan. Ketika pertambahan penduduk tidak terkendali, akan timbul berbagai

masalah diantaranya: (1) tekanan penduduk dan lingkungan dapat berdampak pada berkurangnya lahan pertanian serta kerusakan lingkungan yang dipicu tingginya kepadatan pemukiman dan perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan; (2) kemiskinan sebagai akibat dari keterbatasan penduduk mengakses kebutuhan ekonomi dan pelayanan dasar; (3) pengangguran sebagai akibat dari minimnya lapangan kerja dibandingkan pencari kerja; (4) rawan pangan sebagai akibat dari tingginya kebutuhan pangan yang tidak diimbangi dengan tingginya produksi untuk mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan akan barang, jasa, tempat tinggal, serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan upaya penataan ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung untuk memastikan kebutuhan penduduk terakomodir tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

2.1.4.1 Struktur Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Kediri Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Kediri Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

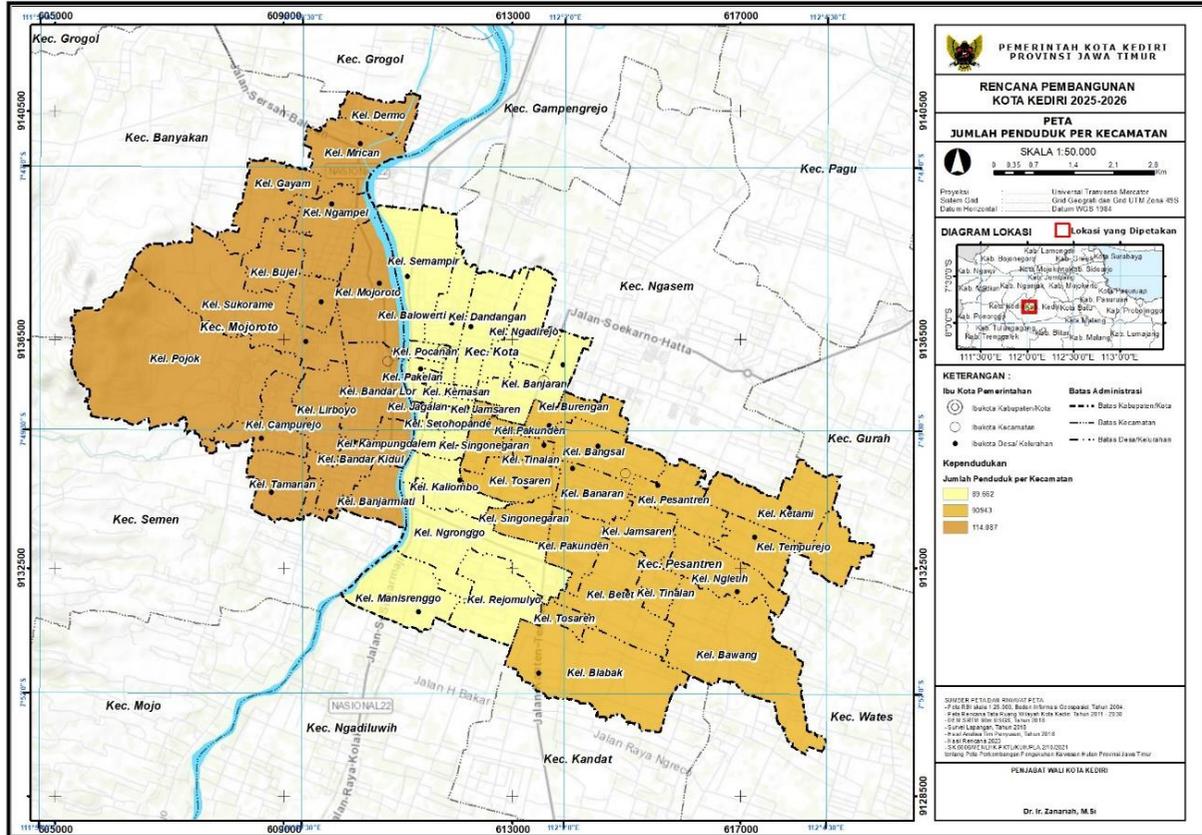
Kecamatan/ Jenis Kelamin	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kecamatan Mojoroto	jiwa	117523	118560	114553	118152	114087
Laki-Laki	jiwa	60038	60613	58359	56124	56645
Perempuan	jiwa	57485	57947	56194	56758	57442
Kecamatan Kota	jiwa	84762	85024	84291	89508	89662
Laki-Laki	jiwa	41128	41288	41418	44100	44218
Perempuan	jiwa	43634	43736	42873	45408	45444
Kecamatan Pesantren	jiwa	83297	83825	87952	88310	90943
Laki-Laki	jiwa	42171	42406	43839	44237	45329
Perempuan	jiwa	41126	41419	441113	44073	45614
Total Penduduk Laki-Laki Kota Kediri	jiwa	142292	143320	143616	144174	144876

Kecamatan/ Jenis Kelamin	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Total Penduduk Perempuan Kota Kediri	jiwa	143290	144089	143180	143788	144542
Jumlah Penduduk Kota Kediri	jiwa	285582	287409	286796	287962	289418

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Jumlah penduduk Kota Kediri dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 fluktuatif cenderung naik. tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi 286.796. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Gambar 2. 14 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Kediri



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

b. Sex Ratio

Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah dapat menggunakan rasio gini/sex ratio. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan pembangunan

laki-laki dan perempuan secara adil. *Sex ratio* berdasarkan Kecamatan di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 19 Sex Ratio Berdasarkan Kecamatan di Kota Kediri Tahun 2018-2022

Kecamatan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Mojoroto	%	104,44	104,6	103,85	104	103,45
Kota	%	94,26	94,4	96,61	97	96,83
Pesantren	%	97,52	97,67	99,38	98	99,42
Kota Kediri	%	99,3	99,47	100,3	100	103,45

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Rasio jenis kelamin Kota Kediri selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif, yakni menunjukkan kisaran angka 99-100,3. Hal ini dipengaruhi penduduk dengan jenis kelamin perempuan meningkat, sehingga mempengaruhi sex ratio nya. Pada tahun 2022, angka sex ratio menunjukkan kisaran angka 103,45, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan meningkat.

c. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Kondisi kepadatan penduduk Kota Kediri berdasarkan kecamatan selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

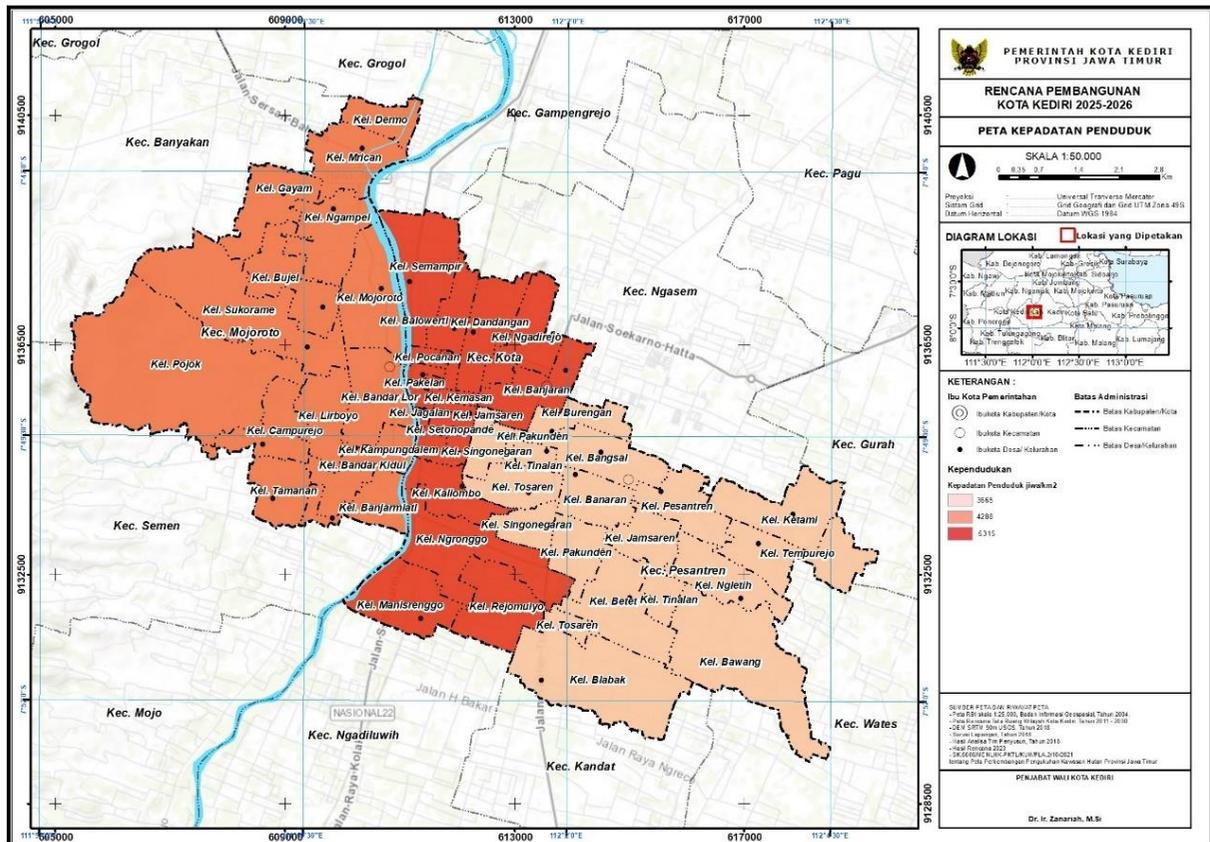
Tabel 2. 20 Kepadatan Penduduk Kota Kediri Berdasarkan kecamatan Tahun 2018-2022

Kecamatan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Mojoroto	Jiwa/km ²	4.777	4.820	4.657	4.271	4.288
Kota	Jiwa/km ²	5.689	5.706	5.657	5.306	5.315
Pesantren	Jiwa/km ²	3.485	3.507	3.680	3.631	3.665
Kota Kediri	Jiwa/km²	4.504	4.652	4.524	4.285	4.307

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Kediri adalah Kecamatan Kota dengan kepadatan penduduk mencapai 5.315 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan penduduk terlingang adalah Kecamatan Pesantren dengan angka kepadatan mencapai 3.665 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kota Kediri di tahun 2022 ini mengalami peningkatan menjadi 4.307 jiwa/km²

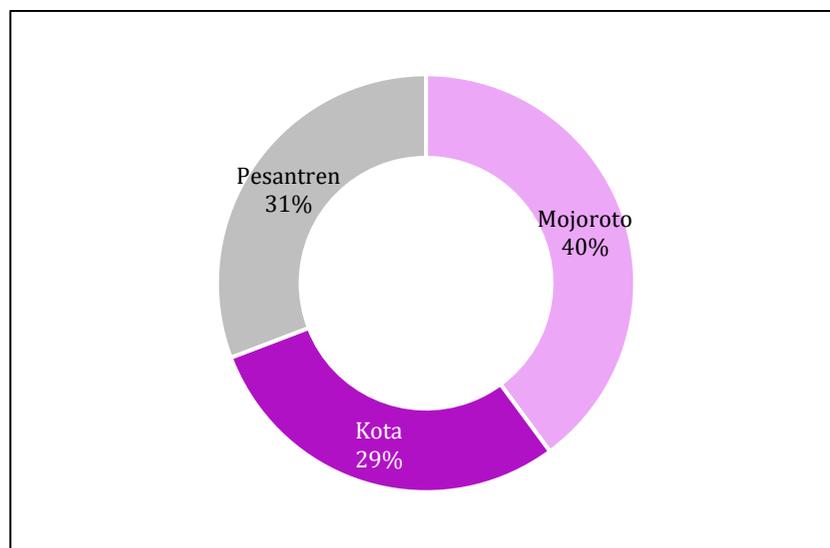
Gambar 2. 15 Peta Kepadatan Penduduk Kota Kediri



Sumber: BPS Kota Kediri diolah (2023)

Adanya kepadatan penduduk di Kota Kediri, maka dapat diketahui distribusi atau persebaran penduduk apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Kota Kediri, persentase sebaran penduduk Kota Kediri berdasarkan Kecamatan di Kota Kediri tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 5 Persentase Sebaran Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Persentase sebaran penduduk di Kota Kediri paling besar adalah Kecamatan Mojoroto dengan persentase mencapai 40%, kemudian Kecamatan Pesantren mencapai 31% dan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota mencapai 29%. Sedangkan kondisi jumlah penduduk lahir, mati, datang, pindah di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Datang, dan Pindah di Kota Kediri Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022

Keterangan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kecamatan Mojoroto						
Lahir	jiwa	1066	1193	1213	1081	-
Mati	jiwa	229	462	564	1139	-
Datang	jiwa	2244	1950	1656	1725	-
Pindah	jiwa	1502	1398	1400	1536	-
Kecamatan Kota						
Lahir	jiwa	840	885	901	763	-
Mati	jiwa	330	536	522	1264	-
Datang	jiwa	1636	1385	1108	1147	-
Pindah	jiwa	1318	1227	1193	1225	-
Kecamatan Pesantren						
Lahir	jiwa	909	972	913	848	-
Mati	jiwa	268	474	601	1242	-
Datang	jiwa	1512	1328	1288	1138	-
Pindah	jiwa	1053	1030	1021	1070	-
Kota Kediri						
Jumlah Penduduk Lahir di Kota Kediri	jiwa	2815	3050	3027	2692	-
Jumlah Penduduk Mati di Kota Kediri	jiwa	827	1472	1687	3645	-
Jumlah Penduduk Datang ke Kota Kediri	jiwa	5392	4663	4051	4010	-
Jumlah Penduduk Pindah dari Kota Kediri	jiwa	3873	3655	3614	3831	-

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Jumlah penduduk lahir, mati, datang dan pindah di Kota Kediri, selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah penduduk yang datang ke Kota Kediri lebih banyak dari jumlah penduduk lahir, mati dan pindah, meskipun menempati posisi tertinggi namun jumlahnya mengalami penurunan sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

2.1.4.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Kediri memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif

Komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2018-2022 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

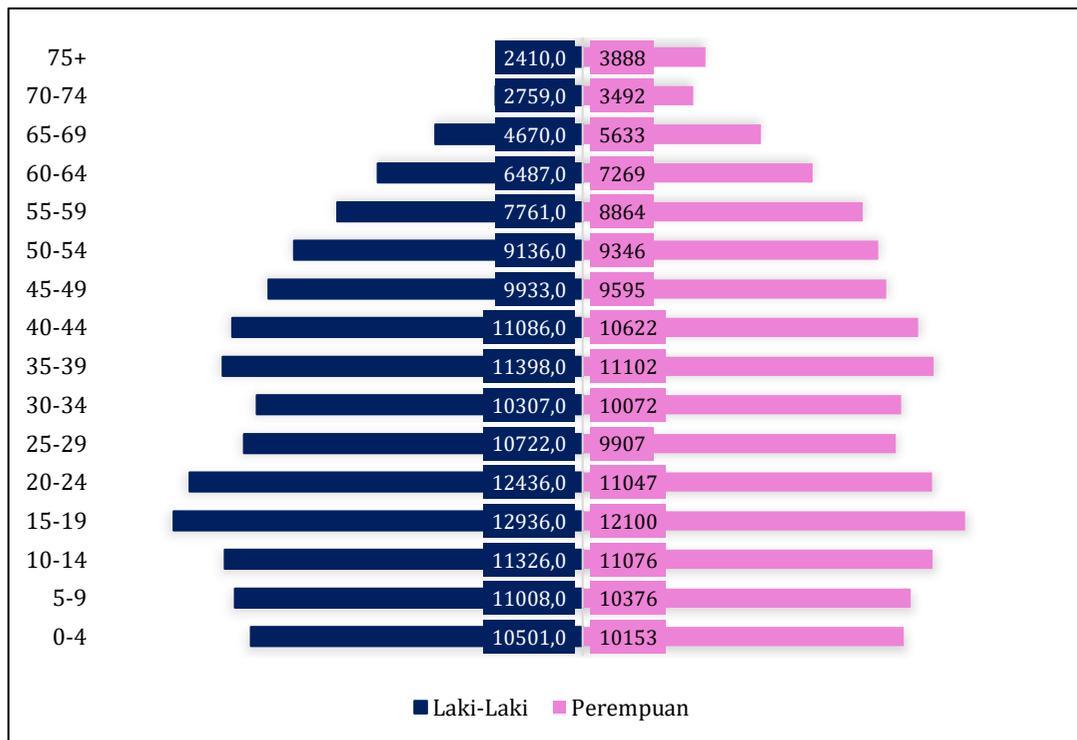
Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Kediri Tahun 2018-2022

Kelompok Usia	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
0-4	jiwa	22.952	23.095	20.878	20.712	20.654
5-9	jiwa	22.083	22.220	21.745	21.577	21.384
10-14	jiwa	20.987	21.119	22.531	22.443	22.402
15-19	jiwa	26.465	26.630	25.453	25.219	25.036
20-24	jiwa	26.370	26.532	23.948	23.712	23.483
25-29	jiwa	23.428	23.572	20.836	20.721	20.629
30-34	jiwa	22.575	22.715	20.506	20.443	20.379
35-39	jiwa	20.800	20.931	22.542	22.494	22.500
40-44	jiwa	21.478	21.615	21.736	21.744	21.708
45-49	jiwa	19.995	20.125	19.109	19.303	19.528
50-54	jiwa	18.414	18.537	18.030	18.268	18.482
55-59	jiwa	13.747	13.843	15.835	16.225	16.625
60-64	jiwa	9.425	9.491	12.924	13.335	13.756
65-69	jiwa	6.452	6.498	9.472	9.896	10.303
70-74	jiwa	4.785	4.819	5.512	5.866	6.251
75+	jiwa	5.626	5.667	5.739	6.004	6.298
Jumlah Penduduk Kota Kediri	jiwa	285.582	287.409	286.796	287.962	289.418

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Penduduk Kota Kediri selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Kota Kediri pada tahun 2022 tercatat berjumlah 289.418 jiwa, naik sebanyak 3.836 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan usia di Kota Kediri didominasi oleh usia produktif. Sedangkan berdasarkan piramida penduduk Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 6 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2022



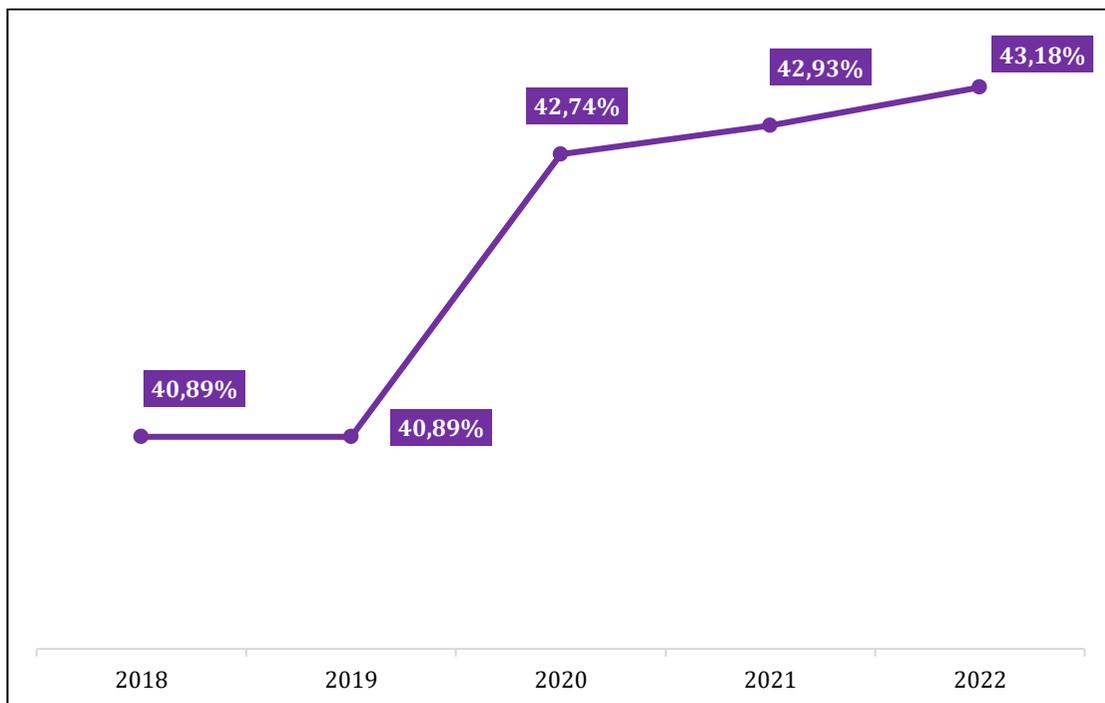
Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Penduduk Kota Kediri tahun 2022 usia produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 202.126 jiwa atau sekitar 69,84%, sedangkan jumlah penduduk usia non produktif hanya 87.292 jiwa atau 30,16%. Kondisi ini sangat menguntungkan karena penduduk usia produktif berpotensi sebagai modal pembangunan. Jumlah penduduk usia muda lebih banyak bila dibandingkan jumlah penduduk usia tua, bila digambarkan dalam bentuk piramida penduduk masuk dalam kategori piramida ekspansif atau piramida penduduk muda.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan sebuah ukuran yang mencerminkan seberapa besar beban penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan ≥ 65 tahun). Semakin tinggi persentase tingkat ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Rasio ketergantungan Kota Kediri selama lima tahun terakhir sebagai berikut.

Grafik 2. 7 Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2022

Rasio ketergantungan Kota Kediri tahun 2022 sebesar 43,18% , artinya bahwa di tahun 2022 setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan atau tidak produktif.

2.1.4.3 Penduduk Menurut Agama

Persebaran penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan agama yang dianut di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

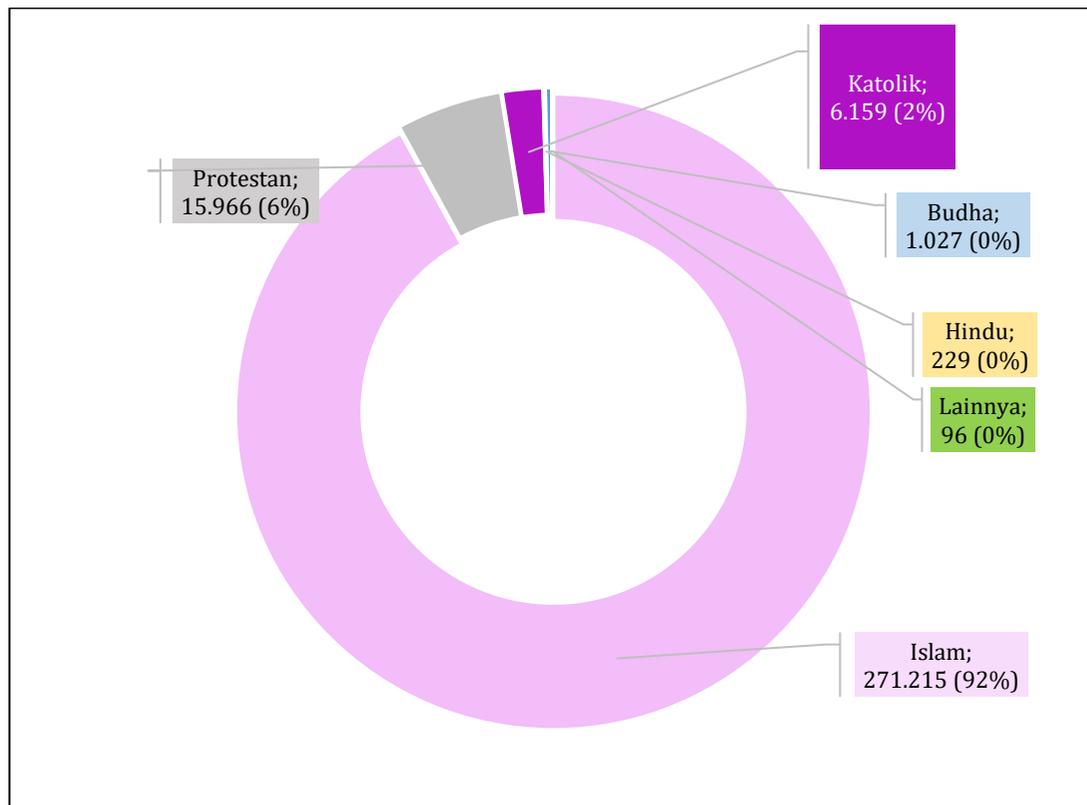
Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Kediri Tahun 2018-2022

Kecamatan/Agama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kecamatan Mojoroto						
Islam	jiwa	105.442	106.687	106.409	107.058	108.317
Protestan	jiwa	3.237	3.283	3.270	3.285	3.293
Katolik	jiwa	2.391	2.370	2.354	2.333	2.289
Hindu	jiwa	112	118	118	114	109
Budha	jiwa	73	76	74	68	67
Lainnya	jiwa	11	11	12	11	12
Kecamatan Kota						
Islam	Jiwa	78.792	78.776	77.588	77.439	77.706
Protestan	Jiwa	8.529	8.426	8.258	8.131	8.069
Katolik	Jiwa	3.116	3.080	3.014	2.965	2.954
Hindu	Jiwa	51	52	54	67	64
Budha	Jiwa	902	868	842	824	805
Lainnya	Jiwa	74	74	77	69	64
Kecamatan Pesantren						
Islam	Jiwa	84.136	85.251	84.361	84.464	85.192
Protestan	Jiwa	4.752	4.737	4.685	4.617	4.604
Katolik	Jiwa	907	910	920	921	916
Hindu	Jiwa	51	51	48	57	56
Budha	Jiwa	168	160	156	154	155
Lainnya	Jiwa	24	20	22	20	20

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Sedangkan persentase penduduk menurut agama yang dianut di Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 8 Persentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kota Kediri Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Mayoritas penduduk di Kota Kediri memeluk agama Islam, yaitu mencapai 92% atau 271.215 jiwa. Penduduk beragama Protestan mencapai 6% atau 15.966 jiwa. Penduduk beragama Katolik mencapai 2% atau 6.159 jiwa. Selain itu terdapat penduduk beragama Hindu, Budha, dan lainnya. Keberagaman agama di Kota Kediri ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan dan dipertahankan agar dapat hidup dengan harmonis

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah guna menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya yang akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini.

2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

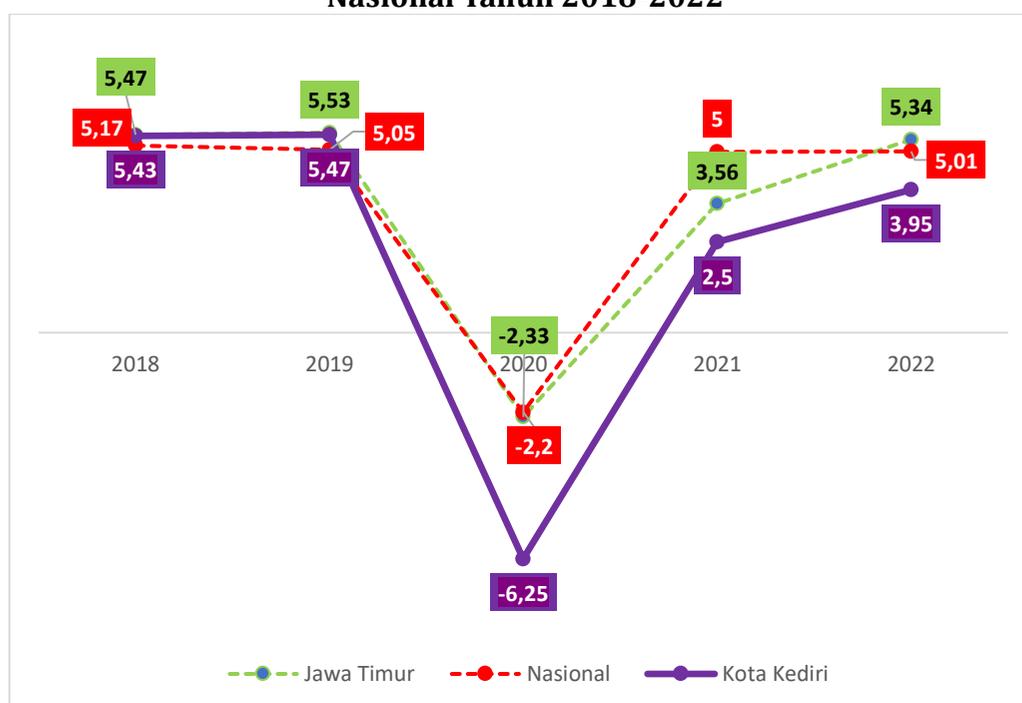
Salah satu unsur penting yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan adalah kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ingin dicapai oleh setiap daerah selain meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, juga manfaatnya harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks gini, ketimpangan, tingkat pengangguran, serta capaian indeks pembangunan manusia (IPM).

Terdapat beberapa fokus yang ada dalam komponen kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.

Grafik 2.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

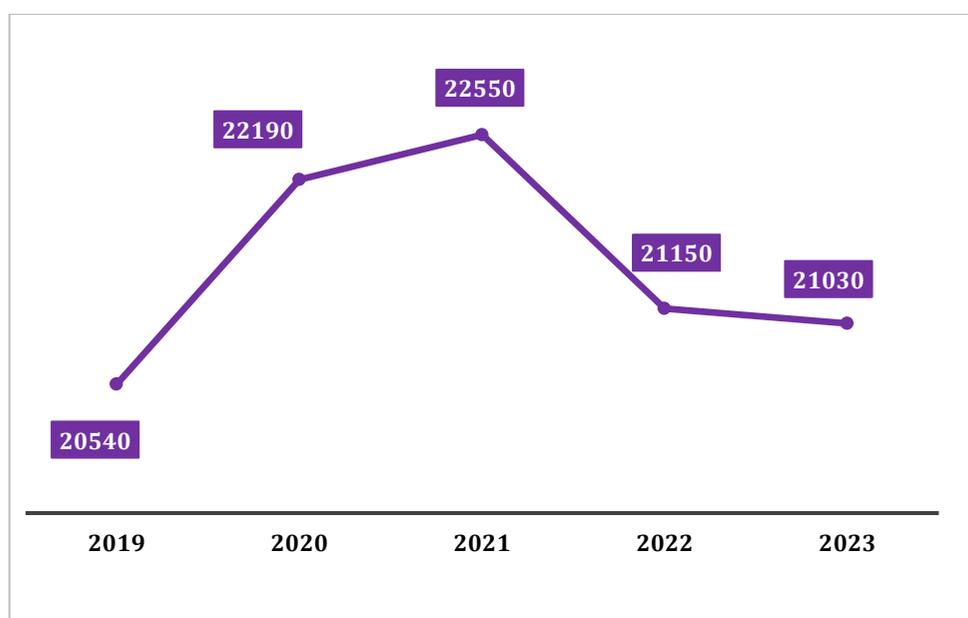
Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri mengalami kondisi fluktuatif atau belum stabil. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,43%, selanjutnya naik pada tahun 2019 menjadi 5,47%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi -6,25%, jauh di bawah angka pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Penurunan ini terjadi secara keseluruhan baik di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, maupun Nasional berada di angka minus disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Setelah itu, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik menjadi 2,5% dan pada tahun 2022 berada di angka 3,95%. Pada tahun

2020 hingga tahun 2022, Kota Kediri memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Maka dari itu, masih diperlukan kebijakan dan program-program yang mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.

2.2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kota Kediri, maka diperlukan upaya pengukuran terhadap jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, garis kemiskinan, serta indeks gini. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Kediri pada tahun 2019-2023.

Grafik 2. 10 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Kediri Tahun 2019 – 2023



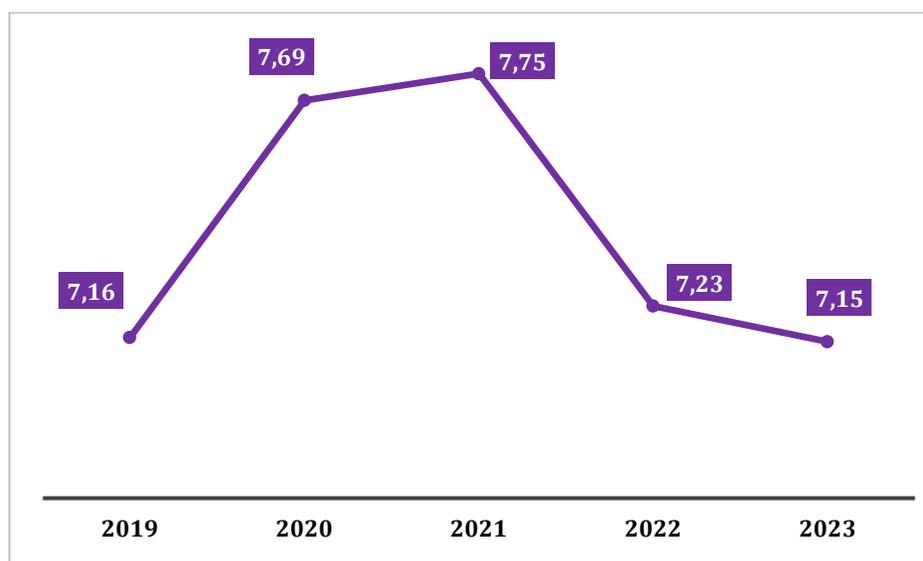
Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

Jumlah penduduk miskin di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif. Dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Kediri berjumlah 20.540. Namun di tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan yang cukup tajam menjadi 22.190 dan 22.550 yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengguncang ekonomi Kota Kediri serta menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin. Namun demikian di tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Kediri mengalami penurunan menjadi 21.150 jiwa, berlanjut turun Kembali di tahun 2023 menjadi 21.030 jiwa. Kondisi

ini seiring dengan program stimulasi pemulihan ekonomi dampak pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri.

Persentase penduduk miskin menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berikut adalah grafik yang menunjukkan persentase penduduk miskin di Kota Kediri tahun 2019-2023.

Grafik 2. 11 Persentase Penduduk Miskin di Kota Kediri Tahun 2019 – 2023



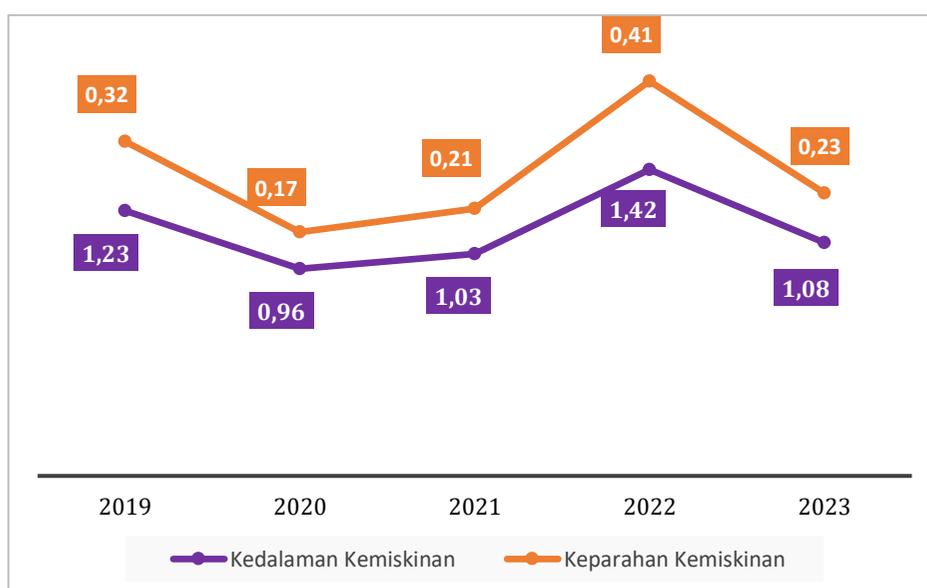
Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

Persentase penduduk miskin di Kota Kediri tahun 2019-2023 cenderung bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Kota Kediri mencapai angka 7,16%. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 persentase penduduk miskin di Kota Kediri mengalami kenaikan tajam yaitu berada di angka 7,69% dan 7,75% yang disebabkan karena dampak pandemic covid 19 yang melumpuhkan perekonomian dan meningkatkan kemiskinan di Kota Kediri. Kemudian di tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kota Kediri mengalami penurunan tajam menjadi di angka 7,23%, berlanjut turun Kembali di tahun 2023 menjadi di angka 7,15%. Hal ini seiring dengan program yang berfokus pada pemulihan ekonomi dampak pandemik.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi kemiskinan dari dimensi ekonomi selain dengan melihat capaian dan perkembangan jumlah maupun persentase penduduk miskin, juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Kediri tahun 2019-2023.

Grafik 2. 12 Tingkat Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Kota Kediri Tahun 2019 - 2023

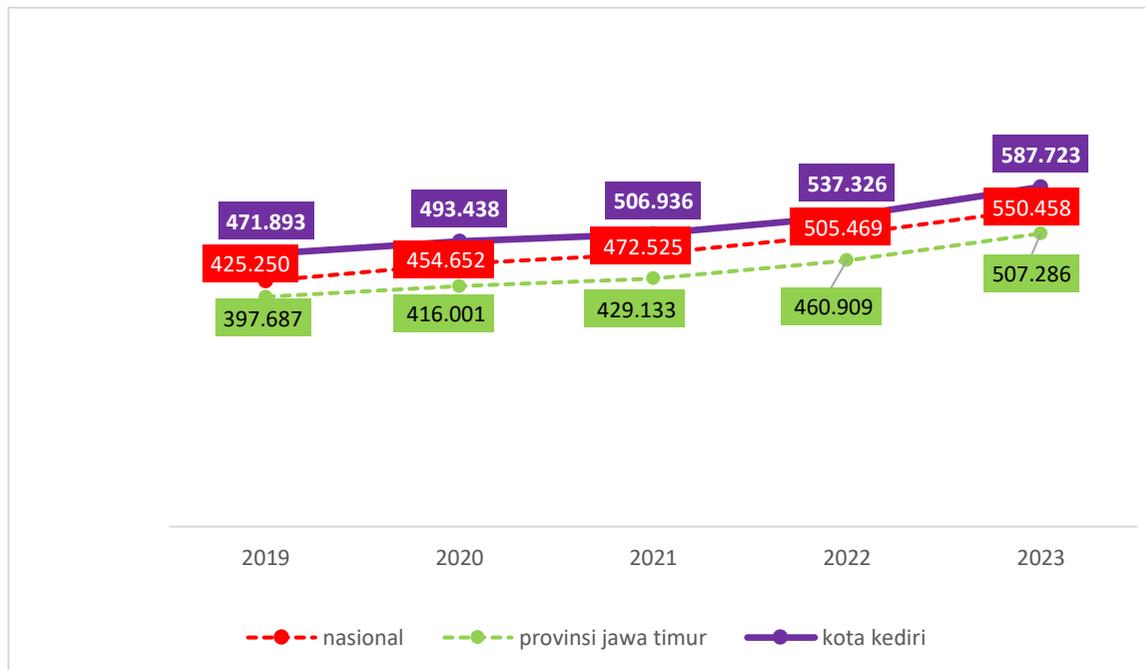


Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

Tahun 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Kediri sebesar 1,03, lebih tinggi 0,07 poin dibanding tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,39 poin menjadi 1,42, namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,08. Sedangkan pada Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada tahun 2021 Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kota Kediri menunjukkan angka 0,21 mengalami peningkatan sebesar 0,04 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20 poin menjadi 0,41, dan di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,23.

Guna menentukan masyarakat dengan kategori miskin, maka diperlukan pengukuran dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berikut adalah grafik yang menunjukkan garis kemiskinan Kota Kediri tahun 2019-2023.

Grafik 2. 13 Garis Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2019 - 2023

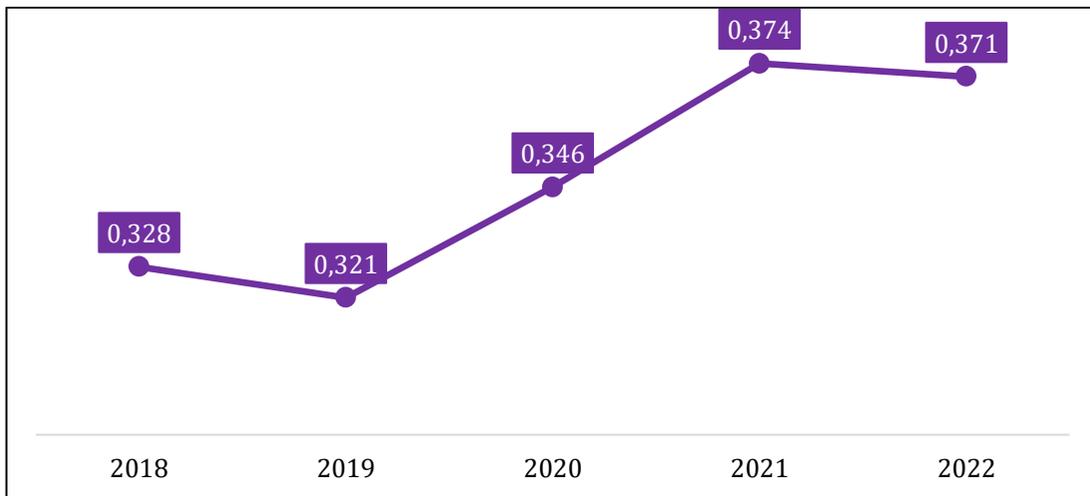


Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Garis kemiskinan Kota Kediri berada di atas garis kemiskinan Jawa Timur dan Nasional. Adapun garis kemiskinan Kota Kediri di tahun 2023 berada di angka Rp.587.723,-. Sedangkan garis kemiskinan Nasional dan Jawa Timur pada tahun 2023 berada di angka Rp.550.458,- dan Rp.507.286,-. Garis Kemiskinan Kota Kediri pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 juga konsisten mengalami kenaikan. Total kenaikan yang terjadi selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2023 mencapai Rp.115.830,-.

Guna mengetahui kondisi ekonomi dan kemiskinan di suatu daerah, maka diperlukan pula pengukuran yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pengukuran indeks Gini merupakan suatu salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Besaran indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika Gini Ratio mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati angka Satu. Berikut adalah data yang menunjukkan indeks gini Kota Kediri tahun 2018-2022.

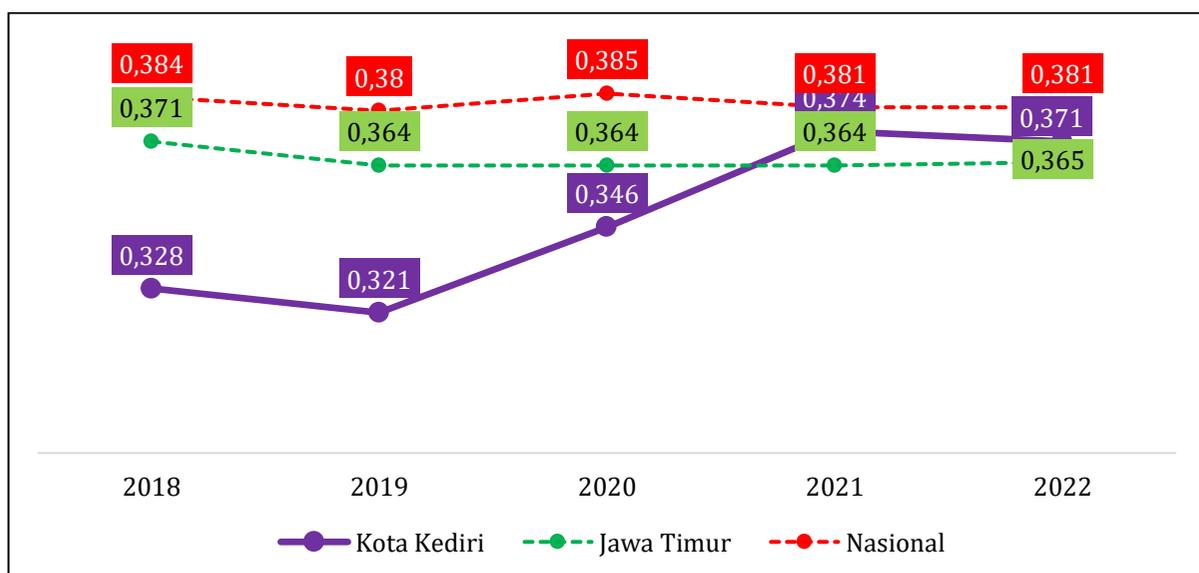
Grafik 2. 14 Indeks Gini Kota Kediri Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Capaian Indeks Gini Kota Kediri cukup fluktuatif. Indeks Gini Kota Kediri pada tahun 2018 sebesar 0,328 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,321. Kemudian, pada tahun 2020 indeks Gini Kota Kediri terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 0,374. Setelah itu indeks gini Kota Kediri pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,371. Guna mengetahui perbandingan capaian indeks Gini Kota Kediri dengan wilayah lain maka diperlukan perbandingan capaian indeks Gini Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan indeks gini Kota Kediri dengan Jawa Timur, dan nasional pada tahun 2018-2022.

Grafik 2. 15 Perbandingan Indeks Gini Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Indeks Gini Kota Kediri pada tahun 2018-2020 lebih rendah dibandingkan dengan indeks Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun tersebut Kota Kediri terdapat pemerataan pendapatan penduduk yang lebih proporsional dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini merupakan

gambaran bahwa pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dinikmati oleh penduduk Kota Kediri, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang berpenghasilan rendah. Sedangkan indeks Gini Kota Kediri pada tahun 2021-2022 lebih tinggi dari indeks Gini Provinsi Jawa Timur, tetapi masih lebih rendah dari indeks Gini Nasional.

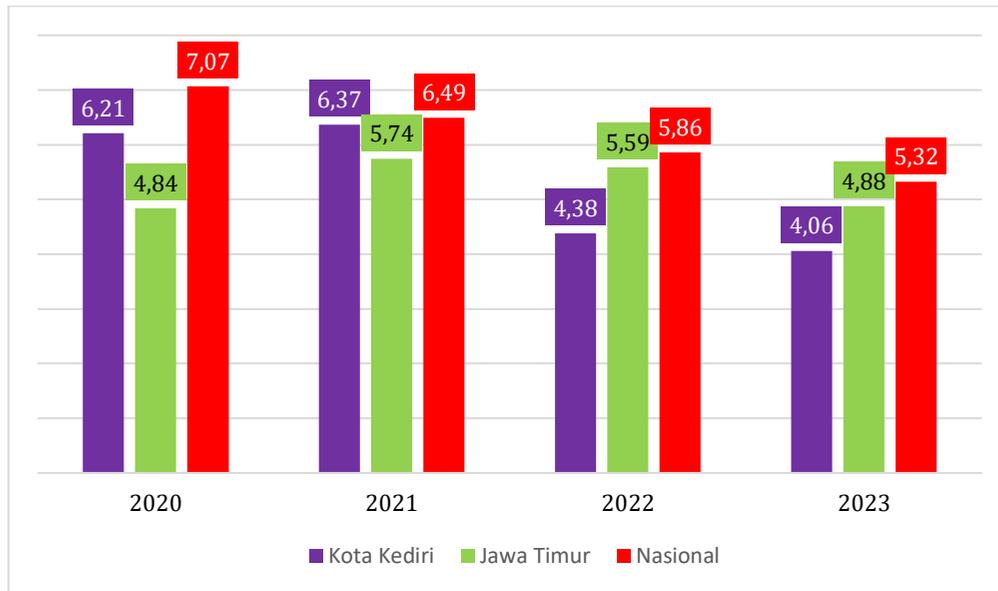
Pemerintah Kota Kediri tetap memerlukan upaya untuk mengendalikan ketimpangan pendapatan agar tidak semakin membesar serta perlu mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Jika tidak diantisipasi akan dapat memperlambat upaya pengentasan kemiskinan, bahkan pada tingkat ketimpangan tertentu dapat meningkatkan kemiskinan, meskipun perekonomian mengalami pertumbuhan yang pesat.

2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum pada tahun 2020-2023 tingkat pengangguran terbuka di Kota Kediri mengalami trend yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 sebesar 6,21 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,37 persen sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi global melemah, sehingga banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Disamping itu, banyak perusahaan baru yang melakukan efisiensi tenaga kerja sebagai dampak Pandemi Covid-19 sehingga terjadi penurunan jumlah lowongan kerja.

Pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2022, nilai TPT mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 4,38 persen, dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 4,06 persen. Penurunan nilai TPT tersebut menggambarkan bahwa kondisi perekonomian Kota Kediri telah kembali menggeliat, bahkan nilai TPT tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan nilai TPT tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19 yang sebesar 4,22 persen.

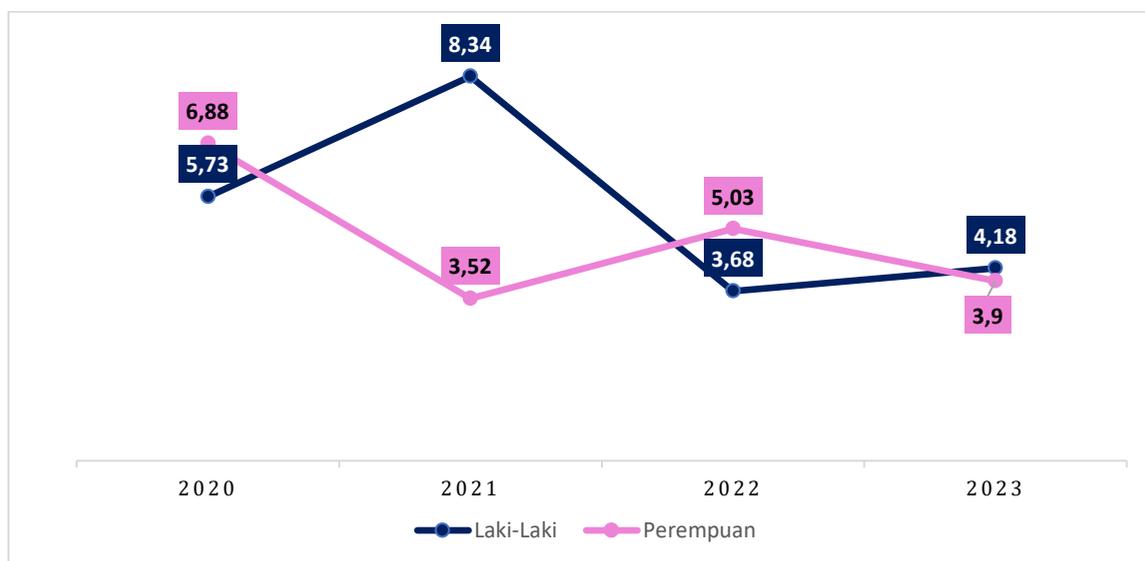
Grafik 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa TPT Kota Kediri selama pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 berada di atas TPT Jawa Timur namun masih berada dibawah TPT nasional. Setelah pandemi Covid-19 tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Kota Kediri berhasil menurunkan nilai TPT hingga berada dibawah TPT Jawa Timur dan Nasional. Tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin pada 2020-2023 di Kota Kediri cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2020 TPT laki-laki sebesar 5,73 persen, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 8,34 persen sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, pada tahun 2022 pasca pandemi Covid-19 TPT laki-laki mengalami penurunan yang signifikan, yaitu 3,68 persen.

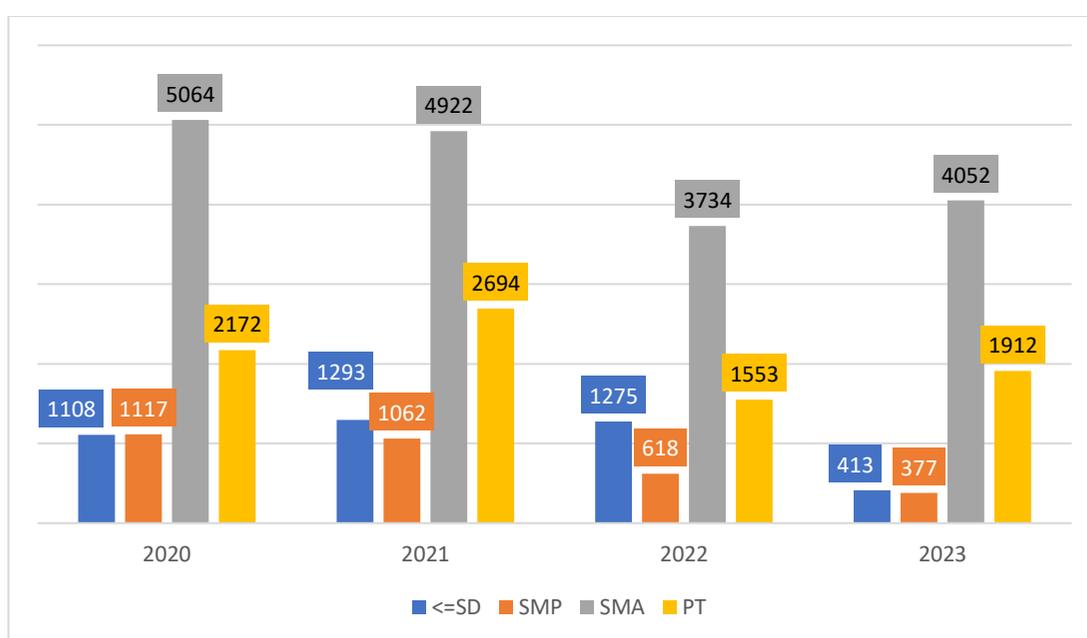
Grafik 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2020-2023



Sumber: BPS, 2023

Hal yang sedikit berbeda terjadi pada TPT perempuan, dimana pada tahun 2020 sebesar 6,88 persen, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga sebesar 3,52 persen sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19, yang tadinya laki-laki sebagai tumpuan ekonomi keluarga tetapi selama masa pandemi perempuan menjadi tumpuan ekonomi keluarga dengan aktivitas berdagang secara daring. Setelah masa pandemi pada tahun 2022, TPT perempuan kembali mengalami peningkatan hingga sebesar 5,03 persen, disebabkan laki-laki kembali menjadi tumpuan ekonomi keluarga sehingga perempuan mulai meninggalkan aktivitas perdagangan secara daring. Pada tahun 2023, TPT perempuan kembali mengalami penurunan hingga sebesar 3,9 persen.

Grafik 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2020-2023



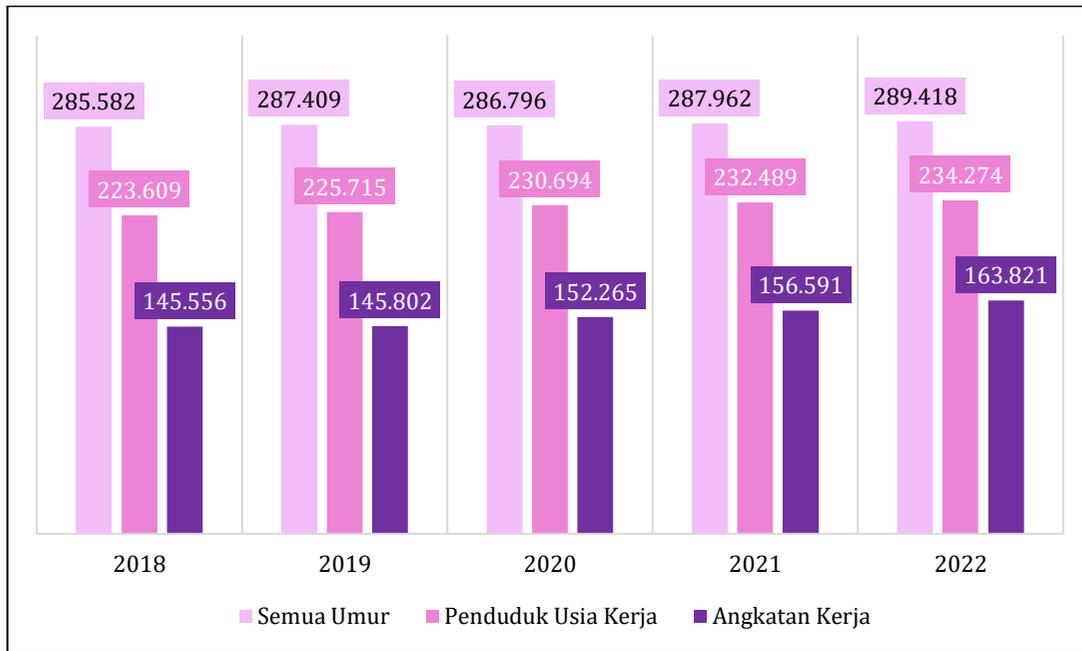
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik di atas, menurut pendidikan pada tahun 2020-2023, pendidikan setingkat SMA atau sederajat mendominasi TPT Kota Kediri. Di sisi lain, pendidikan setingkat SD dan SMP atau sederajat dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka relatif tinggi. Oleh sebab itu, para pemberi kerja atau calon pemberi kerja dapat mempertimbangkan untuk membuka lapangan kerja semaksimal mungkin sehingga diharapkan dapat menurunkan nilai TPT.

2.2.1.4 Ketenagakerjaan

Berdasarkan definisi BPS, tenaga kerja (*man power*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terbagi menjadi dua golongan, yakni bekerja dan pengangguran. Kondisi ketenagakerjaan di Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 19 Jumlah Penduduk Semua Umur, Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja Kota Kediri, Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah Angkatan kerja Kota Kediri mengalami kenaikan seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia kerja di Kota Kediri. Jumlah penduduk usia Jumlah Angkatan kerja Kota Kediri tahun 2022 mencapai 163.821 jiwa, terjadi peningkatan mencapai 7.230 jiwa dibandingkan tahun 2021 mencapai 156.591 jiwa. Adanya peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan peran dalam pembangunan ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Kediri.

Tabel 2. 23 Indikator Ketenagakerjaan Kota Kediri Tahun 2018- 2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas)	Jiwa	225.715	230.694	232.489	234.274	231.562
Angkatan Kerja	Jiwa	145.802	152.265	156.591	163.821	166.321
Bekerja	Jiwa	139.645	142.804	146.620	156.641	159.567
Pengangguran	Jiwa	6.157	9.461	9.971	7.180	6.754
Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	79.913	78.429	75.898	70.453	65.241
Sekolah	Jiwa	27.020	26.812	21.760	23.612	
Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	41.653	42.704	44.472	40.780	
Lainnya	Jiwa	11.218	8.913	9.666	6.061	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,6	66	67,35	69,93	71,83

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,22	6,21	6,37	4,38	4,06
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	95,78	93,79	93,63	96,72	
Upah Minimum Kota (UMK)	Rupiah	2.060.925	2.060.925	2.085.925	2.118.116	

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Kediri tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK Kota Kediri tahun 2022 sebesar 69,93 persen, meningkat 2,58 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 67,35 persen. Meningkatnya TPAK di tahun 2022 menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk ke pasar tenaga kerja (termasuk mereka yang sudah berstatus bekerja dan masih mencari pekerjaan).

Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2022 di Kota Kediri sebanyak 156.641 orang (66,86 persen dari total penduduk usia kerja), bertambah 10.021 orang dari tahun 2021, Ini mengindikasikan bahwa sudah banyak angkatan kerja yang terserap ke pasar kerja. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan, hal ini tidak sebanding dengan kenaikan angkatan kerja. Artinya jumlah pengangguran akan tetap meningkat di tahun 2022.

2.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Terhitung sejak tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah metode penghitungan IPM yang disebabkan karena ada beberapa indikator yang dianggap tidak relevan sebagai dasar penghitungan. Perubahan tersebut terdapat pada indikator *Angka Melek Huruf* yang tidak lagi digunakan sebagai salah satu indikator pendidikan, kemudian digantikan dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah. Perubahan yang lain adalah PDRB per kapita tidak lagi digunakan sebagai dasar penghitungan indeks daya beli, yang digantikan oleh Produk Domestik Regional Neto (PDRN) perkapita, karena dianggap lebih akurat dalam menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Terdapat tiga dimensi yang membentuk adanya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH)
2. Pengetahuan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran.

Guna menentukan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, Badan Pusat Statistik Indonesia membuat batasan minimal dan maksimal kriteria komponen Pembangunan Manusia yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24 Kriteria Komponen Pembangunan Manusia Berdasarkan BPS

Dimensi	Indikator	Min.	Max.
Kesehatan	Umur Harapan Hidup saat lahir (Tahun)	20	85
Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	0	18
	Rata-rata Harapan Sekolah (Tahun)	0	15
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)	1.007.436 ¹	26.572.352 ²

Sumber: *Booklet IPM Metode Baru*

Selain itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah mengembangkan dan menetapkan Konsep Pembangunan Manusia peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

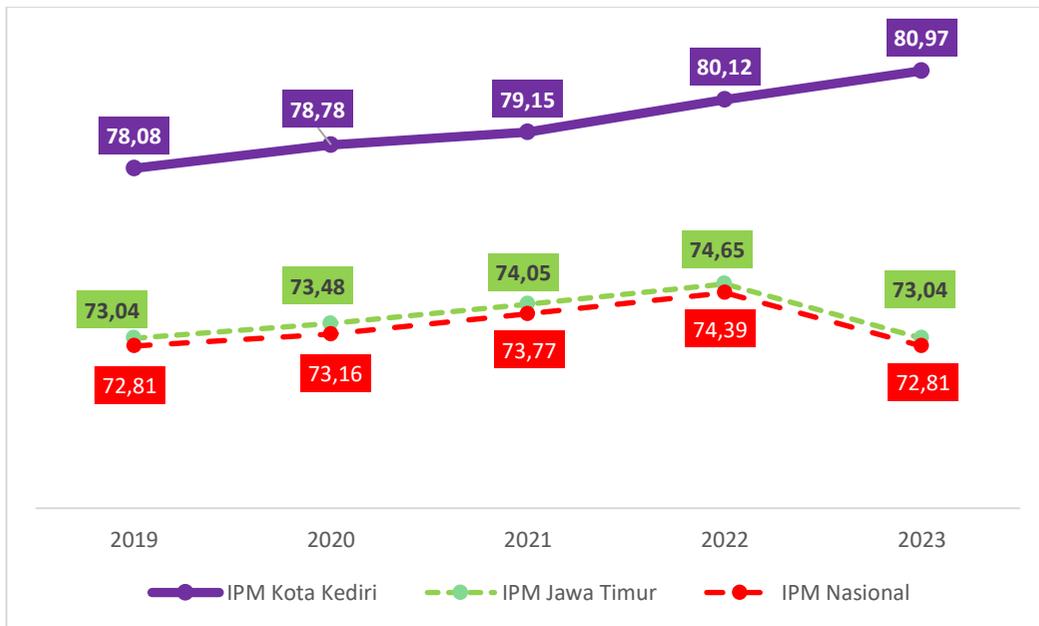
1. Sangat Tinggi : IPM >80
2. Tinggi : IPM antara 70 < IPM <80
3. Sedang : IPM antara 60 < IPM <70
4. Rendah : IPM < 60

Perkembangan nilai IPM Kota Kediri Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

¹ Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

² Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Grafik 2. 20 Perkembangan IPM Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Selama kurun waktu lima tahun perkembangan IPM Kota Kediri konsisten mengalami kenaikan. Adapun kenaikan yang terjadi selama kurun waktu lima tahun mencapai 2,89 poin, dimana di tahun 2019 nilai IPM Kota Kediri berada di angka 78,08 kemudian di tahun 2023 nilai IPM Kota Kediri berada di angka 80,97, dengan kategori “Sangat Tinggi”. Pada tahun 2023, nilai IPM Jawa Timur berada di angka 73,04, sedangkan nilai IPM Nasional berada di angka 72,81. Jika dibandingkan dengan nilai IPM Jawa Timur dan Nasional, IPM Kota Kediri jauh lebih unggul diatas nilai IPM Nasional dan Jawa Timur. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat/penduduk Kota Kediri menjadi lebih baik.

Terdapat beberapa komponen dalam pengukuran IPM. Pengukuran IPM meliputi 3 dimensi, diantaranya adalah Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Dimensi Pendidikan, dan Dimensi Standar Hidup Layak. Berikut adalah uraian yang menjelaskan mengenai dimensi yang terdapat dalam pengukuran IPM.

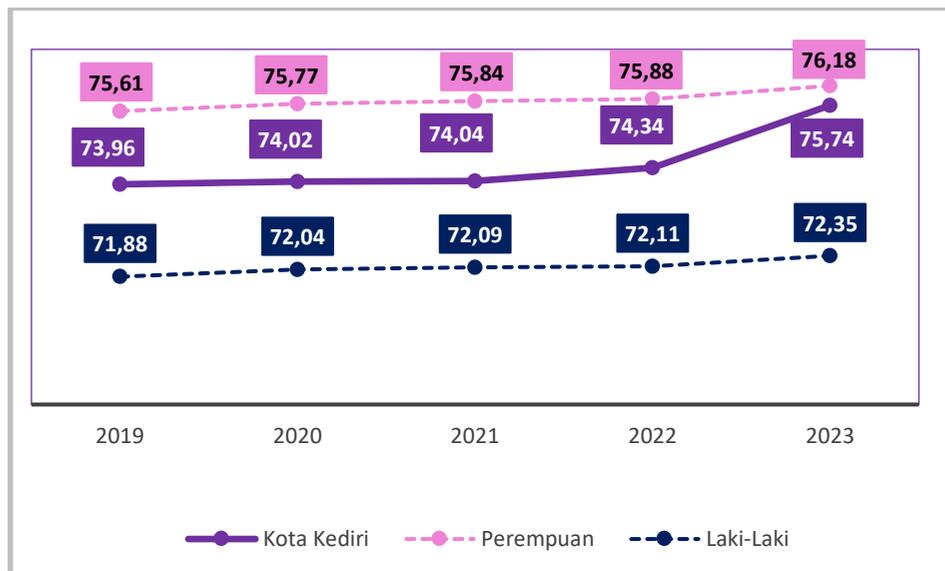
Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1) Dimensi umur panjang dan sehat

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Umur Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Kota Kediri selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 2. 21 Perkembangan Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2019-2023



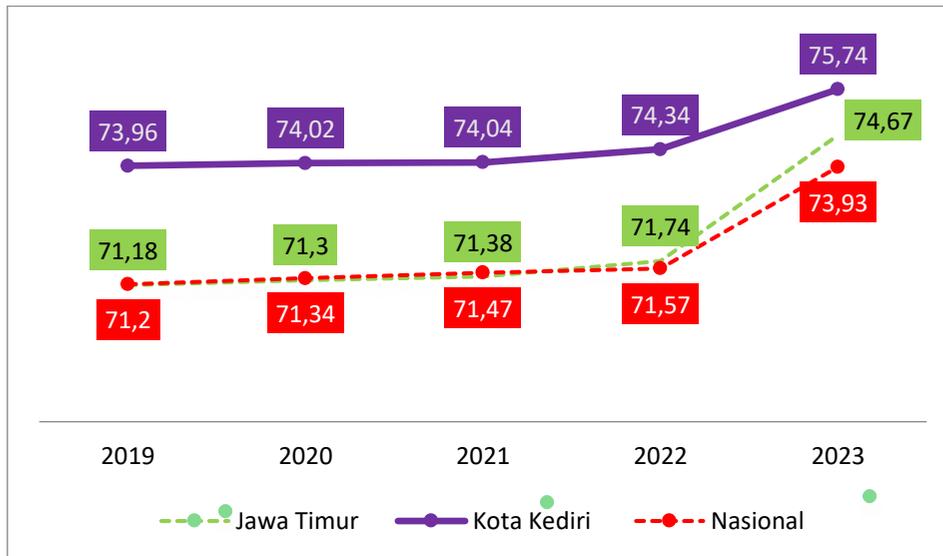
Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

UHH Kota Kediri pada tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki tren naik dengan kenaikan yang signifikan dan merupakan kenaikan tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan UHH tertinggi terjadi di tahun 2023 yaitu naik 1,4 menjadi 75,74. Sedangkan kenaikan UHH terendah di tahun 2021 yaitu naik 0,02 menjadi 74,04. Artinya, umur harapan hidup bayi yang baru lahir pada tahun 2023 dapat berumur sampai 75 tahun. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Tahun 2023, UHH perempuan 76 tahun di atas UHH laki-laki 72 tahun.

Dilansir dari beberapa literasi termasuk data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penyebabnya adalah laki-laki lebih banyak terpapar polutan, salah satunya dipengaruhi rokok. Sebanyak 48 persen laki-laki di Indonesia merupakan perokok aktif, sehingga angka risiko kematian lebih banyak pada laki-laki. Akibatnya UHH laki-laki menjadi kontributor yang menyebabkan rendahnya UHH Kota Kediri. Terdapat banyak program untuk meningkatkan UHH laki-laki, diantaranya Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Gerakan Masyarakat hidup sehat, namun implementasi di masyarakat yang masih belum optimal. Diharapkan dengan meningkatnya UHH laki-laki maka akan meningkatkan UHH Kota Kediri secara langsung.

Untuk mengetahui capaian Kota Kediri dalam meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat, maka diperlukan perbandingan UHH Kota Kediri dengan UHH provinsi dan nasional. Pengukuran perbandingan ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah Kota Kediri termasuk daerah yang berkontribusi menaikkan UHH provinsi dan nasional. Berikut grafik perbandingan UHH Kota Kediri dengan UHH provinsi dan nasional.

Grafik 2. 22 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



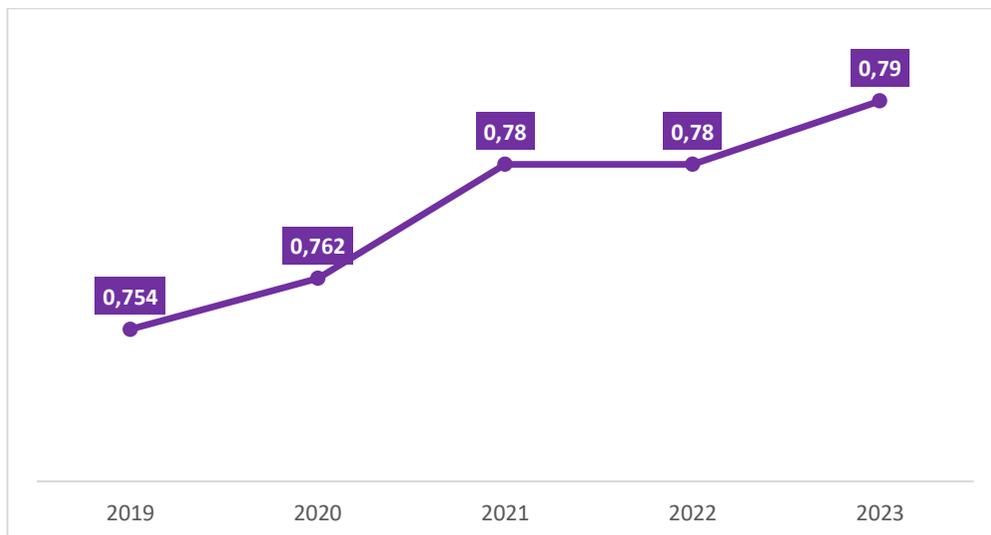
Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

UHH Kota Kediri sejak tahun 2019 hingga 2023 berada di atas UHH provinsi dan nasional. Nilai tersebut berada di atas nilai UHH nasional dan provinsi yaitu masing – masing sebesar 73,93 dan 74,67. Selisih angka cukup signifikan, dibandingkan UHH provinsi terpaut selisih 1,07 lebih tinggi, sedangkan dibanding nasional, selisih 1,81 lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Kediri merupakan salah satu kontributor dalam menaikkan angka UHH di tingkat provinsi maupun nasional.

2) Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan atau Indeks pendidikan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks pendidikan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Perkembangan Indeks pendidikan Kota Kediri selama 5 tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

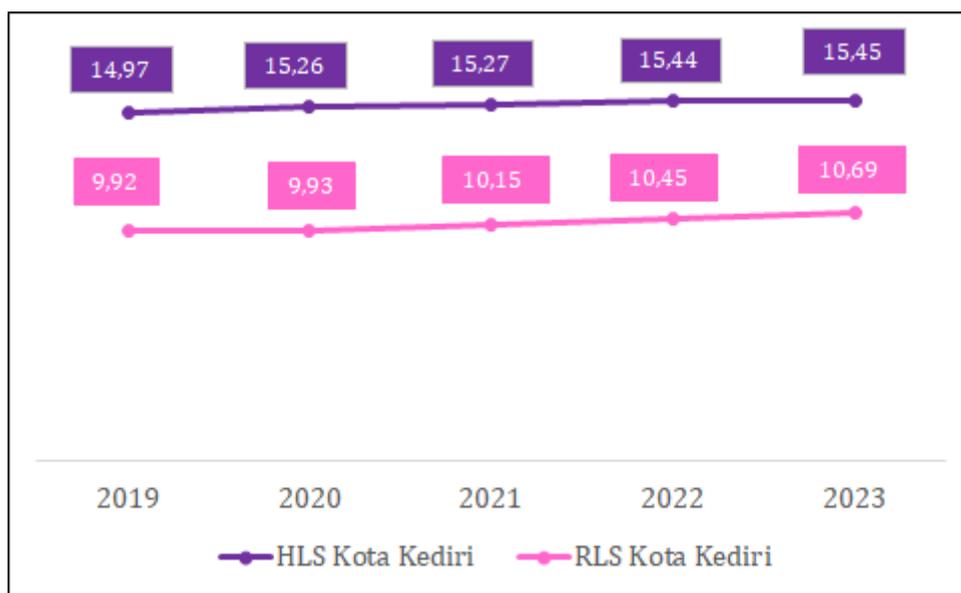
Grafik 2. 23 Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Sedangkan, perkembangan RLS dan HLS Kota Kediri selama 5 tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 24 Perkembangan RLS dan HLS Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

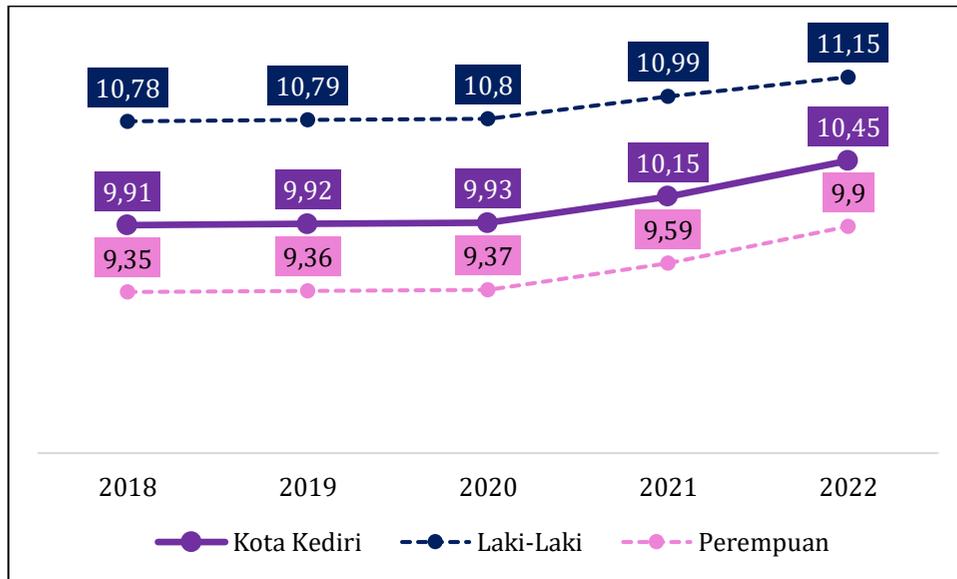
Capaian harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Kediri konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Capaian HLS Kota Kediri di tahun 2023 berada di angka 15,45. Kondisi ini menunjukkan bahwa harapan lamanya sekolah yang akan dirasakan oleh anak di masa mendatang di Kota Kediri adalah 15,45 tahun atau setara dengan lulus Diploma 3 atau sedang menempuh jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) semester 7. Sedangkan capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Kediri pada tahun 2023 berada di angka 10,69. Artinya penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata telah mencapai jenjang SMA (lebih tepatnya kelas 2 SMA).

Selanjutnya, perolehan RLS dan HLS perlu diuraikan guna mengetahui capaian berdasarkan jenis kelamin serta membandingkan capaian RLS dan HLS dengan wilayah lain yang selanjutnya termuat pada penjelasan sebagai berikut.

a. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penentuan Rata-Rata Lama Sekolah diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Formula angka rata-rata lama sekolah adalah 1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas dikali lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Kediri selama 5 tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini.

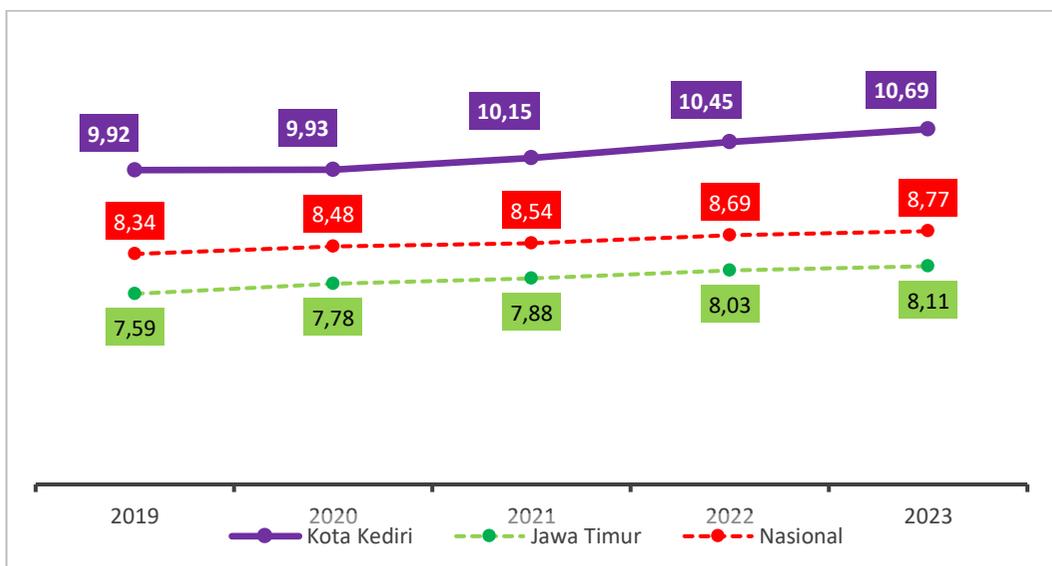
Grafik 2. 25 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk perempuan. Adapun capaian RLS penduduk laki-laki di Kota Kediri pada tahun 2022 berada di angka 11,15. Artinya penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata telah mencapai Pendidikan kelas 3 SMA. Sedangkan capaian RLS penduduk perempuan berada di angka 9,9. Artinya penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata telah mencapai Pendidikan kelas 1 SMA. Guna mengetahui perbandingan capaian RLS Kota Kediri dengan wilayah lain maka diperlukan pengukuran perbandingan rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Kediri dengan Jawa Timur dan nasional. Berikut adalah data yang menunjukkan perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Kediri dengan Jawa Timur dan nasional tahun 2018-2022:

Grafik 2. 26 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



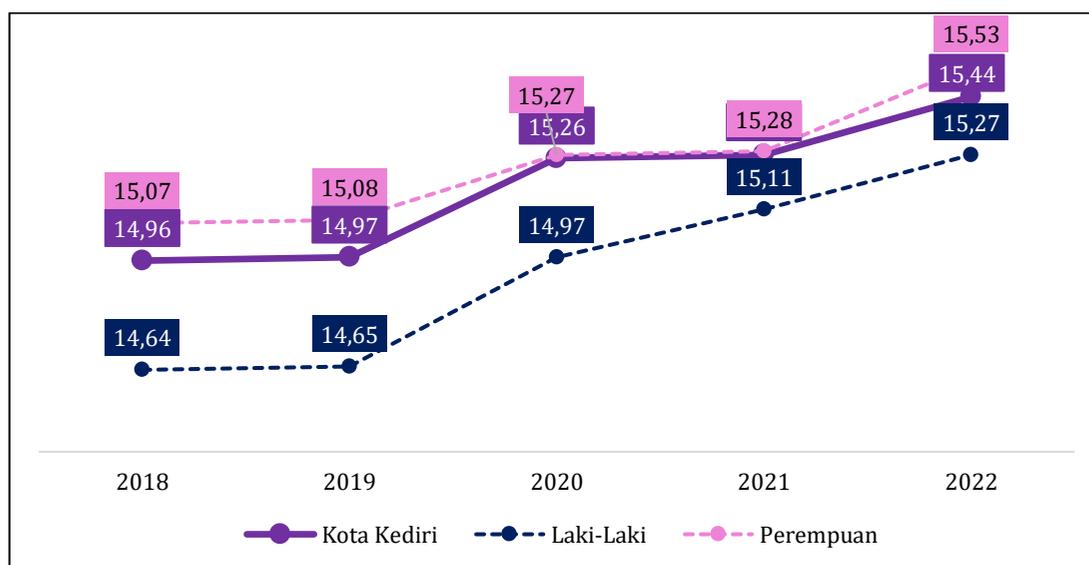
Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

RLS Kota Kediri sejak tahun 2019 hingga 2023 berada di atas RLS provinsi dan nasional. RLS Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai angka 10,69. Artinya penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata telah mencapai jenjang SMA (lebih tepatnya kelas 2 SMA). Nilai tersebut berada di atas nilai RLS nasional dan provinsi yaitu masing – masing sebesar 8,77 dan 8,11 (atau setingkat dengan jenjang SMP kelas 3). Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Kediri merupakan salah satu kontributor dalam menaikkan angka RLS provinsi dan nasional.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Kediri selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 2. 27 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2018-2022

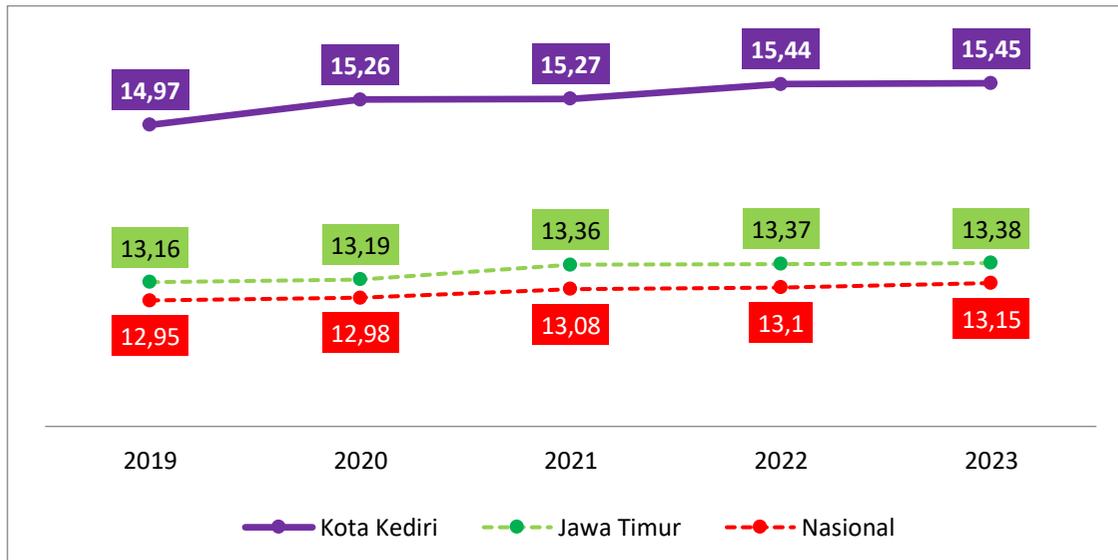


Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Harapan lama sekolah (HLS) penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan harapan lama sekolah (HLS) laki-laki. Capaian HLS perempuan berada di angka 15,53 atau setara dengan lulus Diploma 3 (D3) atau menempuh Pendidikan Strata 1 (S1) semester akhir. Sedangkan capaian HLS laki-laki berada di angka 15,27 atau setara dengan lulus Diploma 3 (D3) atau menempuh Pendidikan strata 1 (S1) semester akhir.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan capaian HLS Kota Kediri dengan wilayah lain maka diperlukan pengukuran perbandingan HLS Kota Kediri dengan Jawa Timur dan nasional. Berikut adalah data yang menunjukkan perbandingan harapan lama sekolah Kota Kediri dengan Jawa Timur dan nasional tahun 2018-2022.

Grafik 2. 28 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



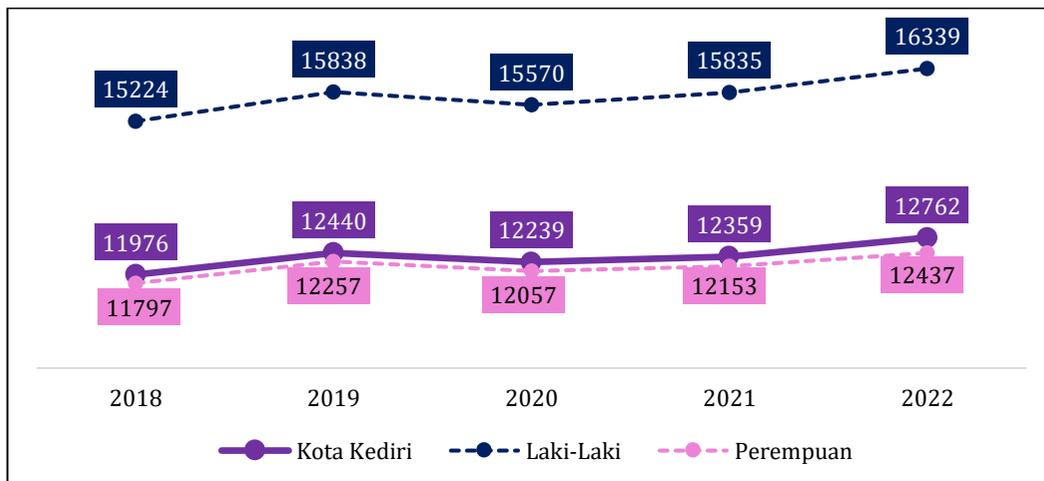
Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Kediri selama kurun waktu lima tahun konsisten mengalami peningkatan. Peningkatan ini mencapai 0,48 poin dari angka 14,97 di tahun 2019 menjadi 15,45 di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa harapan lamanya sekolah yang akan dirasakan oleh anak pada umum tertentu di masa mendatang di Kota Kediri adalah 15,45 tahun atau setara dengan Pendidikan Strata 1 (S1). Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Kediri ini berada diatas capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Timur dan nasional yang berada di angka 13,38 dan 13,15 atau setara dengan Pendidikan Diploma 2 (D-2). Peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Kediri ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kediri semakin menyadari pentingnya Pendidikan dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

3) Standar Hidup Layak

Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi standar hidup layak adalah dengan mengukur angka pengeluaran per-kapita yang disesuaikan. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Selanjutnya pengeluaran perkapita juga perlu diuraikan berdasarkan jenis kelamin guna mengetahui tingkat kesejahteraan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Berikut adalah data yang menunjukkan perkembangan pengeluaran perkapita berdasarkan jenis kelamin di Kota Kediri tahun 2018-2022:

Grafik 2. 29 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2018-2022

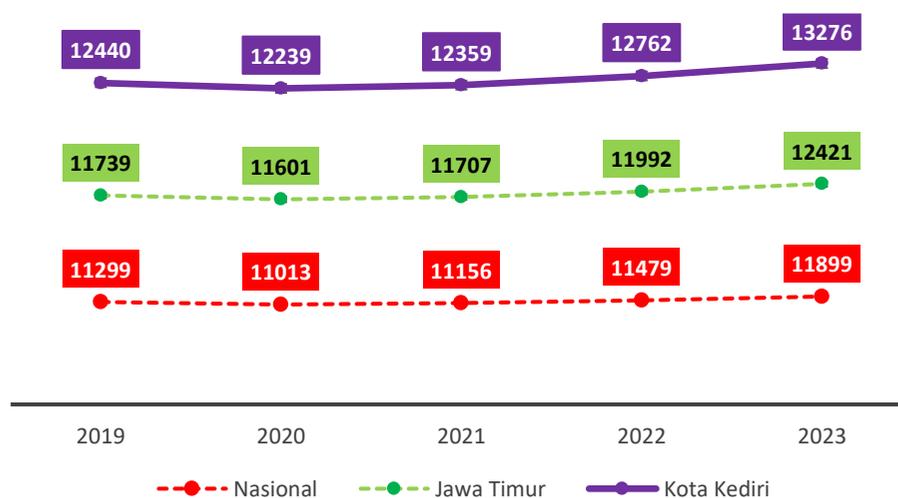


Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dari pengeluaran perkapita laki-laki. Pengeluaran perkapita laki-laki di tahun 2022 berada di angka Rp.16.639.000,-/tahun, sedangkan pengeluaran perkapita perempuan di tahun 2022 berada di angka Rp.12.437.000,-/tahun. Akibatnya pengeluaran perkapita perempuan menjadi kontributor yang menyebabkan rendahnya pengeluaran perkapita Kota Kediri. Oleh karena itu diperlukan adanya program untuk meningkatkan pengeluaran perkapita perempuan karena dengan menaikkan pengeluaran perkapita perempuan maka akan meningkatkan pengeluaran perkapita dan perekonomian Kota Kediri secara langsung.

Guna mengetahui perbandingan capaian pengeluaran perkapita Kota Kediri dengan wilayah lain, maka diperlukan pengukuran perbandingan pengeluaran perkapita Kota Kediri dengan Jawa Timur dan nasional. Berikut adalah data yang menunjukkan perbandingan pengeluaran perkapita Kota Kediri dengan Jawa Timur dan nasional tahun 2018-2022.

Grafik 2. 30 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Pengeluaran perkapita Kota Kediri berada diatas capaian pengeluaran perkapita Jawa Timur dan nasional. Pengeluaran Per Kapita Kota Kediri di tahun 2023 berada di angka Rp13.276.000,-, sedangkan pengeluaran perkapita Jawa Timur berada di angka Rp.12.421.000,-. Sementara capaian pengeluaran perkapita nasional berada di angka Rp.11.899.000,-.

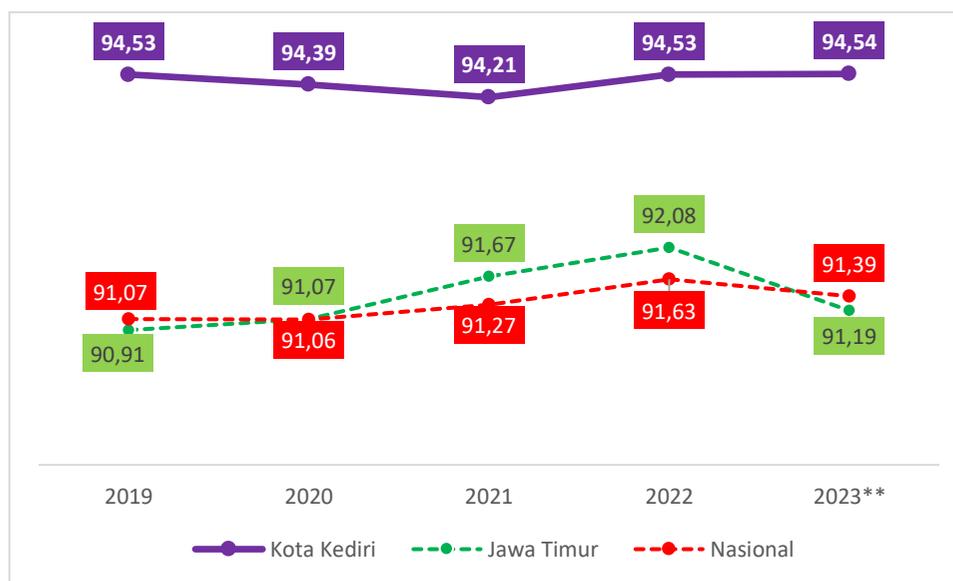
2.2.2.2 Pembangunan Gender

Pembangunan responsif gender merupakan pembangunan yang menciptakan keadilan dan pemerataan bagi seluruh penduduk. Keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilihat dari dimensi pendidikan, kesehatan dan pengeluaran melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga harus menciptakan keadilan dan pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk melihat kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat dicermati melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG).

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator IPG menunjukkan pencapaian kualitas pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. IPG dihitung dari IPM perempuan dibanding IPM laki-laki. Dengan kata lain IPG menggambarkan tingkat disparitas kualitas hidup laki-laki dibanding perempuan. Perkembangan capaian IPG Kota Kediri selama tahun 2019-2023 dibanding Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 31 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023), RPJMD Kota Kediri, RPJMD Provinsi Jatim & RPJMD Nasional Tahun 2020-2024

Ket : **Data Kota Kediri & Provinsi Jatim merupakan target 2023, data Nasional merupakan target 2024

Realisasi nilai IPG Kota Kediri tahun 2023 belum dirilis oleh BPS, namun demikian target IPG yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 94,54% hampir tercapai di tahun 2022 sebesar 95,53% dengan kesenjangan capaian hanya 0,01%. IPG Kota Kediri tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 0,09 poin. Dominasi 50,4% penduduk perempuan di Kota Kediri pada tahun 2022 adalah potensi, sekaligus tantangan bagi pencapaian kesetaraan pembangunan yang tercermin dalam IPG. Meningkatnya angka IPG Kota Kediri pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan IPM perempuan lebih tinggi dibanding peningkatan IPM laki-laki. IPG Kota Kediri tahun 2022 menempatkan Kota Kediri pada Peringkat 8 tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

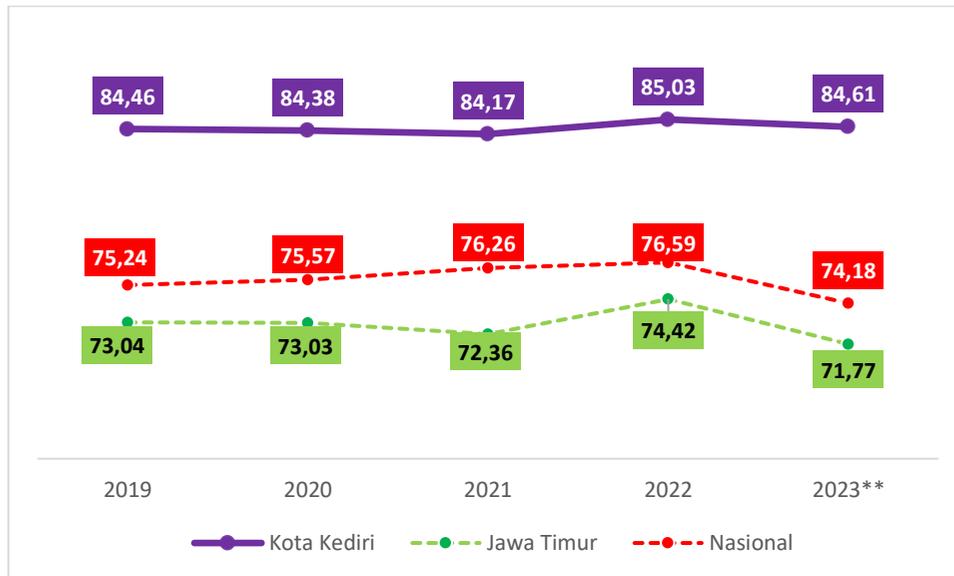
Data tersebut menunjukkan bahwa di Kota Kediri masih terdapat kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan Perempuan yang tercermin dari IPG Kota Kediri yang berada di angka 94,53. Meskipun berada di atas rata-rata Provinsi maupun Nasional tetapi masih menunjukkan bahwa manfaat dan hasil pembangunan untuk perempuan masih di bawah laki-laki.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari Pembangunan itu sendiri.

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator IDG menunjukkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di masyarakat, diukur dari proporsi keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Perkembangan capaian IPG Kota Kediri selama tahun 2019-2023 dibanding Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 32 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023), RPJMD Kota Kediri, RPJMD Provinsi Jatim & RPJMD Nasional Tahun 2020-2024

Ket : **Data Kota Kediri & Provinsi Jatim merupakan target 2023, data Nasional merupakan target 2024

Sejak tahun 2023 tolok ukur pemberdayaan gender tidak lagi direpresentasikan melalui IDG, melainkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Namun demikian capaian IDG Kota Kediri telah melampaui target IDG yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 84,61%, yaitu IDG tercapai 85,03% pada tahun 2022 dengan tren meningkat selama lima tahun terakhir. IDG tahun 2022 mengalami peningkatan 0,86% menjadi sebesar 85,03% dibanding capaian IDG tahun 2021 sebesar 84,17%.

Atas capaian ini Kota Kediri menempati urutan teratas IDG diantara Kab/Kota di Jawa Timur. Tingginya angka IDG Kota Kediri menunjukkan makin tingginya akses, kontribusi perempuan untuk ambil peran dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, diantaranya pada saat ini proporsi perempuan sebagai anggota legislatif di Kota Kediri pada periode 2020-2024 mencapai 36,67%.

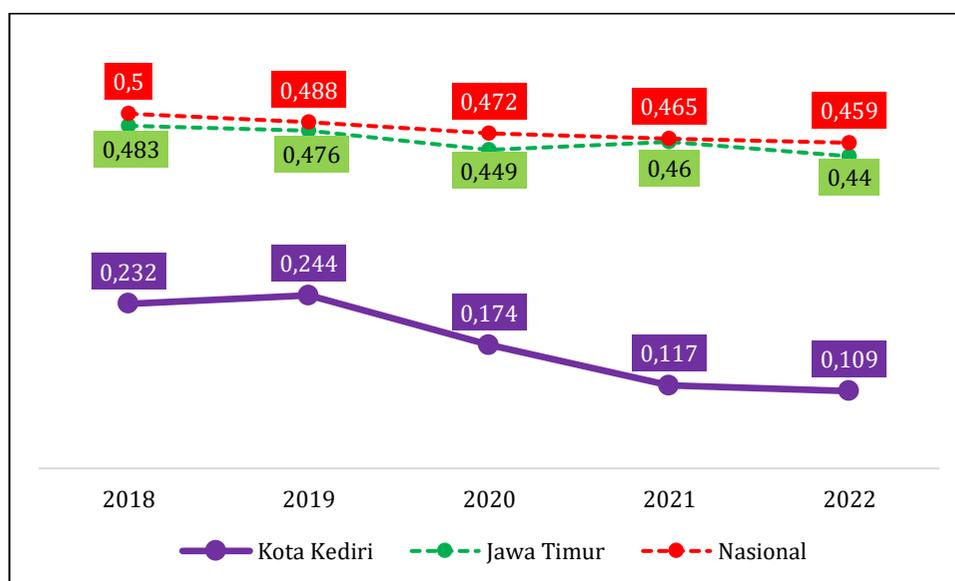
3) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kesetaraan gender menjadi bagian dari target pembangunan dalam mengatasi terjadinya disparitas pembangunan. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal. Oleh karena itu kondisi ideal yang diharapkan dalam pembangunan manusia adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender, yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Nilai IKG berada pada rentang 0-1. Angka IKG sebesar 0 (nol) mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya. Sedangkan angka IKG sebesar 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender. Sehingga nilai IKG yang semakin rendah menuju ke 0 merepresentasikan terwujudnya kesetaraan dalam pembangunan.

Perkembangan capaian Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri selama tahun 2018-2022 dibanding Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 33 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Kota Kediri telah memiliki capaian kesetaraan gender yang baik dengan nilai IKG pada tahun 2022 mendekati target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 0,095 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0,109, jauh lebih rendah dibanding IKG Provinsi Jawa Timur maupun Nasional dalam tren yang terus menurun selama lima tahun terakhir. Capaian ini menempatkan Kota Kediri pada peringkat ke-2 terendah di Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan capaian pembangunan manusia yang inklusif dengan ketimpangan gender yang cukup rendah.

Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan kesetaraan gender. Hubungan IPM, IPG, dan IDG dengan IKG idealnya berlawanan. IPM, IPG dan IDG yang tinggi selayaknya didukung oleh IKG yang rendah, dan berlaku sebaliknya

Dari grafik 2.14, 2.24, 2.25 dan 2.26 di atas menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi IPM, maka akan semakin rendah IKG, demikian halnya dengan IPG dan IDG. Hal ini terlihat dari nilai korelasi yang negatif antara IKG dengan IPM, IKG dengan IDG, dan IKG dengan IDG. Korelasi yang paling tinggi adalah hubungan antara IKG dengan IPM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian pembangunan manusia Kota Kediri sudah baik dicerminkan oleh angka IPM pada kategori sangat tinggi, diikuti dengan pemerataan kesempatan akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan Perempuan yang ditunjukkan oleh nilai IPG yang tinggi dan IKG yang rendah.

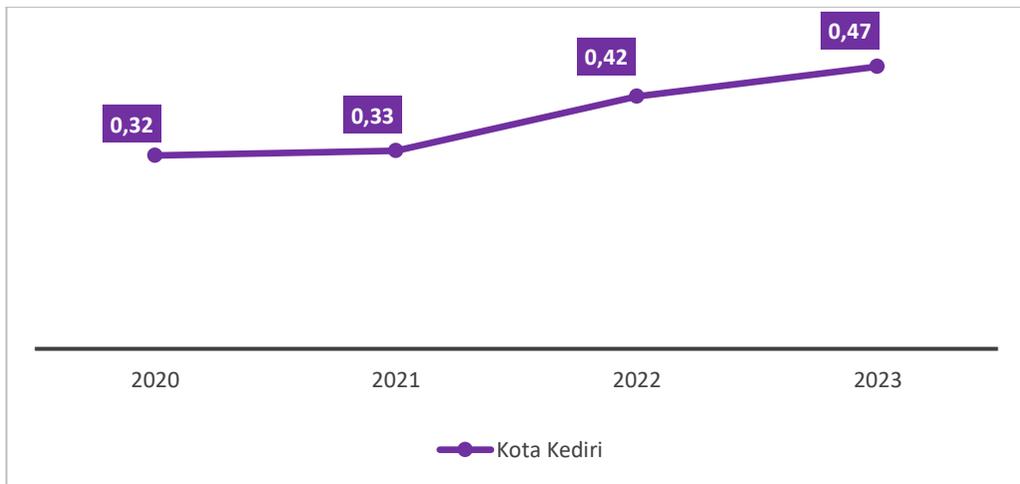
2.2.2.3 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

IKS adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga telah disepakati adanya 12 indikator untuk penanda status kesehatan keluarga, yaitu:

- 1) keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB),
- 2) ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan,
- 3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap,
- 4) bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif,
- 5) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan,
- 6) penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar,
- 7) penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur,
- 8) penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan,
- 9) anggota keluarga tidak ada yang merokok,
- 10) keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
- 11) keluarga mempunyai akses sarana air bersih,
- 12) keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil indikator tersebut dilakukan perhitungan Indeks keluarga sehat (IKS) dari setiap anggota keluarga. Keluarga dikatakan sehat dengan IKS > 0,800, keluarga pra sehat IKS = 0,500 - 0,800, sedangkan Keluarga tidak Sehat dengan IKS < 0,500. Indeks Keluarga Sehat Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 34 Indeks Keluarga Sehat Kota Kediri Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, diolah (2023)

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 nilai indeks keluarga sehat Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan meskipun masih berada dibawah 0,5 atau mencapai 0,47. Nilai IKS ini menunjukkan bahwa di Kota Kediri masih tergolong wilayah dengan status keluarga tidak sehat.

2.2.2.4 Balita Stunting

Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh atau pendek pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi yang terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal anak lahir, stunting baru Nampak setelah anak berusia 2 tahun. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi Panjang atau tinggi anak seumurnya.

Tabel 2. 25 Prevalensi Stunting Kota Kediri

Indikator	Data Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting	10,94	-	15,7	14,3	11,48*)

Sumber : 1. Tahun 2019 sumber data dari Survey Status Gizi Balita (SSGBI), 2. Tahun 2021-2022 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI),3. Tahun 2023 target hasil Rakortekrenbang

*) data masih sementara

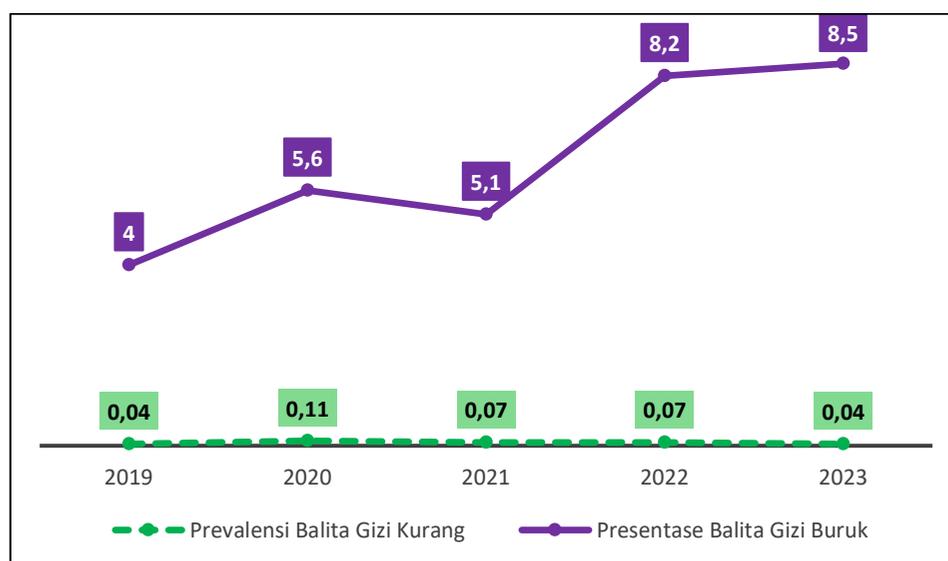
Survei nasional terkait evaluasi status gizi diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menggunakan metode pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan. Riskesdas dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan pemerintah memerlukan monitoring dan evaluasi status gizi stunting Balita setiap tahun berdasarkan indikator output intervensi gizi spesifik dan sensitif di tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu sejak tahun 2019-2024 dilaksanakan untuk mengukur status gizi balita, namun pada tahun 2020 tidak dilakukan integrasi survei dikarenakan pandemi Covid-19.

Prevalensi stunting Kota Kediri tahun 2022 berdasar SSGI sebesar 14,3%, masih perlu menurunkan 0,3% dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Namun demikian pada tahun 2023 terjadi penurunan kasus stunting dengan cakupan 58,70% kelurahan new zero stunting. Adapun target prevalensi stunting Kota Kediri tahun 2023 berdasar hasil kesepakatan Rakortek renbang nasional PPS sebesar 11,48%. Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan antara lain melalui intervensi spesifik, yaitu Layanan pemeriksaan ibu hamil (3 kali) dengan USG di Puskesmas, Program 1 dokter spesialis anak di setiap puskesmas untuk layanan rujukan balita Stunted, Pemberian PMT Plus PKMK (pangan kondisi medis khusus) bagi Balita Stunting, Pangan Diet Khusus (PDK) bagi Ibu Hamil KEK, Balita Wasting dan Balita Gizi Kurang; intervensi sensitif melalui strakom kader kesehatan, sekolah orang tua hebat di seluruh kelurahan, penanganan kawasan kumuh terintegrasi; serta penguatan kelembagaan TPPS Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Disamping itu proporsi anggaran untuk PPS tahun 2023 meningkat dari 8,60% menjadi 9,32% terhadap APBD Kota Kediri.

2.2.2.5 Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi balita perlu dipertahankan dalam status gizi baik, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan makanan bergizi seimbang yang sangat penting untuk pertumbuhan. Rendahnya status gizi berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Permasalahan gizi di Kota Kediri yakni gizi kurang dan gizi buruk, untuk mengetahui kondisi balita gizi kurang dan Gizi Buruk Kota Kediri 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 35 Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita di Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, diolah (2023)

Selama lima tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, kondisi balita gizi buruk di Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan, untuk data 2023 dengan

presentase 8,5% masih menggunakan data sementara. Sedangkan presentasi prevalensi balita gizi kurang terus mengalami fluktuatif.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 DAYA SAING EKONOMI

Daya Saing Ekonomi Daerah menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memberikan gambaran jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi daerah dalam periode tahun tertentu. Nilai PDRB dapat dilihat atas beberapa faktor yaitu Atas Harga Berlaku berdasarkan tahun berjalan dan Atas Harga Konstan berdasarkan tahun dasar tertentu dan menurut lapangan usaha. Berdasarkan Atas Harga Berlaku, PDRB di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 26 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Kediri Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	304.292,02	305.950,02	323.441,35	339.824,13	356.813,08
B	Pertambangan dan Penggalian	42,66	42,54	40,33	41,64	42,54
C	Industri Pengolahan	104.129.792,58	114.237.065,82	108.748.945,99	115.829.481,84	123.819.147,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.712,92	11.249,94	11.020,98	11.199,16	12.395,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.933,14	23.430,63	24.601,76	26.325,96	29.475,22
F	Konstruksi	2.261.907,38	2.328.789,81	2.174.614,66	2.289.278,25	2.606.865,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.188.613,19	12.968.712,58	11.482.357,93	12.880.643,60	14.794.380,24
H	Transportasi dan Pergudangan	550.151,16	591.358,44	590.700,24	626.713,31	778.108,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.974.713,47	2.157.004,26	1.958.325,09	2.100.699,31	2.469.799,58
J	Informasi dan Komunikasi	2.277.514,38	2.325.484,95	2.749.751,13	2.932.789,88	3.118.304,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.194.306,24	1.274.569,32	1.278.303,59	1.332.019,79	1.480.812,32
L	Real Estate	512.410,08	541.303,03	561.404,86	566.209,17	605.408,61
M,N	Jasa Perusahaan	262.246,22	276.963,57	264.532,86	271.247,02	292.426,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452.133,98	506.408,39	517.226,60	516.593,21	558.217,87
P	Jasa Pendidikan	954.223,59	1.030.044,62	1.082.125,47	1.069.539,11	1.091.061,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.049,42	231.609,30	258.974,26	275.703,86	292.273,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	406.731,26	434.886,44	379.693,98	398.813,64	485.611,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		127.716.773,70	139.244.873,64	132.406.061,08	141.467.122,88	152.791.144,63

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Sedangkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 27 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Kediri Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	0,22	0,24	0,24	0,23
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	81,53	82,04	82,13	81,88	81,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	1,77	1,67	1,64	1,62	1,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,54	9,31	8,67	9,11	9,68
H	Transportasi dan Pergudangan	0,43	0,42	0,45	0,44	0,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,55	1,55	1,48	1,48	1,62
J	Informasi dan Komunikasi	1,78	1,67	2,08	2,07	2,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,94	0,92	0,97	0,94	0,97
L	Real Estate	0,4	0,39	0,42	0,4	0,4
M,N	Jasa Perusahaan	0,21	0,2	0,2	0,19	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,35	0,36	0,39	0,37	0,37
P	Jasa Pendidikan	0,75	0,74	0,82	0,76	0,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,17	0,17	0,2	0,19	0,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,32	0,31	0,29	0,28	0,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Kediri, 2023

Pada tahun 2022, nilai PDRB ADHB Kota Kediri sebesar 152.791,14 miliar rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 141.467,12 miliar rupiah. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari peranan tiap lapangan usaha terhadap total PDRB. Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha pembentuk PDRB didominasi oleh lima lapangan usaha. Pada Tahun 2022 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Industri Pengolahan yang mencapai 81,04% diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 9,68%, dan selanjutnya Informasi dan Komunikasi sebesar 2,04%, kemudian disusul oleh Konstruksi sebesar 1,71% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,62%. Selama kurun waktu 2018-2022, kontribusi kelima lapangan usaha

tersebut cenderung berfluktuasi. Namun demikian, jika dibandingkan antara tahun 2022 dengan Tahun 2018 (sebelum pandemi Covid-19) menunjukkan bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan, dan Konstruksi cenderung mengalami penurunan kontribusi, sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Informasi dan Komunikasi cenderung mengalami peningkatan kontribusi. Berdasarkan analisis LQ ditunjukkan bahwa dari lima lapangan usaha dominan tersebut yang memiliki potensi terbesar adalah Industri Pengolahan, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Informasi dan Komunikasi.

Sementara PDRB Atas Harga Konstan Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 28 Nilai PDRB Kota Kediri Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Kediri Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	192.926,28	191.896,87	197.455,24	197.623,43	197.004,50
B	Pertambangan dan Penggalian	32,73	32,44	29,97	29,65	30,13
C	Industri Pengolahan	67.989.719,85	71.862.095,23	67.283.439,20	68.298.646,56	70.307.031,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.464,95	8.696,92	8.692,53	8.830,85	9.574,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.687,72	18.123,45	18.953,51	20.104,46	21.493,39
F	Konstruksi	1.495.412,13	1.554.943,68	1.446.935,95	1.500.021,12	1.616.936,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.950.779,23	9.361.023,73	8.195.446,51	8.999.406,26	9.774.058,94
H	Transportasi dan Pergudangan	376.635,24	397.331,72	394.638,14	419.128,14	495.216,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.347.392,11	1.444.978,87	1.296.533,33	1.339.283,29	1.518.301,19
J	Informasi dan Komunikasi	2.116.922,29	2.160.080,96	2.545.007,39	2.691.372,95	2.834.866,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	795.744,12	841.501,90	845.239,48	861.012,04	891.401,66
L	Real Estate	402.508,18	420.151,27	428.554,29	429.857,23	451.775,73
M,N	Jasa Perusahaan	177.834,00	185.477,86	172.428,68	173.108,79	180.013,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	308.090,62	326.064,43	318.597,55	319.837,21	320.304,70
P	Jasa Pendidikan	691.655,99	736.219,51	759.508,46	749.579,71	758.426,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.375,97	169.946,29	186.834,30	197.165,22	201.252,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	305.498,22	322.951,12	276.684,28	280.587,34	324.469,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		85.337.679,49	90.001.516,25	84.374.978,80	86.485.594,27	89.902.158,29

Sumber : BPS Kota Kediri, 2023

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 digunakan untuk menggambarkan perkembangan PDRB dan komponennya. Nilai PDRB ADHK Kota Kediri pada tahun 2022 sebesar 89.902,16 miliar rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 86.485,59 milyar rupiah. Berdasarkan angka PDRB ADHK pertumbuhan PDRB Kota Kediri tahun 2022 meningkat 3,95 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjang oleh pertumbuhan yang terjadi di hampir semua sektor lapangan usaha. Pertumbuhan positif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 18,15%, sementara pertumbuhan positif terendah terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 0,15%. Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Kediri Tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,63	-0,53	2,9	0,09	-0,31
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,98	-0,87	-7,63	-1,06	1,6
C	Industri Pengolahan	5,38	5,7	-6,37	1,51	2,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,11	2,74	-0,05	1,59	8,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,66	2,46	4,58	6,07	6,91
F	Konstruksi	4,76	3,98	-6,95	3,67	7,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,34	4,58	-12,45	9,81	8,61
H	Transportasi dan Pergudangan	8,37	5,5	-0,68	6,21	18,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,78	7,24	-10,27	3,3	13,37
J	Informasi dan Komunikasi	3,91	2,04	17,82	5,75	5,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,77	5,75	0,44	1,87	3,53
L	Real Estate	2,76	4,38	2	0,3	5,1
M,N	Jasa Perusahaan	5,58	4,3	-7,04	0,39	3,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,07	5,83	-2,29	0,39	0,15
P	Jasa Pendidikan	6,31	6,44	3,16	-1,31	1,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,99	5,97	9,94	5,53	2,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,87	5,71	-14,33	1,41	15,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,43	5,47	-6,25	2,5	3,95

Sumber : BPS Kota Kediri, 2023

2.3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB Perkapita menurut lapangan usaha Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 30 Pertumbuhan PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Kota Kediri Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Triliun Rupiah)					
ADHB	127,72	139,24	132,41	141,47	152,79
ADHB	85,34	90,00	84,37	86,49	89,90
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	447,22	483,98	461,67	491,27	527,93
ADHK	298,82	312,82	294,20	300,34	310,63
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB	9,82	8,22	-4,61	6,41	7,46
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010	4,82	4,69	-5,95	2,09	3,43
Jumlah Pertumbuhan Penduduk (orang)	285.582	287.707	286.796	287.962	289.418

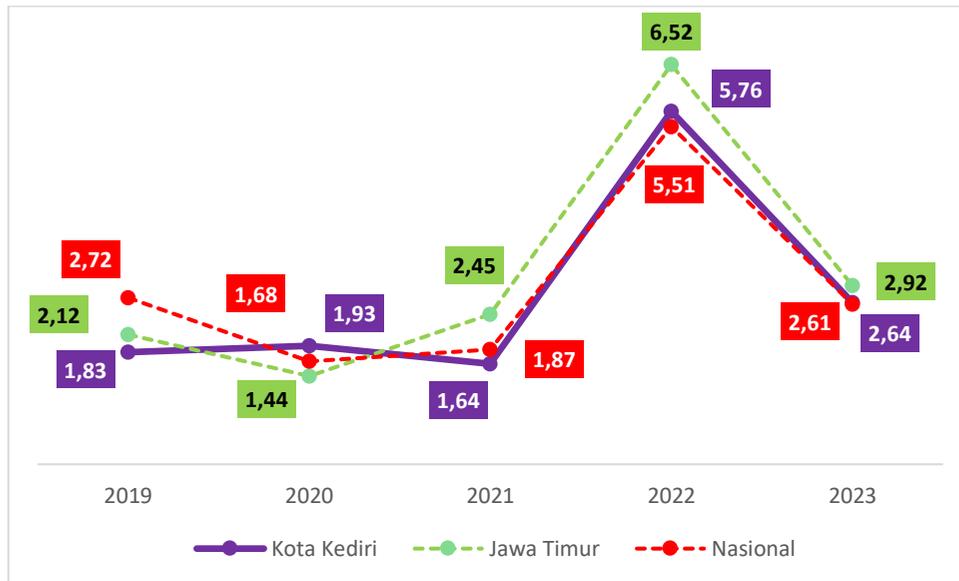
Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

PDRB per kapita Kota Kediri selama 2018-2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif. PDRB perkapita ADHB pada tahun 2022 senilai 527,93 juta rupiah per kapita. Sementara, nilai PDRB per kapita ADHK pada tahun 2022 sebesar 310,63 juta rupiah perkapita. Dilihat dari tingkat pertumbuhannya, selama 2018-2022 mengalami pertumbuhan positif kecuali pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2022 sebesar 3,43%.

2.2.1.3 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat stabilitas perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data inflasi selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kota Kediri tergolong relatif stabil. Rata-rata laju inflasi di Kota Kediri tidak melebihi dua digit. Perbandingan tingkat inflasi Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional menurut kelompok pengeluaran Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 36 Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional (yoy) tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Jawa Timur, Nasional, diolah (2023)

Berdasarkan grafik diatas, dalam rentang Tahun 2019-2023, inflasi tertinggi sebesar 5,76% (yoy) terjadi pada Tahun 2022. Inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan harga secara umum, yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Meskipun inflasi Kota Kediri Tahun 2022 diatas rentang target inflasi nasional, namun dibanding Provinsi Jawa Timur, inflasi Kota Kediri masih lebih rendah dan cukup terjaga. Kenaikan inflasi tersebut juga menunjukkan penguatan daya beli masyarakat seiring pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Sementara inflasi Kota Kediri Tahun 2023 tercatat sebesar 2,64% (yoy) lebih rendah dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,92% dan inflasi Tahun 2022 sebesar 5,76%. Inflasi yang stabil dan terjaga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meski inflasi saat ini cukup terjaga, tetap perlu mewaspadaai situasi saat ini yang kurang menentu yaitu pertumbuhan perekonomian global yang diproyeksikan melambat pada Tahun 2024 menurut *World Economic Situation and Prospects (WESP)*, tekanan harga yang masih tinggi di banyak negara serta adanya eskalasi konflik geopolitik lebih lanjut (Perang Rusia-Ukraina, dan Perang Israel-Palestina) yang berisiko meningkatkan inflasi di dalam negeri. Seiring kondisi tersebut diperlukan penguatan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stakeholder terkait, dan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi.

2.3.1.4 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tingkat pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan penduduk, namun demikian sampai dengan saat ini, pengeluaran penduduk masih digunakan sebagai pendekatan terbaik untuk mengetahui pendapatan/penghasilan penduduk. Pengeluaran penduduk dikelompokkan menjadi

pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan terhadap total pengeluaran, mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Jika dilihat berdasarkan pengeluaran perkapita penduduk sebulan di Kota Kediri menurut kelompok makanan dan non makanan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 31 Jumlah dan Persentase Pengeluaran Perkapita Penduduk Per Bulan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran Perkapita	2019	2020	2021	2022	2023
Makanan	Rp. 512.133,- 45,46%	Rp. 561.467,- 44,92%	Rp. 639.163,- 42,60%	Rp. 706.619,- 45,51%	Rp. 685.403,- 41,25%
Non Makanan	Rp. 614.527,- 54,54%	Rp. 688.323,- 55,08%	Rp. 861.306,- 57,40%	Rp. 846.212,- 54,49%	Rp. 976.022,- 58,75%
Total	Rp. 1.126.660,-	Rp. 1.249.790,-	Rp. 1.500.469,-	Rp. 1.552.831,-	Rp. 1.661.425,-

Sumber : BPS Kota Kediri, 2023 (data diolah)

Kelompok makanan terbagi menjadi 14 (empat belas) subkelompok diantaranya padi-padian; umbi-umbian; ikan; daging; telur dan susu; sayur-sayuran; kacang-kacangan; buah-buahan; minyak dan kelapa; bahan minuman; bumbu-bumbuan; konsumsi lainnya; makanan dan minuman jadi; dan rokok. Sementara kelompok non makanan terbagi dalam 6 (enam) subkelompok diantaranya perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka komoditas dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; komoditas tahan lama; pajak, pungutan dan asuransi; keperluan pesta dan upacara/kenduri. Selama Tahun 2019-2023, rata-rata pengeluaran perkapita Kota Kediri konsisten mengalami peningkatan dengan nilai pengeluaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.661.425,00.

Berdasarkan jenis pengeluaran, kelompok non makanan selalu memiliki persentase lebih besar dibanding kelompok makanan dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2023 rata-rata pengeluaran per bulan untuk kelompok makanan sebesar Rp. 685.403,00, sementara untuk kelompok non makanan sebesar Rp. 976.022,00. Pada kelompok pengeluaran makanan, subkelompok Makanan dan Minuman Jadi merupakan subkelompok dengan pengeluaran rata-rata per bulan tertinggi, yaitu sebesar Rp. 279.577,00 atau sebesar 16,83% dari total pengeluaran perkapita. Sedangkan pada kelompok pengeluaran non makanan, subkelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga memiliki pengeluaran rata-rata per bulan tertinggi, yaitu sebesar Rp. 459.258,00 atau sebesar 27,64% dari total pengeluaran perkapita.

Berdasarkan kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menurut kelompok komoditas di Kota Kediri Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 32 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Per Bulan) Menurut Kelompok Komoditas di Kota Kediri Tahun 2023

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran (Per Bulan)			Total Rata-Rata Pengeluaran	Persentase Kelompok Komoditas
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas		
Padi-padian	55.747	61.348	78.167	62.468	3,76%
Umbi-umbian	3.722	6.879	11.524	6.543	0,39%
Ikan/udang/cumi/kerang	9.846	21.991	50.666	22.861	1,38%
Daging	18.645	33.693	71.057	35.138	2,11%
Telur dan susu	22.178	39.232	81.062	40.767	2,45%
Sayur-sayuran	39.876	52.665	80.107	53.030	3,19%
Kacang-kacangan	16.467	19.881	26.327	19.803	1,19%
Buah-buahan	14.629	38.623	83.856	38.058	2,29%
Minyak dan kelapa	11.570	17.894	29.794	17.741	1,07%
Bahan minuman	12.703	16.047	25.158	16.530	0,99%
Bumbu-bumbuan	8.622	11.703	19.794	12.087	0,73%
Bahan makanan lainnya	8.377	13.280	18.535	12.367	0,74%
Makanan dan minuman jadi	155.342	279.073	529.411	279.577	16,83%
Rokok dan tembakau	42.062	66.759	124.587	68.432	4,12%
Kelompok Makanan	419.786	679.069	1.230.047	685.402	41,25%
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	196.032	349.291	1.206.059	459.258	27,64%
Aneka barang dan jasa	88.558	166.270	766.420	255.174	15,36%
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	15.933	38.915	106.140	43.154	2,60%
Barang tahan lama	8.372	29.901	350.774	85.454	5,14%
Pajak, pungutan, dan asuransi	46.342	81.752	281.933	107.605	6,48%
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1.058	4.079	116.615	25.377	1,53%
Kelompok Non Makanan	356.295	670.208	2.827.942	976.022	58,75%
Rata-Rata Pengeluaran Kota Kediri	776.080	1.349.277	4.057.989	1.661.425	100,00%

Sumber : BPS Kota Kediri, 2023 (data diolah)

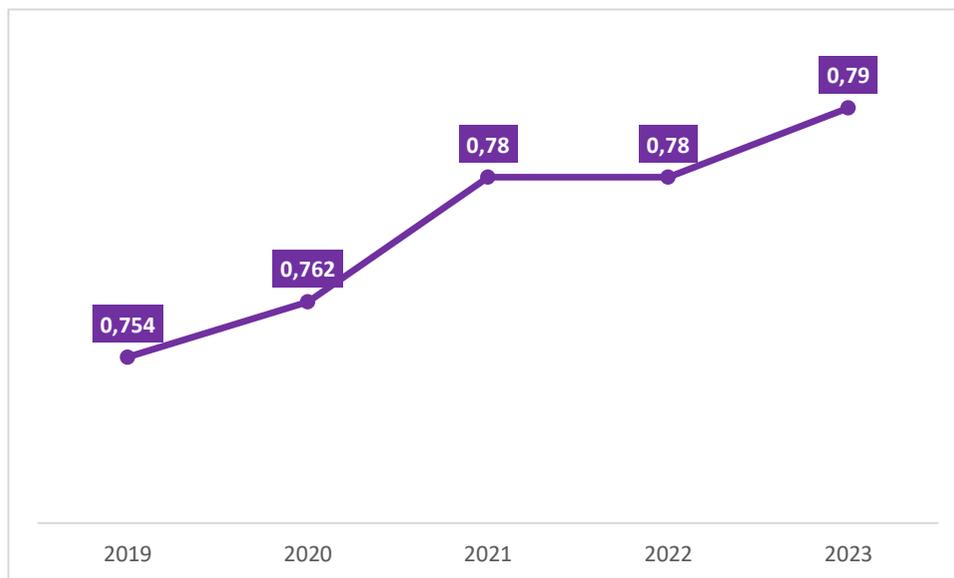
2.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Daya Saing SDM Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula. Perkembangan Indeks pendidikan Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 37 Indeks Pendidikan Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2023

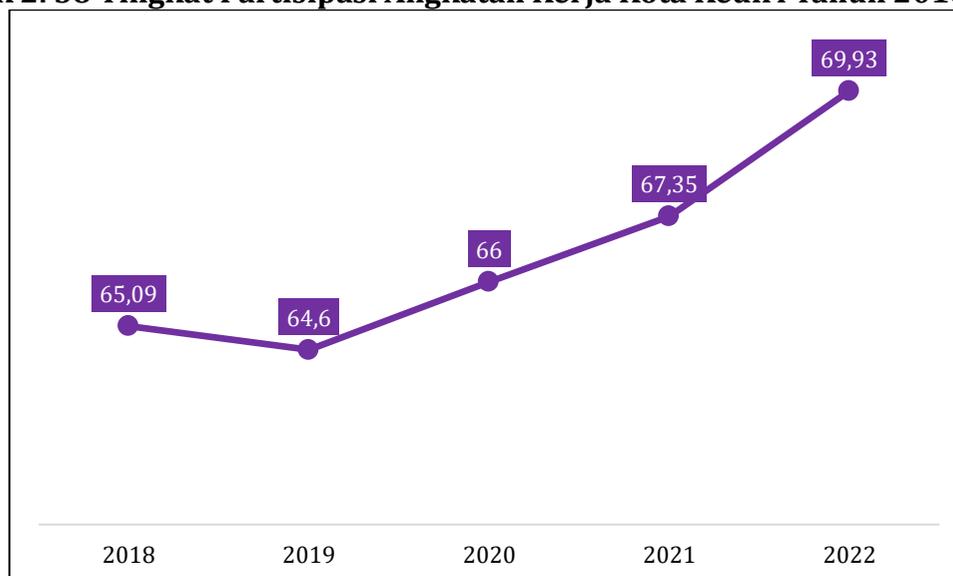
Indeks pendidikan Kota Kediri selama 2019-2023 mengalami kenaikan sebesar 0,036 poin dari 0,754 menjadi 0,79. Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terjadinya peningkatan indeks pendidikan, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan dan semakin besar kontribusinya terhadap indeks pembangunan Manusia di Kota Kediri.

2.3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Tingkat partisipasi Angkatan kerja dihitung berdasarkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dengan porsi

penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan). Kondisi tingkat partisipasi Angkatan kerja Kota Kediri tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kediri Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2021, yaitu menjadi 69,93%. Kenaikan ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Selain itu, meningkatnya lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja.

2.3.3 DAYA SAING IKLIM INVESTASI

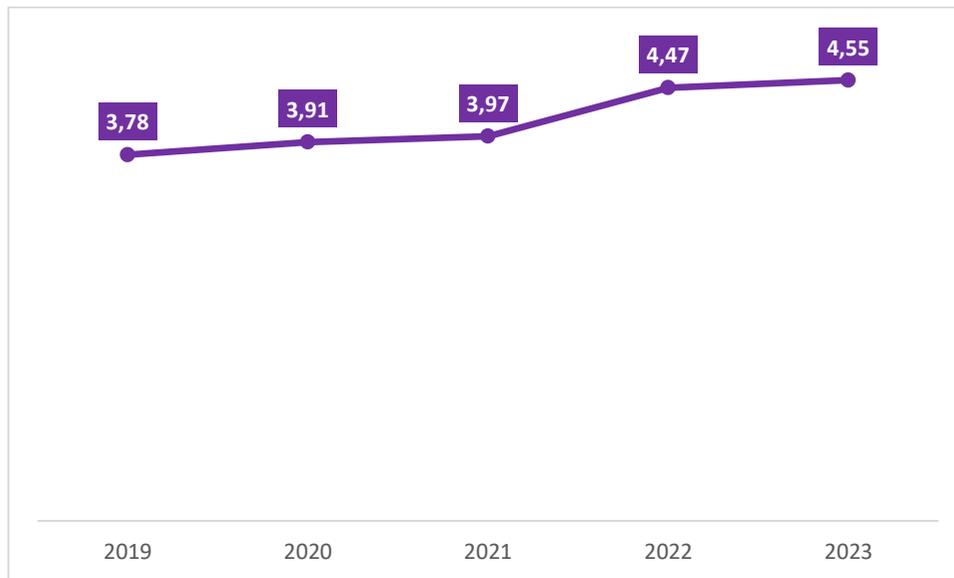
2.3.3.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk terus menjaga, menciptakan dan melestarikan kerukunan hidup antar umat beragama. yang dilandasi Pengukuran Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Kediri difokuskan pada 4 (empat) variabel utama, yaitu toleransi, kesetaraan, kerjasama, dan kebijakan. Pada tahun 2019 indeks kerukunan antar umat beragama 3,78% (tinggi). Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 3,91. Tahun 2021 berada di angka 3,97%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 0,5% menjadi 4,47%, kemudian lanjut mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 4,55 (sangat tinggi). Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian tersebut adalah :

1. Faktor historis, kultur dan budaya yang kondisional;
2. Dukungan pemerintah terhadap FKUB;
3. Doktrin agama yang moderat;
4. Tingkat pendidikan yang semakin baik;
5. Peran strategis aktivis lintas agama yang mengedepankan asas kerukunan.

Indeks kerukunan umat beragama Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 39 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2022

2.3.3.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

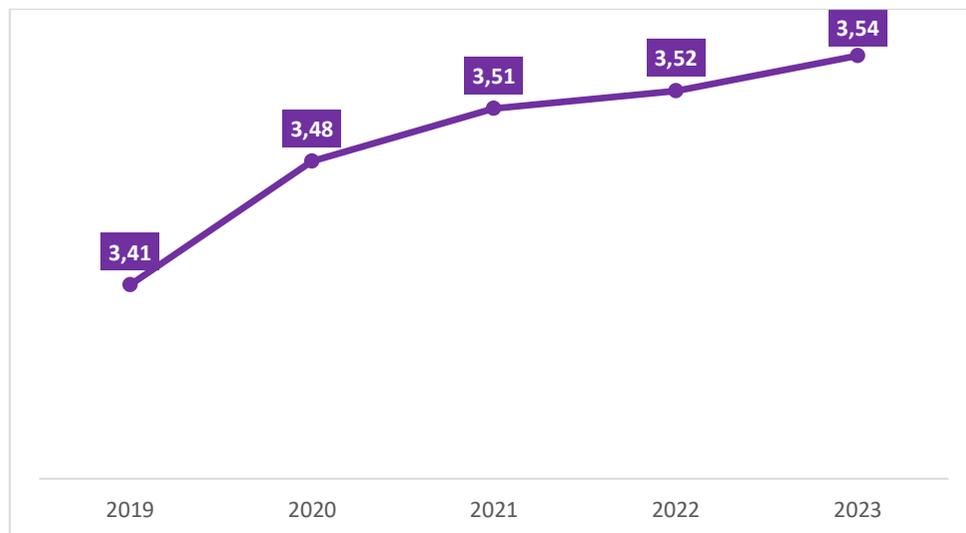
- 1) Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 3) Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

- 4) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
- 7) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 9) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
 - 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
 - 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- Perkembangan nilai IKM Kota Kediri Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 40 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa nilai IKM Kota Kediri dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019 nilai IKM Kota Kediri adalah 3,41(B). Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi B dengan skor 3,48. Tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi B(3,51) dan B(3,52), dan puncaknya di tahun 2023 nilai IKM Kota Kediri adalah 3,54 (A). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan nilai IKM adalah Menerapkan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Menyelenggarakan Sertifikasi Pelayanan Publik (ISO), memanfaatkan media sosial secara masif sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan.

2.3.3.3 Nilai Investasi Daerah

Indikator kinerja sasaran ini diukur dengan menghitung nilai absolut dari realisasi investasi yang ada di Kota Kediri. Selama 5 (lima) tahun terakhir nilai investasi Kota Kediri menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2023 nilai investasi daerah mencapai Rp.1.200,00 Milyar Rupiah atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 2.357,05 Milyar Rupiah. Penurunan tersebut disebabkan adanya investasi dari PTPN X PG Pesantren Baru sebnilai Rp. 1, 62 Triliun pada Tahun 2022, sementara pada Tahun 2023 nilai investasi terbesar senilai 342 Milyar Rupiah dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 1.200 T (angka sementara).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi daerah adalah sosialisasi melalui media sosial dan langsung pada masyarakat, melakukan promosi melalui pameran dan *workshop*, membangun Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan perizinan yang mudah, cepat dan transparan. Adapun program inovasi yang dapat menarik minat berinvestasi antara lain kemudahan izin seperti melalui *Mobile Public Service*,

Pelayanan Berdaya Khusus (Bekal Perizinan Bagi Disabilitas Agar Makin Jaya), Celengan Rindu (Cek Lokasi Live Dengan Drone Dan Aplikasi Zoom Untuk Pelayanan Perizinan Terpadu), Sinonik (Sistem Pembayaran Non Tunai Secara Elektronik dan Istri Pintar); Pelayanan DPMPTSP Kota Kediri sudah dilakukan secara Cepat, Tepat, Mudah, Transparan, Gratis, Berbasis Digital yaitu melalui Sistem OSS Berbasis Resiko (*Online Single Submission*) dan KSWI (*Kediri Single Window For Investment*); Adanya program pengembangan iklim usaha dan promosi penanaman modal untuk menjaring investor; Adanya pendampingan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Apelin Pacar (Asistensi Pengisian LKPM Online Dibantu Sampai Lancar). Kinerja capaian nilai investasi daerah Tahun 2019 – 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 33 Nilai Investasi Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
Nilai Investasi (Milyar Rp)	690,78	1.313,37	2.378,14	2.357,05	1.200,00

Ket * : Data Sementara

Sumber : DPMPTSP Kota Kediri

Perdagangan dan Jasa

Kota Kediri sebagai Kota Perdagangan dan Jasa semakin dimudahkan dengan adanya Bandara Dhoho Kediri. Meskipun bandara terletak di Kabupaten Kediri, namun keberadaannya akan memberikan *multiplier effects* secara tidak langsung pada Kota Kediri. Menjelang beroperasinya bandara dan pembangunan jalan tol, Kota Kediri perlu menangkap peluang dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan menata kota dan kawasan seperti kawasan Central Bussiness District (CBD), dan menyediakan fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE).

Keberadaan hotel dan restoran juga turut menunjang sektor perekonomian dan pariwisata di Kota Kediri. Pada tahun 2022, jumlah hotel yang ada di Kota Kediri tercatat sebanyak 29 hotel dengan 7 hotel berkategori bintang dan sisanya non bintang. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah hotel tidak mengalami perubahan, namun demikian perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perluasan promosi ke masyarakat. Disamping hotel, pendukung sektor pariwisata lainnya adalah rumah makan. Jumlah rumah makan/restoran yang terdaftar di Kota Kediri selama tahun 2019-2022 mengalami perubahan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, pada tahun 2019-2022 terjadi peningkatan secara drastis dari 77 rumah makan menjadi 517 rumah makan. Berikut data perkembangan jumlah hotel dan rumah makan di Kota Kediri :

Tabel 2. 34 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Kota Kediri Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Hotel	29	29	29	29
Jumlah Rumah Makan/Restoran	77	555	392	517

Sumber : BPS Kota Kediri

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan tahun 2019-2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2. 35 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019-2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	106,14	100,27	80,56	95,65	88,20
2	Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,14	100,25	105,72	110,08	106,94
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/A	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kediri

Memperhatikan capaian SPM pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, program untuk memberantas buta aksara, menekan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS dan BOP, bantuan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP, bantuan pendidikan siswa SMA, SMK dan Mahasiswa, bantuan penuntasan ijazah di

sekolah swasta, serta menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan program pendidikan lainnya.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2023 pada layanan pada Pendidikan dasar telah melebihi target, layanan Pendidikan kesetaraan mencapai target sedangkan layanan PAUD belum memenuhi target.

2. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 36 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan

Tahun 2019-2023

NO	Indikator SDGs	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase SD terakreditasi A	%	27,2	30,88	47,05	46,38	45,65
2	Persentase SMP terakreditasi A	%	45,45	45,45	45,45	44,12	41,18
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%	106,56	106,26	102,9	105,76	102,87
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	%	107,78	109,99	111,18	118,21	114,39
5	Angka partisipasi kasar SD	%	111,24	109,81	108,43	106,00	107,75
6	Angka partisipasi kasar SMP	%	127,59	132,79	129,13	129,05	129,45
7	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,92	9,93	10,15	10,45	10,69
8	Persentase guru sesuai kualifikasi	%	95,67	89,49	83,75	89,74	89,65

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data capaian SDGs di atas dapat dijelaskan capaian setiap indikator, seperti Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat pada tahun 2020 dan 2021 mengalami sedikit penurunan, dan meningkat lagi di tahun 2022 tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat mengalami penurunan di tahun 2019 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 - 2022 tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Angka APM yang berfluktuasi baik pada jenjang SD sederajat maupun SMP sederajat disebabkan jumlah penduduk pada usia 7-12 dan 13-15 juga mengalami fluktuasi . Angka partisipasi kasar SD mengalami penurunan di tahun 2020-2022 tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Angka partisipasi kasar SMP turun di tahun 2019 dan naik di tahun 2020, kemudian turun lagi di tahun 2021 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2022 dan 2023. Penurunan angka APM pada tahun 2023 baik pada jenjang SD maupun SMP tetapi pada saat yang sama terjadi kenaikan angka APK pada jenjang SD dan SMP menggambarkan bahwa layanan pendidikan masih optimal. Angka rata-rata lama sekolah terus mengalami kenaikan dari

tahun 2019-2023. Persentase guru sesuai kualifikasi mengalami penurunan di tahun 2019-2021 dan naik di tahun 2022.

3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang menjalani pra pendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Berikut ini merupakan data PAUD di Kota Kediri Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 37 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	13.257	11.538	11.068	11.237	11.745

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Kediri pada tahun 2020 berada di angka 11.538 anak. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan berangsur naik Kembali pada tahun 2021,2022 dan tahun 2023 dengan angka 11.745 anak. Penurunan pada tahun 2020 dan 2021 merupakan dampak dari pandemi covid 19 dimana pada saat itu sekolah menggunakan mekanisme belajar dari rumah.

4. Angka Melek Huruf (AMH)

Pendidikan merupakan hal yang penting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pun sangat konsen dengan kemajuan pendidikan di Indonesia, sejalan dengan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurang 20 persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”. Menurut BPS, Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis penduduk. Dengan kata lain, indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi indikator ini, semakin tinggi mutu sumber daya suatu masyarakat. Angka Melek Huruf (AMH) didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada umumnya, angka melek huruf di Kota

Kediri telah mencapai angka 100%. Berikut adalah data yang menunjukkan angka melek huruf di Kota Kediri.

**Tabel 2. 38 Angka Melek Huruf Kota Kediri
Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melek Huruf	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan pada data tabel diatas dapat dilihat bahwa angka melek huruf di Kota Kediri dari tahun 2019-2023 konsisten berada di angka 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa seluruh warga Kota Kediri sudah melek huruf dan mampu membaca dan menulis huruf latin atau lainnya.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Interpretasi APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

**Tabel 2. 39 Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kota Kediri Tahun 2019-2023**

No	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	PAUD	%	98,46	92,84	88,82	92,84	94,02
2	TK	%	106,14	102,28	93,86	99,14	99,40
3	SD/MI/Paket A	%	111,24	109,81	108,43	106,00	107,75
4	SMP/MTs/Paket B	%	127,59	132,79	129,13	129,05	129,45

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi berada di tingkat jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B dengan capaian angka 129,45. APK tertinggi kedua yakni tingkat jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A dengan capaian 107,75. Kemudian kelompok Pendidikan TK dengan capaian 99,40 dan yang terakhir adalah kelompok Pendidikan PAUD dengan capaian 94,02 di tahun 2023. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

mengalami penurunan dan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk jenjang SD/MI/Paket A mengalami penurunan sejak tahun 2019 dengan angka 111,24 sampai pada tahun 2022 dengan angka 106,00 dan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs/Paket B angka APK berfluktuasi sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 dimana capaian tertinggi pada tahun 2020, tahun 2021 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2023. Angka yang berfluktuasi pada semua jenjang dan Kembali mengalami tren kenaikan pada tahun 2023 disebabkan wabah covid 19 pada tahun 2019 dan 2020 khususnya pada jenjang PAUD dan TK. Selain itu jumlah penduduk usia sekolah sebagai pembanding juga terjadi fluktuasi. Tetapi secara keseluruhan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023.

6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu di suatu jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah grafik Angka Partisipasi Murni di Kota Kediri tahun 2019-2023.

Tabel 2. 40 Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Angka Partisipasi Murni (APM)	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI/Paket A	%	106,56	106,26	102,9	105,76	102,87
2	SMP/MTs/Paket B	%	107,78	109,99	111,18	118,21	114,39

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa APM SMP/MTs/Paket B lebih tinggi daripada APM tingkat Pendidikan SD/MI/Paket A. Adapun APM kelompok Pendidikan SMP/MTs/Paket B bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sejak tahun 2019 sampai 2022. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan capaian APM mencapai 118,21. Sedangkan capaian APM kelompok Pendidikan SD/MI/Paket A bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Capaian APM kelompok Pendidikan SD/MI/Paket A berada di angka 105,76 di tahun 2022 dan kembali turun pada tahun 2023. Fluktuasi ini disebabkan jumlah penduduk pada usia 7-12 dan 13-15 juga mengalami fluktuasi. Tetapi secara layanan mengalami kenaikan. Hal itu dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) yang menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 dan 2023.

7. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Kediri Tahun 2019-2023 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. 41 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	%	106,56	106,26	102,9	105,76	102,87
2	SMP/MTs	%	107,78	109,99	111,18	118,21	114,39

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian APS pada jenjang Pendidikan SMP/MTs lebih tinggi daripada APS jenjang Pendidikan SD/MI. Adapun APS kelompok Pendidikan SMP/MTs bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan capaian APS mencapai 118,21. Sedangkan capaian APS kelompok Pendidikan SD/MI/Paket A bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Capaian APS kelompok Pendidikan SD/MI/Paket A berada di angka 105,76 di tahun 2022 dan 102,87 pada tahun 2023. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A dan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B sama dengan APM pada jenjang tersebut karena menggunakan perhitungan yang sama.

8. Angka Putus Sekolah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Berikut ini merupakan data angka putus sekolah di Kota Kediri tahun 2019-2023.

Tabel 2. 42 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Angka Putus Sekolah (APtS)	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,003	0,003
2	SMP/MTs	%	0,11	0,01	0,01	0,015	0,04

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa angka putus sekolah pada Tingkat SD/MI dari tahun 2019-2021 stabil di angka 0,01 dan pada tahun 2022-2023 menjadi 0,003, dapat diartikan bahwa siswa yang mengalami putus sekolah SD/MI relatif sedikit. APts Tingkat SMP/MTs di tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,1. Sedangkan di tahun 2022 ke tahun 2023 naik sebesar 0,025. dapat diartikan bahwa siswa yang mengalami putus sekolah SD/MI di tingkat SMP/MTs sedikit mengalami kenaikan.

9. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini merupakan suatu indikator yang menghitung persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga nantinya dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah, dalam hal ini Kota Kediri. Berikut adalah angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Kediri.

Tabel 2. 43 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Angka Pendidikan yang ditamatkan							
1	SD/MI	%	100	99,91	100	100	100
2	SMP/MTs	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan tabel diatas, persentase angka pendidikan yang ditamatkan di tingkat SD/MI hampir 100% di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,001, kemudian pada tahun 2021 sampai 2023 naik menjadi 100% yang berarti bahwa seluruh pelajar telah menamatkan Pendidikan di jenjang SD/MI. Persentase angka Pendidikan yang ditamatkan di tingkat SMP/MTs dari tahun 2019-2023 sebesar 100% yang mengindikasikan bahwa seluruh pelajar telah menamatkan pendidikan di jenjang SMP/MTs.

10. Angka Lulus Sekolah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Kediri Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 44 Angka Kelulusan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	100	99,91	100	100	100
2	SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa secara umum angka kelulusan terhadap jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Kediri telah mencapai angka 100%.

11. Angka Melanjutkan

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Kediri Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 45 Angka Melanjutkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	32,999	32,263	31,66	30,481	30,263
2	SMP/MTs	19,144	19,958	19,5	19,706	19,852

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2019 jumlah siswa SD/MI selalu mengalami penurunan dan pada tahun 2023 jumlah siswa sebanyak 30.263 siswa. Jika di rata rata pada jenjang SD/MI ada 6 rombongan belajar (rombel) maka lulusan SD/MI berjumlah 5.844 siswa. Sedangkan jumlah siswa pada SMP mengalami jumlah dengan tren naik. Pada tahun 2023 jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 19.852 siswa. Jika di rata-rata sebanyak 3 rombel maka siswa setiap rombel sebanyak 6.617 siswa. Sehingga angka melanjutkan di atas 100 % atau tepatnya 113,22. Angka ini menunjukkan bahwa ada siswa luar kota yang melanjutkan sekolah di SMP/MTs Kota Kediri.

12. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang

materi yang lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kota Kediri tahun 2019-2023.

**Tabel 2. 46 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Kediri
Tahun 2019-2023**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Guru yang Berkualifikasi S1/DIV	95,67	89,49	83,75	89,74	89,65

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kota Kediri berada di angka 89,74 % di tahun 2022. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 83,75% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan karena adanya guru berijazah S 1 yang memasuki masa pensiun.

2.4.1.2 Urusan Kesehatan

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 47 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94,62	90,73	90,02	91,7	89,51
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96,38	93,09	100	93,19	90,14
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	101,7	98,22	94	98,04	92,69
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90,46	93,35	96	99,7	100,00
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99,93	100	100	124,99	100,00
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	33,76	26,09	70,2	90,73	100,00
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	59,82	34,95	64,73	87,45	91,96
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	26,6	17,67	33	44,98	100,00
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	71,5	66,43	95	110,43	100,00
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	76,43	92,71	107	110,23	100,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	83,9	45,87	43,32	125	100,00
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97,39	91,98	100	100,17	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

*) data masih sementara

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator SPM di bidang kesehatan pada tahun 2023 masih ada yang belum mencapai target 100%, diantaranya adalah cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, cakupan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar, cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

Jika dilihat tren dari tahun 2019 hingga 2023, maka ada indikator yang mengalami penurunan capaian pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Indikator tersebut adalah Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Capaian SPM yang menunjukkan peningkatan signifikan selama 5 tahun terakhir adalah Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis. Hal ini disebabkan karena adanya intervensi signifikan pada indikator-indikator tersebut termasuk salah satunya adalah dukungan kegiatan.

Adapun capaian SPM kesehatan paling rendah yakni cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 86,62%. Penyebab belum tercapai target 100% adalah karena adanya perbedaan jumlah sasaran proyeksi dengan sasaran sesungguhnya. Solusi yang dapat dilakukan untuk masalah ini adalah dengan menggunakan data sesungguhnya yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2. *Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan*

Selanjutnya capaian SDGs bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 48 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan
Tahun 2019-2023**

No	Indikator SDGS	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita	%	4	5,6	5,1	8,2	8,5*)
2.	Persentase Balita Stunting	%	10,9	12,7	13,6	14,3	11,48*)
3.	Persentase Balita Stunting (pendek dan sangat Pendek) pada baduta	%	10,9	10,2	12,7	7,1	6*)
4.	Persentase Balita Obesitas (BB/TB) kelompok umur 0-59 Bln	%	3,8	4,4	2,5	0,1	2*)
5.	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bln yang mendapatkan ASI Eksklusif	%	30,5	52,8	51,9	62,8	65,1*)
6.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup		0	46,01	154	25,27	0
7.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15 – 49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	92	93,09	100	93,22	90,14
8.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15 – 49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	92	93,09	91	93,2	90,14
9.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup			1,1	1,1	0,51	0
10.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup					0,51	0,26
11.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		2,55	1,38	1,54	0,51	0,27
12	Persentase HIV yang mendapat ARV	%	73	58	63	56	99
13	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	%	80	90	89	83	83
14	Kejadian Malaria per 1000 orang	Per 1000	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03
15	Persentase RFT rate Kusta	%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
16	Persentase Anak Umur 12 – 23 Bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap (Kelompok penduduk 40% terbawah)	%	98,75	96,59	95,66	94,25	92,67
16	Persentase Anak Umur 12 – 23 Bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap (Kelompok penduduk 40% terbawah)	%	98,75	96,59	95,66	94,25	92,67
17	Prevelensi kekurangan Gizi (Underweight) pada anak balita	% (0-59 bln)	4	5,6	5,1	8,2	8,5*)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

3. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Cara perhitungan/rumus cakupan ini adalah sebagai berikut.

$$\text{AKB} = \frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$$

Indikator ini mencerminkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Kediri Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 49 Angka Kematian Bayi di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 100.000 Kelahiran	2,55	1,38	1,54	0,51	0,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi bahwa realisasi Kematian Bayi (AKB) tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini dikarenakan jumlah bayi yang meninggal di Kota Kediri dapat terus ditekan. Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya keaktifan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melakukan rujukan dini terencana pada janin yang mengalami fetal distress/ancaman bayi baru lahir dengan asfiksia yang masih dalam kandungan. Selain itu adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Kediri dengan semua rumah sakit, bidan koordinator puskesmas/bidan penanggungjawab wilayah dan bidan praktik mandiri serta sistem rujukan yang semakin membaik, pengambilan keputusan yang cepat tepat dan fasilitas layanan di rumah sakit yang memadai sehingga penanganan menjadi lebih maksimal.

Apabila ada kasus kematian bayi, bidan puskesmas segera melapor 1x 24 jam yang kemudian disusul laporan OVP (Otopsi Verbal Perinatal) dan kronologi kematian. Sehingga berbagai penyebab kematian dapat diketahui dan diambil upaya antisipasi pencegahan maupun kegawatdaruratan untuk yang akan datang dengan hal tersebut angka kematian bayi bisa ditekan lebih maksimal. Penyebab kematian pada bayi neonatal umumnya disebabkan oleh asfiksia berat dan tidak tertolong dan terselamatkan.

Upaya yang telah dilakukan dan terus ditingkatkan kualitasnya untuk menekan angka kematian bayi di Kota Kediri adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Kediri dengan semua rumah sakit, bidan koordinator puskesmas/bidan penanggungjawab wilayah dan bidan praktik mandiri terkait rujukan dini terencana untuk bayi baru lahir dengan resiko asfiksia
- 2) Audit Maternal Perinatal (AMP) atau pengkajian dan pembahasan kematian maternal perinatal dan neonatal oleh SpOG dan SpA se- Kota Kediri dengan narasumber SpOG konsultan dan SpA konsultan dari Provinsi
- 3) Pembelajaran hasil rekomendasi AMP bagi rumah sakit, bidan puskesmas, bidan praktek mandiri, Kepala Puskesmas, Institusi Kebidanan se – Kota Kediri.
- 4) Adanya *team work* dalam menangani kasus kehamilan atau kebidanan dengan resti dan kasus bayi dengan komplikasi.
- 5) Meningkatkan pendampingan/pemantauan ibu hamil baik oleh kader, mahasiswa, petugas dan bidan wilayah untuk memantau setiap ibu dari masa hamil sampai masa nifas 42 hari bersama bayi baru lahir

4. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Cara perhitungan/rumus cakupan ini adalah:

$$AKI = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$$

Indikator ini mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan *prenatal* dan *obstetric*. Berikut adalah data yang menunjukkan angka kematian ibu di Kota Kediri tahun 2019-2023.

Tabel 2. 50 Angka Kematian Ibu di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	46,01	154	25	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa angka kematian ibu melahirkan di Kota Kediri sempat mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid 19 (2021). Namun Ketika masa pandemi berakhir, jumlah kematian ibu di Kota Kediri mengalami penurunan kembali hingga di tahun 2023 tidak ada kematian ibu melahirkan. Capaian ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan guna menekan AKI, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Kediri dengan semua rumah sakit, bidan koordinator puskesmas/bidan penanggungjawab wilayah dan bidan praktik mandiri serta sistem rujukan yang semakin membaik, pengambilan keputusan yang cepat tepat dan fasilitas layanan di rumah sakit yang memadai sehingga penanganan menjadi lebih maksimal.
- 2) Apabila ada kasus kematian ibu, bidan puskesmas segera melapor 1x 24 jam yang kemudian disusul laporan OVM (Otopsi Verbal Merinatal) dan kronologi kematian. Adanya Rekam Medis Maternal Perantara (RMM P) bagi Fasilitas perujuk dan Rekam Medis Maternal (RMM) bagi rumah sakit tempat meninggal,dan Audit Maternal Perinatal, sehingga berbagai penyebab kematian dapat diketahui dan diambil upaya antisipasi pencegahan maupun kegawatdaruratan untuk yang akan datang dengan hal tersebut angka kematian bayi bisa ditekan lebih maksimal
- 3) Setiap komplikasi kebidanan mendapat pelayanan yang adekuat
- 4) Penguatan jejaring rujukan kegawatdaruratan obstetri
- 5) Penguatan rujukan dini berencana
- 6) Adanya Program Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan (PAPI ASIK) untuk mengetahui secara dini ibu hamil risti , sehingga dari data yang valid, dan terintegrasi petugas kesehatan lebih cepat melakukan intervensi dan memberikan penanganan yang cepat dan tepat

5. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Indikator ini menggambarkan bahwa pertolongan persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, diukur dengan membandingkan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan

kompeten dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Kediri dari tahun 2019-2023.

Tabel 2. 51 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan	92	93,09	100	93,22	90.14

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada tahun 2019, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berada di angka 92, kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 93,22. Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan.

Adapun faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya indikator ini pada tahun-tahun sebelumnya adalah meningkatnya koordinasi jejaring di masing masing Puskesmas dengan fasilitas kesehatan (DSOG, PMB dan Rumah sakit) yang ada di wilayahnya. Sementara itu, belum tercapainya 100% indikator ini dikarenakan terjadinya Abortus/gagal hamil, ataupun mobilitas ibu bersalin yang tinggi sehingga pemantauan wilayah setempat sulit dilakukan karena adanya ibu penduduk yang ber KTP Kota yang awalnya melakukan ANC di wilayah Kota Kediri akan tetapi saat melahirkan pindah.

Strategi yang dilakukan agar pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat mencapai target adalah Kader melakukan komunikasi intensif, melakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat bagi ibu hamil yang awalnya melakukan ANC di Kota Kediri dan pindah keluar kota / pinda periksa ke faskes diluar kota kediri dengan meminta nomor kontak persen ibu hamil untuk mengingatkan waktunya periksa, bila **sudah bersalin** di faskes luar kota bisa minta difotokan buku KIAnya untuk di catat di kohort ibu hamil. Sehingga bisa tercatat di wilayah Kota Kediri.

6. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang. Indikator ini menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Formula indikator yang digunakan adalah jumlah balita dengan gizi buruk dibanding jumlah balita yang ada di Kota Kediri. Berikut ini merupakan data persentase balita gizi buruk di Kota Kediri.

Tabel 2. 52 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Kediri	0,04	0,11	0,07	0,07	0,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase balita dengan gizi buruk mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir, yang semula berada di angka 0,04 di tahun 2019 menjadi 0,4 di tahun 2023. Kenaikan capaian ini disebabkan karena perubahan pengambilan data, data yang sebelumnya diambil secara manual dari laporan bulanan, untuk tahun 2023 data sudah diambil dari e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat yang sudah *by name by adress*.

Faktor yang mendorong keberhasilan beberapa tahun sebelumnya prevalensi gizi buruk ini dapat ditekan adalah Pemberian PMT baik penyuluhan maupun pemulihan/intervensi. Namun jika dibandingkan dengan target nasional <0,03, capaian persentase balita gizi buruk di Kota Kediri masih belum mencapai target nasional. Strategi yang dilakukan untuk mengurangi kasus gizi buruk di Kota Kediri adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan pola asuh anak,
- 2) Meningkatkan kerjasama lintas program dalam rangka menyelesaikan masalah penyakit penyerta,
- 3) Sweeping pemantauan pertumbuhan balita yang tidak datang ke posyandu

Adapun saran perbaikan agar dapat mencapai target nasional adalah:

- a) Meningkatkan kualitas PMT baik penyuluhan maupun pemulihan/intervensi
- b) Melakukan pendampingan pada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan TTD agar tidak berstatus bumil KEK yang menyebabkan melahirkan bayi BBLR. Bayi BBLR lebih berisiko menjadi balita gizi buruk. Dan meminimalisir terjadinya kelainan bawaan.
- c) Segera diaktifkan kembali posyandu yang belum aktif

7. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan kelurahan universal child immunization menggambarkan keadaan suatu kelurahan minimal 80% dari bayi (0-11Bln) yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu 1 tahun. Formula indikator yang digunakan adalah jumlah kelurahan UCI dibanding jumlah kelurahan yang ada di Kota Kediri. Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan kelurahan *universal child immunization* di Kota Kediri pada tahun 2019-2023.

Tabel 2. 53 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	95,65	95,65	95,65	93,47*

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

*) data masih sementara

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kondisi kinerja cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Realisasi cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2023 sebesar 93,47% atau sebanyak 43 kelurahan UCI dari 46 kelurahan di Kota Kediri. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerjanya sebesar 93,47% dengan kategori **berhasil**.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya indikator ini adalah:

- 1) Ketersediaan vaksin yang memadai
- 2) Fasilitas Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang tersebar di Kota Kediri sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan imunisasi
- 3) Peran serta kader kesehatan maupun tenaga kesehatan yang pro aktif dalam memantau status riwayat imunisasi anak melalui buku KIA di wilayah kerja masing-masing, sehingga anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai dengan jadwal.

Hambatan atau kendala yang menyebabkan tidak tercapai sesuai target adalah masih terdapat 3 kelurahan yang kurang dari 80% bayinya mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu Betet, banaran, ngletih. Hal ini disebabkan karena proyeksi surviving infant lebih tinggi dari pada bayi riil.

Jika dilihat dari permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut, maka strategi yang dapat diambil adalah strategi jemput bola. Melakukan sweeping imunisasi bagi bayi yang tidak datang ke puskesmas atau posyandu dimana petugas imunisasi mendatangi dari rumah ke rumah bayi yang tidak datang ke puskesmas maupun posyandu yang sudah terjadwal imunisasi

8. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita digunakan untuk menggambarkan rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita, capaiannya diperoleh dengan cara membandingkan jumlah posyandu dibanding dengan jumlah balita. Setiap posyandu dapat memberikan pelayanan Kesehatan pada sejumlah balita, dari sini dapat kita ketahui perlunya penambahan jumlah posyandu atau tidak dalam suatu wilayah. Berikut adalah data yang menunjukkan rasio posyandu per satuan balita di Kota Kediri pada tahun 2019-2023.

Tabel 2. 54 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:62	1:61	1:60	1:60	1:60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2023 rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita mempunyai trend positif. Pada tahun 2023 rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita adalah 1:60 yang artinya 1 posyandu rata-rata melayani 60 balita, sehingga capaiannya sebesar 101,64%. Target kinerja rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 1 : 61, sehingga capaian kinerjanya dikategorikan **berhasil**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 pada semester yang sama yaitu 1:60 dengan capaian 103,23%, maka rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita di tahun 2023 sama dengan tahun 2022 karena jumlah posyandu tidak bertambah sementara jumlah balita mengalami penurunan dibanding tahun 2022.

Berhasilnya rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita didukung dengan jumlah posyandu, kader, dan tenaga Kesehatan yang mencukupi. Pemberdayaan masyarakat semakin baik. Kader berperan sesuai fungsinya. Kerja sama lintas sektor terlaksana dengan baik.

9. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk digunakan untuk menggambarkan jumlah tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga medis yang kurang memadai atau tidak merata akan berdampak kurang maksimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diperoleh dengan membandingkan jumlah tenaga medis tahun ini dengan jumlah penduduk.

Tabel 2. 55 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	1:500	1:645	1:687	1:236	1:317

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, capaian tertinggi yakni di tahun 2022 rasionya sebanyak 1/236, dimana 1 petugas tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan kepada 236 penduduk dalam kurun waktu 1 tahun, dengan capaian 162,87%. Target kinerja rasio tenaga medis per satuan penduduk yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 1/635 yang artinya 1 orang tenaga medis melayani 635 penduduk, sehingga capaian kinerjanya telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori **berhasil**.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh jumlah Fasyankes dan Lembaga Pendidikan Kesehatan di Kota Kediri yang cukup banyak. Sehingga Kota Kediri menjadi daerah yang diminati oleh tenaga medis.

10. Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Cakupan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar menggambarkan cakupan pelayanan kesehatan neonatal (bayi usia 0-28 hari) esensial setiap bayi baru lahir sesuai standar, yang diperoleh dengan perhitungan Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah sasaran bayi baru lahir di x 100 % wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023.

Tabel 2. 56 Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		98,22	94	98	92,69*

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

**) data masih sementara*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif (tidak ada data pada tahun 2019) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar di Kota Kediri pada tahun 2023 terealisasi 92,69%. Target Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Dari target yang sudah ditentukan tersebut, maka capaian kinerja dengan kategori **berhasil**.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 98%, maka cakupan pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir di Kota Kediri pada tahun 2023 mengalami penurunan.

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar menggambarkan semua balita berusia 0-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun mendapatkan pelayanan sesuai standar, yang diperoleh dengan perhitungan Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dibanding Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama. Berikut

Adalah data yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023.

Tabel 2. 57 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		93,35	96	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa cakupan Pelayanan kesehatan anak balita Sesuai Standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 mengalami trend yang positif (tidak ada data pada tahun 2019). Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita Sesuai Standar di Kota Kediri pada tahun 2023 terealisasi 100%. Target Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita Sesuai Standar yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%, dari target yang sudah ditentukan tersebut, maka capaian kinerja dengan kategori **berhasil**.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100%, maka cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak balita di Kota Kediri pada tahun 2023 tetap stabil. Dari capaian tersebut diatas, masih perlu peningkatan, yaitu meningkatkan edukasi kepada ibu hamil pada kelas ibu hamil tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif.

12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar sesuai standar menggambarkan Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran, yang diperoleh dengan perhitungan Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibanding Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023

Tabel 2. 58 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator SPM	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar		100	84,42	125	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Kediri pada tahun 2023 tercapai 100%. Target Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai Standar yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Dari target yang sudah ditentukan tersebut, maka capaian kinerja masuk dengan kategori **berhasil**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 125%, maka Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan capaian pada tahun 2022 masih termasuk data siswa berdomisili luar wilayah puskesmas. Adapun faktor yang mendukung peningkatan dan keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam pelaksanaan kegiatan skrining
2. Menyediakan sarana prasarana meliputi buku raport kesehatan anak sekolah UKS Kit
3. Koordinasi dengan sekolah dalam pelaksanaan skrening anak sekolah supaya berjalan dengan lancar

Namun demikian masih perlu beberapa perbaikan untuk peningkatan pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai dengan standar, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang skrining
- 2) Memberikan umpan balik hasil skrening ke sekolah bagi siswa yang mengalami masalah kesehatan untuk disampaikan ke orang tua

13. Cakupan Pelayanan Hipertensi Sesuai Standar

Indikator ini menggambarkan setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang diperoleh dengan perhitungan. Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023.

**Tabel 2. 59 Cakupan Pelayanan Kesehatan Hipertensi Sesuai Standar
Di Kota Kediri Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Hipertensi Sesuai Standar	-	17,67	33	45	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa cakupan Pelayanan hipertensi sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Cakupan Pelayanan hipertensi sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2023 terealisasi 100%. Target Cakupan Pelayanan Hipertensi sesuai Standar yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang sudah tentukan dan merupakan target sasaran yang berhak mendapatkan pelayanan minimal sesuai standar. Adapun faktor yang mendorong keberhasilan ini adalah adanya dukungan kegiatan kunjungan ke rumah penderita hipertensi dan pengadaan peralatan tensi meter

14. Cakupan Pelayanan Diabetes Militus (DM) Sesuai Standar

Cakupan pelayanan diabetes melitus sesuai standar menggambarkan setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang diperoleh dengan perhitungan Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023

**Tabel 2. 60 Cakupan Pelayanan Kesehatan Diabetes Militus (DM) Sesuai Standar di
Kota Kediri Tahun 2019-2023**

No.	Indikator SPM	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Diabetes Militus (DM) Sesuai Standar	-	66,43	95	110	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa cakupan Pelayanan Diabetes Militus (DM) sesuai Standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 mempunyai trend positif, Dimana terjadi peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Cakupan Pelayanan Diabetes Militus (DM) sesuai Standar di Kota Kediri pada tahun 2023 terealisasi 100%. Target Cakupan Pelayanan kesehatan Diabetes melitus Sesuai Standar yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%, dari target yang sudah ditentukan tersebut, maka capaian kinerja dengan kategori **berhasil**.

Adapun faktor yang mendukung peningkatan dan keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah:

- 1) Adanya jejaring kemitraan dengan fasyankes yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas dalam pencatatan data penderita DM yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 2) sweeping penemuan penderita DM baru di masyarakat melalui Posbindu maupun posyandu lansia dan mengajak mereka mau datang ke puskesmas secara rutin
- 3) melakukan sosialisasi, edukasi dan konsultasi (memanfaatkan daring) dalam setiap kesempatan ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan secara rutin bagi penderita Diabetes mellitus

15. Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Sesuai Standar

Cakupan pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar menggambarkan Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya, yang diperoleh dengan perhitungan Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibanding Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023.

Tabel 2. 61 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator SPM	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Sesuai Standar	-	92,71	107	110	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 mempunyai trend kinerja yang positif, meningkat dari tahun ke tahun. Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2023 terealisasi 100%. Target Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai Standar yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Dari target yang sudah ditentukan tersebut, maka capaian kinerja dengan kategori **berhasil**

Adapun faktor yang mendukung peningkatan dan keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah:

- 1) Sudah terbentuknya Posyandu Jiwa di 9 puskesmas yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan pendampingan dari puskesmas bekerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan untuk meningkatkan cakupan layanan ODGJ dan menemukan sasaran

- 2) Memberdayakan keluarga, TRC Dinsos maupun kader Joyoboyo sebagai pengawas minum obat, serta menjelaskan tentang efek samping dari obat yang diberikan untuk meningkatkan cakupan layanan ODGJ dan menemukan sasaran.

Namun demikian masih perlu beberapa perbaikan untuk peningkatan pelayanan ODGJ berat agar sesuai dengan standar:

- 1) Memberikan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang penanganan pasien ODGJ dan mendorong masyarakat untuk menginformasikan jika ada permasalahan kesehatan jiwa di wilayahnya
- 2) Memberikan edukasi dan menyelenggarakan pelatihan Kesehatan Jiwa berbasis Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan kader jiwa yang ada di masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan jiwa.

16. Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar menggambarkan bahwa orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, diukur dengan membandingkan jumlah orang yang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar dengan jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu yang sama (sasaran/target ditentukan oleh pusat). Berikut adalah data yang menunjukkan persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kota Kediri pada tahun 2019-2023.

Tabel 2. 62 Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator SPM	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Terduga Tuberculosis (TB) Sesuai Standar	100	45,73	43,32	125	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 sempat mengalami naik turun, terutama pada masa pandemi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi capaian orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart pada tahun 2023 terealisasi 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100 %, maka capaian kinerjanya sudah mencapai target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **berhasil**. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh:

- a. Adanya Perubahan Definisi Operasional terduga TB sesuai dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 443.24/16163/102.3/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Penyesuaian indikator SPM pelayanan kesehatan orang

terduga Tuberkulosis, bahwa Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi:

1. Pemeriksaan klinis
 2. Edukasi tanpa pemeriksaan penunjang. Karena jika terduga TB harus diperiksa dahak, selama pandemi ini penjangingannya sulit
- b. Penjangingan terduga dari kontak erat pasien TBC sama seperti covid ada kontak tracing, sehingga Investigasi Kontak 1 pasien TB 20 kontak

17. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengeue (DBD)

Perhitungan yang digunakan sebagai indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD diperoleh dengan melalui jumlah penemuan penderita penyakit DBD dibanding jumlah penanganan penderita penyakit DBD. Cakupan penemuan dan Penanganan penderita DBD di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 63 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengeue (DBD) di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengeue (DBD)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Capaian kinerja penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Kediri pada tahun 2023 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 cukup stabil sesuai target yang ditetapkan.
- 2) Pada tahun 2023 di Kota Kediri ditemukan sebanyak 85 kasus DBD. Jumlah kasus ini menurun dari Tahun 2022 sebanyak 89 kasus DBD. Secara keseluruhan semuanya berhasil ditangani (hasil capaian 100%).
- 3) Target kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 100%, dari 85 pasien DBD yang ditemukan semuanya mendapatkan penanganan. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% (**berhasil**). Keberhasilan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ini didukung oleh logistic dan sumber daya manusia yang mencukupi untuk penanggulangan vector maupun penanganan penderita serta telah terbentuknya jejaring rujukan di wilayah Kota Kediri.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Kediri antara lain :

- 1) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara serentak disertai dengan kegiatan ledang oleh petugas Puskesmas;
- 2) Pemeriksaan Jentik secara Berkala (PJB) di rumah,sekolah dan TTU
- 3) Adanya tim pemantau jentik dari Puskesmas;
- 4) Antisipasi cepat melalui fogging daerah kasus;
- 5) Penyediaan alat dan bahan fogging;
- 6) Penyuluhan pencegahan DBD melalui media massa;
- 7) *Fogging focus*;
- 8) Memperkuat sistem jejaring rujukan, KIE kepada masyarakat untuk membiasakan PSN setiap saat

18.Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Orang dengan Resiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)

Indikator ini menggambarkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi HIV, setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, LSL, PSK, pengguna NAPZA, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, yang diperoleh dengan perhitungan jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibanding jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV (sasaran/ target ditentukan dari pusat). Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Orang dengan Resiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 64 Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Orang dengan Resiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS	100	91,98	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2023, Capaian pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi HIV mempunyai trend yang cukup bagus, walaupun sedikit mengalami penurunan pada masa pandemi, karena tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjanging orang dengan resiko terinfeksi HIV.

Cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi di Kota Kediri pada tahun 2023 terealisasi 100%. Target cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi **HIV** yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Dari target yang sudah ditentukan tersebut, maka capaian kinerja dengan kategori **berhasil**. Keberhasilan

cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi ini tidak terlepas dari kerjasama dengan *stakeholder* terkait kegiatan yang melibatkan populasi kunci.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 100%, maka cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi di Kota Kediri pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan jumlah target sasaran yang diproyeksikan masing-masing kriteria mengalami penurunan.

19. Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Indikator ini menggambarkan cakupan masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional, yang diperoleh dengan perhitungan jumlah peserta yang terdaftar JKN dibanding jumlah penduduk. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 65 Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	17,92	89,05	94,15	98	102,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian cakupan masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Kediri mempunyai trend yang positif yaitu terus meningkat melebihi angka target 102,1% UHC. Capaian kinerja cakupan masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Kediri pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan.

Target kinerja cakupan masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 98%, sedangkan capaian realisasi yang terjadi adalah mencapai 102,1%. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa program yang dilakukan termasuk dalam kategori **berhasil**. Keberhasilan ini didukung dengan adanya komitmen dari pemerintah Kota Kediri untuk mensukseskan Program UHC.

20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator ini menggambarkan cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar, diukur dengan membandingkan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dengan jumlah seluruh sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 66 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kota Kediri
Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	90,73	90,02	92	89.51

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun 2019-2023 dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga trendnya fluktuatif dari tahun ke tahun. Realisasi cakupan pelayanan Kesehatan ibu hamil tahun 2023 mencapai 89,51%. Jika target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%, maka diperoleh capaian kinerjanya yaitu sebesar 89,51% dan dikategorikan **berhasil**. Hal ini didukung oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Setiap Puskesmas di wilayah Kota Kediri mempunyai Inovasi ANC terpadu mobile yang melakukan pemeriksaan di masyarakat dengan membuka pelayanan (Rumah RW, di Balai Posyandu, dll).
2. Pelaksanaan Ante Natal Care Terpadu di semua Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri maupun Rumah sakit se Kota Kediri dengan berbagai macam Inovasi di masing masing Puskesmas
3. Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di semua Kelurahan.

Adapun kendala yang muncul pada pencapaian target indikator ini antara lain:

1. Tingginya mobilitas Ibu hamil saat periksa kunjungan ke empat (K4) sulit untuk di pantau, untuk itu diperlukan pemantauan wilayah setempat dengan maksimal Penduduk yang ber KTP Kota Kediri, tapi berdomisili/tinggal di luar wilayah Kota Kediri, yang awalnya melakukan ANC di Kota Kediri kemudian pindah tempat pemeriksaan ke luar wilayah Kota Kediri/ pindah domisili sehingga cakupan K4 tidak terpenuhi
2. Masih ada kasus bayi lahir premature (usia kehamilan kurang 7 bulan) sebanyak 37 ibu (0,83%), dengan kondisi tersebut bahwa pada persalinan prematur tidak bisa dihitung sehingga berpengaruh terhadap pencapaian K4 target Ibu hamil

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi lagi pada pencapaian yang akan datang, diantaranya:

1. Melakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat bagi Ibu hamil yang awalnya melakukan ANC di Kota Kediri dan pindah keluar kota/ pindah periksa ke fasyankes di luar Kota Kediri dengan meminta nomor yang bisa dihubungi Ibu hamil untuk

mengingatkan waktu periksa, bila sudah periksa di fasyankes luar kota dapat difotokan buku KIAnya untuk di catat di kohort Ibu hamil.

2. Pendampingan ibu hamil oleh kader dan Mahasiswa Institusi Kebidanan yang bermitra dengan TP PKK Kota Kediri dalam Program Gerakan Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi (GEMAKIBA) mulai dari masa hamil sampai masa nifas 42 hari Meningkatkan kerjasama dengan program Gizi dan memantau Gizi Ibu hamil selama masa kehamilan dan pemberian tablet tambah darah untuk mencegah terjadinya persalinan premature.

21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Indikator ini menggambarkan cakupan pelayanan Kesehatan pada usia produktif, diukur dengan membandingkan jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining sesuai standar dengan jumlah warga negara usia 15-59 thn yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif di Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 67 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		26,09	70,2	91	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja cakupan pelayanan Kesehatan pada usia produktif tahun 2019-2023 mengalami trend yang positif. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Kediri pada tahun 2023 tercapai 100%. Target kinerja cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%, ditetapkan dengan kategori **berhasil**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dengan capaian 91%, maka cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Kediri pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh:

1. Tersedia cukup BMHP
2. Percepatan deteksi dini faktor risiko PTM

Namun demikian masih ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target, diantaranya:

1. Sasaran masih dihitung dari proyeksi bukan data riil. Sehingga masih ada selisih sejumlah penduduk yang belum terlayani.
2. Meningkatnya jumlah usia produktif (bonus demografi), sementara tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang melakukan pemeriksaan, sehingga pelayanan belum dapat menjangkau seluruh jumlah penduduk usia produktif.

Agar kedepan pencapaian lebih maksimal, perlu strategi untuk menyelesaikan hambatan/kendala diatas, diantaranya:

1. Meningkatkan kegiatan deteksi dini faktor resiko PTM/ Posbindu Mobile bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor
2. Melakukan pemetaan sasaran untuk percepatan deteksi dini faktor resiko PTM di tingkat kelurahan
3. Melakukan refreshing kader posbindu untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM sehingga dapat membantu tenaga Kesehatan dalam melayani.
4. Melaksanakan integrasi dengan lintas program untuk meningkatkan cakupan.

22. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Indikator ini menggambarkan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, diukur dengan membandingkan jumlah lansia usia >60 thn yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dengan jumlah penduduk usia 60 thn keatas yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 68 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		14,48	64,73	87	97,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun hingga saat ini belum mencapai target maksimal. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Kediri tahun 2023 terealisasi 97,9%. Target kinerja cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian kerjanya masih dibawah target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 97,9% dengan kategori **berhasil**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 87%, maka cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Kediri pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Adapun kendala yang dihadapi untuk capaian yang belum maksimal adalah ketersediaan SDM yang tidak proporsional dengan jumlah sasaran lansia, dimana pelayanan yang memenuhi standar untuk satu orang lansia sangat banyak dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak bisa mengcover semua sasaran dalam kurun waktu satu tahun.

Strategi untuk mempercepat peningkatan cakupan usia lanjut menuju 100% pada tahun berikutnya meliputi:

1. peningkatan pemberdayaan kader untuk penambahan SDM dalam rangka *sweeping* pelayanan lansia
2. *mobile screening* untuk menjangkau sasaran lansia yang tidak dapat mengakses pelayanan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Pekerjaan Umum terdiri dari Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar dalam SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Kab/ Kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Mutu Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penerima layanan kepada Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dengan penerima layanan berupa Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Capaian SPM Pekerjaan Umum untuk Kota Kediri dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 69 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,56	90,65	95,69	91,00	100,00
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,82	90,02	90,22	90,83	91,03

Sumber: SPM Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

2. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum

Air minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030 mengharuskan pemerintah berinvestasi dalam infrastruktur air minum yang memadai, menyediakan fasilitas sanitasi, meningkatkan pengelolaan persampahan, serta melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air. Dalam lingkup global, negara – negara anggota PBB harus memastikan layanan air minum universal yang aman dan terjangkau untuk lebih dari 800 juta orang, terutama bagi warga yang kesulitan mengakses layanan dasar. Pada tahun 2015 terdapat 4,5 miliar jiwa tidak memiliki layanan sanitasi yang dikelola dengan aman dan 2,3 miliar jiwa yang tidak memiliki sanitasi dasar.

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum Kota Kediri Tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 70 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua					
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	90,56	90,65	95,69	91,00	100,00
Target 6.2. Pada tahun 2013, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan					
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	89,82	90,02	90,22	90,83	91,03
Persentase Tingkat Pelayanan air Limbah					

Sumber: SDGs Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Pada tahun 2023, rumah tangga yang menggunakan akses air bersih mengalami peningkatan sebanyak meningkat menjadi 102.045 rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dari 102.045 rumah tangga di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 100,00%. Peningkatan ini sebesar 9 % (9.180 Rumah Tangga) dikarenakan dari 2020-2022 masih belum memasukkan akses air minum non perpipaan dalam penghitungan.

Adapun upaya untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi tentang dampak pencemaran air.
2. Meningkatkan rehabilitasi pada catchment area guna memaksimalkan daerah tangkapan hujan.
3. Melakukan peningkatan SPAM perpipaan dan pembangunan tandon air.

Sedangkan untuk Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak pada tahun 2023, jumlah rumah tangga bersanitasi mengalami peningkatan sebanyak 203 rumah tangga menjadi 92.887 rumah tangga bersanitasi dari 102.045 rumah tangga yang ada atau terealisasi sebesar 91,03%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Kediri, antara lain adalah dengan melaksanakan sosialisasi tentang pengolahan limbah rumah tangga kepada masyarakat, melaksanakan program implementasi strategi sanitasi Kota Kediri dengan melibatkan perangkat daerah terkait melalui program dan

kegiatan yang ada, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL DS) baik melalui program dan kegiatan yang dibiayai APBD maupun APBN

3. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur Kota Kediri mulai diukur pada tahun 2022, pada tahun 2022 indeks infrastruktur dihitung melalui rata-rata dari 3 (tiga) kinerja infrastruktur yaitu kinerja infrastruktur jalan sebesar 72,09 %, kinerja infrastruktur air bersih sebesar 100,00% dan kinerja infrastruktur drainase sebesar 76,51 %. Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga kinerja tersebut , diperoleh indeks infrastruktur Kota Kediri sebesar 82,87%. Pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh indeks infrastruktur Kota Kediri sebesar 86,80%, yang merupakan rata-rata nilai dari masing-masing kinerja Infrastruktur jalan sebesar 77,40%, Kinerja Infrastruktur Air Bersih, sebesar 100,00% dan Kinerja Infrastruktur Drainase sebesar 83,01%.

Tabel 2. 71 Indeks Infrastruktur Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
indeks infrastruktur	-	70,00**	75,00**	82,87	86,80

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Laporan Akhir Indeks Infrastruktur dan pelayanan Jalan Kota Kediri Tahun 2023

** target indeks infrastruktur pada RPJMD 2020-2024

Berdasarkan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024, pada tahun 2023 nilai indeks infrastruktur yang ditargetkan sebesar 84,00% dan pada tahun 2024 sebesar 88.00%. Dengan nilai capaian indeks infrastruktur Kota Kediri sebesar 86,80%, maka target capaian untuk tahun 2023 dapat dipenuhi. Namun terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk mencapai target indeks infrastruktur di tahun 2024, antara lain:

1. Melengkapi pendataan kinerja jalan pada jalan dengan fungsi kolektor sekunder untuk mendukung pengukuran kinerja infrastruktur jalan pada indikator persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 Km/Jam). Kondisi saat ini pendataan kinerja jalan kolektor sekunder adalah sepanjang 50,83 Km dari total panjang jalan kota dengan fungsi kolektor sekunder sepanjang 52,25 Km
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas jembatan baik dalam kondisi baik maupun jembatan dalam kondisi rusak ringan
3. Meningkatkan kinerja pelayanan trotoar di Kota Kediri, khususnya pada kawasan pusat kegiatan dengan intensitas pejalan kaki yang tinggi. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan menambah panjang trotoar untuk meningkatkan kontinuitas jaringan jalur pejalan kaki, maupun meningkatkan kondisi perkerasan trotoar, khususnya pada ruas trotoar dengan kondisi rusak

4. Untuk meningkatkan pencapaian nilai rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan di Kota Kediri dapat dilakukan kajian pendahuluan mengenai tingkat aksesibilitas wilayah (diantaranya rasio luas jalan per luas wilayah, dan rasio panjang jalan per luas wilayah) sebagai pembanding dalam pengambilan keputusan penambahan panjang jalan pada area tertentu di Kota Kediri

Untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, perlu dievaluasi ruas jalan kewenangan kota di Kecamatan Mojojoto dengan peran strategis untuk ditingkatkan fungsinya menjadi kolektor sekunder, sebagaimana yang menjadi arahan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri Tahun 2021-2041

4. Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat pelayanan jalan dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan jalan dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi sosial masyarakat dan dasar perkiraan lalu lintas dimasa mendatang. Tingkat pelayanan jalan ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan dihitung dengan membandingkan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Volume lalu lintas merupakan salah satu faktor yang dapat menggambarkan bagaimana fasilitas jalan digunakan. Volume lalu lintas meningkat sejalan adanya bangkitan dan tarikan pergerakan. Kapasitas jalan merupakan kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu.

Agar suatu jalan dapat memberikan pelayanan yang memadai, maka volume pelayanan harus lebih kecil dari kapasitas jalan itu ($V/C < 1$). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dalam Pedoman Kapasitas Jalan Indoneia (2023), kinerja jalan diwakili oleh tingkat pelayanan (level of service, LOS) yaitu suatu ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas berkendara.

Tabel 2. 72 Tingkat Pelayanan Jalan Kota Kediri Tahun 2023

RPJMD			PKJI			Permenhub No. PM 96/2015	
Kategori	VCR / LoS	Jumlah	Kategori	VCR / LoS	Jumlah	Kategori	Jumlah
A	0,01-0,7	140	A	0 – 0,20	16	Sesuai	141
B	0,7-0,8	2	B	0,20 – 0,44	60	Perlu Pe-nanganan	1
C	0,8-0,9	-	C	0,45 – 0,74	64		
D	0,9-1,0	-	D	0,75 – 0,84	2		
E	>1,0	-	E	0,85 – 1,00	-		
		-	F	> 1,00	-		

Sumber : Hasil analisis berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Kediri tahun 2023

Analisis tingkat pelayanan jalan dihitung berdasarkan tingkat pelayanan dalam RPJMD Kota Kediri 2020-2024 dan PKJI 2023 sesuai dengan kelas jalan yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal kewenangan kota didapat rata-rata nilai VCR Jalan Arteri yaitu 0,55, VCR Jalan Kolektor adalah 0,48, dan VCR Jalan Lokal adalah 0,37. VCR secara keseluruhan jalan rata-rata di Kota Kediri adalah 0,46. Nilai tersebut cenderung sama dengan tingkat pelayanan jalan tahun 2022. Sedangkan, ketidakterersediaan data tingkat pelayanan jalan pada tahun 2019-2021 dikarenakan belum adanya kajian perhitungan tingkat pelayanan jalan tahun 2019 hingga 2021.

Berdasarkan indeks pelayanan jalan RPJMD Rata-rata Jalan di Kota Kediri masuk dalam kategori A dan berdasarkan PKJI masuk ke dalam kategori C, sesuai dengan Permenhub 96 tahun 2015 bahwa indeks pelayanan jalan sesuai dengan kelas dalam PKJI di Kota Kediri sudah sesuai kecuali Jalan Panglima Sudirman yang teridentifikasi memiliki VCR lebih besar dari 0,75 karena seharusnya standar Jalan Kolektor adalah Kelas C.

Kondisi ini merupakan kondisi saat ini, dimana Jalan Tol Kediri – Tulungagung dan Bandara Dhoho masih belum beroperasi. Peningkatan volume kendaraan pada jalan perkotaan dapat terjadi seiring berkembangnya infrastruktur pendukung jalan tol dan bandara di Kota Kediri. Maka dari itu perlunya dilakukan perhitungan secara berkala pada ruas jalan perkotaan untuk mengantisipasi kemacetan.

5. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat aksesibilitas antar wilayah dan pemenuhan jaringan jalan di Kota Kediri. Formula yang digunakan untuk menghitung proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap adalah perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap dengan panjang jaringan jalan.

Pada tahun 2023, realisasi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sepanjang 8,143 km menjadi sepanjang 329,338 km atau terealisasi sebesar 84,84%. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Mantap Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 73 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap/ Baik Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap/Baik	121,57	82,58	82,74	84,84	86,00

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ;
Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Indikator panjang jalan dalam kondisi baik/ mantap pada tahun 2019 adalah dihitung dengan membandingkan realisasi panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 339,072 km dibandingkan dengan target panjang jalan dalam kondisi baik yang ditargetkan yang ditetapkan sepanjang 278,919 km sehingga capaian kinerja mencapai 122%, pada RPJMD 2020-2024 setting target diubah menjadi proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dengan formula *Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (km)* dibagi *Panjang Jalan (km)*. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan capaian indikator di tahun 2019 dan capaian indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2020.

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap di Kota Kediri, antara lain:

1. Melakukan pembaharuan data leger jalan secara periodik.
2. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta sarana penunjang jalan lainnya.
3. Bekerjasama dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal terkait rekayasa lalu lintas maupun pembangunan rute baru terutama untuk kendaraan besar yang melalui Kota Kediri.

6. Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik

Proporsi jembatan dalam kondisi baik dipergunakan untuk mengetahui jumlah total jembatan dengan kondisi baik. Formula yang digunakan untuk menghitung proporsi jembatan dalam kondisi baik diperoleh dari jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan yang ada.

Pada tahun 2023, realisasi jembatan dalam kondisi baik berjumlah 57 jembatan dari 59 jembatan atau terealisasi sebesar 96,61%. Hal ini menurun apabila melihat pada tahun 2022 dimana dari 59 jembatan dengan bentang minimal 6 (enam) meter yang ada di Kota Kediri keseluruhannya dalam kondisi baik. Penurunan kondisi jembatan dalam kondisi baik ini disebabkan karena ada 2 jembatan yang mengalami kerusakan karena arus Sungai Kedak yakni jembatan yang ada di Kelurahan Mojoroto gg 7 dan jembatan yang ada di Kelurahan Bujel gg 3.

Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 74 Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	111,32	100,00	100,00	100,00	96,61

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Pada tahun 2019 formulasi penghitungan capaian jembatan dalam kondisi baik dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun 2019 sebanyak 59 unit dengan target jumlah jembatan dalam kondisi baik sebanyak untuk tahun 2019 yang ditetapkan sebanyak 53 unit sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 111,32%. Pada RPJMD 2020-2024 indikator proporsi jembatan dalam kondisi baik diperoleh dengan membandingkan jumlah jembatan dalam kondisi baik (unit) dengan jumlah jembatan yang ada di Kota Kediri (unit). Hal inilah yang mengakibatkan capaian indikator jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 111,32% menjadi 100,00% di tahun 2020.

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan proporsi jembatan dalam kondisi baik, antara lain:

1. Melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga terjalin sinergitas dalam peningkatan proporsi jembatan dalam kondisi baik.
2. Melakukan pemantauan dan perawatan terhadap kondisi jembatan yang ada secara berkala.
3. Melakukan update database jembatan untuk mengetahui jumlah dan kondisi jembatan di Kota Kediri, sehingga fungsi jembatan dan aksesibilitas semakin meningkat.

7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi menggambarkan sejauh mana tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sarana sanitasi, diperoleh dengan formula perbandingan antara jumlah rumah tangga bersanitasi dengan jumlah rumah tangga di Kota Kediri. Pada tahun 2023, jumlah rumah tangga bersanitasi mengalami peningkatan sebanyak 203 rumah tangga menjadi 92.887 rumah tangga bersanitasi dari 102.045 rumah tangga yang ada atau terealisasi sebesar 91,03%. Persentase rumah tinggal bersanitasi tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 75 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	89,82	90,02	90,22	90,83	91,03

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase rumah tinggal bersanitasi, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi tentang pengolahan limbah rumah tangga terpusat kepada masyarakat.
2. Melaksanakan program implementasi strategi sanitasi Kota Kediri.
3. Pembangunan IPAL Komunal.

8. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat menunjukkan sejauh mana jalan di Kota Kediri telah dilengkapi saluran pembuangan dalam kondisi baik sehingga mampu mengalirkan air limpasan hujan ke badan air tanpa menimbulkan genangan. Formula yang digunakan yaitu perbandingan antara panjang saluran drainase dalam kondisi baik dengan panjang drainase yang ada di Kota Kediri. Pada tahun 2023 realisasi panjang drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan sepanjang 41,977 km menjadi sepanjang 450,810 km drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat dari 496,335 km saluran drainase yang ada di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 82,37%.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 76 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	189,59	89,50	76,42	82,37	90,83

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Kediri selama lima tahun dari 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif cenderung turun, terjadinya penurunan yang tajam dari 189,59% di tahun 2019 menjadi 89,50% di tahun 2020 dikarenakan adanya *updating data*, nilai tersebut menurun selama 2 tahun mencapai 76,42% di tahun 2021 dan kembali naik di tahun 2022 dengan capaian 82,37% dan pada tahun 2023 menjadi 90,83%. Pada Tahun 2023 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan terdapatnya 3 (tiga) pekerjaan pelebaran drainase di bawah perlintasan kereta api yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab tidak lancarnya aliran air dari timur perlintasan kereta api menuju Sungai Brantas yang mengakibatkan terdapatnya genangan di beberapa ruas jalan bagian timur perlintasan kereta api.

Hambatan dan kendala untuk meningkatkan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Kediri, antara lain :

1. Belum tersedianya prasarana dalam penanganan banjir dalam kota.
2. Tertutupnya inlet saluran diakibatkan adanya perubahan fungsi bahu jalan menjadi oprit (menambah/merubah jalan masuk kerumah atau pertokoan), bahu jalan berubah menjadi paving atau beton sehingga posisinya lebih tinggi dari bahu jalan.
3. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran.

Upaya untuk terus meningkatkan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Kediri, antara lain:

1. Membentuk tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk melakukan pengerukan/pembersihan sedimentasi di gorong-gorong rawan genangan air dan pada sungai sebagai upaya revitalisasi fungsi sungai dan gorong - gorong.
2. Meningkatkan pemeliharaan/rehabilitasi ataupun pembangunan gorong-gorong pada titik rawan banjir.

9. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap digunakan untuk mengetahui keberfungsian jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. Formula yang digunakan untuk menghitung persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap adalah membandingkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan total panjang jaringan irigasi yang ada di Kota Kediri. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Mantap tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2. 77 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap	67,14	68,00	71,55	80,51	88,99

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan sepanjang 8,46 km menjadi 88,81 km irigasi dalam kondisi baik dari 99,80 km Panjang jaringan irigasi yang ada di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 88,99%. Hambatan dan kendala untuk meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Adanya beberapa saluran irigasi yang bersentuhan dengan tanah warga.
2. Faktor cuaca yang ekstrim sehingga meningkatkan jumlah fluktuasi air.
3. Belum optimalnya pengelolaan sumber mata air dan sungai oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap, antara lain:

1. Menjaga komunikasi dan komitmen warga dalam pemeliharaan jaringan irigasi.
2. Adanya pola kerja yang efektif melalui sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan antara pemerintah Kota Kediri dan masyarakat.
3. Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dengan daerah terutama terkait sempadan sungai, saluran, mata air yang menjadi kewenangan pusat.

10. Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan

Rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan bertujuan untuk mengetahui tingkat keterjangkauan jaringan irigasi terhadap luas persawahan. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan adalah membandingkan antara panjang jaringan irigasi terbangun dengan luas lahan baku sawah yang aktif di kota Kediri.

Pada tahun 2023, jaringan irigasi mengalami peningkatan sepanjang 9,96 km menjadi 528,96 km dari 1.708 hektar atau terealisasi sebesar 30,97%. Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 78 Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Persawahan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Persawahan	-	30,00	30,24	30,36	30,97

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Hambatan dan kendala untuk meningkatkan rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan adalah semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan budidaya seperti permukiman terutama pada daerah aliran sungai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan di Kota Kediri adalah menetapkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan.

11. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan bertujuan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih yang layak di Kota Kediri. Formula yang digunakan yaitu membandingkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dengan jumlah rumah tangga di Kota Kediri.

Pada tahun 2023, rumah tangga yang menggunakan akses air bersih mengalami peningkatan menjadi 102.045 rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dari 102.045 rumah tangga di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 100,00%. Peningkatan sebesar 9 % (9.180 Rumah Tangga) dikarenakan dari 2020-2022 masih belum memasukkan akses air minum non perpipaan dalam penghitungan.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 79 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	90,56	90,65	90,97	91,00	100,00

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Adapun upaya untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi tentang dampak pencemaran air.
2. Meningkatkan rehabilitasi pada *catchment area* guna memaksimalkan daerah tangkapan hujan.
3. Melakukan peningkatan SPAM perpipaan dan pembangunan tandon air

12. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Ketaatan terhadap RTRW diukur untuk melihat keterpaduan, keserasian pembangunan dengan dokumen tata ruang yang dimiliki. Formula yang digunakan untuk menghitung ketaatan terhadap RTRW adalah membandingkan antara luas pemanfaatan yang sesuai RTRW/RDTR dengan jumlah luas pemanfaatan lahan di Kota Kediri. Pada tahun 2023, luas pemanfaatan lahan yang sesuai RTRW mengalami peningkatan seluas 58,57 km² menjadi 5,338,57 km² luas pemanfaatan yang sesuai RTRW/RDTR dari 6,340

km² jumlah luas pemanfaatan lahan di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 84,20%. Persentase ketaatan RTRW tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 80 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	79,92	81,50	81,50	83,28	84,20

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase ketaatan RTRW, antara lain:

1. Kemudahan dalam pengurusan permohonan tata ruang melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin pemanfaatan ruang.
3. Pembangunan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR)

13. Rasio Bangunan Ber-IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Per-Satuan Bangunan

Rasio Bangunan Ber-IMB/PBG per-satuan bangunan digunakan untuk mengetahui persentase bangunan di Kota Kediri yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber-IMB/PBG per satuan bangunan yaitu jumlah bangunan ber-IMB/PBG dibanding jumlah bangunan yang ada.

Pada tahun 2023, jumlah bangunan ber-IMB mengalami peningkatan sebanyak 198 bangunan ber-IMB menjadi 42.807 bangunan ber-IMB/PBG dari 69,097 bangunan yang ada di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 61,95%. Rasio Bangunan Ber-IMB/PBG Per Satuan Bangunan tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 81 Rasio Bangunan Ber-IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) per Satuan Bangunan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Bangunan Ber-IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) per Satuan Bangunan	44,23	40,30	40,98	61,67	61,95

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Pada tahun 2020 capaian rasio bangunan ber-IMB peraturan bangunan mengalami kenaikan yang cukup besar karena terjadi *updating* data melalui survei dan digitalisasi pada komponen perhitungan capaian indikator ini yang mengakibatkan kenaikan yang signifikan pada tahun 2022.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan proporsi rasio bangunan ber-IMB/PBG di Kota Kediri, antara lain:

1. Menyusun database persetujuan bangunan gedung.
2. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk mengurus izin PBG.
3. Menerbitkan surat pemberitahuan dan peringatan bagi warga yang belum mengurus persetujuan bangunan gedung

14. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dengan Trotoar

Proporsi panjang jaringan jalan dengan trotoar digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas trotoar untuk meningkatkan kenyamanan bagi pejalan kaki di Kota Kediri. Formula yang digunakan yaitu membandingkan antara panjang trotoar dengan jumlah panjang jalan yang layak dipasang trotoar.

Pada tahun 2023, realisasi jumlah panjang trotoar sepanjang 40,141 km dari 94,650 km panjang jalan yang layak dipasang trotoar atau terealisasi sebesar 45,58%. Proporsi panjang jaringan jalan dengan trotoar tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 82 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dengan Trotoar

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dengan Trotoar	12,74	16,10	45,35	45,58	42,44

Sumber : Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan dengan trotoar, antara lain:

1. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan trotoar untuk menambah kenyamanan dan estetika kota
2. Menambah jalur penyanggah disabilitas (*guiding block*) untuk meningkatkan pembangunan responsif gender.

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat merupakan pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pemerintah daerah di bidang perumahan, untuk jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di Kota Kediri selama tahun 2020-2021 diberikan kepada warga yang terkena kebakaran dan puting beliung. Jumlah warga yang memperoleh rumah layak huni selama ini diajukan setelah diajukan permohonan ke Pemerintah Kota Kediri melalui kepala daerah, kemudian

diverifikasi dan disetujui oleh dinas teknis dan dilakukan pembangunan/ rehabilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat.

Sedangkan untuk pelayanan dasar minimal lainnya yang harus disediakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan adalah jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni tidak pernah disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri. Hal ini disebabkan selama ini tidak ada program Pemerintah Kota Kediri yang mengenai perumahan/ permukiman masyarakat Kota Kediri yang mengakibatkan masyarakat harus direlokasi ke tempat lain.

Tabel 2. 83 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022

Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai salah satu jenis pelayanan dasar yang masuk SPM bidang Perumahan Rakyat tidak pernah dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, karena di Kota Kediri pernah program pemerintah Kota Kediri yang mengakibatkan relokasi rumah layak huni bagi yang terdampak program pemerintah.

2. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Perumahan Rakyat

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa upaya yang signifikan untuk membangun dan mengelola ruang kota. Pesatnya pertumbuhan kota akibat meningkatnya populasi dan meningkatnya migrasi telah menyebabkan ledakan di kota-kota besar, terutama di negara berkembang, dan permukiman kumuh menjadi ciri kehidupan perkotaan yang tidak terhindarkan.

Upaya mewujudkan kota berkelanjutan berarti menciptakan peluang karier dan bisnis, perumahan yang aman dan terjangkau, serta membangun masyarakat dan ekonomi yang tangguh. Ini memerlukan investasi dalam transportasi umum, menciptakan ruang terbuka hijau publik, dan meningkatkan perencanaan dan manajemen perkotaan dengan cara partisipatif dan inklusif.

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 84 *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh					
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	N/A	3,34	3,34	2,26	2,14
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	93,93	94,35	94,91	94,93	95,26

Sumber: SDGs Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022

Terjadi penurunan jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dari tahun 2020-2023, dari 3,34 Ha di tahun 2020 menjadi 2,14 Ha, berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/10/419.033/2020 tahun 2020 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman. Indikator rasio rumah layak huni diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah yang ada di wilayah Kota Kediri. Pada tahun 2023, realisasi rasio rumah layak huni mengalami peningkatan sebanyak 198 rumah layak huni menjadi sebanyak 56.722 total bangunan rumah yang ada di Kota Kediri atau sebesar 95,26%. Capaian ini diperoleh dengan program perbaikan rumah tidak layak huni baik dari dana APBD maupun sumber dana yang lain yang ada di Kota Kediri.

3. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator rasio rumah layak huni diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah yang ada di wilayah Kota Kediri. Pada tahun 2023, realisasi rasio rumah layak huni mengalami peningkatan sebanyak 198 rumah layak huni menjadi sebanyak 56.722 total bangunan rumah yang ada di Kota Kediri atau sebesar 95,26%. Capaian ini diperoleh dengan program perbaikan rumah tidak layak huni baik dari dana APBD maupun sumber dana yang lain yang ada di Kota Kediri.

Kinerja peningkatan rasio rumah layak huni tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 85 Rasio Rumah Layak Huni Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Rumah Layak Huni	93,93	94,35	94,91	94,93	95,26

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022

Faktor pendukung peningkatan rasio rumah layak huni antara lain:

1. Program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR.
2. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam perbaikan rumah tidak layak huni.
3. Peran serta fasilitator dari Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Hambatan dan kendala untuk meningkatkan rasio rumah layak huni adalah terhambatnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni dikarenakan kepemilikan tanah bukan atas nama yang bersangkutan/penghuni. Adapun upaya untuk terus meningkatkan rasio rumah layak huni antara lain:

1. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang program perbaikan rumah tidak layak huni.
2. Melakukan optimalisasi database rumah tidak layak huni
3. Melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional terkait dokumen kepemilikan lahan, misalkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
4. Melakukan Kerjasama dengan pemangku wilayah terkait bukti pendukung legalitas lahan, misalkan surat waris, letter C

4. Persentase Pemukiman yang Tertata

Indikator persentase permukiman yang tertata diperoleh dengan membandingkan jumlah perumahan yang memiliki izin prinsip perumahan dibandingkan dengan jumlah perumahan yang ada di Kota Kediri. Pada tahun 2023 perumahan yang memiliki izin prinsip perumahan sebanyak 73 perumahan yang memiliki ijin prinsip dari jumlah perumahan yang ada di Kota Kediri sebanyak 76 perumahan, atau sebesar 96,05%. Kinerja peningkatan persentase permukiman yang tertata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 86 Persentase Pemukiman yang Tertata di Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pemukiman yang Tertata	*	100,00	100,00	95,65	96,05

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022; Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

* indikator ini merupakan indikator baru di RPJMD 2020-2024 dan belum menjadi indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di RPJMD 2014-2019.

Faktor pendukung peningkatan persentase permukiman yang tertata antara lain:

1. Kesadaran pengembang perumahan untuk mengajukan izin prinsip
2. Kemudahan dalam pengajuan perijinan berupa KKPR/KRK melalui OSS RBA.

Upaya untuk terus meningkatkan persentase permukiman yang tertata antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi perizinan perumahan di Kota Kediri yang dilakukan secara periodik.
2. Sosialisasi tentang mekanisme perizinan perumahan kepada stakeholder perumahan secara intensif.

Penyederhanaan sistem perizinan yang lebih mudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Indikator persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan diperoleh dengan membandingkan luas kawasan permukiman kumuh dibanding dengan luas wilayah Kota Kediri. Pada tahun 2023 realisasi luas kawasan permukiman kumuh di Kota Kediri 2,14 hektar dari luas wilayah Kota Kediri sebesar 6.719,95, atau sebesar 0,03%. Kinerja peningkatan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 87 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	_*	0,0530	0,0500	0,0340	0,032

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022; Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

* indikator ini merupakan indikator baru di RPJMD 2020-2024 dan belum menjadi indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di RPJMD 2014-2019.

Keberhasilan capaian pengurangan luasan kawasan kumuh tersebut tidak terlepas oleh adanya dukungan dan sinergi yang baik dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengurangan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan antara lain:

1. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat
2. Belum adanya kolaborasi dalam intervensi penanganan permukiman kumuh antar OPD.
3. Belum maksimalnya koordinasi antar OPD maupun stakeholder perumahan dan kawasan permukiman baik melalui Kelompok kerja maupun Forum Perumahan dan kawasan Permukiman tingkat Kota.

Upaya untuk terus meningkatkan persentase permukiman yang tertata antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat dan bersih
2. Menyusun dokumen perencanaan terkait perumahan dan Kawasan permukiman khususnya mengenai kawasan kumuh

6. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

Indikator cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU diperoleh dengan membandingkan jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh rumah yang ada di Kota Kediri.

Pada tahun 2023 realisasi jumlah lingkungan yang didukung PSU sebanyak 2.709 rumah yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dari jumlah seluruh rumah sebanyak 3.122 rumah atau sebesar 86,77%. Kinerja peningkatan cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU tahun 2019- 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 88 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)	-*	80,00	80,00	82,00	86,77

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022; Data

Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

* indikator ini merupakan indikator baru di RPJMD 2020-2024 dan belum menjadi indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di RPJMD 2014-2019.

Faktor pendukung dalam meningkatkan cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU, yaitu:

1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan yang dilakukan secara periodik
2. Verifikasi terhadap PSU perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri setiap tahunnya.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pengembang dalam penyediaan PSU bagi lingkungan perumahan yang dibangun
2. Terdapat PSU yang tidak terpelihara akibat pengembang perumahan lama yang tidak diketahui keberadaannya.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat terkait faktor pendukung dan hambatan yang dialami dalam meningkatkan cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU, antara lain:

1. Pemberian insentif ataupun disinsentif bagi pengembang perumahan terkait penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan PSU di lingkungan perumahan.
2. Sosialisasi tentang penyerahan PSU dalam kaitannya dengan kesinambungan pengelolaan/ pemeliharaan PSU dan terjaminnya hak-hak penghuni perumahan atas penyediaan PSU

7. Rasio Lampu Penerangan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

Indikator rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri diperoleh dengan membandingkan jumlah lampu dalam kondisi baik di Kota Kediri dengan jumlah penerangan jalan lingkungan yang ada. Pada tahun 2023 realisasi lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri sejumlah 9.589 jumlah penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri dari seluruh Penerangan Jalan Lingkungan yang ada yaitu sebanyak 10.703 titik, atau sebesar 89,59%.

Kinerja rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 89 Rasio Lampu Penerangan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Lampu Penerangan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	83,77	75,00	87,83	87,84	89,59

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022; Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

Pada RPJMD Kota Kediri 2014-2019 terdapat indikator jumlah penerangan jalan umum yang terpasang (titik), target 2019 adalah 13.240 titik dan dapat terealisasi 11.091 titik sehingga diperoleh capaian sebesar 83,77%. Pada RPJMD 2020-2024 ditetapkan indikator baru terkait penerangan jalan lingkungan yaitu Rasio Lampu Penerangan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik dimana dihitung dengan membandingkan jumlah lampu dalam kondisi baik di Kota Kediri dengan jumlah penerangan jalan lingkungan yang ada. Dari perubahan indikator dan formulasi yang digunakan terjadi penurunan target dan capaian untuk indikator ini pada tahun 2020. Faktor pendukung dalam meningkatkan rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri diperoleh akibat peran serta masyarakat dalam memelihara jaringan penerangan jalan lingkungan yang dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) maupun masyarakat secara mandiri.

Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri antara lain:

1. Terjadi kerusakan karena faktor non teknis seperti pohon tumbang, longsor, hewan pengerat yang tidak dapat diprediksi
2. Kerusakan akibat dari penyambungan penerangan jalan lingkungan ilegal
3. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang ada

Upaya-upaya yang dilakukan terkait faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri antara lain:

- a. Pemutusan Jaringan penerangan jalan lingkungan ilegal;
- b. Penambahan SDM dan sarana dan prasarana berupa snorkel penerangan jalan lingkungan; dan
- c. Peningkatan kualitas jaringan pada ruas jalan tertentu yang sering terjadi kerusakan jaringan penerangan jalan lingkungan

8. Persentase Jaringan Drainase Lingkungan yang Berfungsi dengan Baik

Indikator persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik diperoleh dengan membandingkan panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik dengan panjang drainase lingkungan secara keseluruhan.

Pada tahun 2023 realisasi panjang jaringan drainase lingkungan di Kota Kediri sebesar 113.147 m panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik dari panjang drainase lingkungan secara keseluruhan sepanjang 122.866 m, atau sebesar 92,09%.

Tabel 2. 90 Persentase Jaringan Drainase Lingkungan yang Berfungsi dengan Baik Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jaringan Drainase Lingkungan yang Berfungsi dengan Baik	.*	89,77	90,04	91,27	92,09

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022; Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

* indikator ini merupakan indikator baru di RPJMD 2020-2024 dan belum menjadi indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di RPJMD 2014-2019.

Faktor pendukung meningkatnya persentase jaringan drainase yang berfungsi dengan baik oleh adanya program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selanjutnya, di masa yang akan datang perbaikan jaringan drainase lingkungan dapat didukung melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat maupun kolaborasi dengan berbagai pihak.

9. Persentase Rusunawa yang Dikelola Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik

Indikator persentase rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah diperoleh dengan membandingkan jumlah rusun dalam kondisi baik dengan jumlah rusun terbangun. Pada tahun 2023 realisasi rusun dalam kondisi baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri sebanyak 5 *twin block* dengan jumlah rusun yang terbangun 5 *twin block*, atau sebesar 100%. Adapun kinerja persentase Rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 91 Persentase Rusunawa yang Dikelola Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rusunawa yang Dikelola Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2023

10. Indeks Kota Layak Huni

Kota Layak Huni atau *Livable City* merupakan kota dimana semua penduduknya dapat tinggal dengan nyaman dan mendapatkan akses yang mudah. *Livable City* menurut IAP (Ikatan Ahli Perencana) adalah kota layak huni yang menggambarkan lingkungan yang nyaman dan suasana kota sebagai tempat tinggal dan bekerja, dengan melihat berbagai aspek baik secara fisik (fasilitas perkotaan, infrastruktur, tata ruang, dan lain-lain) serta non-fisik (sosial hubungan, kegiatan ekonomi, dan lain-lain).

Tingkat *Livable City* kota-kota besar di Indonesia yang diteliti oleh IAP (Ikatan Ahli Perencanaan) dengan sifat '*snapshot*' yaitu observasi yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Berikut adalah data yang menunjukkan indeks kualitas lingkungan hidup Kota Kediri pada tahun 2019-2023 ;

Tabel 2. 92 Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri Tahun 2019-2023

Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH	70.37	72.6	77.8	79.37	79.83

Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 nilai Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri sebesar 79.83 atau naik sekitar 0,46 poin dari tahun 2022 yakni 79,37. Dari hasil kajian indeks kota layak huni didapat kesimpulan bahwa yang memiliki nilai cukup yakni sektor :

1. Sektor Informal kota
2. Fasilitas Pejalan kaki
3. Pengelolaan drainase

Sedangkan indikator lain pada kondisi baik dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 2. 93 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Kediri Tahun 2022

No	Indikator	Nilai indikator	Mutu pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Keamanan Kota	80.32%	B	Baik
2	Fasilitas keamanan	80.61%	B	Baik
3	Politik kota	81.15%	B	Baik
4	keselamatan kota	82.82%	B	Baik
5	kesehatan kota	78.13%	B	Baik
6	Fasilitas kesehatan	84.30%	B	Baik
7	kebersihan kota	77.27%	B	Baik
8	Persampahan	78.40%	B	Baik
9	Pengelolaan air bersih	83.53%	B	Baik
10	Perekonomian kota	76.72%	B	Baik
11	Fasilitas ekonomi	79.47%	B	Baik
12	sektor informal kota	72.22%	C	Cukup
13	Ketercukupan pangan	83.04%	B	Baik
14	Informasi pembangunan dan partisipasi Masyarakat	81.36%	B	Baik
15	Fasilitasi administrasi pemerintahan dan pelayanan public	81.74%	B	Baik
16	Perumahan	80.59%	B	Baik
17	Fasilitas peribadatan	84.49%	B	Baik
18	Fasilitas Pendidikan	82.07%	B	Baik
19	Fasilitas Taman Kota	83.73%	B	Baik
20	Fasilitas Olahraga	77.04%	B	Baik
21	Fasilitas Kesenian dan budaya	78.07%	B	Baik
22	Pelestarian cagar budaya	79.67%	B	Baik
23	Fasilitas pejalan kaki	72.42%	C	Cukup
24	Transportasi	77.66%	B	Baik
25	Pengelolaan Drainase	74.76%	C	Cukup
26	Jaringan telekomunikasi	81.75%	B	Baik
27	Kelistrikan	82.29%	B	Baik
28	Penataan kota	77.96%	B	Baik
29	IKLH Kota Kediri	79.83%	B	Baik

Sumber : Dokumen IKLH, 2023

11. Persentase penatagunaan tanah yang berkualitas

Persentase penatagunaan tanah yang berkualitas di peroleh dengan membandingkan Jumlah tata guna tanah yang berkualitas dibagi dengan jumlah tata guna tanah.

Tabel 2. 944 Realisasi indikator kinerja penatagunaan tanah yang berkualitas tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Presentase Realisasi indikator penatagunaan tanah yang berkualitas	NA	NA	NA	66,67%	66,67%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Pada sasaran strategis, meningkatnya kualitas penatagunaan tanah tahun 2023, realisasi dari indikator kinerja persentase penatagunaan tanah yang berkualitas yaitu sebesar (66,67%) dengan capaian indikator kinerja persentase penatagunaan tanah yang berkualitas sebesar (102,56%) dan anggaran Rp. 80.000.000,- realisasi Rp 56.362.400,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar (69,89%). Berdasarkan capaian kinerja pada indikator tersebut dan capaian realisasi anggaran, sehingga pada sasaran strategis ini bisa dikatakan efisien.

Tabel 2. 955 Realisasi indikator kinerja penatagunaan tanah yang berkualitas tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi anggaran program penatagunaan tanah yang berkualitas	NA	NA	89,66%	5,57%	69,89%

Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

Dalam melaksanakan program penatagunaan tanah yang berkualitas perlu adanya penyusunan dan inventarisasi data pertanahan dulu, sehingga di tahun 2024 dapat memaksimalkan kegiatan untuk melakukan database pertanahan yang menjadi kewenangan atau urusan pemerintah daerah

Upaya-upaya yang dilakukan terkait faktor pendukung dalam meningkatkan kegiatan pertanahannya, kedepannya perlu adanya perubahan program menjadi program pengelolaan tanah kosong dengan indikator programnya presentase ketersediaan dokumen data/informasi tanah kosong di tahun 2025 – 2026.

2.4.1.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2019 – 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 96 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pengurusan surat terdaftar organisasi masyarakat dan ijin penelitian	Persentase diterbitkannya surat terdaftar dan ijin yang telah memenuhi persyaratan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Sosialisasi peraturan perundangan terbaru mengenai perpolitikan.	Persentase tersosialisasikannya peraturan perundangan mengenai politik yang terkini	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Penyadaran masyarakat akan pentingnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kegiatan peningkatan penyadaran/ motivasi masyarakat akan pentingnya Wawasan Kebangsaan baik secara langsung maupun lewat media online/ media massa.	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pemantauan Kegiatan di tingkat Kota dan demo di Kota Kediri	Persentase kegiatan pemantauan acara di tingkat Kota dan aksi demo masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian indikator untuk jenis pelayanan dasar pelayanan yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi tetap perlu ditingkatkan baik dalam kuantitas, khususnya dalam hal kualitas. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk mempertahankan capaian indikator tersebut di tahun berikutnya antara lain :

1. Penguatan regulasi serta anggaran pembiayaan untuk semua program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Peningkatan pemahaman pemangku kebijakan terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan semua unsur di masyarakat Kota Kediri untuk menciptakan Kota Kediri yang lebih Harmonis secara utuh, dengan dasar Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
3. Peningkatan partisipasi unsur Pentahelix dalam peningkatan kewaspadaan dini dan tanggap terhadap setiap potensi konflik yang ada di lingkungan masing-masing;
4. Penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Tabel 2. 97 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkara Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	97,5%	95%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	91,53%	96,94%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian indikator untuk jenis pelayanan dasar pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota dan Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2022 sebesar 97,5% dan 91,53% belum mencapai 100%.

Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum capaiannya 2023 turun dari 2022 karena pada penilaian mutu di aplikasi SPM pada indikator Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) tidak tercapai karena pada tahun 2023 Satpol PP belum menyusun Dokumen Standar Pelayanan Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum terhadap Perda dan Perkada.

Adapun upaya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut di tahun berikutnya antara lain :

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan SPM Trantibum tahun-tahun sebelumnya;
- 2) Menganggarkan kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM;
- 3) Mempelajari regulasi terkait SPM, dan penginputan capaian SPM triwulanan melalui aplikasi.

Tabel 2. 98 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	92,7%	100%	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	83,3%	83,33 %	67%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	75%

Sumber : BPBD Kota Kediri

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian indikator untuk jenis pelayanan dasar pada Tahun 2023 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 67 % dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 75 %, belum mencapai 100%, maka dari itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut di tahun berikutnya antara lain :

1. Penguatan regulasi untuk program penanggulangan bencana;
2. Peningkatan pemahaman pemangku kebijakan terhadap risiko bencana

3. Peningkatan partisipasi unsur Pentahelix dalam penanggulangan bencana.
4. Penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat serta pemulihan pascabencana.

2. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban yaitu nilai capaian penegakan 12 Ruang Lingkup Ketentraman dan Ketertiban di Kota Kediri berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diukur dengan indikator tujuan Indeks Ketentraman dan ketertiban didapat dari nilai survei capaian kuisisioner yang dibagikan kepada 50 responden secara acak, adapun kuisisioner berisikan tentang penegakan 12 ruang lingkup ketentraman dan ketertiban di Kota Kediri (berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat). Ruang Lingkup yang dimaksud adalah:

- (1) Tertib jalan dan angkutan jalan;
- (2) Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- (3) Tertib Sungai, saluran dan mata air;
- (4) Tertib usaha;
- (5) Tertib lingkungan;
- (6) Tertib bangunan;
- (7) Tertib sosial masyarakat;
- (8) Tertib kesehatan;
- (9) Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- (10) Tertib pemondokan, kos, dan penginapan/ hotel;
- (11) Tertib kependudukan; dan
- (12) Tertib pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Peraturan daerah Ketentraman dan Ketertiban mencakup 12 Tertib diatas yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam menegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum di masyarakat. Ke-12 Tertib tersebut menjadi Variabel yang akan menjadi dasar mengukur Tingkat Trantibum di Kota Kediri. Setiap, variabel memiliki Bobot Nilai yang berbeda sesuai dengan penting dan urgensi substantif penegakan Trantibum di Kota Kediri. Penilaian di lakukan dengan survei kepada masyarakat secara langsung untuk menilai persepsi mereka tentang Trantibum. Analisis Data dilakukan dengan menilai 4 level jawaban, jawaban angka 4 = sangat setuju, angka 3 = Setuju, angka 2 = Cukup dan angka 1 = Tidak Setuju. Sasaran survei Trantib adalah perangkat publik (kelurahan, RT/RW, Ormas, dan masyarakat).

Adapun data capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 99 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Kediri Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	N/A	86	87	87,11	86,65

Sumber: Satpol PP Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Ketentraman dan Ketertiban dari tahun 2020 sampai dengan 2022 bertahap meningkat dan terjadi penurunan 0,46 poin pada tahun 2023 dikarenakan Indeks Trantib didapat dari survei jadi nilainya tergantung dari kondisi sosial masyarakat atau faktor eksternal.

Indeks Trantib mulai dihitung untuk periode Renstra tahun 2020-2024, sedangkan pada tahun 2019 belum ada perhitungan Indeks Trantib.

Tabel 2. 100 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR SDGs	SATUAN	TAHUN DASAR	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	%	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
2.	Jumlah desa tangguh bencana yang baru dibentuk dikawasan rawan bencana	Desa/ kelurahan	N/A	N/A	N/A	8	6	N/A
3.	Persentase desa tangguh bencana	%	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
4.	Persentase sistem peringatan dini / EWS yang berfungsi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A

Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Tabel 2. 101 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR SDGs	SATUAN	TAHUN DASAR	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	dokumen	1	2	2	2	2	2
3.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	100	100	100	300	300
4.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	100	100	100	300	300
5.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	1	1	1	1	1	1
6.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	100	100	100	100	100	100
7.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	dokumen	3	3	3	3	3	3
9.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	orang	50	50	50	50	130

Sumber: Kesbangpol, 2023

Tabel 2. 102 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR SDGs	SATUAN	TAHUN DASAR (2019)	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1.033	1.033	78	90	80	95
2.	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	1	3	4	1	15
4.	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	2	2	3	4	4	52

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, 2023

3. Potensi Konflik Yang Tertangani

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali sehingga dapat mengakibatkan potensi konflik. Indikator potensi konflik yang tertangani menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam menangani potensi konflik. Potensi konflik yang tertangani pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 103 Potensi Konflik yang Tertangani Tahun 2019-2023

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Potensi konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi konflik yang tertangani selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 konsisten berada di angka 100%.

4. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Persentase penegakan Perda dihitung dari jumlah penyelesaian penegakan perda dibagi jumlah pelanggaran perda dikali seratus persen. Indikator ini bertujuan menghitung jumlah kasus pelanggaran perda yang berhasil terselesaikan sesuai prosedur yang berlaku dalam satu tahun. Pada tahun 2019 terdapat 37 kasus pelanggaran Perda dan seluruhnya telah terselesaikan, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 9 kasus pelanggaran perda dan seluruhnya juga telah terselesaikan. Namun pada tahun 2021 persentase penegakan perda menurun menjadi 95,93% dengan jumlah kasus sebanyak 123 dan terselesaikan sebanyak 118 sampai dengan akhir tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran Perda terjadi peningkatan yang sangat besar dikarenakan adanya perubahan persepsi terkait kasus yang termasuk dalam pelanggaran perda (reklame). Jumlah kasus pelanggaran Perda pada tahun 2022 sebanyak 2.478 yang seluruhnya terselesaikan pada tahun yang sama atau Persentase Penegakan Perda sebesar 100%. Adapun data penegakan Perda dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 104 Penegakan Peraturan Daerah (%) Kota Kediri Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan
2019	100 %	37	37
2020	100 %	9	9
2021	95,93 %	123	118
2022	100 %	2.478	2.478
2023	100%	2.768	2.768

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran perda dalam kurun waktu 5 tahun bersifat fluktuatif dengan jumlah pelanggaran perda tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan total 2.768. Namun demikian, persentase penegakan peraturan daerah secara umum berada di angka 100%.

Jumlah data pada tahun 2022 dan 2023 meningkat tajam dibandingkan data pada tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan pengklasifikasian kasus pelanggaran Perda. Data pada tahun 2022 dan 2023 terdapat data pelanggaran Perda terkait pemasangan reklame dimana pada tahun sebelum 2022 data pemasangan reklame tidak dimasukkan ke dalam pelanggaran Perda.

5. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3)

Tingkat penyelesaian K3 dihitung dengan membandingkan pelanggaran K3 yang terselesaikan dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikali seratus persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Kediri pada 5 tahun terakhir ditargetkan sebesar 100%. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan kasus pelanggaran dan gangguan ketentraman, ketertiban, serta keindahan di Kota Kediri.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) meliputi semua gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan di Kota Kediri baik yang terdapat di Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan produk hukum Lainnya ataupun tidak. Dalam penerapan kehidupan bermasyarakat misalnya adanya gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang seringkali meresahkan masyarakat. Gangguan ketertiban misalnya pengusaha yang mengoperasikan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, adanya ruang terbuka hijau yang semakin menambah peluang maraknya pelanggaran ketertiban. Gangguan keindahan misalnya pemasangan reklame yang tidak sesuai aturan penempatan dan perizinannya sehingga mengurangi keindahan kota. Adapun data tingkat penyelesaian K3 dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 105 Tingkat Penyelesaian K3 (%) Kota Kediri Tahun 2019-2023

Tahun	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan
2019	100 %	6.477	6.477
2020	100 %	2.062	2.062
2021	99,85 %	3.311	3.306
2022	100 %	2.894	2.894
2023	100%	3.007	3.007

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan bersifat fluktuatif, dengan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 secara umum berada di angka 100%.

6. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) bencana kebakaran dihitung dengan formula indikator jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikalikan seratus persen. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) dihitung mulai diterimanya pengaduan, persiapan sampai dengan paling lambat 15 menit sampai ke tempat kejadian untuk memulai melakukan penanganan.

Berikut adalah data yang menunjukkan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 106 Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK Kota Kediri Tahun 2019-2023

Tahun	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Kasus Kebakaran (Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit)	Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK)
2019	100 %	54	54
2020	96,3 %	27	26
2021	92,86 %	28	26
2022	100 %	33	33
2023	87,83 %	101	115

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Waktu tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) bersifat fluktuaktif dengan tren cenderung meningkat mengingat kejadian kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran tidak dapat dikendalikan jumlah dan lokasinya pada setiap tahunnya. Untuk Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2023 turun sebesar 12,17% dari tahun 2022 dikarenakan meningkatnya jumlah kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran

serta sebaran lokasi kejadian kebakaran yang tertangani diatas 15 menit merupakan area di barat Sungai Brantas yang mana lokasi Pos Pemadam Kebakaran sendiri berada di timur Sungai Brantas sehingga waktu penanganan lebih dari 15 menit.

7. *Response Time* Penanganan Bencana

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *Response Time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kejadian bencana diterima oleh Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), pengiriman Tim Reaksi Cepat, sampai pada penanganan darurat bencana dilakukan. Realisasi *Response Time* Penanganan Bencana tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 107 *Response Time* Penanganan Bencana Tahun 2019 - 2023

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Response Time Penanganan Bencana	15 menit				

Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada kejadian bencana di Kota Kediri tahun 2019 sampai dengan 2023, rata-rata waktu penanganan bencana adalah 15 menit.

8. Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana menggambarkan ketahanan suatu daerah terhadap risiko bencana yang ada. Formula indikator yang digunakan untuk menghitung indeks ketahanan daerah terhadap bencana adalah rata-rata jumlah indeks skala prioritas. Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta turunan aturannya. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indeks ketahanan daerah terhadap bencana. Pengukuran indeks ketahanan daerah terhadap bencana berpedoman pada 7 prioritas, yaitu:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik;
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Adapun indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 108 Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Tahun 2019-2023

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,51	0,52	0,65	0,76	0,77

Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Indeks ketahanan daerah terhadap bencana pada tahun 2023 berada di angka 0,77. Angka ini mengalami peningkatan sejumlah 0,1 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 0,76, sehingga semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Daerah maka upaya pemerintah untuk peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana semakin tinggi dan baik.

2.4.1.6 Urusan Sosial

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial tahun 2019 – 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 109 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN				
			2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	95,71	100	100*
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	96,67	100*
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	91,20	93,76	93,84	81,05	100*
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di - luar panti	100	100	91,49	90,45	96,48*

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN				
			2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	97,49	100	100	100

Sumber : Dinsos Kota Kediri, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat 3 (tiga) capaian indikator untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti belum mencapai 100%, maka dari itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut di tahun berikutnya dengan optimalisasi pemberian bantuan sosial antara lain :

1. Bantuan sosial bagi orang dengan kecacatan berat;
2. Bantuan sosial bagi anak terlantar;
3. Bantuan sosial Asistensi Penyandang Disabilitas, Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
4. Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis.

2. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. PPKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 110 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	2019	TAHUN			
				2020	2021	2022	2023
1.	PPKS Non Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial	orang	5.724	4.950	2.335	3.780	3.673
2.	PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	orang	5.726	4.975	2.499	3.948	3.716
3.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	99,97%	99,5%	93,4%	95,7%	98,8%

Sumber : Dinsos Kota Kediri, 2024

Keterangan * data sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 persentase jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami penurunan perihal tersebut diakibatkan oleh program – program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kediri antara lain :

- a) Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD);
- b) Pendataan Lanjut Usia Terlanjur (ASLUT);
- c) Bantuan terhadap Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB);
- d) Bantuan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- e) Bantuan Langsung Tunai Pekerja di industri pengolahan tembakau

3. PPKS yang Tertangani

Indikator PPKS yang tertangani merupakan kumulatif PPKS yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial untuk semua jenis program layanan yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Kediri. Program tersebut berupa pemenuhan kebutuhan dasar, program capaian SPM, program rehabilitas sosial maupun pemberdayaan sosial dan program lain yang dilaksanakan Dinas Sosial. Indikator ini dihitung dari rerata capaian masing-masing indikator program kinerja Dinas Sosial. Adapun data capaian kinerja untuk indikator ini dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 111 PPKS yang Tertangani Tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TAHUN			
			2020	2021	2022	2023
1.	Persentase PPKS yang tertangani	87,52%	91,69%	90,39%	95,74%	99,03%

Sumber : Dinsos Kota Kediri, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 fluktuatif mengalami turun naik dengan kecenderungan meningkat di tiap tahunnya. perihal tersebut diakibatkan oleh program – program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan melakukan berbagai pembinaan terhadap PPKS, diantaranya adalah memberi pelatihan kewirausahaan pada PPKS, pemberian layanan bagi anak terlantar di panti sosial, memberi pelatihan keterampilan kepada anak jalanan, bantuan sosial uang tunai bagi orang dengan kecacatan berat, pengiriman dan pemberian bantuan peralatan sekolah kepada petirah, rehabilitasi sosial, pemberian santunan kematian kepada masyarakat tidak mampu, penyaluran Program Keluarga Harapan, santunan kepada anak yatim, pemberian jaminan hidup bagi lansia terlantar (ASLUT), pemberian bantuan pangan non tunai.

4. PPKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PPKS yang dimaksud dalam indikator ini dikhususkan untuk keluarga fakir miskin skala kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2019 -2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 112 PPKS Skala Kota yang Menerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2019 - 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR (2019)	TAHUN			
				2020	2021	2022	2023
1.	PPKS skala kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	11.890	27.365	33.300	28.715	31.157*
2.	PPKS skala kota yang seharusnya menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	14.449	30.042	39.640	29.038	31.715*
3.	PPKS skala kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	82,29	91,09	84,01	98,89	98,24*

Sumber : Dinsos Kota Kediri, 2024

Keterangan * data sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase PPKS skala kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2019-2023 cenderung

mengalami peningkatan, dengan rata-rata per-tahun sebesar 3,90%, perihal tersebut diakibatkan oleh program – program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan melakukan berbagai pembinaan terhadap PPKS, diantaranya adalah memberi bantuan sosial uang tunai bagi orang dengan kecacatan berat, penyaluran Program Keluarga Harapan, santunan kepada anak yatim, pemberian jaminan hidup bagi lansia terlantar (ASLUT), pemberian bantuan pangan non tunai.

5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini merupakan perhitungan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 113 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	SATUA N	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	unit	13	13	14	14	14
2.	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	unit	13	13	14	14	14
3.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinsos Kota Kediri, 2024

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Kediri pada tahun 2019 hingga 2023 konsisten mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa panti sosial yang ada sudah berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

6. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Kejadian bencana merupakan hal yang tidak diharapkan terjadi di setiap tempat, termasuk Kota Kediri. Datangnya tidak terduga dan tidak dapat diperkirakan. Ketika bencana datang, praktis akan memerlukan penanganan dan pemenuhan kebutuhan yang tidak sedikit. Untuk itu, upaya mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan korban

bencana mutlak harus dipersiapkan terus menerus untuk mencegah dampak yang lebih parah bagi korban bencana alam. Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 114 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	orang	3	25.146	4.263	0	10*
2.	Korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	orang	3	25.146	4.263	0	10*
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	0	100

Sumber : Dinsos Kota Kediri, 2024

Keterangan * data sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 dengan catatan jumlah warga Kota Kediri yang terdampak sebanyak 25.146 orang, semuanya mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui program Isoman dan penyaluran bantuan melalui Kartu Sahabat. Pada tahun 2022 tercatat tidak ada kejadian yang dikategorikan sebagai bencana baik itu bencana alam, maupun bencana sosial di Kota Kediri, sehingga tidak ada target pemenuhan kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/ Kota di Kediri. Meskipun tidak ada penyaluran pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana, Dinas Sosial tetap siaga dan sudah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pangan sebanyak 8 (delapan) paket. Paket tersebut dijadikan persediaan sebagai antisipasi jika sewaktu - waktu dibutuhkan sedangkan pada tahun 2023 terdapat 10 orang penderita Covid-19 dan semuanya mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

7. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar penerima jaminan sosial bagi para penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial. Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 115 Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	orang	862	904	1.107	2.633	951*
2.	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya telah menerima jaminan sosial	orang	943	962	1.175	2.807	951*
3.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	91,41	93,97	94,21	93,80	100

Sumber : Dinsos Kota Kediri, 2024

Keterangan * data sementara

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di tahun 2023 sebanyak 951 orang, angka ini mengalami penurunan sebanyak 1.856 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 2.807 orang, meskipun demikian persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan rata-rata per-tahun sebesar 2,19%.

2.4.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR

2.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu)

daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

1. Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023, jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami fluktuasi. Jumlah pekerja yang paling sedikit ditempatkan terjadi di tahun 2020 saat terjadi Pandemi Covid-19, banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan ataupun tidak membuka lowongan kerja. Sementara jumlah pekerja yang paling banyak ditempatkan setelah pandemi Covid-19 berlalu terjadi pada tahun 2023 sebanyak 463 orang dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 802 orang atau meningkat sebanyak 41 orang dibanding tahun 2022. Data pencari kerja terdaftar dan pencari kerja yang ditempatkan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 116 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	4.125	668	528	761	802
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	2.681	140	281	451	463
% Pencari Kerja yang Ditempatkan	64,99	20,96	53,22	59,26	57,73

Sumber : BPS Kota Kediri, 2023

2. Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Jumlah Pemberi Kerja/Badan Usaha (PKBU) di Kota Kediri yang mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2019-2023 secara berturut-turut adalah 1.155; 1.208; 1.285; 1.233; dan 1.717 PKBU. Pada tahun 2023 banyaknya PKBU yang mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan sebanyak 484 PKBU atau sebesar 39,25%, demikian juga dengan jumlah tenaga kerja yang didaftarkan meningkat sebanyak 1.018 orang atau sebesar 3,11% dibanding tahun 2022. Peningkatan yang terjadi didorong mulai bangkitnya perusahaan-perusahaan setelah terpuruk karena pandemi Covid-19 dan adanya dukungan program hubungan industrial pada sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja terkait perlindungan pekerja rentan, serta program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang dicover oleh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara jumlah kepesertaan tenaga kerja/buruh dalam Program BPJS Ketenagakerjaan paling rendah terjadi pada tahun 2020 saat Pandemi Covid-19 melanda yaitu sebanyak 30.925 tenaga kerja. Pada masa Pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang terdampak,

bahkan mengalami kebangkrutan hingga melakukan pengurangan karyawan dengan melakukan PHK besar-besaran.

Tabel 2. 117 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pemberi Kerja/Badan Usaha (PKBU)	1.155	1.208	1.285	1.233	1.717
Tenaga Kerja Peserta Jamsostek	36.906	30.925	32.388	32.783	33.801

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Kediri, 2023

3. Tenaga Kerja Terbina Kompetensi

Berdasarkan data BPS Kota Kediri, beberapa jumlah lowongan kerja terdaftar tidak terpenuhi oleh pencari kerja. Pada tahun 2022, jumlah lowongan yang terdaftar sebanyak 1.063 lowongan dengan jumlah pencari kerja sebanyak 761 orang, namun pencari kerja yang memenuhi lowongan atau ditempatkan hanya sebanyak 451 orang. Ada gap antara jumlah pencari kerja, lowongan yang tersedia dan pekerja yang memenuhi lowongan diduga ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan keterampilan pekerja yang dibutuhkan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan sesuai bidang yang diminati sehingga SDM di Kota Kediri berkompeten, profesional dan memiliki komitmen. Jumlah tenaga kerja terbina kompetensi di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 118 Tenaga Kerja Terbina Kompetensi di Kota Kediri Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	350	400	2.904	2.859

Ket. : Data Tahun 2019 tidak tersedia karena merupakan indikator baru pada RPJMD Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, 2023

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan program pelatihan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan, sedangkan identifikasi kebutuhan pelatihan harus dilakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengguna atau industri. Jika hasil identifikasi kebutuhan pelatihan telah tersedia standar kompetensinya baik Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI) atau Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), maka program pelatihan dapat disusun berdasarkan standar kompetensi tersebut. Sedangkan materi pelatihan disusun mengacu kepada isi atau substansi dari program pelatihan. Materi pelatihan sebagai

sumber pembelajaran merupakan penjelasan atau informasi yang lebih rinci dari suatu (unit) kompetensi pada standar kompetensi kerja deskriptif. Dengan demikian terdapat keterkaitan antara program pelatihan dengan materi pelatihan yaitu pada standar kompetensi kerja.

Dari tahun 2020-2023, jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan tren peningkatan dengan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi sebanyak 2.904 orang atau meningkat 626%. Namun dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi berkurang 45 orang menjadi 2.859 orang dikarenakan adanya peserta yang mengundurkan diri, sudah mendapatkan pekerjaan, dan ada yang pindah keluar kota ketika proses pemanggilan dan adanya pembatasan peserta setiap batch pelatihan untuk memberikan hasil yang lebih optimal dan berkualitas. Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 32 pelatihan antara lain pelatihan administrasi perkantoran, bengkel motor, bengkel sepeda, budidaya perikanan, *cleaning service*, *content creator*, desain grafis, *digital marketing*, fotografi, *handycraft*, instalasi listrik, jahit, pengelasan, operator *excavator*, operator *forklift*, perhotelan, *bakery*, tata boga tradisional, tata boga modern, tata rambut/*barber*, tata rias, tukang bangunan, *urban farming*, videografi, pijat disabilitas, kewirausahaan, kendaraan, satpam, teknisi HP, teknisi laptop/ PC, teknisi AC, barista.

2.4.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Predikat Pengarusutamaan Gender

Predikat Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Indikator ini diukur melalui 3 komponen yaitu 1) pelebagaan PUG, 2) penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan, serta 3) inovasi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Kategori predikat PUG meliputi tingkat pratama, madya, nindya, utama dan mentor. Penyelenggaraan evaluasi Pengarusutamaan Gender melalui APE dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Sejak keikutsertaannya dalam APE pada tahun 2017, Pemerintah Kota Kediri berhasil menyandang predikat Madya hingga tahun 2021. Dan pada tahun 2023 ini Predikat PUG Kota Kediri meningkat pada kategori Nindya.

Hal ini didukung dengan pemenuhan tiga prasyarat PUG meliputi komitmen melalui terbitnya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, penguatan kelompok kerja PUG,

penyediaan SDM terlatih dalam P2TP2A yang akan bertransformasi menjadi UPTD PPA, serta penyediaan data terpilah gender.

2. Predikat Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) digambarkan sebagai kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan media massa. Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengembangan KLA menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030, setiap tahun dilaksanakan evaluasi KLA yang bertujuan melihat sejauh mana komitmen dan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak.

Kategori predikat KLA meliputi tingkat pratama, madya, nindya, utama dan KLA. Keikutsertaan Pemerintah Kota Kediri dalam Evaluasi KLA diawali pada tahun 2015 dan memperoleh predikat Pratama, selanjutnya sejak tahun 2018 pencapaian predikat KLA Kota Kediri meningkat pada kategori Madya dan belum mengalami perubahan kategori hingga tahun 2023.

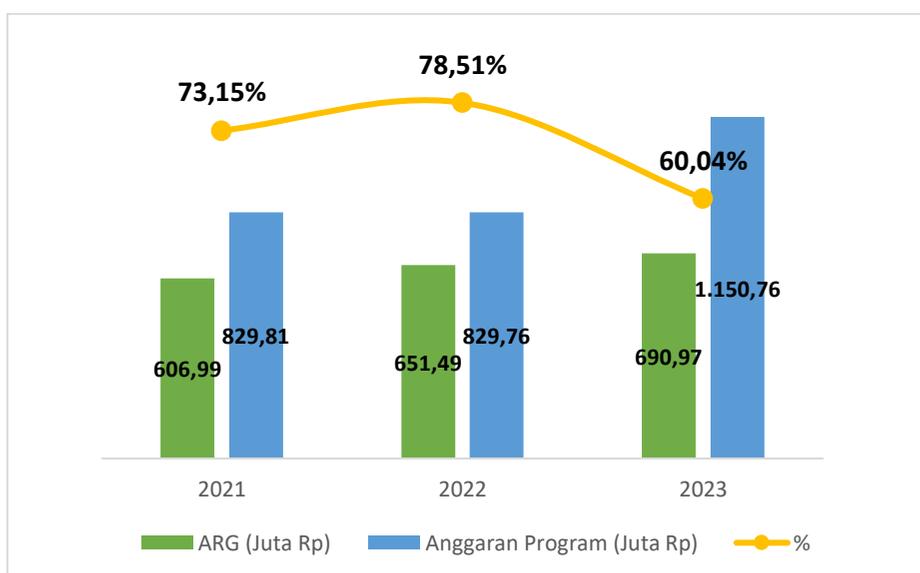
Capaian pemenuhan 24 indikator KLA dari 5 (lima) klaster substantif hak anak dan kelembagaan, serta 2 indikator tambahan yaitu Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) dan Kecamatan Layak Anak (Kelana) diupayakan melalui penguatan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak, penguatan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, optimalisasi kegiatan pendukung penyelenggaraan lima klaster KLA, meliputi Hak Sipil Kebebasan; Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar & Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya; dan Perlindungan Khusus; serta peningkatan kolaborasi dengan Lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa dalam mendorong percepatan Kota Kediri menuju Kota Layak Anak.

3. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah Anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Indikator Persentase ARG dihitung dari jumlah ARG pada belanja operasional dan belanja modal APBD dibanding jumlah seluruh belanja operasional dan belanja modal APBD tahun yang bersangkutan. ARG Kota Kediri pada tahun 2023 sebesar Rp. 690.970.362.492,- atau 60,04% dari total belanja operasional dan belanja modal APBD Kota Kediri TA 2023 sejumlah Rp 1.150.755.911.364,-. Persentase ARG tahun 2023 menurun 18,47%

dibanding tahun 2022, namun demikian jumlah ARG meningkat sejumlah Rp 39.483.318.611,-. Peningkatan jumlah ARG menunjukkan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini didorong dengan adanya penguatan kelompok kerja PUG dan peningkatan kapasitas SDM terlatih PUG dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Perkembangan persentase ARG Kota Kediri pada tahun 2021-2023 dapat dicermati dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2. 41 Persentase Anggaran Responsif Gender Kota Kediri Tahun 2021-2023



Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2023

4. Persentase Jumlah Wanita Kawin Usia dibawah 20 tahun

Indikator ini menggambarkan jumlah perkawinan anak yang diukur dari perbandingan jumlah wanita yang kawin pada usia muda yaitu di bawah 20 tahun dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS).

Pada tahun 2023 terdapat 39 wanita yang kawin pada usia muda (di bawah usia 20 tahun) atau sebesar 0,09% dari keseluruhan pasangan usia subur yang ada di Kota Kediri sebanyak 43.007 pasangan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, persentase jumlah wanita kawin usia dibawah 20 tahun menurun 0,02%, yaitu sebanyak 47 wanita kawin usia di bawah 20 tahun dari 42.553 Pasangan Usia Subur atau 0,11%. Hal ini didorong dengan edukasi resiko perkawinan dini melalui Duta Generasi Berencana (Genre), peran pendidik sebaya dalam mencegah perkawinan anak penguatan ketahanan keluarga melalui Kampung Keluarga Berkualitas, serta pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja yang didukung penuh oleh Tim Penggerak PKK Kota Kediri.

Perkembangan wanita kawin usia dibawah 20 tahun di Kota Kediri selama tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 119 Persentase Jumlah Wanita Kawin Usia dibawah 20 tahun

Tahun	Jumlah Wanita Kawin Usia dibawah 20 Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	% Wanita Kawin Usia dibawah 20 Tahun
2018	128	44.110	0,29
2019	268	44.820	0,60
2020	166	44.721	0,37
2021	47	42.757	0,109
2022	47	42.553	0,11
2023	39	43.007	0,09

Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri , 2023

Upaya menekan angka perkawinan persentase Jumlah wanita kawin usia dibawah 20 tahun merupakan salah satu strategi dalam menangkap peluang bonus demografi yang saat ini telah dicapai Kota Kediri, yaitu dengan mempertahankan Total Fertility Rate (TFR) yang rendah untuk memperlama masa pencapaian bonus demografi.

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain. KDRT tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga kekerasan secara psikologis dan seksual.

Rasio KDRT menggambarkan prevalensi KDRT di suatu wilayah atau kelompok masyarakat yang diukur dengan membandingkan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dengan jumlah rumah tangga. Perkembangan Rasio KDRT Kota Kediri selama tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2. 120 Rasio KDRT di Kota Kediri Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah KDRT	Jumlah Rumah Tangga	Rasio KDRT
2018	1	74.612	0,0013
2019	11	N/A	N/A
2020	13	N/A	N/A
2021	6	75.234	0,0079
2022	4	75.615	0,0052
2023	6	75.985	0,0079

Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2023

Pencapaian kasus KDRT yang tertangani tidak terlepas dari adanya sinergi lintas sektor yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

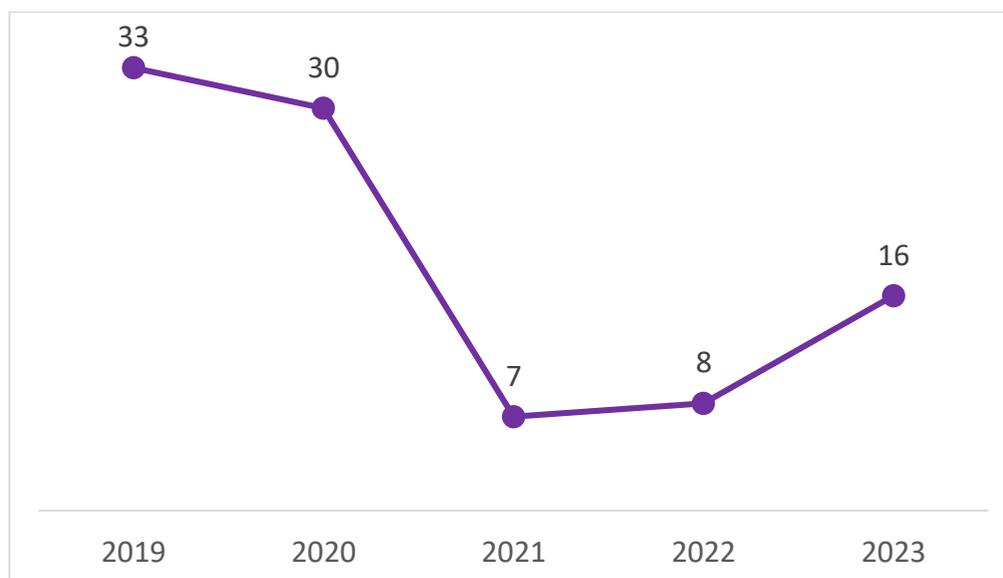
Anak (P2TP2A), serta peran dan kinerja Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di 3 kecamatan dan 46 kelurahan.

5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Kediri telah terfasilitasi dengan baik dari tahun ke tahun. Keberhasilan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di pusat pelayanan terpadu ini tidak lepas dari adanya sinergi lintas sektor yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta peran dan kinerja Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) pada masing-masing kecamatan dan 46 kelurahan dalam melakukan penjangkauan kasus hingga ke level RT. Untuk mengoptimalkan fungsi P2TP2A pada tahun 2023 ini telah disusun Naskah Akademik UPTD PPA sehingga diharapkan P2TP2A akan bertransformasi menjadi UPTD PPA pada tahun 2024..

Perkembangan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang memperoleh penanganan dalam pusat pelayanan terpadu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 121 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Terlayani di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Kediri Tahun 2018-2022



Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2023

2.4.2.3 Urusan Pangan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Pemerintah Kota Kediri

berkomitmen untuk melaksanakan urusan ketahanan pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri dengan tolak ukur sebagai berikut :

1. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Tujuan PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) yang didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptability), serta kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability). Skor Pola Pangan Harapan selama 5 tahun terakhir terdapat pada tabel :

Tabel 2. 122 Skor Pola Pangan Harapan Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Skor Pola Pangan Harapan	89,74	89,57	90,57	90,60	94,83

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan di Kota Kediri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 terjadi penurunan 0,17% hal tersebut dikarenakan terdapatnya Pandemi Covid 19. Sedangkan pada tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi kenaikan skor pola pangan harapan di Kota Kediri sehingga hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.

2. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimal untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim,

sumber daya alam, sumberdaya genetik, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan tingkat kesehatan.

Kondisi ketahanan pangan daerah digambarkan dengan Peta Ketahanan Pangan Dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas-FSVA*). Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan dan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan. Peta FSVA terdiri dari 3 indikator yakni ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Adapun persentase penanganan daerah rawan pangan Kota Kediri Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 123 Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Kediri Tahun 2019-2023

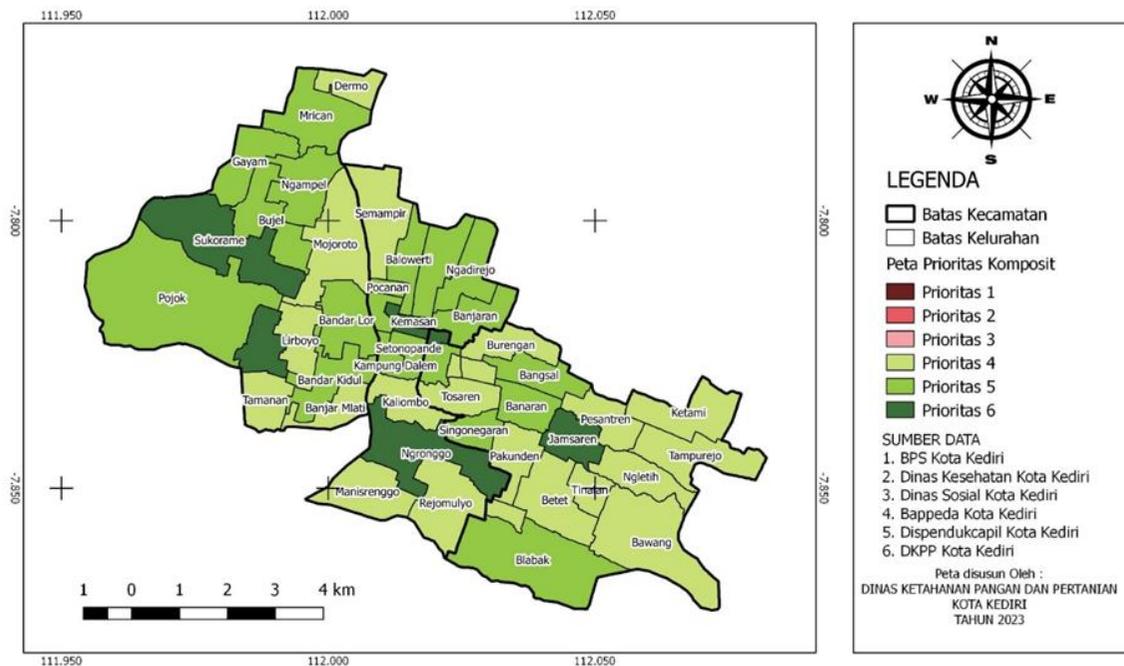
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penanganan daerah rawan pangan	62.30%	62.70%	63.00%	100%	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

Pada tahun 2021 penanganan daerah rawan pangan mencapai 63% sedangkan tahun 2022 penanganan daerah rawan pangan mencapai 100%. hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022 sampai tahun 2023 di Kota Kediri tidak ada daerah rawan pangan.

Selain itu salah satu faktor pendukung dalam penanganan daerah rawan pangan di Kota Kediri adalah terdapatnya anggaran Prodamas plus di kelurahan sehingga seluruh wilayah memiliki akses yang memadai dalam pemenuhan pangan.

Gambar 2. 16 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Kediri Tahun 2023



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, 2023

3. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Ketersediaan energi dan protein perkapita perhari merupakan parameter dari kemampuan pemerintah dalam penyediaan pangan dari hasil produksi dalam daerah, pasokan pangan dan pengelolaan cadangan pangan yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Untuk mengetahui persentase ketersediaan energi dan protein dilakukan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM). Hasil dari analisis Neraca Bahan Makanan tahun 2022 yang bersumber dari pemantauan secara periodik dan kontinu pengumpulan data stok ketersediaan pangan di wilayah Kota Kediri, menunjukkan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 3.730 kkal/kap/hari, sedangkan standar nasional AKE adalah 2.400 kkal/kap/hari. Persentase AKE Kota Kediri dibanding standar nasional sebesar 155,42%. Begitu pula untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) diperoleh hasil yang lebih tinggi yaitu 108 gr/kap/hari dibanding standar AKP nasional sebesar 63 gr/kap/hari. Persentase AKP kota Kediri dibanding standar nasional sebesar 171,42%.

Tabel 2. 124 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan energi perkapita (kkal/kap/hari)	2.390	2.429	2.806	3.730	**
Ketersediaan protein perkapita (gr/kap/hari)	73,2	74,4	95,2	108	**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

** Data merupakan target RPJMD, data capaian dalam proses analisis

Tabel 2. 125 Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan energi dan protein perkapita	92.00%	92.04%	93.60%	94%	94%**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

** data belum tersedia, angka merupakan target RPJMD

Tolak ukur keberhasilan indikator ini ditempuh dengan menjaga dan meningkatkan kualitas alur distribusi pangan agar distribusi pangan (keluar masuk) wilayah Kota Kediri terjaga stok ketersediaannya serta meningkatkan produksi pangan domestik baik pangan konvensional maupun pangan olahan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Kediri dengan tidak menimbulkan kekurangan pangan ataupun gejolak sosial yang berarti.

Adapun faktor pendorong antara lain :

- a) Penyusunan Data Base potensi Produksi Pangan;
- b) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
- c) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kabupaten/kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan merupakan salah satu bagian dari Cadangan Pangan Nasional. Pemerintah berkewajiban mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, disamping stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan salah satunya dalam bentuk pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPP dan CPPD. Penyaluran CPP dilakukan untuk menanggulangi: a.) kekurangan pangan; b.) gejolak harga pangan; c.) bencana alam; d.) bencana sosial; dan/atau e.) menghadapi keadaan darurat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, berupa bantuan penyediaan pangan. Beras merupakan salah satu dari 11 jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah. Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Kota Kediri belum memiliki Cadangan Pangan Pemerintah, baik berupa beras atau bahan pangan pokok lainnya. Hasil penghitungan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor

15 Tahun 2023 tentang tata cara penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah, CPPD-beras Kota Kediri sebesar 39,88 ton sedangkan cadangan pangan di masing-masing kelurahan sebesar 40 kg/kelurahan.

Tabel 2. 126 Hasil Penghitungan CPPD-Beras Kota Kediri

NO	VARIABEL	NILAI	SATUAN
A. DATA MASUKAN (2021/2022)			
1	Wilayah Terdampak Bencana (WTB)	0,72	-
2	Prevalensi Kerawanan Bencana (PKP)	0,0641	-
3	Indeks Kerawanan Bencana (IRBI)	0,67	Sedang
4	Jumlah Penduduk (Pop)	289.418	Jiwa
5	Konsumsi (K)	0,064	Ton/Kap/Thn
6	Proporsi APBD Kota Kediri/Jatim	0,016	-
7	Proporsi Produksi Kota Kediri/Jatim	0,001	-
B. CBPD KOTA KEDIRI		39,88	Ton
C. CB KELURAHAN KOTA KEDIRI		40	Kg/Kel.

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

2.4.2.4 Urusan Lingkungan Hidup

1. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan permen ATR nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% sedangkan penyediaan dapat dilakukan melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB).

Sesuai Permen ATR nomor 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau prosentase RTH publik dihitung menggunakan metode Indeks Hijau Biru (IHBI). IHBI adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial dengan cara memberikan nilai pembobotan (persentase), Faktor Hijau-Biru Indonesia/FHBI (koefisien), dan bonus elemen terhadap luasan RTH.

Perhitungan RTH berdasarkan IHBI dilakukan dengan menggunakan formula 1 dan 2 sebagai berikut:

$$\text{IHBI} = (\text{Luas RTH} \times \text{Bobot} \times \text{FHBI}) + \text{Bonus Elemen} \quad (1)$$

$$\text{RTH} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{IHBI}_i}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\% \quad (2)$$

Sedangkan berdasarkan perhitungan dari Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, bahwa ruang terbuka hijau publik sebesar 11,3% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 127 Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota Kediri

TIPOLOGI	JENIS	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	Luas (ha) Pola Ruang RTH	Nilai	%
A	KAWASAN RTH					
A.1	Rimba Kota	100	3	35	105	1,56%
A.2	Taman Kota	100	2,5	34	85	1,26%
A.3	Taman Kecamatan	100	2	58	116	1,73%
A.4	Taman Kelurahan	100	1,8	51	91,8	1,37%
A.5	Taman RW	100	1,6	0	0	0,00%
A.6	Taman RT	100	1,5	0	0	0,00%
A.7	Pemukaman	100	1,3	64	83,2	1,24%
A.8	Jalur Hijau	100	1,5	17	25,5	0,38%
	JUMLAH			259	506,5	7,53 %
B	KAWASAN LAINNYA					
B.1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	30	1	42	12,6	0,19%
B.2	Kawasan Perlindungan Setempat	50	1	10	5	0,07%
B.3	Kawasan Konservasi	30	1	0	0	0,00%
B.4	Kawasan Hutan Adat	30	1	0	0	0,00%
B.5	Kawasan Lindung Geologi	20	1	0	0	0,00%
B.6	Kawasan Cagar Budaya	10	1	0	0	0,00%
B.7	Kawasan Ekosistem Mangrove	20	1	0	0	0,00%
B.8	Kawasan Hutan Produksi	15	1	254	38,1	0,57%
B.9	Kawasan Perkebunan Rakyat	15	1	0	0	0,00%
B.10	Kawasan Pertanian	10	1	1751	175,1	2,60%
	JUMLAH			2057	230,8	3,43 %
C	OBJEK RUANG BERFUNGSI RTH					
C.1	Objek Ruang Pada Bangunan					

TIPOLOGI	JENIS	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	Luas (ha) Pola Ruang RTH	Nilai	%
C.1.1	Taman Atap	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.2	Taman Podium	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.3	Taman Balkon	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.4	Taman Koridor	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.5	Taman Vertikal	100	0,5	0	0	0,00%
C.1.6	Taman dalam Pot	100	0,4	0	0	0,00%
C.1.7	Taman dalam Kontainer	100	0,5	0	0	0,00%
C.2	Objek Ruang pada Kavling					
C.2.1	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Perumahan	100	1	0	0	0,00%
C.2.2	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa	100	1	0	0	0,00%
C.2.3	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Perkantoran	100	1	0	0	0,00%
C.2.4	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Peruntukan Industri	100	1	0	0	0,00%
C.2.5	Pekarangan Rumah	50	1	0	0	0,00%
C.3	Ruang Terbuka Biru					
C.3.1	Danau	20	1	0	0	0,00%
C.3.2	Waduk	20	1	0	0	0,00%
C.3.3	Sungai	20	1	114	22,8	0,34%
C.3.4	Embung	20	1	0	0	0,00%
C.3.5	Situ	20	1	0	0	0,00%
C.3.6	Mata Air (termasuk sempadan)	50	1	7	3,5	0,05%
C.3.7	Rawa	20	1	0	0	0,00%
C.3.8	Biopori	100	0,2	0	0	0,00%
C.3.9	Sumur Resapan	100	0,5	0	0	0,00%
C.3.10	Bioswale	100	1,2	0	0	0,00%
C.3.11	Kebun Hujan	100	1,2	0	0	0,00%
C.3.12	Kolam Retensi dan Detensi	100	1,3	0	0	0,00%
C.3.13	Rawa Buatan	100	1,5	0	0	0,00%
	JUMLAH			121	26,3	0,39 %

TIPOLOGI	JENIS	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	Luas (ha) Pola Ruang RTH	Nilai	%
	IHBI KOTA KEDIRI			2437	763,6	11,36 %

Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikembangkan secara nasional oleh mengacu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menggunakan Indeks Lingkungan Berbasis Wilayah (kabupaten kota/provinsi). Indikator ini menjadi acuan bagi semua pihak sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan dan program kinerja perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Target peningkatan dari IKLH akan mencakup keseluruhan sektor pembangunan yang tercermin pada meningkatnya kualitas air dan udara untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih. Pengetahuan akan kondisi kualitas lingkungan hidup akan membantu pengalokasian sumber daya alam secara lebih akurat agar penggunaannya lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun capaian IKLH dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 128 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH	63,24	65,85	64,6	65,83	66,54

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2023

a. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) digunakan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Pemantauan kualitas air dilakukan pada sungai utama dengan 7 (tujuh) parameter, yakni TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Coliform. Kota Kediri memiliki nilai IKA yang menunjukkan tren fluktuatif karena masih tingginya tingkat pencemaran. Semakin beragamnya aktivitas masyarakat setiap tahunnya menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan air, begitu pula pada tingkat kualitas air. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kegiatan sehari-hari masyarakat Kota Kediri masih sangat tinggi dalam pemanfaatan air. Pengukuran IKA dilakukan dengan membandingkan jumlah sampel air sungai yang tercemar dengan jumlah sampel yang diambil. Dari 43 (empat puluh tiga) sampel titik air sungai yang diuji disimpulkan bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) sampel memenuhi baku mutu, sebanyak 9 (sembilan) sampel tercemar ringan,

sebanyak 6 (enam) sampel tercemar sedang dan untuk yang tercemar berat nihil (0) sampel. Adapun IKA Kota Kediri selama tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 129 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Kediri

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
IKA	59,29	60,23	62,22	65,56	67,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri 2023

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara, yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Peningkatan kualitas udara sangat penting karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Semakin kecil kadar SO2 dan NO2 maka akan semakin tinggi nilai IKU di suatu daerah. Adapun IKU Kota Kediri selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 130 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Kediri Tahun 2018-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
IKU	91,68	90,76	92,27	93,03	93,07

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2023

c. Pembangunan Rendah Karbon

Indonesia secara serius dan konsisten terus menjalankan komitmen penanganan perubahan iklim melalui Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). PPRK merupakan transformasi strategi dari program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011. Dimana Indonesia berkomitmen mereduksi emisi sebesar 29% (skenario Fair/menggunakan kemampuan sendiri). RAN-GRK diturunkan ke daerah berupa Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAD GRK), Kota Kediri belum memiliki RAD GRK, namun upaya penurunan emisi karbon telah dilakukan dan telah dilaporkan dalam Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) dari Bappenas yang telah dimonitoring dan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada Tahun 2023 Kota Kediri dapat melakukan penurunan potensi emisi gas rumah kaca (CO2EQ) sebesar 26.559,06 Ton atau berkontribusi 0.01% pada capaian Provinsi Jawa Timur melalui 44 kegiatan yang tersebar di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah yang mempertimbangkan aspek konservasi dan rehabilitas yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan mulai dari tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Dalam pemantauan kualitas tutupan IKLH, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan maupun program untuk memperbaiki kualitas lahan yang buruk. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan kemampuan dan kualitas lahan yang paling baik dan stabil. Indeks kualitas tutupan lahan di Kota Kediri meningkat signifikan disebabkan oleh penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, dimana lahan sawah perkotaan yang ditetapkan sebagai sawah abadi dapat dianggap sebagai sabuk hijau kota. Hasil pengukuran IKTL Kota Kediri tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 131 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Kediri Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKTL	41,68	45,63	45,64	45,64	45,67	45,99

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2023

3. Timbulan Sampah yang Terkelola

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri nomor 35 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kota kediri dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui penanganan dan pengurangan sampah.

Adapun target pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Dengan berkurangnya volume sampah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA), maka diharapkan TPA dapat berumur lebih panjang dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.

Pada tahun 2021, volume produksi sampah mencapai 138.837 ton, dapat dikelola sebesar 98,96% atau sebesar 137.240 ton dan pada tahun 2022, volume produksi sampah mencapai 139.831 ton yang dapat dikelola sebesar 99,19% (mengalami peningkatan sebesar 0,23%) atau sebesar 138.700 ton.

Tabel 2. 132 Timbulan sampah yang terkelola di Kota Kediri Tahun 2018-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan sampah yang terkelola	98.06%	98.96%	98,85%	99,19%	99,01%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2023

Realisasi capaian layanan persampahan Kota Kediri pada akhir tahun 2023 sebesar 99,01% hal tersebut lebih rendah 0,18 % dari tahun tahun 2022 yakni sebesar 99,19%. Adapun penurunan capaian tersebut dikarenakan TPA Kota Kediri yang sudah *overload* atau sudah melampaui kapasitas daya dukung daya tampung sehingga mempengaruhi produksi sampah/bertambah karena penduduk yang juga bertambah dan menyebabkan bertambahnya timbulan sampah yang menjadi beban TPA Kota Kediri.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian pengelolaan sampah di Kota Kediri antara lain:

1. Pengadaan sarana dan prasarana persampahan.
2. Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah yakni penerapan instalasi pengolah sampah domestik di TPS 3R Kelurahan Banjarmlati
3. Penerapan Perda nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan antara lain :

1. Belum maksimalnya penerapan perda tentang pengelolaan persampahan
2. Belum terdapatnya teknologi dalam pengelolaan persampahan
3. Semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah perkotaan
4. TPA Kota Kediri yang sudah *overload*.
5. Masih rendahnya pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

2.4.4.5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Sejak tahun 2011, KTP non elektronik digantikan dengan KTP elektronik (KTP-el).

Sebelumnya KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan, kecuali warga berusia 60 tahun ke atas yang KTP-nya berlaku seumur hidup. Setelah adanya KTP-el, KTP bagi

WNI berlaku seumur hidup untuk semua umur. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Dimana (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan KTP dihitung berdasarkan jumlah penduduk ber KTP di Kota Kediri dibanding Jumlah penduduk wajib ber-KTP.

Tabel 2. 133 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Kediri Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023**
Jumlah penduduk ber KTP	Jiwa	215.445	211.171	213.443	217.163	219.686
Jumlah penduduk wajib ber KTP	Jiwa	217.222	214.722	216.043	222.752	222.710
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk		0,99	0,98	0,98	0,97	0,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023 (**)

2. Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akta kelahiran mempunyai manfaat utama untuk menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Di dalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak. Jadi akta kelahiran menentukan status hukum seseorang dan merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Kepemilikan akta kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Indikator ini bertujuan untuk melihat jumlah bayi berakta kelahiran dengan jumlah keseluruhan bayi yang ada. Rasio penduduk ber-akta kelahiran di Kota Kediri tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 134 Rasio Penduduk Ber-Akta Kelahiran di Kota Kediri
Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023**
Jumlah bayi yang ber Akta Kelahiran	Bayi	3.022	3.000	2.696	2.696	2.696
Jumlah bayi	Bayi	3.050	3.027	2.701	2.701	2.701
Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023 (**)

3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Menurut UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kegunaan kartu keluarga bagi masyarakat sangatlah penting. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga sebagai dokumen penting dalam kependudukan keluarga. Kegunaan kartu keluarga sebagai dokumen kependudukan sebagai berikut : kartu keluarga menjadi salah satu elemen penting bagi penduduk yang berkeluarga, dibutuhkan untuk membuat KTP El, mendaftar sekolah, pernikahan, atau mengajukan pinjaman bank. Kepemilikan KK diukur berdasarkan jumlah kepemilikan KK dengan keluarga yang wajib memiliki KK. Persentase kepemilikan KK di Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 135 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
Kota Kediri Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023**
Jumlah Kepemilikan KK	Keluarga	98.157	96.904	97.182	98.224	103.261
Keluarga Yang Wajib Memiliki KK	Keluarga	102.045	99.706	100.948	102,353	103.301
Rasio Kepemilikan KK		0,96	0,97	0,96	0,96	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023 (**)

4. Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia Anak

Diamanatkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Tujuan pencatatan kelahiran menurut UU no.1 Tahun 1974 Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Kepemilikan akta kelahiran penduduk Indikator kepemilikan akta kelahiran berdasarkan jumlah penduduk (usia 0-18 tahun) yang berakta kelahiran dan Jumlah anak usia 0-18 tahun.

Tabel 2. 136 Kepemilikan Akta Kelahiran Per-1000 Penduduk Usia Anak Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023**
Jumlah penduduk (usia 0-18 tahun) yang ber akta	Jiwa	85.363	86.070	85.218	85.242	78.574
Jumlah anak usia 0 - 18 tahun	Jiwa	86.777	87362	86214	86.231	78.977
Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk Usia Anak		0,98	0,98	0,98	0,98	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023 (**)

5. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. Sama juga seperti KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sesuai amanat dari Permendagri 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kepemilikan KIA dapat diketahui berdasarkan jumlah anak yang memiliki KIA dengan jumlah anak wajib memiliki KIA. Kepemilikan KIA di Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 122 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Kediri Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023**
Jumlah anak yang memiliki KIA	orang	59.345	60.072	68.015	64.958	62.119
Jumlah anak wajib KIA	Orang	77.728	77.540	76.559	76.429	71.940
Rasio Kepemilikan KIA		0,76	0,77	0,88	0,85	0,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

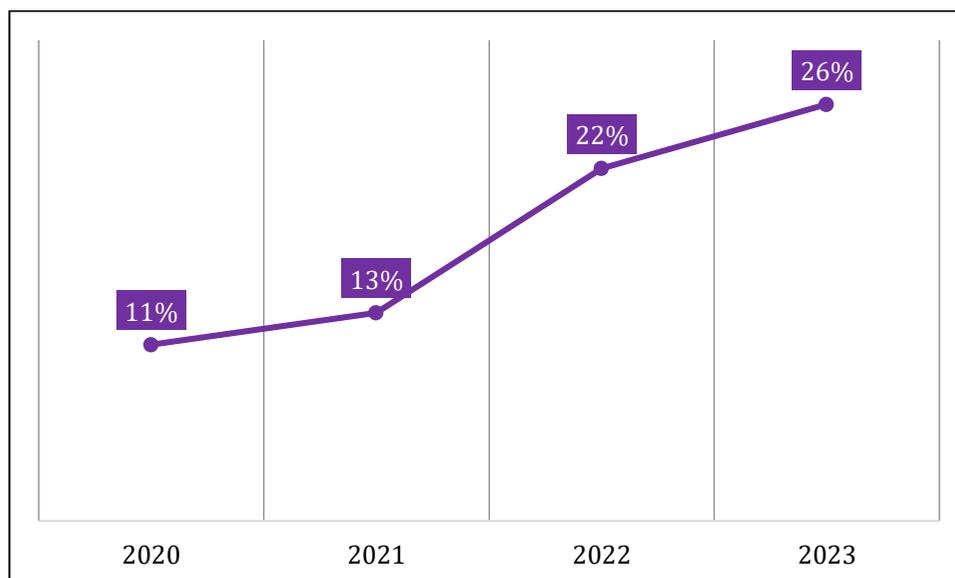
Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023 (**)

2.4.2.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat diukur dengan tingkat perkembangan kelurahan. Tingkat perkembangan kelurahan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan kelurahan setiap tahun diukur dari laju kecepatan perkembangan: (a) ekonomi masyarakat; (b) pendidikan masyarakat; (c) kesehatan masyarakat; (d) keamanan dan ketertiban; (e) kedaulatan politik masyarakat; (f) peran serta masyarakat dalam pembangunan; (g) lembaga kemasyarakatan; (h) kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan (i) pembinaan dan pengawasan. Hasil evaluasi

keberhasilan kegiatan pembangunan setiap tahun akan menentukan laju perkembangan kelurahan. Tingkat perkembangan kelurahan terdiri atas: swasembada, swakarya dan swadaya. Pada RPD tahun 2025-2026, Pemerintah Kota Kediri menetapkan indikator persentase kelurahan Swasembada. Perkembangan kelurahan dengan tingkat perkembangan Swasembada tahun 2020-2023, sebagai berikut:

Grafik 2. 42 Persentase Kelurahan Swasembada Tahun 2020-2023



Sumber : Bagian Pemerintahan, 2023

Selama tahun 2020-2023, jumlah kelurahan dengan tingkat perkembangan Swasembada mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, Kelurahan Swasembada sebesar 11% meningkat menjadi 26%. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan pada tingkat kelurahan berdampak pada peningkatan perkembangan kelurahan.

Presentase Kelurahan dengan Swasembada

Presentase kelurahan dengan swasembada/ berdaya digunakan sebagai indikator untuk mengukur meningkatnya pemberdayaan masyarakat tujuan pengukuran ini untuk meningkatkan presentase kelurahan dengan swasembada dengan berfokus pada penggalan potensi data pada profil desa, meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), serta penguatan kapasitas LKK dan pokmas agar dapat berperan aktif dalam proses pembangunan di kelurahan.

2.4.2.7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

LPP dihitung berdasarkan selisih jumlah penduduk selama 2 (dua) tahun terakhir dibanding jumlah penduduk pada tahun awal. Jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2023 mencapai 295.225 jiwa, meningkat 3.026 jiwa dibanding jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 292.199 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri pada

tahun 2023 sebesar 0,01. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 cenderung tidak mengalami perubahan, yaitu kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 4.237 dari jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 287.962 jiwa.

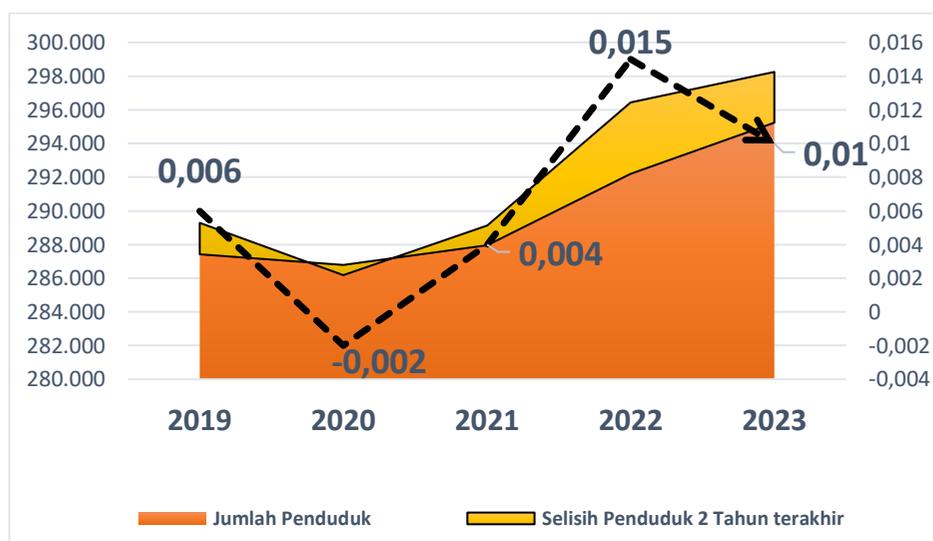
Perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2019-2023 dapat dicermati pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2. 137 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Selisih Penduduk 2 Tahun terakhir	Laju Pertumbuhan Penduduk
2019	287.409	1.867	0,006
2020	286.796	-613	-0,002
2021	287.962	1.166	0,004
2022	292.199	4.237	0,015
2023	295.225	3.026	0,010

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri Tahun 2020-2024

Grafik 2. 43 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2024

Upaya pengendalian penduduk dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Kediri dilakukan melalui kampanye program KB (Keluarga Berencana) untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga serta perwujudan 5 kampung keluarga berkualitas (kampung KB) pada tahun 2022, yaitu di Kelurahan Dermo, Tamanan, Manisrenggo, Ketami, dan Bawang.

2. Peningkatan kualitas Kampung KB

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan

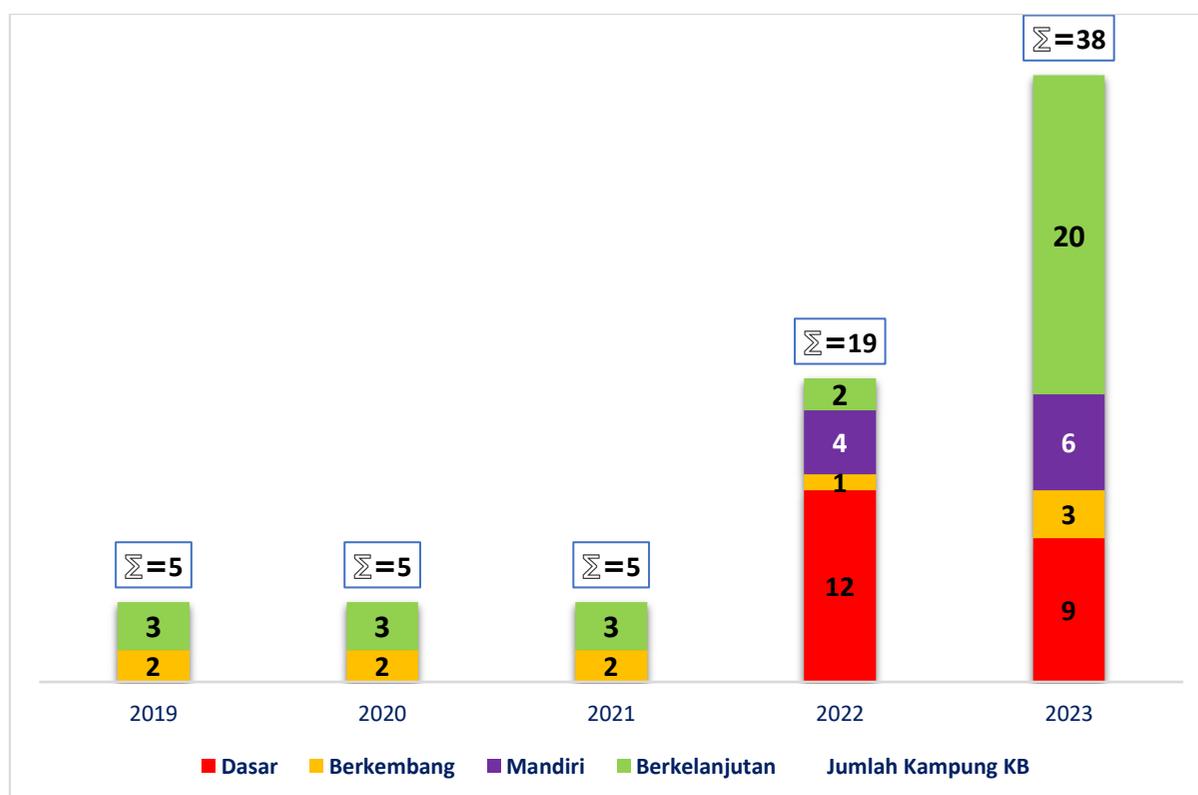
pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Terdapat 4 (empat) kategori pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, antara lain kategori dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan. Indikator peningkatan kualitas kampung KB diukur dari cakupan jumlah Kampung KB pada kategori mandiri dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023 terdapat 6 Kampung KB kategori mandiri dan 20 Kampung KB kategori berkelanjutan dengan keseluruhan kampung KB di Kota Kediri yang terbentuk sebanyak 38 kampung KB. Cakupan kampung KB kategori mandiri dan berkelanjutan pada tahun 2023 meningkat dari 6 menjadi 26 kampung KB berkualitas (333%) dengan jumlah keseluruhan kampung KB yang dikembangkan meningkat 100% yaitu sebanyak 19 kampung KB.

Peningkatan jumlah Kampung KB yang dikembangkan selama tahun 2019-2023 sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2. 44 Peningkatan kualitas Kampung KB Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2024

Keberhasilan peningkatan pengembangan kampung keluarga berkualitas pada kategori mandiri dan berkelanjutan diwujudkan melalui keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, serta dukungan lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat dalam bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dsb yang mendukung penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga.

3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

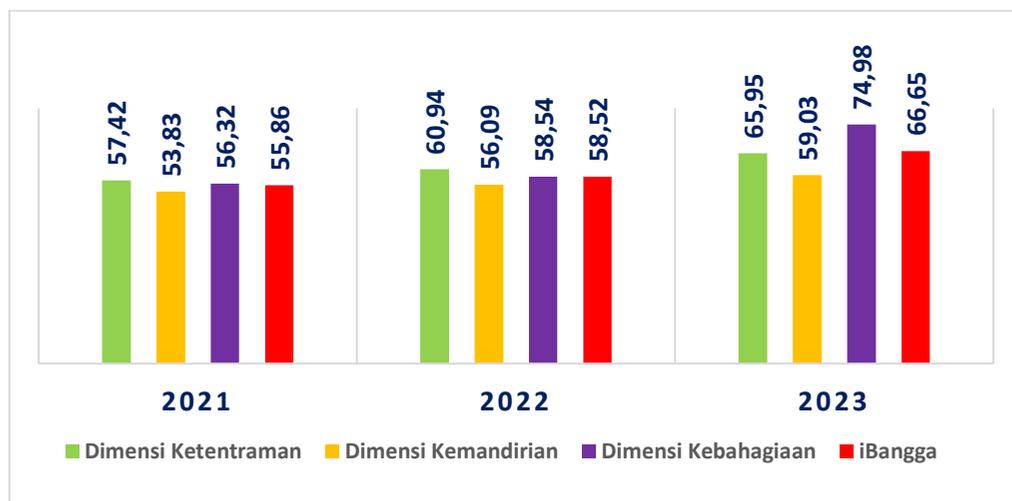
Indikator indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menggambarkan kualitas peran dan fungsi keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi pengukuran, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga dapat menentukan level pembangunan keluarga di suatu wilayah dengan tiga kategori, yaitu keluarga tangguh, berkembang, atau rentan.

Ketiga dimensi pengukuran iBangga antara lain :

1. Dimensi Ketenteraman, meliputi Keluarga dengan ibadah rutin, keluarga akta nikah, keluarga dengan akta lahir anak usia 0-17 tahun, keluarga dengan kepemilikan Jamkes, keluarga tanpa konflik, keluarga tanpa cerai;
2. Dimensi Kemandirian, meliputi keluarga memiliki penghasilan, keluarga makan beragam, keluarga dengan rumah layak huni, keluarga memiliki tabungan, keluarga tidak ada putus sekolah, keluarga tidak ada art sakit, keluarga dengan akses media online; dan
3. Dimensi Kebahagiaan, meliputi keluarga dengan interaksi antar anggota, keluarga pengasuhan anak bersama suami istri, terdapat rekreasi keluarga, dan keluarga ikut kegiatan sosial.

Pencapaian indeks iBangga Kota Kediri tahun 2022 sebesar 58,52 diatas Provinsi Jawa Timur sebesar 57,87 dan menempati peringkat 8 tertinggi diantara kab/kota se-Jatim. Capaian iBangga meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 66,65 diatas Provinsi Jawa Timur sebesar 61,80, meliputi nilai dimensi ketenteraman sebesar 60,94, dimensi kemandirian sebesar 56,09 dan dimensi kebahagiaan sebesar 58,54. Perkembangan capaian iBangga Kota Kediri selama tahun 2021-2023 dapat dicermati pada grafik berikut.

Grafik 2. 45 Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri



Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2024

Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong nilai iBangga secara signifikan pada tahun 2023 didorong dengan karena adanya kesadaran masyarakat terkait peningkatan kualitas hidup dari 3 (tiga) dimensi yaitu Dimensi ketentraman, Dimensi kemandirian dan Dimensi kebahagiaan, yang didukung dengan banyaknya program inovasi Pemerintah Kota Kediri melalui kolaborasi perangkat daerah bersama Tim Penggerak PKK dalam penguatan ketahanan keluarga, antara lain pengembangan 38 Kampung Keluarga Berkualitas, peningkatan cakupan akta kelahiran program GO KLING (Go Keliling), PENCAKSILAT (Pelayanan Pencatatan Sipil bagi yang terlambat), Pelayanan 3 in 1 (KK, Akta Kelahiran dan KIA), Universal Health Coverage (UHC) 100%, CEPAK (Cegah Perkawinan Anak), PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Klinik Pendidikan, penanganan Anak Tidak Sekolah, SELIMUT HATI, dll.

2.4.2.8 Urusan Perhubungan

1. Rasio Ijin Trayek

Perhitungan rasio izin trayek bertujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas angkutan umum di Kota Kediri. Rasio izin trayek dihitung dengan membandingkan jumlah rute trayek angkutan kota yang tersedia dengan jumlah rute kota yang dibutuhkan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan, sebanyak 12 rute angkutan kota yang dibutuhkan untuk melayani keseluruhan Kota Kediri.

Tabel 2. 138 Rasio Ijin Trayek Angkutan Kota Tahun 2018-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
Izin Trayek	8	8	7	7	8	0,45%
Rasio Ijin Trayek	66,67%	66,67%	58,33%	58,33%	66,67%	0,45%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri, 2023

Rasio izin trayek angkutan perkotaan cenderung tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2022. Penurunan jumlah izin trayek diakibatkan oleh berkurangnya jumlah angkutan kota yang signifikan, di sisi lain adanya pandemic Covid-19 sehingga diberlakukan kebijakan pembatasan perjalanan juga mengakibatkan semakin berkurangnya pengguna angkutan kota. Pada 2023 kenaikan izin trayek diakibatkan adanya trayek baru bus SATRIA.

Peningkatan pelayanan angkutan perkotaan secara keseluruhan perlu menjadi perhatian pemerintah kota dengan harapan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan merubah minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan.

2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang dimaksud merupakan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR pada tahun-n dibandingkan dengan jumlah angkutan umum pada tahun-n. Indikator ini dapat menggambarkan jumlah angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksana pengujian angkutan umum adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Pemerintah Kota Kediri.

Tabel 2. 139 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Kediri Tahun 2018-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Rerata Pertumbuhan
Persentase Kepemilikan KIR	344	91,87%	81,41%	90,87%	93,6%	1,1%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri, 2023

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2021 mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021, rerata pertumbuhan pada tahun 2020 – 2023 bernilai positif sebesar 1,1%. Penurunan terbesar jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR terjadi pada tahun 2021, sebanyak 30 angkutan umum tidak melakukan uji KIR pada tahun tersebut. Secara umum penurunan tersebut diakibatkan oleh perubahan fungsi angkutan umum menjadi kendaraan pribadi, adanya pandemi Covid-19 serta perubahan perilaku masyarakat yang beralih menggunakan angkutan online. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada 9,46% akibat adanya angkutan umum non perkotaan yang beroperasi kembali. Ketidakterediaan data pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya perbedaan perhitungan indikator.

3. Persentase Layanan Angkutan Perkotaan

Layanan angkutan perkotaan merupakan gambaran besaran cakupan layanan angkutan perkotaan. Perhitungan layanan angkutan perkotaan dengan membandingkan jumlah penumpang angkutan umum perkotaan dengan kapasitas kendaraan angkutan umum perkotaan.

Tabel 2. 140 Persentase Layanan Angkutan Perkotaan Kota Kediri Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
Persentase Layanan Angkutan Perkotaan	-	17,85%	35,60%	49,94%	50,95%	47,2%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri, 2023

Persentase layanan angkutan perkotaan mengalami tren positif dari tahun 2020 hingga 2021 dengan pertumbuhan sebesar 47,2%. Peningkatan pada tahun 2021 disebabkan pemulihan pasca Covid-19 sehingga jumlah penumpang pada tahun 2023 sebanyak 47.876 jiwa, merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2020. Kenaikan jumlah penumpang diselaraskan dengan upaya pemerintah Kota Kediri menyediakan angkutan umum perkotaan seperti bus sekolah. Selain kapasitas angkutan umum perkotaan, kualitas pelayanan angkutan umum juga perlu untuk ditingkatkan. Ketidaktersediaan data pada tahun 2019 dikarenakan presentase layanan angkutan perkotaan merupakan indikator baru.

4. Indeks Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan. Fasilitas pelengkap lalu lintas angkutan jalan yang dimaksudkan berupa rambu, marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas di persimpangan atau ruas jalan. Pada indikator ini yang termasuk kedalam perhitungan APILL adalah *traffic light, warning light, pelican crossing, dan rambu electric* (rambu bersuar).

Tabel 2. 141 Indeks Fasilitas Perlengkapan LLAJ

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
Indeks fasilitas perlengkapan LLAJ	-	91,55%	93,58%	95,14%	53,09%	1,9%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri, 2023

Perhitungan indikator fasilitas pelengkap jalan adalah $(\text{capaian rambu} \times 40) + (\text{capaian marka} \times 40) + (\text{capaian APILL} \times 20)$ dibagi 100. Indeks fasilitas perlengkapan lalu lintas angkutan jalan mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2022 dengan rerata tren pertumbuhan 1,9%. Perbaikan marka jalan sepanjang 214 meter dan penambahan APILL pada 6 titik pada tahun 2022 merupakan upaya peningkatan kenyamanan dan keselamatan jalan. Sehingga, total pelengkap jalan pada tahun 2022 adalah 1.443 unit rambu-rambu, 8.947 meter marka jalan dan 139 unit APILL. Ketidaktersediaan data pada tahun 2019 dikarenakan indeks fasilitas perlengkapan lalu lintas angkutan jalan merupakan indikator baru.

Sedangkan pada tahun 2023 penurunan terjadi akibat adanya perubahan indikator dengan penambahan variabel yaitu penerangan jalan umum dan perlengkapan perlintasan sebidang, dengan formulasi (**Rambu baik + Marka baik + APILL baik + PJU baik + Perlintasan sebidang baik**) / (**jumlah Rambu + marka + APILL + PJU + perlintasan sebidang**).

2.4.2.9 Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi bisa digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Gambaran mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota Kediri selama kurun waktu 2018-2022 dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 142 Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika Kota Kediri
Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE		2,61	3,49	3,06	2,96	3,65
Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE		N/A	N/A	2,30	2,30	
Tingkat kematangan layanan SPBE		N/A	N/A	3,57	3,83	
Persentase Aplikasi e-Gov yang Terintegrasi	%	N/A	30,21	30,50	45	64%
Persentase Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Persentase Kebijakan Daerah yang Dipublikasikan	%	100	100	100	100	100

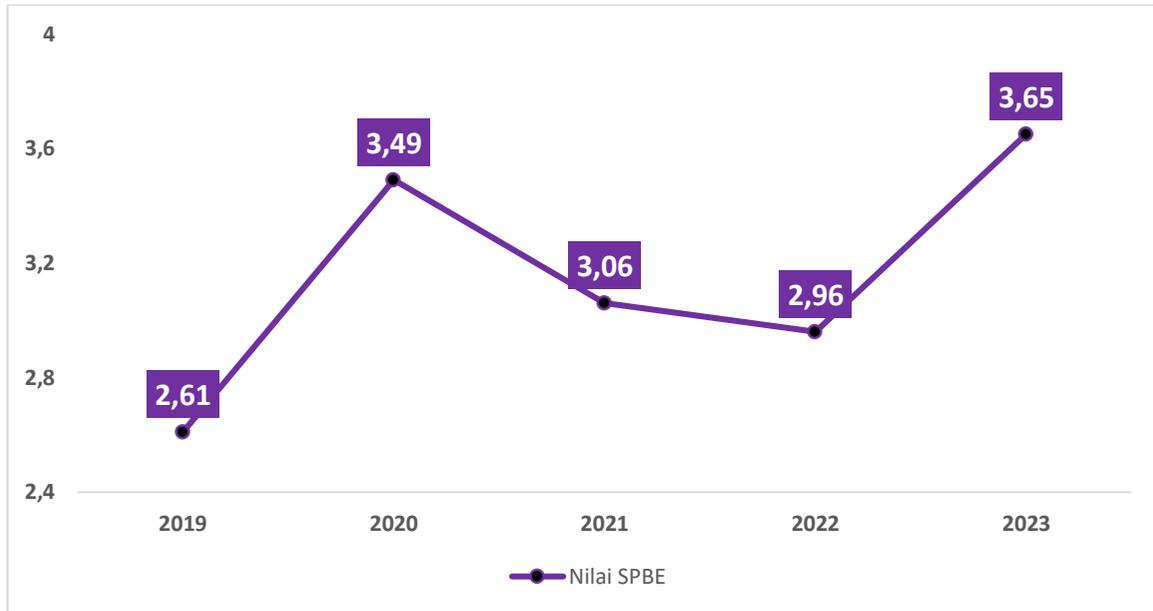
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, 2023

1. Nilai SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indikator indeks Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penilaian hasil penilaiantahunan dari Kementerian PAN RB. Secara lengkap capaian Indeks SPBE sebagai berikut:

Grafik 2. 46 Indeks SPBE Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, 2023

Dari capaian indeks SPBE terjadi penurunan pada tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan prosedur evaluasi SPBE dengan memasukan beberapa indikator pendukung Indeks SPBE sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 962 tahun 2021 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2022 mengalami penurunan karena pada tahun 2022 kebijakan terkait arsitektur belum dapat ditetapkan di tahun 2022, sehingga mempengaruhi nilai total SPBE. Adapun Arsitektur SPBE telah ditetapkan pada tahun 2023, sehingga Indeks SPBE Tahun 2023 dapat naik menjadi 3,65.

Dengan capaian indeks SPBE 3,65 sehingga SPBE Kota Kediri sudah dalam predikat SANGAT BAIK. Capaian Indeks SPBE ini didukung dan dipahami oleh perangkat daerah untuk mendukung SPBE di Kota Kediri dengan memberikan *evident-evident* yang sesuai dengan indikator yang diinginkan. Hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementrian PANRB ini menjadi indikator sejauh mana pelaksanaan SPBE yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan

SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah. Seluruh hal tersebut berdampak pada kelancaran pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kota Kediri karena dukungan oleh perangkat daerah.

2. Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE

Tingkat kematangan SPBE merupakan metodologi yang digunakan dalam mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. tingkat kematangan merupakan alatpenilaian dalam pemantauan dan evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek, dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020. Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Pengukuran tingkat kematangan tata Kelola dimulai tahun 2021. Selama dua tahun berturut-turut, Tingkat Kematangan Tata Kelola bernilai 2,30. Adapun Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE tahun 2023 masih belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB.

3. Tingkat kematangan layanan SPBE

Tingkat Kematangan Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Beberapa layanan yang diukur adalah Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektroni. Capaian tingkat kematangan layanan SPBE tahun 2021 sebesar 3,57 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 3,83. Adapun Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE tahun 2023 masih belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB.

4. Persentase Aplikasi e-Gov yang Terintegrasi

Persentase aplikasi e-Gov yang terintegrasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aplikasi e-Gov di suatu daerah telah terintegrasi. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov) yang terintegrasi. Dasar hukum metode dan mekanisme persentase aplikasi e-Gov yang terintegrasi adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Menurut Permenkominfo tersebut, integrasi aplikasi e-Gov adalah proses penyatuan data dan informasi dari berbagai aplikasi e-Gov yang berbeda, sehingga data dan informasi tersebut dapat diakses dan diolah secara bersama-sama. Indikator Persentase Aplikasi e-Gov yang terintegrasi dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Persentase Aplikasi e-Gov yang terintegrasi = (Jumlah aplikasi e-Gov yang terintegrasi / Jumlah total aplikasi e-Gov *visible* untuk diintegrasikan) * 100

Keterangan:

1. Jumlah aplikasi e-Gov yang terintegrasi adalah jumlah aplikasi e-Gov yang telah dilakukan proses integrasi dengan aplikasi lainnya .
2. Jumlah total aplikasi e-Gov *visible* untuk diintegrasikan adalah jumlah total aplikasi e-Gov *visible* yang ada di Kota Kediri disesuaikan dengan level kematangan aplikasi, yaitu level kematangan 3 sampai level kematangan 5.

Nilai indikator Persentase Aplikasi e-Gov yang terintegrasi berkisar antara 0 hingga 100. Nilai yang semakin tinggi menunjukkan bahwa aplikasi e-Gov di suatu daerah telah semakin terintegrasi Pada tahun 2021, aplikasi e-Gov yang terintegrasi adalah sebesar 30,50% dari aplikasi yang dimiliki. Selanjutnya pada tahun 2022 aplikasi e-Gov yang terintegrasi adalah sebesar 45% kemudian pada tahun 2023 capaian realisasi sudah mencapai 64% aplikasi e-Gov yang terintegrasi.

Untuk meningkatkan indikator persentase aplikasi e-Gov yang terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri akan melakukan beberapa upaya, antara lain:

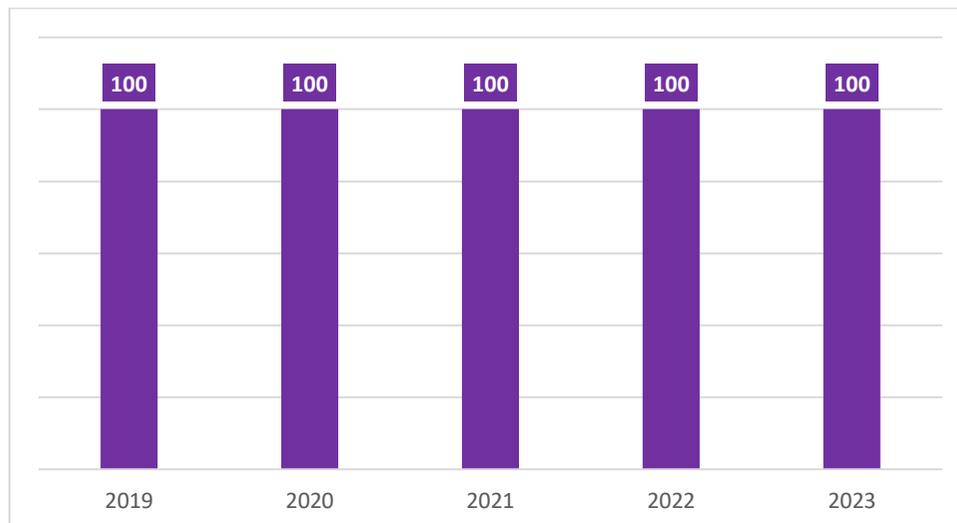
- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perangkat daerah tentang pentingnya integrasi aplikasi e-Gov
- b. Melakukan pendampingan dan pelatihan kepada perangkat daerah dalam proses integrasi aplikasi e-Gov
- c. Menyediakan dukungan anggaran dan infrastruktur TIK untuk integrasi aplikasi e-Gov

Dengan meningkatkan indikator persentase aplikasi e-Gov yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov) yang terintegrasi.

5. Persentase Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti

Indikator sasaran ini dihitung dari jumlah aduan masuk dibandingkan dengan jumlah aduan yang terjawab. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Kediri telah membuat inovasi layanan pengaduan, saran, dan informasi berbasis informatika yang bernama Surga (Suara Warga Kota Kediri) yang dapat diakses melalui <http://surga.kedirikota.go.id>. Selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah kota Kediri menerapkan SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/ Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang disahkan dalam Kepmenpan RB Nomor : 680 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan, Pengaduan, Pelayanan Publik.

Grafik 2. 47 Persentase Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, 2023

6. Persentase Kebijakan Daerah yang Dipublikasikan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, maka dilakukan publikasi atas kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui berbagai media yang ada, diantaranya: media sosial (IG pemkotkediri, FB pemkotkediri dan Twitter pemkotkediri), Harmoni Tv dan *website*. Untuk mengukur keberhasilan publikasi maka disusun indikator persentase kebijakan daerah yang dipublikasikan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah kebijakan daerah/program pemerintah daerah yang dipublikasikan dengan kebijakan daerah/program pemerintah daerah yang diterbitkan. Pada tahun 2021 persentase kebijakan yang dipublikasikan sebesar 100% Kemudian pada tahun 2022 jumlah kebijakan yang dipublikasikan tetap sebanyak 100%, berlanjut capaian persentase tahun 2023 tetap sebesar 100%.

Keberhasilan indikator ini didorong oleh sinergisitas Diskominfo dengan seluruh perangkat daerah melalui penggunaan aplikasi simalik.kedirikota.go.id sebagai *tools/* media untuk pelaporan atau informasi kegiatan atau kebijakan OPD/pemerintah daerah yang membutuhkan publikasi sehingga menjadi dasar informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri untuk membantu mempublikasikan kegiatan atau kebijakan OPD/pemerintah ke media, selain itu adanya tenaga kehumasan OPD yang dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika juga sangat membantu dalam menginformasikan kebijakan-kebijakan / kegiatan OPD kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat dipublikasikan ke media (media pemerintah dan media non-pemerintah).

2.4.2.10 Urusan Statistik

1. Persentase Data Sektoral yang Akurat

Data yang akurat merupakan kunci dari kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan kinerja pemerintah, hingga peluang bisnis, semuanya membutuhkan data yang akurat. Sayangnya, dalam praktiknya data masih sering tidak dikelola secara serius. Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya. Melalui indikator persentase data sektoral yang akurat dan tepat waktu Pemerintah Kota Kediri melakukan upaya untuk mendapatkan data yang kredibel dan dapat memberikan landasan yang sesuai dengan kondisi yang riil dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya data yang sesuai dengan prinsip standar, pembangunan akan berjalan dengan lebih baik, akurat, dan juga efisien. Dalam rangka mengukur keberhasilan urusan ini, maka ditetapkan indikator persentase data sektoral yang akurat dan tepat waktu. Indikator ini merupakan indikator baru di Kota Kediri, dengan capaian di tahun 2023 sebesar 81,80 %.

2.4.2.11 Urusan Persandian

1. Persentase Informasi Persandian yang Diamankan

Dalam rangka menjamin keamanan informasi, Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi persandian. Persandian identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai diretas maupun gagal sampai. Persentase informasi persandian yang diamankan merupakan Indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Kediri. Sebagai usaha dalam hal pengamanan informasi pemerintah provinsi melakukan pengamanan berkelanjutan atas segala informasi baik yang keluar maupun yang masuk. Capaian pada tahun 2023 sebesar 83% informasi telah disampaikan melalui jaringan komunikasi yang aman.

2.4.2.12 Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

1. Persentase Koperasi Sehat

Koperasi sehat yaitu koperasi aktif, yang secara rutin (terus menerus) melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 (tiga) tahun terakhir dan telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi dengan nilai minimal 66. Sedangkan aktif adalah koperasi yang berbadan hukum dan memiliki kegiatan, baik kegiatan organisasi kelembagaan maupun kegiatan usaha. Perkembangan jumlah koperasi sehat tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 143 Persentase Koperasi Sehat Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Koperasi Sehat	73,81	64,00	71,71	66,12	70,40

Sumber : Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, 2023

Pada tahun 2023 jumlah koperasi sehat di Kota Kediri sebanyak 176 koperasi dari 250 koperasi aktif atau sebesar 70,4% meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 jumlah koperasi sehat di Kota Kediri sebanyak 361 dari 546 koperasi aktif atau sebesar 66,12%, Meski memenuhi target namun realisasi kinerjanya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 71,71%. Hal tersebut dikarenakan adanya tambahan jumlah koperasi aktif baru, sementara koperasi aktif tersebut belum dapat dikategorikan sehat karena belum melaksanakan RAT 3 kali terus menerus.

Untuk meningkatkan jumlah koperasi sehat dilakukan berbagai upaya diantaranya peningkatan pendampingan koperasi dengan pembuatan portal *link*, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan manajemen usaha koperasi, pengoptimalan pengawasan terutama pada koperasi aktif, agar tiap tahun bisa melaksanakan RAT, pengoptimalan pemantauan terutama pada koperasi kategori sehat, dan pelaksanaan bimtek penilaian kesehatan koperasi.

2. Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar NIB

Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro di Kota Kediri menurut kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 29.787 usaha, bertambah sebanyak 19.412 usaha dibanding tahun sebelumnya atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 187,1%. Upaya yang dilakukan untuk menambah jumlah usaha mikro diantaranya penciptaan wirausaha baru melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, fasilitasi pendampingan pengurusan legalitas usaha, fasilitasi pendampingan/klinik UMKM, fasilitasi hibah sarana dan prasarana usaha, fasilitasi kredit modal usaha bagi warga kota Kediri (KURNIA), dan fasilitasi promosi/pemasaran produk baik melalui pameran maupun *car free day*.

Tabel 2. 144 Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kota Kediri Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar NIB	682	941	2.209	10.375	29.787

Sumber : DPMPTSP Kota Kediri, 2023

3. Jumlah Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkat

Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro yang omzetnya meningkat sebanyak 695 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebanyak 28 usaha atau sebesar 4,2%. Bertambahnya jumlah usaha mikro yang omzetnya meningkat tersebut disebabkan mulai menggeliatnya aktivitas perekonomian usaha mikro dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat pasca pandemi Covid-19 sehingga membawa dampak pada meningkatnya hasil pemasaran produk usaha yang berpengaruh pada kenaikan omset. Adapun upaya membangkitkan aktivitas usaha para pelaku usaha mikro agar omzetnya meningkat antara lain kegiatan fasilitasi pendampingan/konsultasi usaha mikro, fasilitasi pinjaman modal usaha atau program kredit usaha untuk warga (KURNIA), fasilitasi legalitas usaha (Halal), dan fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha baik melalui pameran maupun *car free day*.

Tabel 2. 145 Jumlah Usaha Mikro berdasarkan Peningkatan Omzet Kota Kediri Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Jumlah Usaha Mikro yang omzetnya naik	100	121	667	695

Sumber : Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, 2023

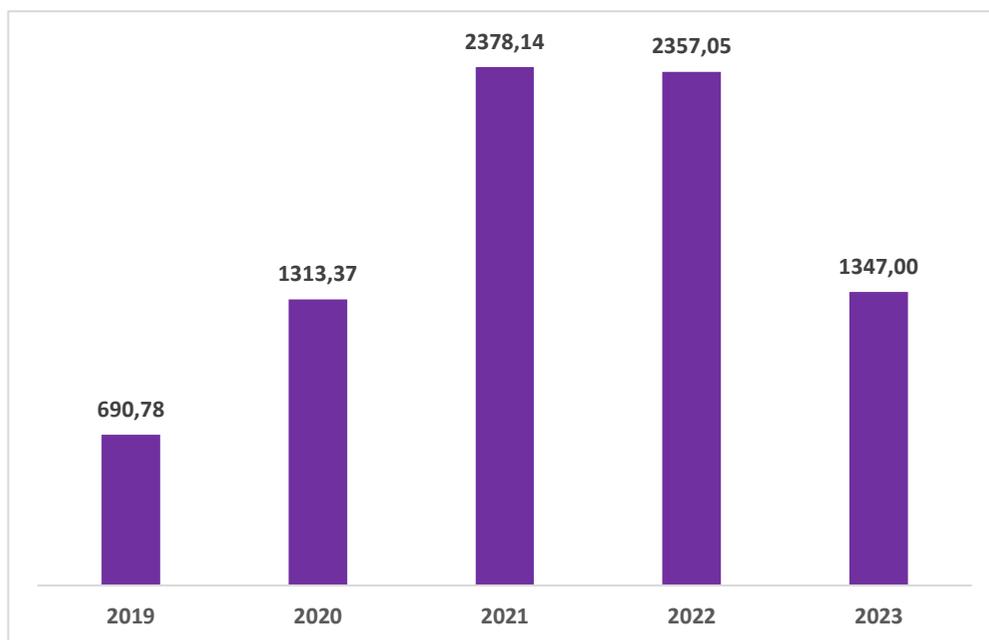
2.4.2.13 Urusan Penanaman Modal

1. Realisasi Nilai Investasi Daerah

Indikator kinerja sasaran ini diukur dengan menghitung nilai absolut dari realisasi investasi yang ada di Kota Kediri. Selama 5 (lima) tahun terakhir nilai investasi Kota Kediri menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2023 nilai investasi daerah mencapai Rp1.347,00 milyar atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.357,05 milyar. Penurunan tersebut disebabkan nilai investasi terbesar pada tahun 2022 senilai Rp1,62 triliun, sementara pada tahun 2023 nilai investasi terbesar senilai Rp342 milyar. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi daerah adalah sosialisasi melalui media sosial dan langsung pada masyarakat, melakukan promosi melalui pameran dan *workshop*, membangun Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan perizinan yang mudah, cepat dan transparan. Adapun program inovasi yang dapat menarik minat berinvestasi diantaranya kemudahan izin seperti melalui *Mobile Public Service*, Pelayanan Berdaya Khusus (Bekal Perizinan Bagi Disabilitas Agar Makin Jaya), Celengan Rindu (Cek Lokasi Live Dengan Drone Dan Aplikasi Zoom Untuk Pelayanan Perizinan Terpadu), Sinonik (Sistem Pembayaran Non Tunai Secara Elektronik dan Istri Pintar); Pelayanan DPMPSTP

Kota Kediri sudah dilakukan secara Cepat, Tepat, Mudah, Transparan, Gratis, Berbasis Digital yaitu melalui Sistem OSS Berbasis Resiko (*Online Single Submission*) dan KSWI (*Kediri Single Window For Investment*); adanya program pengembangan iklim usaha dan promosi penanaman modal untuk menjaring investor; adanya pendampingan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Apelin Pacar (Asistensi Pengisian LKPM Online Dibantu Sampai Lancar). Kinerja capaian nilai investasi daerah tahun 2019 – 2023 dapat digambarkan dalam grafik berikut :

Grafik 2. 48 Realisasi Nilai Investasi Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : DPMPTSP Kota Kediri

2.4.2.14 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi dalam rentang tahun 2019-2023 cukup fluktuatif. Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 34 atlet, sementara pada tahun 2020 indikator tersebut tidak dapat diukur dikarenakan pada tahun 2020 pertama kalinya pandemi Covid-19 melanda, sehingga seluruh event olahraga ditiadakan. Sementara pada tahun 2021 realisasi jumlah atlet berprestasi sebanyak 32 atlet meningkat signifikan dibanding tahun 2020 disebabkan mulai diselenggarakannya kompetisi/turnamen olahraga di tingkat daerah meskipun tidak sebanyak saat sebelum pandemi Covid-19. Terselenggaranya event kejuaraan olahraga di tengah pandemi Covid-19 dikarenakan adanya sinergitas pemerintah daerah dengan KONI untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada atlet dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam lima tahun terakhir jumlah atlet berprestasi terbanyak terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 173 atlet yang disebabkan banyaknya kompetisi olahraga yang diselenggarakan baik tingkat daerah maupun nasional, disamping itu juga karena adanya peningkatan pembinaan atlet, peningkatan sarana dan

prasarana olahraga, pelatihan atlet secara intensif, dan pendelegasian/pengiriman atlet ke berbagai kompetisi/turnamen olahraga. Namun demikian capaian tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 168 atlet dikarenakan adanya satu *event* olahraga/kejuaraan yang tidak dilaksanakan yaitu Pekan Olahraga SD (POR SD).

Tabel 2. 146 Jumlah Atlet Berprestasi Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Atlet Berprestasi	34	0	32	173	168

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

2. Jumlah Kegiatan Olahraga yang Diselenggarakan

Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan pada tahun 2023 sebanyak 7 event atau meningkat sebesar 40% dibanding tahun sebelumnya, tahun 2023 juga merupakan tahun dengan penyelenggaraan *event*/kejuaraan olahraga terbanyak sepanjang lima tahun terakhir. Sementara penyelenggaraan kegiatan olahraga terendah sepanjang tahun 2019-2023 terjadi pada tahun 2020 yang pada saat itu pandemi Covid-19 melanda sehingga diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan segala *event*/kejuaraan olahraga ditiadakan.

Tabel 2. 147 Jumlah Kegiatan Olahraga yang Diselenggarakan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kegiatan Olahraga Yang Diselenggarakan	6	0	3	5	7

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

3. Prestasi Kepemudaan

Jumlah prestasi kepemudaan dari tahun 2019-2023 secara berturut-turut adalah 4; 0; 8; 6; 17 prestasi. Pada tahun 2020 indikator tersebut tidak dapat diukur disebabkan pada saat itu pertama kalinya pandemi Covid-19 melanda, sehingga seluruh *event* kepemudaan di tahun tersebut ditiadakan. Sementara prestasi kepemudaan tahun 2022 sebanyak 6 prestasi menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 8 prestasi. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 belum banyak kompetisi yang digelar di tingkat nasional serta provinsi. Untuk memacu prestasi pemuda Kota Kediri dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, memfasilitasi pemuda untuk mengikuti kompetisi, dan menyelenggarakan kompetisi di tingkat kota. Melalui upaya-upaya tersebut sehingga pada tahun 2023 jumlah prestasi kepemudaan di Kota Kediri meningkat menjadi 17 prestasi.

Tabel 2. 148 Prestasi Kepemudaan Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Prestasi Kepemudaan	4	0	8	6	17

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

2.4.2.15 Urusan Kebudayaan

1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan warisan budaya yang menjadi salah satu pembentuk karakter wilayah dan masyarakat Kota Kediri. Selama tahun 2019-2023 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACD) sebagai benda, situs dan kawasan cagar budaya jumlahnya berbeda-beda setiap tahun tergantung hasil kajian yang dilakukan oleh TACD Provinsi Jawa Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada tahun 2023 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan sebanyak 75 atau meningkat signifikan dibanding tahun 2022 sebanyak 1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan salah satunya adalah terus menjaga kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 149 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan	1	0	5	1	75

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

2. Persentase Kegiatan Seni & Budaya Daerah yang Diselenggarakan

Persentase kegiatan seni & budaya daerah yang diselenggarakan di Kota Kediri pada tahun 2019-2023 minimal sebesar 80% kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga seluruh kegiatan seni dan budaya daerah yang memuat banyak massa ditiadakan. Persentase kegiatan seni & budaya daerah yang diselenggarakan pada tahun 2021-2023 konsisten mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 90% seiring pelonggaran PPKM dan pemulihan ekonomi. Peningkatan persentase kegiatan seni & budaya daerah yang diselenggarakan disebabkan antusiasme yang tinggi dari pelaku seni, budaya dan masyarakat Kota Kediri setelah cukup lama tidak adanya kegiatan seni & budaya daerah yang diselenggarakan selama pandemi Covid-19.

Tabel 2. 150 Persentase Kegiatan Seni & Budaya Daerah yang Diselenggarakan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kegiatan Seni & Budaya Daerah yang diselenggarakan	80%	0	80%	82 %	90%

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

3. Jumlah Kunjungan Museum

Dalam rentang tahun 2019-2023, jumlah kunjungan Museum Airlangga di Kota Kediri mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 2.977 pengunjung dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 12.295 pengunjung. Kunjungan Museum Airlangga Kota Kediri pada tahun 2020 dibuka untuk umum hanya sampai dengan bulan Maret, kemudian hingga akhir tahun tidak dibuka karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 Museum Airlangga sempat dibuka kembali hanya untuk keperluan pendidikan dan penelitian dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga jumlah pengunjung yang dicapai hanya sebesar 476 orang. Pada tahun 2022-2023 jumlah kunjungan Museum Airlangga konsisten meningkat seiring cakupan vaksinasi Covid-19 yang tinggi dan pelonggaran PPKM yang mendorong antusiasme masyarakat untuk bermobilitas termasuk mengunjungi benda-benda purbakala di museum.

Tabel 2. 151 Jumlah Kunjungan Museum Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan Museum	12.295	2.977	476	9.892	14.907

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

2.4.2.16 Urusan Perpustakaan

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menggambarkan tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diukur dari Unsur-unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

Jika sebelumnya hanya diukur pada tingkat provinsi, mulai tahun 2022 Perpunas secara berkala merilis hasil perhitungan IPLM di tingkat kabupaten/kota. Perkembangan IPLM Kota Kediri pada tahun 2022-2023 yang diperoleh dari ketujuh unsur pembangun literasi masyarakat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 152 Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2022-2023

No.	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023
1.	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0021	0,4913
2.	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	1,5146	0,4659
3.	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0009	0,4319
4.	Tingkat Kunjungan Pemustaka	0,5635	0,0320
5.	Perpustakaan Ber-SNP	3,2108	1,0000
6.	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,4166	1,0000
7.	Jumlah Pemustaka	0,4383	1,0000
IPLM		87,81	63,16

Sumber : Perpusnas, 2024

IPLM Kota Kediri tahun 2023 sebesar 63,16 atau termasuk dalam kategori sedang (50-79,99), dan berada di bawah capaian IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 75,18. Jika dibandingkan kondisi tahun 2022, IPLM Kota Kediri mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 24,65 poin yaitu pada skor 87,81 atau termasuk pada kategori tinggi (80-89,9) diatas capaian IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 74,73.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri perlu terus mendorong upaya mengoptimalkan kualitas pembangunan manusia melalui kemampuan literasi masyarakat dengan meningkatkan capaian unsur pembangun literasi masyarakat terstandar, meliputi pemerataan layanan perpustakaan dan dipersepsi terstandar nasional perpustakaan, ketercukupan SDM, pemerataan koleksi bahan pustaka, kegiatan KIE dan pengembangan inovasi layanan perpustakaan digital dengan interpretasi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 153 Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2023

No.	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat	Nilai	Interpretasi
1.	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,4913	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 49 persen dari standar
2.	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,4659	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 46 persen dari standar
3.	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,4319	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 43 persen dari standar
4.	Tingkat Kunjungan Pemustaka	0,0320	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 3 persen dari standar
5.	Perpustakaan Ber-SNP	1,0000	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar
6.	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan	1,0000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7.	Jumlah Pemustaka	1,0000	pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
IPLM		63,16	

Sumber : Perpusnas, 2024

2. Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat

Kunjungan pemustaka dapat mencerminkan tingkat pemanfaatan perpustakaan yang diukur berdasar jumlah kunjungan pemustaka per hari dibagi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil sensus Perpusnas diketahui bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kota Kediri dilihat dari persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 0,06%. Capaian ini mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 5,18% dimana tingkat pemanfaatan perpustakaan pada tahun 2022 mencapai 5,24%.

Dalam Standar Nasional Perpustakaan, ketentuan jumlah kunjungan ke perpustakaan umum setiap hari sebesar 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah.

Capaian kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Kota Kediri belum ideal dan merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Kediri untuk dapat kembali mencapai target sesuai standar nasional. Kurangnya sarana prasarana infrastruktur Perpustakaan Umum Daerah, koleksi buku kurang *update*, dan terbatasnya ketersediaan buku elektronik berdampak pada rendahnya tingkat apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan dan partisipasi pemanfaatan perpustakaan yang masih rendah. Sehingga Pemerintah Kota Kediri gencar melakukan promosi perpustakaan via media sosial (Facebook, Instagram, dan Youtube) dan menggiatkan Perpustakaan Keliling ke sekolah dan taman kota.

3. Tingkat Kegemaran Membaca

Perkembangan literasi masyarakat sangat bergantung kepada perilaku kegemaran membaca masyarakat. Tingkat Kegemaran Membaca memiliki 5 (lima) parameter, yaitu frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan bacaan yang dibaca, frekuensi akses internet, serta durasi akses internet, mengacu pada Pedoman Pengukuran Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia dari perpustakaan, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu : sangat rendah (0-20), rendah (20,1-40), sedang (40,1-60), tinggi (60,1-80), dan sangat tinggi (80,1-100).

Pada tahun 2023 capaian Tingkat Kegemaran Membaca Kota Kediri sebesar 54,2 atau termasuk pada kategori sedang. Capaian ini berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dengan skor sebesar 63,5 dan menempati urutan terendah kedua diantara kabupaten/kota se-Jawa Timur. Secara rinci capaian kelima parameter Indeks Kegemaran Membaca Kota Kediri pada tahun 2023 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2. 154 Nilai Indeks Kegemaran Membaca Kota Kediri pada tahun 2023

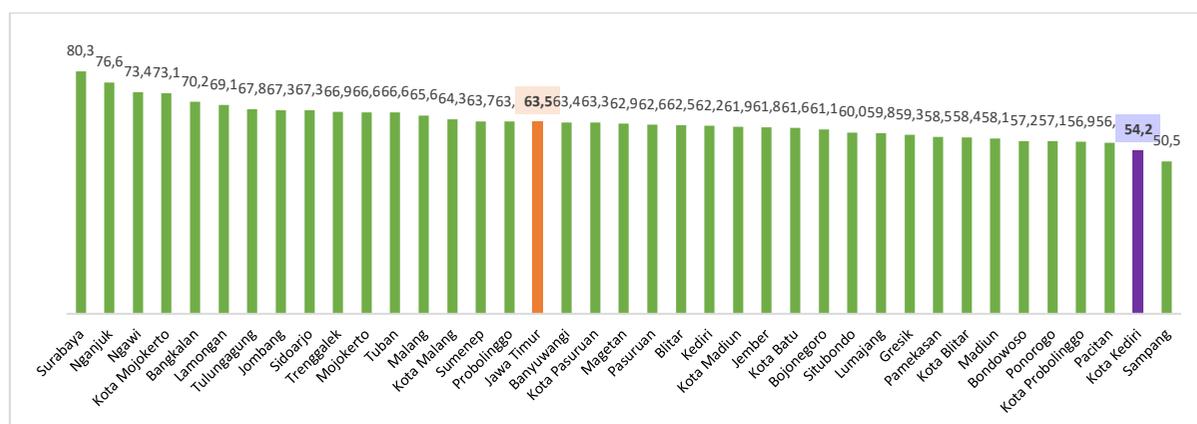
No	Parameter	Nilai	Kategori	Interpretasi
1	Frekuensi Membaca	57,5	Sedang	Frekuensi Membaca per Minggu 3-4 kali
2	Durasi Membaca	52,7	Sedang	Durasi Membaca per hari 1 jam s/d 1 jam 59 menit
3	Jumlah Bahan bacaan yang dibaca	52,4	Sedang	Jumlah Bahan bacaan yang dibaca per Triwulan 3-4 bahan bacaan
4	Frekuensi Akses Internet	58,3	Sedang	Frekuensi Akses Internet per Minggu 3-4 kali
5	Durasi Akses Internet	50,9	Sedang	Durasi Akses Internet per hari 1 jam s/d 1 jam 59 menit
Tingkat Kegemaran Membaca		54,2	Sedang	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim, 2023

Tingkat Kegemaran Membaca Kota Kediri pada tahun 2023 mengalami penurunan 7,5 poin dibanding tahun 2022 dengan capaian sebesar 56,9 atau termasuk pada kategori

sedang. Perbandingan capaian Tingkat Kegemaran Membaca Kota Kediri dengan kabupaten/kota di Jawa Timur ditunjukkan oleh grafik dibawah ini.

Grafik 2. 49 Perbandingan Tingkat Kegemaran Membaca Kota Kediri dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 2024

Upaya Pemerintah Kota Kediri dalam mengungkit capaian pembangunan literasi dan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan, program layanan digital perpustakaan dan pendidikan literasi, antara lain memasifkan promosi dan budaya literasi, transformasi perpustakaan berbasis Inklusi Sosial, serta pengembangan Perpustakaan Daerah Digital.

2.4.2.17 Urusan Kearsipan

1. Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Indeks penyelenggaraan kearsipan menggambarkan hasil monitoring dan pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah yang dihitung berdasar nilai akumulasi 60% bobot hasil nilai audit kearsipan eksternal ditambah 40% bobot hasil nilai audit internal.

Kategori Indeks Kearsipan berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan diklasifikasikan sebagai berikut : 90 - 100 = AA; 80 - 89,99 = A; 70 - 79,99 = BB; 60 - 69,99 = B; 50 - 59,99 = CC; 30 - 49,99 = C ; dan 0 - 29,99 = D).

Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Kota Kediri yang dirilis ANRI pada tahun 2023 dapat dikatakan cukup berhasil dengan kategori penilaian B pada skor 65,63. Capaian ini mengalami penurunan 0,4 poin dibanding Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2022. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia kearsipan, baik tenaga Fungsional Arsiparis maupun tenaga Teknis Kearsipan.

Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan dan pengawasan kearsipan serta pendampingan penataan arsip di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Perkembangan Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Kota Kediri selama tahun 2019-2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 155 Perkembangan Indeks Kearsipan Kota Kediri Tahun 2019-2022

Tahun	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan
2019	Belum terdapat Penilaian Indeks pada Daerah
2020	B (65.63)
2021	CC
2022	B (66.03)
2023	B (67.58)

Sumber : ANRI,2023

2. Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang bernilai baik

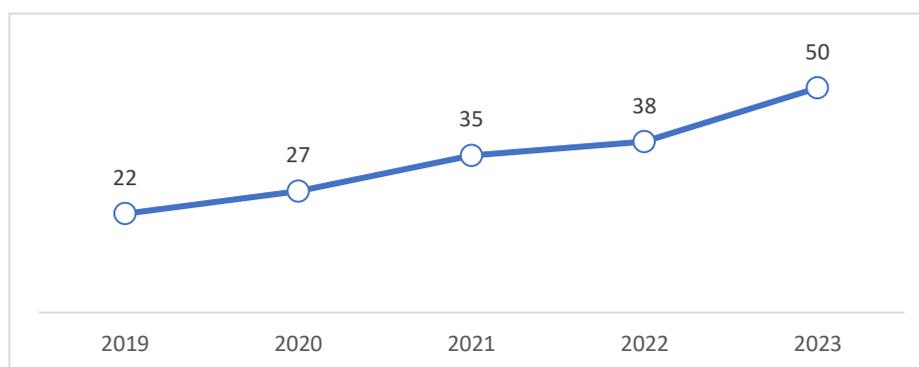
Persentase Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah merupakan hasil audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang bernilai minimal baik, dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan. Aspek penilaian audit internal kearsipan meliputi :

1. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip,
2. Aspek sumber daya kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Prasarana dan Sarana Kearsipan

Perangkat daerah di Kota Kediri yang memiliki nilai audit kearsipan minimal baik pada tahun 2023 sebanyak 18 dari 36 perangkat daerah atau sebesar 50%. Capaian ini meningkat 4 perangkat daerah atau sebanyak 14 perangkat daerah (38%) dengan nilai audit kearsipan minimal baik pada tahun 2022. Hal ini didorong dengan upaya pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, serta penataan dan pendampingan ke unit Kearsipan.

Tren nilai audit internal kearsipan di seluruh unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri menunjukkan perkembangan yang terus meningkat sebagaimana tabel di bawah ini.

Grafik 2. 50 Perkembangan Persentase Audit Internal Kearsipan Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, 2023

2.4.3 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.4.3.1 Urusan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Pengembangan usaha perikanan di Kota Kediri dilanjutkan dari tahun ke tahun dengan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pembinaan, penyuluhan dan pengembangan bibit ikan unggul. Jumlah produksi perikanan tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 156 Produksi Perikanan (dalam Kwintal) Tahun 2018-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Perikanan	1792,1	1466,5	1840	1861	1878

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Target pada tahun 2019 adalah 1605,29 kw. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan target sebesar 1803,50 kw. Pada tahun 2021 target produksi perikanan adalah 1821,50 kw. Pada tahun 2022 target produksi perikanan adalah 1839,50 kw dan pada tahun 2023 target produksi perikanan adalah 1875,6 kw. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan tidak bisa memenuhi target produksi dikarenakan merebaknya COVID-19 sehingga berdampak pada pembatasan kegiatan dan penurunan produksi perikanan. Pada tahun 2021 - 2023 cenderung mengalami kenaikan produksi perikanan dan juga memenuhi target karena tingkat pengetahuan pembudidaya semakin meningkat akibat pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

2. Angka Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan adalah jumlah atau banyaknya ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Penghitungan angka konsumsi ikan bertujuan untuk mengetahui kecukupan asupan gizi masyarakat. Peningkatan konsumsi ikan dilakukan dengan cara Kampanye Gemarikan yaitu memberikan makanan berbahan baku ikan kepada masyarakat. Angka konsumsi ikan tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 157 Angka Konsumsi Ikan (dalam Kg/Kapita/Tahun) Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Konsumsi Ikan	28,32	29,22	32,60	34,80	36,54*

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

*Data bersifat sementara

Target peningkatan konsumsi ikan pada tahun 2020 adalah 26,16 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2021 target mengalami kenaikan menjadi 27,47 kg/kapita/tahun. Tahun 2022 target mengalami kenaikan menjadi 28,84 kg/kapita/tahun. Tahun 2023 target mengalami kenaikan menjadi 30,28 kg/kapita/tahun. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa angka konsumsi ikan Kota Kediri pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dan dapat memenuhi target. Faktor penyebab terjadi peningkatan konsumsi ikan setiap tahun karena kegiatan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) yang menjadi agenda rutin oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri dengan sasaran masyarakat umum, anak usia sekolah, dan balita sehingga menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya makan ikan.

2.4.3.2 Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan bidang pariwisata salah satunya diarahkan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Destinasi wisata yang ada di Kota Kediri terdiri dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata kuliner, wisata belanja, wisata event, dll. Destinasi wisata alam diantaranya Kawasan Wisata Selomangleng, Sumber Banteng, Sumber Jiput, Sumber Cakarsi, Hutan Kota Joyoboyo. Destinasi wisata buatan diantaranya Taman Wisata Tirtayasa, Surya Wisata, Taman Brantas, Memorial Park, Taman Sekartaji, Taman Ngronggo. dll. Destinasi wisata religi diantaranya wisata religi Kedunglo, Pondok Pesantren Lirboyo, Makam Sunan Geseng, Makam Setono Gedong, Pondok LDII, Makam Boncolono, Klenteng, Gereja Merah, dll. Wisata kuliner terdiri dari tempat kuliner Jl. Dhoho, kuliner Soto Bok Ijo, kuliner Pusat Oleh-oleh, kuliner Cafe dan Resto. Wisata belanja terdiri dari wisata belanja Ketos, Jl. Dhoho, Ramayana, Kediri Mall, dll. Wisata *event* diantaranya event atraksi budaya

dan pariwisata, Upacara Manusk Sima. Beberapa destinasi wisata di Kota Kediri memiliki kondisi baik, namun demikian, sebagian besar lainnya rata-rata masih terkendala dalam kualitas dan kelengkapan sarana prasarana seperti lahan parkir, fasilitas disabilitas, ruang laktasi, dll. Disamping sarana dan prasarana, jumlah kunjungan wisata juga dipengaruhi dari upaya promosi wisata melalui paket wisata yang ditawarkan, inovasi pengelolaan usaha pariwisata, ketersediaan kalender *event* tahunan serta aksesibilitas antar tempat wisata yang terintegrasi dengan moda transportasi terjangkau. Berikut tersaji data jumlah wisatawan selama lima tahun terakhir :

Tabel 2. 158 Jumlah Wisatawan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan	2.050.000	721.141	984.930	1.329.737	1.695.361

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

Selama tahun 2019-2023 jumlah kunjungan wisatawan konsisten naik pada tahun 2021-2023. Peningkatan kunjungan wisata didukung oleh adanya *event sport science* dan atraksi budaya, serta keaktifan pelaku seni dan pariwisata dalam mengikuti event festival, baik festival daerah maupun nasional. Sedangkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan terjadi pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi kepariwisataan di Kota Kediri dengan jumlah wisatawan sebanyak 721.141 atau menurun drastis sebesar 64,8%. Dalam kondisi tersebut Pemerintah daerah tidak tinggal diam namun tetap berupaya mengadakan pertunjukan seni dan budaya secara virtual dengan melibatkan seniman lokal Kota Kediri untuk mewadahi kreativitas para seniman dan bekerjasama dengan perangkat daerah terkait alih profesi para pelaku seni dan pariwisata sehingga seiring waktu berakhirnya pandemi dan pemulihan ekonomi, kunjungan wisata pada tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan peningkatan signifikan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk terus memperluas promosi pariwisata dan memperbanyak pagelaran dan *event* kesenian yang lebih menarik.

2.4.3.3 Urusan Pertanian

1. Produktivitas Tanaman Pangan

Produktivitas tanaman pangan dimaksudkan untuk menghitung produksi pangan dibanding dengan luas tanaman pangan. Adapun komoditas tanaman pangan antara lain tanaman padi, jagung dan kedelai di Kota Kediri. Berikut adalah data yang menunjukkan produktivitas tanaman pangan Kota Kediri tahun 2019 – 2023.

Tabel 2. 159 Produktivitas Tanaman Pangan Kota Kediri Tahun 2019-2023

Produktivitas tanaman pangan (ton/ha)	2019	2020	2021	2022	2023
Jagung	7.91	8.4	8.39	8.25	8.63
Padi	7.08	7.29	7.55	7.28	7.35

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa produktivitas tanaman jagung pada tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 produktivitas mengalami penurunan disebabkan karena curah hujan sangat tinggi. Sedangkan pada tahun 2023 produktivitas tanaman jagung mengalami kenaikan menjadi 8,63 ton/ha. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 0,38 ton/ha dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 8,25 ton/ha. Produktivitas padi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 7,55 ton/ha, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,27 ton/ha. Hal ini disebabkan karena serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Adapun capaian produktivitas padi di tahun 2023 yaitu 7,35 ton, angka ini mengalami peningkatan sebanyak 0,07 ton/ha dibandingkan tahun sebelumnya yakni 7,28 ton/ha. Adapun upaya yang dilakukan oleh dinas pertanian adalah melakukan penyuluhan kepada petani sehingga dapat mengantisipasi dan mengatasi hama tanaman.

2. Produktivitas Tanaman Perkebunan

Produktivitas merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas lahan antara lain : luas lahan, kondisi irigasi, keasaman tanah, pupuk, hama, penyakit dan gulma, tenaga kerja, curah hujan, teknologi, jenis atau varietas. Beberapa yang termasuk komoditas perkebunan di Kota Kediri adalah komoditas tanaman tebu. Adapun perkembangan produktivitas tanaman perkebunan Kota Kediri dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 160 Produktivitas Tanaman Perkebunan Kota Kediri Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Produktivitas tanaman Perkebunan (tebu)	98.5	98.5	98.8	99.4	99

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa produktivitas tanaman perkebunan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2023, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat produktivitas dikarenakan terdapatnya hama yang menyerang tanaman tebu. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan terhadap petani dalam mengantisipasi dan mengatasi hama tanaman.

3. Produksi Peternakan

Pembangunan usaha peternakan di Kota Kediri terus dilanjutkan dari tahun ke tahun dengan semakin memberdayakan peternakan rakyat melalui pembangunan sapi potong dan pengembangan unggas. Produksi hasil peternakan dapat diketahui melalui jumlah produksi hasil ternak. Jumlah produksi hasil ternak (daging, telur dan susu) tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 161 Produktivitas Peternakan Kota Kediri (dalam Ton) Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktivitas peternakan	4.679	3.242,05	2.802,22	2.703,30	2.785,06	2.718,00

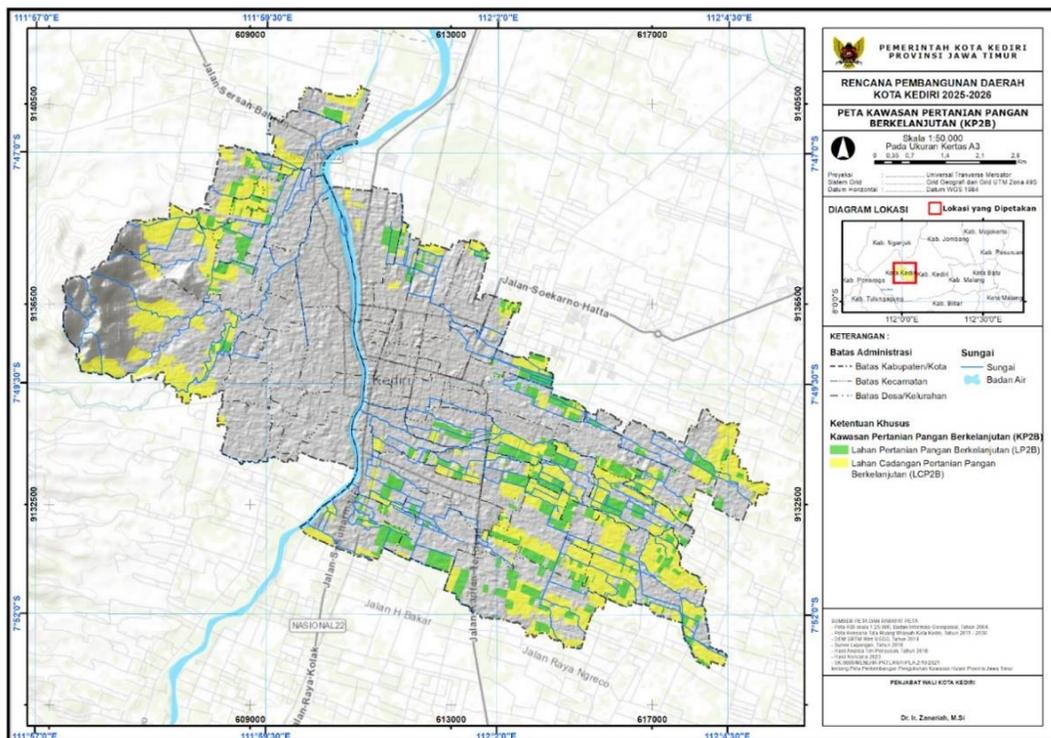
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa produktivitas peternakan Kota Kediri pada tahun 2018-2023 cenderung mengalami penurunan. Capaian produktivitas peternakan di tahun 2023 adalah 2.718,00 ton. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2.785,06 ton hal ini dikarenakan terdapatnya penyakit Mulut dan Kuku yang menjadi wabah hampir seluruh Indonesia. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang beredar di Kota Kediri.

4. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Dalam rangka melindungi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah perlu dilakukan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kota Kediri menetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sesuai Perda tersebut luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 1.441,95 hektare, yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 509,96 hektare yang merupakan aset Pemerintah Kota Kediri dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 931,99 hektare yang merupakan tanah warga Kota Kediri.

Gambar 2. 17 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)



Sumber: Bappeda Kota Kediri 2024

Berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2019 dan tahun 2023 terdapat selisih zona pertanian sebesar 775,95 hektare. Adapun data penggunaan lahan berupa sawah sebagai berikut:

Tabel 2. 162 Penggunaan Lahan Sawah Kota Kediri Tahun 2019 dan 2023

Penggunaan Lahan	2019	2023
Sawah	3,279.91	2,503.96

Sumber: DKPP Tahun 2024

Perubahan penggunaan lahan tersebut disebabkan karena adanya dinamika pembangunan seperti rencana pembangunan jalan tol dan bandara Kediri sehingga terdapat perubahan penggunaan lahan dari pertanian baik menjadi pertanian, perdagangan dan jasa, industri maupun sarana dan prasarana umum.

2.4.3.4 Urusan Perdagangan

1. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Kota Kediri pada tahun 2022, mengalami peningkatan menjadi Rp98.155,46 miliar dibanding tahun sebelumnya atau mengalami surplus. Peningkatan kinerja ekspor sebesar Rp6.723,2 miliar tersebut menunjukkan masih kuatnya permintaan dari luar Kota Kediri seiring dengan pengendalian pandemi Covid-19 yang semakin baik. Upaya untuk terus meningkatkan neraca perdagangan Kota Kediri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri melaksanakan program/kegiatan pembinaan terhadap pelaku

usaha dan IKM melalui pelatihan, promosi dan pemasaran sehingga meningkatkan pertumbuhan jumlah dan omzet IKM/pelaku usaha baik di tingkat regional, nasional maupun global. Neraca perdagangan Kota Kediri Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. 163 Neraca Perdagangan Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023**
Neraca Perdagangan (Miliar Rp)	88.525	84.958	91.432	98.155	89.000

*Ket ** : Data menggunakan target pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dikarenakan realisasi belum tersedia*

Sumber: BPS Kota Kediri, RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024

2. Indeks Tertib Ukur

Indeks Tertib Ukur merupakan parameter yang mengukur keberhasilan tertib ukur dengan menggunakan indikator Alat-alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, Indeks Tertib Ukur Kota Kediri mencapai angka sebesar 70,6% dengan target yang ditetapkan sebesar 67%. Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun 2022 yang mencapai 81,27%, pencapaian tersebut tetap berada di atas target yang ditetapkan. Penurunan disebabkan adanya BDKT yang tidak memenuhi standar/ketentuan yaitu LPG 3 kg melon.

Pada tahun 2023, dilakukan kegiatan pengawasan terhadap 7.764 UTTP dan 323 BDKT. Jumlah UTTP yang memiliki tanda tera sah dan berlaku mencapai 7.252 dari 10.484 potensi UTTP di Kota Kediri, setara dengan 69,17%. UTTP yang diawasi melibatkan berbagai jenis, seperti meter kayu, takaran basah, TUM BBM, timbangan (sentisimal, meja, dacin logam, elektronik, pegas, BBI meja/lantai, jembatan, neraca obat), pompa ukur BBM di SPBU, meter air, perlengkapan alat timbang biasa, serta alat timbang halus.

Sementara itu, dari 323 unit BDKT yang diawasi, 238 unit BDKT (73,68%) memenuhi ketentuan yang berlaku. Jenis BDKT yang diawasi melibatkan makanan ringan (80 sampel) dan LPG (243 sampel). Dari kesesuaian UTTP dan BDKT tersebut, nilai Indeks Tertib Ukur (ITU) mencapai 70,6%, melebihi target tahun 2023 sebesar 67%. Rincian jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 164 Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku Tahun 2023

No.	Jenis UTTP	Tahun Pembubuhan			Masa Berlaku 2023
		2021	2022	2023	
1	Meter Kayu			40	40
2	Meter Taksi			0	0
3	Takaran :			0	0
	- takaran basah			27	27
	- takaran kering			0	0
4	TUM BBM		164	530	694
5	Timbangan			0	0
	- sentisimal			288	288
	- meja			533	533
	- dacin logam			36	36
	- elektronik			315	315
	- pegas			72	72
	- cepat			0	0
	- BBI meja/lantai			4	4
	- jembatan			11	11
	- neraca obat			51	51
	- neraca emas			0	0
6	PUBBM			159	159
7	Meter Air	197	127	220	544
8	Perlengkapan :			0	0
	- AT. biasa			3.901	3901
	- AT.Halus			577	577
Jumlah		197	291	6.764	7.252

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, 2023

Indeks tertib ukur Kota Kediri Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. 165 Indeks Tertib Ukur Kota Kediri Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Indeks Tertib Ukur (%)	37	73,3	81,27	70,6

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, 2023

Upaya untuk terus meningkatkan Indeks Tertib Ukur Kota Kediri antara lain melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia dan kolaborasi dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal, Kementerian Perdagangan, dalam pengawasan dan penyuluhan mengenai kemetrologian kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang kepada pemilik UTTP juga menjadi fokus, baik di kantor pelayanan, tempat di mana alat ukur terpasang dan dipakai, maupun di pasar dan kelurahan melalui sidang tera/tera ulang. Selain itu, upaya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kemetrologian, seperti pengamat tera, penera, dan pengawas kemetrologian.

2.4.3.5 Urusan Perindustrian

Jumlah industri hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 8.424 unit yang meliputi industri besar (3 unit), IKM formal (5.404 unit), IKM non formal (2.198 unit) dan 46 sentra (819 unit). Sementara jumlah industri pada tahun 2023 tercatat sebanyak 13.133 unit yang meliputi industri besar (3 unit), IKM formal (10.029 unit), IKM non formal (2.281 unit) dan 46 sentra industri (820 unit). Realisasi pertumbuhan industri tahun 2023 sebesar 55,90% melebihi target yang ditetapkan sebesar 12,4%. Meskipun pertumbuhan industri tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022 sebesar 79,46%, namun peningkatan jumlah industri pada tahun 2023 sebanyak 4.709 unit lebih tinggi di banding peningkatan industri pada tahun 2022 sebanyak 3.730 unit. Berikut rincian peningkatan 4.709 unit industri pada tahun 2023 berdasarkan jenisnya tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 166 Jenis dan Jumlah Industri Tahun 2023

NO.	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4
2	Industri Karet dan Plastik	22
3	Industri Kayu	66
4	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	7
5	Industri Kertas dan Percetakan	130
6	Industri Kimia Dan Farmasi	45
7	Industri Lainnya	184
8	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	136
9	Industri Makanan	3120
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	90
11	Industri Mineral Non Logam	29
12	Industri Tekstil	394
13	Reparasi	482

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, 2023

Sedangkan pertumbuhan industri Kota Kediri dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 167 Tabel Pertumbuhan Industri Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Industri (%)	8,67	12,12	18,00	79,46	55,90

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, 2023

Upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan industri di Kota Kediri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri melaksanakan Program/Kegiatan, antara lain: Program pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), memicu kenaikan jumlah IKM formal dan wirausaha baru, Fasilitasi halal dan merk gratis untuk melengkapi legalitas usaha seperti NIB (Nomor Induk

Berusaha) yang berbasis risiko (OSS RBA), Fasilitasi promosi dan pemasaran baik *online* melalui *pusakaumkm.id* maupun *offline* melalui pameran, promosi media, fashion show untuk meningkatkan akses pemasaran dan omzet pelaku usaha; Pelatihan dan pendampingan bisnis untuk meningkatkan motivasi, kualitas, dan daya saing pelaku usaha.

2.4.4 FOKUS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

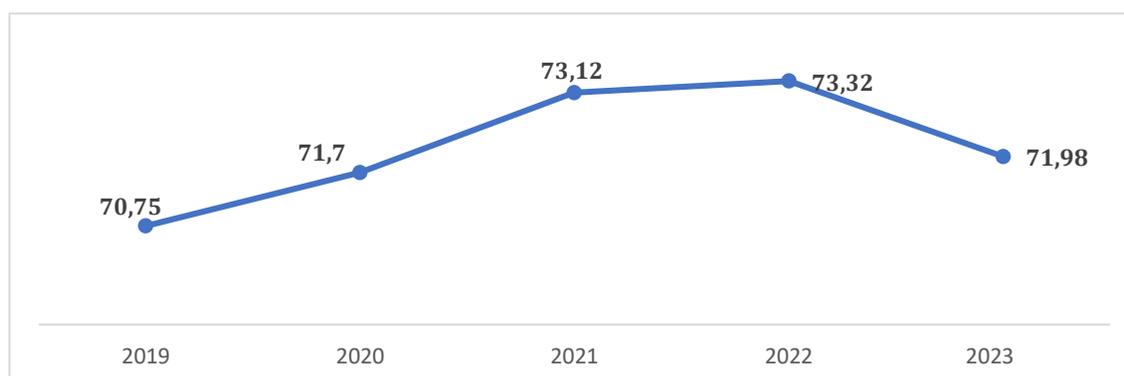
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja setiap tahunnya. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui Tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Sasaran evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Adapun nilai SAKIP Kota Kediri tahun 2019 – 2023 sebagaimana dalam grafik berikut.

Grafik 2. 51 Nilai SAKIP Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber: Bagian Organisasi, 2023

2.4.4.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan memiliki peran kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Untuk mengukur capaian kinerja urusan perencanaan ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja. Indikator kinerja urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 168 Indikator Kinerja Perencanaan

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	73.29	73.44	75.00	75.78	75.85	74.42
2	Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen perencanaan						80%
3	Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran						75%
4	Persentase capaian kinerja perencanaan						95 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

Adapun analisis terhadap pencapaian 4 (empat) indikator sasaran tersebut di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Persentase Rata-Rata Capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja.

Evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kota Kediri. Evaluasi tersebut meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Bappeda Kota Kediri terlibat aktif dalam dua jenis evaluasi yaitu penilaian kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.

Oleh karena itu, indikator yang digunakan adalah persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja. Formulasi yang digunakan adalah rata-rata dari persentase dari nilai komponen perencanaan dibanding bobot perencanaan ditambah dengan Persentase Nilai Pengukuran Kinerja dibanding Bobot Kinerja. Secara lebih lengkap didapatkan sebagai berikut:

Tabel 2. 169 Pengukuran Kinerja Kota Kediri Tahun 2019-2023

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
Pengukuran Kinerja (1)	68.88	71.60	72.52	72.63	71,93
Perencanaan Kinerja (2)	78.00	78.40	79.03	79.07	76,90
Persentase (1) dan (2)	73.44	75.00	75.78	75.85	74,42

Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

Hasil persentase menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah menerapkan SAKIP dengan baik namun terlihat dari penilaian kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja berjenjang yang menunjukkan adanya penurunan di tahun 2023 dan perlu perbaikan di tahun berikutnya.

2. Persentase Pemenuhan Kriteria Minimum SAKIP Komponen Perencanaan

Pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri telah menetapkan indikator baru yang signifikan, yaitu Persentase Pemenuhan Kriteria Minimum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada komponen perencanaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021. Komponen perencanaan terdiri dari beberapa sub komponen, yaitu:

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
- c. Dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan.

Dalam konteks perencanaan di dalam sub komponen, persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP pada komponen perencanaan menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penetapan indikator ini menggambarkan komitmen Bappeda Kota Kediri untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kinerja dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Permenpan

RB Nomor 88 Tahun 2021 memberikan pedoman terkait implementasi SAKIP di instansi pemerintah, termasuk dalam hal perencanaan. Oleh karena itu, persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP pada komponen perencanaan di Bappeda Kota Kediri tidak hanya menjadi tolak ukur bagi kualitas perencanaan, tetapi juga sebagai upaya pemenuhan ketentuan regulasi yang berlaku. Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen perencanaan = (jumlah kriteria indikator kinerja perencanaan yang terpenuhi / jumlah total kriteria indikator kinerja perencanaan) * 100%. Pada tahun 2023, sebagai tahun awal perhitungan di dapatkan nilai 80% pemenuhan kriteria SAKIP dalam komponen perencanaan kinerja.

Dengan menitikberatkan pada indikator ini, Bappeda Kota Kediri berharap ke depan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks implementasi Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021, Bappeda juga diharapkan mampu mengevaluasi dan memperbaiki proses perencanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

3. Persentase Pemenuhan Kriteria Minimum SAKIP Komponen Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), komponen pengukuran terdiri dari beberapa sub komponen, yaitu:

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan
- b. pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- c. pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Indikator persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah memenuhi kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran. Kriteria minimum tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Dengan adanya indikator persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran, diharapkan Pemerintah Kota Kediri dapat meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dan mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien. Nilai indikator Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran dihitung dengan menggunakan formula berikut: Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran = (jumlah kriteria indikator kinerja pengukuran yang terpenuhi /

jumlah total kriteria indikator kinerja pengukuran) * 100%. Pada tahun 2023, persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran sebesar 75 % pemenuhan kriteria SAKIP dalam komponen pengukuran kinerja.

Dengan mengimplementasikan persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP pada komponen pengukuran di Bappeda Kota Kediri diharapkan dapat mengukur, memantau, dan meningkatkan kinerja instansinya secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan

Persentase capaian kinerja perencanaan merupakan indikator baru dalam RPD Kota Kediri tahun 2025-2025 yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Formula perhitungan persentase capaian kinerja perencanaan adalah sebagai berikut: Persentase capaian kinerja perencanaan = (Realisasi capaian kinerja indikator kategori tinggi/Total indikator kinerja) *100

Keterangan:

- a. Realisasi capaian kinerja indikator kategori tinggi adalah jumlah indikator kinerja yang telah mencapai target kinerja kategori tinggi.
- b. Total indikator kinerja adalah jumlah total indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- c. Indikator kategori tinggi adalah indikator kinerja yang memiliki target kinerja yang ditetapkan di atas 76%.

Dengan menggunakan formula tersebut, nilai indikator persentase capaian kinerja perencanaan dapat berkisar antara 0 hingga 100. Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah semakin baik dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 indikator persentase capaian kinerja perencanaan sebesar 95% dari total 40 Indikator.

2.4.2.2 Keuangan

1. Penyelenggaraan Urusan Keuangan

Penyelenggaraan urusan keuangan diarahkan untuk meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan serta meningkatnya Penerimaan Asli Daerah (PAD). Capaian indikator persentase kenaikan PAD pada tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 170 Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kenaikan PAD		184,52	-1,45	67,33	-27,42

Sumber : BPPKAD Kota Kediri, 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sarana mendukung pendanaan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan dan fungsi pemerintahan. Keberhasilan penerimaan PAD diukur dengan membandingkan PAD tahun berjalan dengan PAD pada tahun sebelumnya. Realisasi PAD tahun anggaran 2021 sebesar Rp439.896.279.120,18, sedangkan realisasi PAD tahun anggaran 2022 sebesar Rp319.295.604.320,24, terdapat penurunan sebesar Rp120.600.674.799,94 atau minus 27,42% dari target yang ditetapkan sebesar 1,25%, dengan capaian kinerja sebesar minus 2.194%. Sehingga masuk dalam kategori **kurang berhasil**.

Pada tahun anggaran 2022, tiga dari empat komponen PAD mengalami kenaikan, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sedangkan komponen penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2021. Penurunan tersebut didominasi oleh penurunan penerimaan pendapatan BLUD, dimana pada tahun 2021 terdapat lonjakan pasien akibat pandemi Covid-19 yang berimbas pada lonjakan kenaikan pendapatan BLUD. Penanganan pandemi yang baik berdampak pada penurunan kasus Covid-19 sehingga jumlah pasien pun berkurang **drastis**. Hal ini juga berdampak pada penurunan pendapatan BLUD tahun 2022 secara **drastis** jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD, antara lain:

1. Intensifikasi penerimaan PAD dengan beberapa pendekatan antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas layanan pembayaran pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi bekerjasama dengan pihak perbankan dan *e-commerce*, seperti pembayaran PBB melalui Indomaret, Alfamart, *Mobile Banking*, OVO, Tokopedia dan GoPay, serta Pembayaran BPHTB dan pajak daerah lainnya melalui *mobile banking* dan *virtual account* (VA) BNI dan Bank Jatim.
 - b. Optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang.
 - c. Mendekatkan layanan pembayaran kepada masyarakat/ wajib pajak dan retribusi melalui mobil keliling, tempat pembayaran PBB di kelurahan, melayani pembayaran di mal, *Car Free Day* dan *event-event* tertentu.
 - d. Menyampaikan surat tagihan piutang kepada WP secara *door to door* dan menerima penagihan melalui aplikasi android jika WP berkenan.

- e. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan pajak.
 - f. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data.
 - g. Penyampaian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) tepat waktu.
 - h. Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan.
 - i. Peningkatan kapasitas SDM dengan mengadakan kegiatan Bimtek dan sosialisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - j. Penyusunan SOP pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - k. Memperkuat pengawasan dan pemeriksaan dengan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kejaksaan Negeri.
 - l. Melakukan sosialisasi yang intensif melalui berbagai media dan acara/kegiatan.
2. Ekstensifikasi penerimaan PAD, melalui beberapa pendekatan:
- a. Membuat kajian tentang sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Melakukan pemutakhiran atau validasi data pajak daerah/retribusi daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pendekatan pengecekan atau pendataan ulang objek pajak dan retribusi yang ada di lapangan secara bertahap.
 - c. Menyusun draft rancangan perda kenaikan tarif yang rencananya akan dibahas pada tahun 2023.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Sementara itu, guna menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah maka diterapkan pengukuran melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dasar hukum implementasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah Permendagri nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD diukur melalui 6 dimensi, yaitu: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; Transparansi pengelolaan keuangan daerah; Penyerapan anggaran; Kondisi keuangan daerah; dan Opini BPK atas LKPD;

Adapun pembobotan dimensi IPKD diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran --> 15%
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD → 20%
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah → 15%
4. Penyerapan anggaran → 20%
5. Kondisi keuangan daerah → 15%
6. Opini BPK atas LKPD → 15%

Hasil dari Pengukuran IPKD adalah sebagai berikut.

1. Peringkat baik dengan nilai A
2. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B
3. Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C

Tabel 2. 171 Hasil pengukuran IPKD Kota Kediri

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai IPKD	38,15	34,15	48,56	56,43	69,93
	(-)	(-)	(-)	(C)	(C)

Sumber: BPPKAD Kota Kediri

Keterangan : (-) = tidak ada predikat

3. Opini BPK

Sementara itu, opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)

Ada 4 (empat) jenis Opini BPK yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah setelah pemeriksa mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, dan pemeriksa menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasive.

4. Opini Tidak Memberikan Pendapat(TMP)/ Disclaimer

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat

Pemerintah Kota Kediri telah menerima Opini BPK WTP selama 9 (Sembilan) tahun beturut-turut menandakan Pemerintah Kota Kediri memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

2.4.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

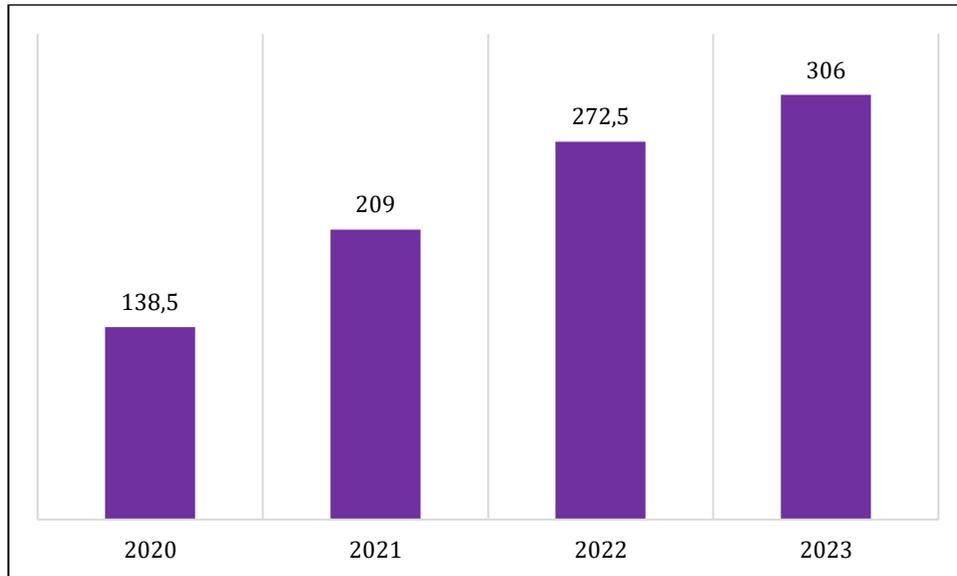
Salah satu penilaian yang digunakan untuk mengukur sistem dalam manajemen sumber daya manusia menggunakan penilaian indeks Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Tingkat penerapan Sistem Merit diukur dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
- b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
- c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
- e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
- f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
- h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan

- i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Perkembangan Sistem Merit di Kota Kediri disajikan pada grafik berikut

Grafik 2. 52 Indeks Sistem Merit Tahun 2020-2023



Sumber : BKPSDM Kota Kediri, 2022

Seiring dengan upaya perbaikan dalam manajemen ASN, nilai indeks Sistem Merit Kota Kediri mengalami kenaikan dari 138,5 (buruk) pada tahun 2020, meningkat menjadi 272,5 (baik) pada tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 306 (baik) pada tahun 2023.

Pada periode RPD 2025-2026, Pemerintah Kota Kediri berupaya meningkatkan manajemen ASN yang berbasis sistem merit dengan memperkuat sistem manajemen talenta ASN Kota Kediri. Penguatan manajemen talenta ASN dimulai dengan memperluas cakupan pelaksanaan uji kompetensi bagi ASN Kota Kediri, Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi, Pengelolaan kinerja yang terukur demi mencapai tujuan organisasi, dan pengembangan karir ASN (Promosi, Rotasi, Mutasi dan Pengembangan Kompetensi) berdasarkan rekomendasi penilaian potensi pada kotak manajemen talenta.

2.4.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Grafik 2. 53 Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Predikat Inovasi Daerah	-	1.697 (Sangat Inovatif)	55,03 (Inovatif)	(53,86) Inovatif	(47,63) Inovatif
2	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	75,81
3	Persentase penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan kategori layak	-	-	-	-	100
4	Persentase penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan pembangunan dengan kategori layak	-	-	-	-	100
5	Tingkat kematangan inovasi perangkat daerah	-	-	-	-	69,38

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

1. Predikat Inovasi Daerah

Predikat inovasi daerah merupakan penilaian terhadap tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan tiga dimensi, yaitu:

1. Inovasi pelayanan publik, yaitu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Inovasi tata kelola pemerintahan, yaitu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
3. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Mulai tahun 2020, Penilaian IID dilakukan dengan menggunakan skala 0-100. Daerah dengan nilai IID di atas 60,01-100 dinyatakan sebagai daerah sangat inovatif.

Daerah dengan nilai IID antara 35,00-60,00 dinyatakan sebagai daerah inovatif. Daerah dengan nilai IID di bawah 35,00 dinyatakan sebagai daerah kurang inovatif. Secara lengkap capaian IID Kota Kediri Tahun 2020 – 2023.

Grafik 2. 54 Indeks Inovasi Daerah Kota Kediri Tahun 2021-2023



Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2022

Dari penilaian IID tiga tahun terakhir, Kota Kediri termasuk dalam inovatif. Namun demikian, skor yang dicapai mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan inovasi pembangunan daerah.

2. Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Inovasi dan hasil kelitbangan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Inovasi dan hasil kelitbangan dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembangunan daerah. Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana inovasi dan hasil kelitbangan telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memanfaatkan inovasi dan hasil kelitbangan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Formula perhitungan persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah = (rata-rata dari (penelitian yang layak dibagi jumlah penelitian dan inovasi) dengan (tingkat kematangan lebih dari 70 dibagi jumlah inovasi)) * 100

Keterangan:

1. Penelitian yang layak adalah penelitian yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.
2. Tingkat kematangan lebih dari 70 adalah tingkat kematangan inovasi yang telah mencapai tahap prototipe atau lebih.

3. Jumlah penelitian dan inovasi adalah jumlah total penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pihak lainnya.

Dengan menggunakan formula tersebut, nilai indikator Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berkisar antara 0 hingga 100. Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah semakin baik dalam memanfaatkan inovasi dan hasil kelitbangan.

Adapun capaian tahun 2023 yang merupakan baseline indikator ini di dapatkan nilai ersentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebesar 75,81%.

3. Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan Kategori Layak

Persentase penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan kategori layak merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan untuk penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemerintah daerah.
2. Penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan harus menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.
3. Penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan harus dilakukan secara sistematis dan metodologis.

Indikator Persentase penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan kategori layak dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut: Persentase penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan kategori layak = (jumlah penelitian dan pengembangan yang memenuhi standar bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang layak / jumlah total penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan) * 100

Keterangan:

- a. Jumlah penelitian dan pengembangan yang memenuhi standar adalah jumlah penelitian dan pengembangan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.
- b. Jumlah total penelitian dan pengembangan adalah jumlah total penelitian dan pengembangan yang dilakukan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Dengan menggunakan formula tersebut, nilai indikator Persentase penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan kategori layak dapat berkisar antara 0 hingga 100. Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan bahwa penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan telah semakin baik. Adapun capaian tahun 2023 yang merupakan baseline indikator ini adalah 100% yang berarti bahwa semua penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan dan pengkajian peraturan telah layak semua.

4. Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dengan Kategori Layak

Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dengan kategori layak merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan untuk penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemerintah daerah.
2. Penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan harus menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan harus dilakukan secara sistematis dan metodologis.

Indikator persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dengan kategori layak dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut: Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dengan kategori layak = (jumlah penelitian dan pengembangan yang memenuhi standar bidang ekonomi dan pembangunan / jumlah total penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan pembangunan) * 100

Keterangan:

- a. Jumlah penelitian dan pengembangan yang memenuhi standar bidang ekonomi dan pembangunan adalah jumlah penelitian dan pengembangan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Jumlah total penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan adalah jumlah total penelitian dan pengembangan yang dilakukan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Dengan menggunakan formula tersebut, nilai indikator persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dengan kategori layak dapat berkisar antara 0 hingga 100. Nilai indikator yang semakin tinggi menunjukkan bahwa penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan telah semakin baik. Adapun capaian tahun 2023 yang merupakan *baseline* indikator ini adalah 100% yang berarti bahwa semua penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan pembangunan telah layak semua.

5. Tingkat Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Tingkat kematangan inovasi perangkat daerah merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi. Pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat kematangan inovasi perangkat daerah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Kriteria kematangan inovasi dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

1. Tahap Ide: Ide inovasi telah muncul, tetapi belum dikembangkan secara lebih lanjut.
2. Tahap Prototipe: Ide inovasi telah dikembangkan menjadi prototipe yang dapat diuji coba.
3. Tahap Produk: Inovasi telah dikembangkan menjadi produk yang siap untuk diimplementasikan.
4. Tahap Penerapan: Inovasi telah diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Tahap Skalabilitas: Inovasi telah dikembangkan dan dapat diterapkan di berbagai wilayah.

Penilaian tingkat kematangan inovasi perangkat daerah di dapatkan melalui penilaian dari inputan inovasi perangkat daerah dalam sistem Inovasi Daerah yang dikembangkan oleh Kemendagri. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang mencakup berbagai aspek, antara lain kualitas ide inovasi, kualitas prototipe inovasi, kualitas produk inovasi, kualitas penerapan inovasi dan kualitas skalabilitas inovasi.

Nilai penilaian tingkat kematangan inovasi perangkat daerah berkisar antara 0 hingga 100. Nilai yang semakin tinggi menunjukkan bahwa inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah telah semakin matang. Adapun nilai tingkat kematangan inovasi perangkat daerah tahun 2023 sebesar 69,38. dengan nilai yang masih di bawah 70, berarti ada beberapa inovasi perangkat daerah yang perlu ditingkatkan kembali tingkat kematangan.

2.4.4.5 Penunjang Pemerintahan Umum

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : 1. Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi; 2. Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas; 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; 4. Penataan database peraturan perundang-undangan.

Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kota Kediri. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2023 adalah 55.24 dengan kategori CC (CUKUP). Pada tahun 2025-2026 Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk meningkatkan capaian indeks reformasi hukum melalui optimalisasi harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN sebagai perancangan peraturan perundang-undangan.

2. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Berkualitas

Persentase kebijakan bidang perekonomian yang berkualitas digunakan sebagai indikator dalam mengukur meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian. Tujuan pengukuran ini adalah untuk melihat kualitas kebijakan bidang perekonomian meliputi

kebijakan bidang perekonomian secara umum, kebijakan bidang BUMD dan BLUD serta kebijakan bidang sumber daya alam yang di susun bisa diterapkan dan berjalan sesuai dengan harapan. Perkiraan realisasi pada tahun 2023 persentase kebijakan bidang perekonomian yang berkualitas sebesar 75% sehingga di rencanakan dalam 2025-2026 bisa meningkat menjadi 80-85%. Selanjutnya dengan peningkatan kualitas kebijakan di bidang perekonomian dapat menunjang salah satu variabel pembentuk Indeks reformasi Hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi.

3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

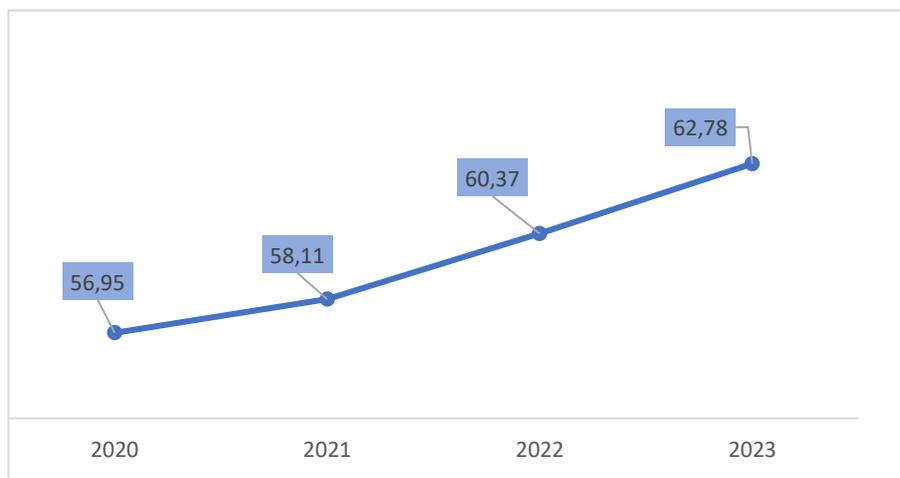
Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih serta melakukan pembaharuan dan perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini fokus pada delapan area perubahan, yaitu Organisasi, Tata Laksana, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Peraturan Perundang – Undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Aparatur. Sebagai upaya dalam memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan setiap pentahapan lima tahun diikuti dengan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada akhir periode *Grand Design* RB tahun 2010-2025 upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 dimana kondisi Reformasi Birokrasi Kota Kediri menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada kualitas hasil antara, yaitu Sistem Merit, ASN profesional, kualitas pelayanan publik, kapabilitas APIP, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip. Namun untuk implementasi SPBE dan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan, untuk maturitas SPIP masih sama seperti tahun sebelumnya sehingga secara

keseluruhan hasil antara Kota Kediri pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Adapun trend kenaikan hasil penilaian RB dari Kementerian PANRB sejak tahun 2019 hingga 2022 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2. 55 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri Tahun 2019-2022



Sumber : Bagian Organisasi Kota Kediri, 2022

Selanjutnya pada tahun 2023 ada perubahan formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.

Skor EKPPD

Guna mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi perlu adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Salah satu indikator yang menunjang keberhasilan urusan pemerintahan adalah Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Adapun Skor EKPPD Pemerintah Kota Kediri dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 172 Skor EKPPD Pemerintah Kota Kediri Tahun 2018-2023

No	SKOR	KETERANGAN
1	3,3301 (Status Sangat Tinggi)	Skor EKPPD tahun 2017 terhadap LPPD tahun 2016 diumumkan tahun 2018
2	3,2769 (Status Sangat Tinggi)	Skor EKPPD tahun 2018 terhadap LPPD tahun 2017 diumumkan tahun 2019
3	3,4198 (Status Sangat Tinggi)	Skor EKPPD tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 diumumkan tahun 2020
4	2,70 (Status Sedang)	Skor EKPPD tahun 2022 terhadap LPPD tahun 2021 diumumkan tahun 2023

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2023

Sesuai tabel di atas Skor EKPPD pemerintah Kota Kediri mengalami penurunan pada tahun 2022 dimana Skor EKPPD Pemerintah Kota Kediri tahun 2019 mendapatkan skor 3,4198 (Status Sangat Tinggi) mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2,70 (Status Sedang).

Pada RPD tahun 2025-2026 Pemerintah Kota Kediri berupaya meningkatkan skor EKPPD dengan memperkuat penilaian pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menggali potensi data atas Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD pada setiap perangkat daerah, sehingga penilaian Skor EKPPD Kota Kediri bisa mendapatkan penilaian skor yang lebih baik dan maksimal.

4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan

Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintahan dan bertujuan untuk melakukan harmonisasi regulasi dan mendorong perbaikan kebijakan bidang pemerintahan. Persentase kebijakan bidang pemerintahan pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 75%.

5. Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Pedoman Penganggaran Dan Pelaksanaan APBD

Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Pedoman Penganggaran dan Pelaksanaan APBD digunakan sebagai indikator dalam mengukur Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan Regulasi Penganggaran Dan Pelaksanaan APBD.

Tujuan pengukuran ini adalah untuk melihat peningkatan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menyusun APBD, Melaksanakan APBD dan Pelaporan APBD, sebagai salah satu Variabel Penunjang pembentukan Opini BPK-Unsur Kepatuhan dalam rangka Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Perkiraan Realisasi Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Pedoman Penganggaran dan Pelaksanaan APBD pada Tahun 2023 adalah 82%, dengan Rincian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pedoman Penganggaran (Standar Harga Satuan Barang Jasa) 100% dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Pedoman Pelaksanaan (Pedoman Umum Pelaksanaan APBD) 64%.

Sesuai Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan APBD Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai Tugas : Pemantauan Tingkat Kesiapan Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Kegiatan, Kewenangan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan.

6. Persentase Ketersediaan Peta Jabatan Perangkat Daerah Yang Sudah Ditetapkan Oleh PPK

Salah satu penilaian yang digunakan untuk mengukur sistem dalam manajemen sumber daya manusia menggunakan penilaian indeks Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Tingkat penerapan sistem merit diukur dengan aspek sebagai berikut : 1) Perencanaan Kebutuhan, 2) Pengadaan, 3) Pengembangan Karier, 4) Promosi dan Mutasi, 5) Manajemen Kinerja, 6) Penggajian, Penghargaan dan disiplin, 7) Perlindungan dan Pelayanan, 8) Sistem Informasi

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen meningkatkan manajemen ASN melalui peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengadaan ASN dengan tersedianya peta jabatan serta dokumen anjab abk

Formula perhitungan indikator ini adalah membandingkan peta jabatan perangkat daerah yang sudah ditetapkan oleh PPK dengan jumlah OPD yang mengusulkan. Realisasi tahun 2023 adalah 100%, Target tahun 2024 dan 2025 yang ditetapkan adalah 100%

7. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan kesimpulan hasil penilaian beberapa variabel yaitu kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Formula perhitungan indikator ini menggunakan hasil evaluasi AKIP KemenPANRB. Realisasi tahun 2023 adalah 11,16 sedangkan target tahun 2024 adalah 12,5 serta target tahun 2025 sebesar 13

Komponen Pelaporan terdiri dari 3 sub komponen dan 22 kriteria. Semakin banyak kriteria yang dipenuhi maka akan meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja. Untuk itu indikator ini perlu dicantumkan pada RPD

8. Persentase UPP dengan Indeks PEKPPP Baik

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh gambaran kondisi serta bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan. Dasar pelaksanaan PEKPPP mengacu kepada PermPANRB No 29 Tahun 2022 tentang PEKPPP dan Pedoman Menteri PANRB No. 1 Tahun 2022 tentang Instrumen Dan Mekanisme PEKPPP. Secara umum aspek pengukuran mekanisme PEKPPP yang digunakan dalam pedoman evaluasi berdasarkan 6 (enam) aspek, antara lain : 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); 5) Konsultasi dan Pengaduan dan 6) Inovasi. Pedoman tersebut menjadi rujukan bagi penyelenggara pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, evaluator dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) baik secara nasional maupun internal.

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah dengan melakukan evaluasi kinerja seluruh penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dengan menggunakan instrumen yang sama. Formula perhitungan indikator ini adalah perbandingan antara Jumlah UPP Indeks PEKPPP baik dengan jumlah seluruh UPP yang dievaluasi. Target tahun 2024 sebesar 25% dan target tahun 2025 sebesar 45%.

9. Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi

Indikator ini diperoleh dengan cara membandingkan usulan layanan hukum yang diusulkan, penyusunan produk hukum daerah, dibanding dengan layanan hukum, penyusunan produk hukum daerah, yang telah diharmonisasi. pada tahun 2023 usulan layanan penyusunan produk hukum sejumlah 671, sedangkan yang berhasil diharmonisasi

sebanyak 653 produk hukum. Selain persentase produk hukum yang telah diharmonisasi, Bagian Hukum juga memfasilitasi layanan hukum yang lainnya yaitu :

- a. Usulan kegiatan sosialisasi sebanyak 10 kali, sedangkan yang terlaksana sebanyak 11 kali.
- b. Usulan kelurahan binaan sadar hukum target sebanyak 4 kelurahan, dan yang berhasil dilakukan pembinaan sebanyak 4 kelurahan.
- c. Usulan fasilitasi penanganan perkara hukum ditargetkan sebanyak 7 perkara, dan yang berhasil terfasilitasi sebanyak 16 perkara.

Jumlah keseluruhan usulan layanan hukum sebanyak 701 dan jumlah layanan hukum yang terfasilitasi sebanyak 683. Dengan demikian capaian kinerja Bagian Hukum pada tahun 2023 sebesar 97,4%

10. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa digunakan sebagai indikator dalam mengukur Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan Regulasi Penganggaran Dan Pelaksanaan APBD. Sesuai amanat Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 69 yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Maka dari itu, perlu diciptakan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik untuk mewujudkan pengadaan yang Akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai tolak ukur pengelolaan pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 telah menetapkan kriteria pengukuran terkait tata kelola pengadaan barang/jasa. Kriteria pengukuran yang dilakukan adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik (ITKPMB) yang juga merupakan salah satu aspek "Antara" dalam komponen pengungkit Reformasi Birokrasi (RB) pada tingkat meso.

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dilakukan secara online melalui website <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/dashboardctr/googlestudio?jenis=2>. ITKP terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan pada tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) >> bobot 10%
 - b. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) >> bobot 5%

- c. e-Purchasing (Toko Daring) >> bobot eKatalog 4% & Toko Daring 1%
 - d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing >> bobot 5%
 - e. e-Kontrak >> bobot 5%
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) >> bobot 30%
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) >> bobot 40%

Indikator diatas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yaitu:

a. Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Aplikasi SiRUP merupakan salah satu aplikasi pengadaan berbasis web (web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempermudah masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa secara Nasional. Selain untuk melancarkan pengumuman RUP, SiRUP juga dikembangkan untuk mengoptimasi proses pelaporan pengadaan barang/jasa pemerintah secara online melalui Monev Online. Anggaran yang harus disusun RUP nya dan diumumkan dalam SiRUP adalah seluruh anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah, kecuali Belanja Pegawai. Pengumuman RUP tersebut untuk Pemerintah Daerah dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan, penggunaan aplikasi SiRUP dinilai dari segi persentase jumlah anggaran yang terumumkan dalam SiRUP.

b. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seluruh K/L/PD. Aplikasi SPSE ini digunakan untuk melakukan proses tender/seleksi secara elektronik (*e-tendering/seleksi*), proses pengadaan langsung atau penunjukan langsung secara elektronik (*non e-tendering*), maupun pencatatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pembelian langsung. Dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan, penggunaan aplikasi SPSE diukur dari persentase jumlah paket pengadaan melalui Penyedia dalam aplikasi SiRUP yang telah direalisasikan pengadaannya melalui aplikasi SPSE.

c. Katalog Elektronik LKPP Katalog Elektronik LKPP atau disebut *e-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Pembelian barang/jasa melalui *e-catalogue* ini disebut dengan *e-purchasing*. Dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan, penggunaan katalog elektronik LKPP diukur dari persentase jumlah pembelian yang telah diselesaikan 100% dibandingkan dengan jumlah pengadaan dengan metode *e-purchasing* yang tercatat di RUP.

2) Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan

Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan adalah indikator yang mengukur kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki seseorang untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ). Pengukuran kualifikasi dan kompetensi JF PPBJ berdasarkan persentase keterisian formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapat rekomendasi LKPP atau e-formasi KemenPAN-RB. Di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, formasi JF PPBJ yang mendapat rekomendasi LKPP adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, yang terdiri atas 10 (delapan) orang JF PPBJ Tingkat Pratama, dan 11 (empat) JF PPBJ Tingkat Muda dan 3 (tiga) orang JF PPBJ Tingkat Madya. Sedangkan keterisian JF PPBJ sampai saat ini adalah sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang terdiri atas 4 (empat) orang JF PPBJ Tingkat Pratama, dan 11 (empat) JF PPBJ Tingkat Muda dan 3 (tiga) orang JF PPBJ Tingkat Madya.

3) Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Tingkat Kematangan UKPBJ, dalam Pengukurannya terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variable (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri atas 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Pencapaian target minimal level 3 (proaktif) adalah kondisi UKPBJ yang sudah sesuai dengan amanat peraturan-perundangan-undangan, yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi UKBP pada laman LKPP (<https://siukpbj.lkpp.go.id/>). UKPBJ Sekretariat Daerah Kota Kediri sampai dengan saat ini sudah mencapai level Proaktif.

11. Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang berkualitas

Formula perhitungan indikator ini adalah perbandingan antara Jumlah Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dengan Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun. Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang berkualitas digunakan sebagai indikator dalam mengukur Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat. Tujuan pengukuran ini adalah untuk melihat kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat meliputi kebijakan bidang keagamaan secara umum, kebijakan bidang sosial serta kebijakan bidang kemasyarakatan yang di susun bisa diterapkan dan berjalan sesuai dengan harapan. Perkiraan realisasi pada tahun 2023 persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang berkualitas sebesar 75% sehingga di rencanakan dalam 2025-2026 bisa meningkat menjadi 80-85%. Selanjutnya dengan peningkatan kualitas kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dapat menunjang salah satu variabel pembentuk Indeks reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah memiliki peran yang penting untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Analisis keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.1 REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2019-2023

3.1.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah selama periode tahun anggaran 2019-2023.

3.1.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 – 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya sejak tahun anggaran 2021 pelaksanaan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Gambaran umum pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2019 – 2023 sebagai berikut.

3.1.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pendapatan daerah terdiri dari atas (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (b) dana perimbangan; dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah diperlukan analisis pendapatan daerah yang dilakukan melalui penghitungan rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah. Tercatat pendapatan daerah tahun anggaran 2019-2020 mengalami penurunan sebesar minus 4,20%. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perolehan pendapatan daerah tahun 2020, khususnya pajak dan retribusi daerah, mengalami penurunan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2019-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2020

NO.	URAIAN	REALISASI ANGGARAN		RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2019	2020	
1	PENDAPATAN	1,339,405,675,036.73	1,283,093,769,233.74	-4,20%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	266,745,042,377.64	262,886,289,227.78	-1,45%
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	115,891,296,479.41	112,204,944,288.62	-3,18%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11,991,620,390.00	10,293,135,651.00	-14,16%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,513,099,375.53	1,209,685,603.43	-20,05%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	137,349,026,132.70	139,178,523,684.73	1,33%
1.2	DANA PERIMBANGAN	894,171,424,641.00	854,446,197,667.00	-4,44%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	135,944,574,065.00	138,293,154,466.00	1,73%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	637,453,134,000.00	579,131,566,000.00	-9,15%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	120,773,716,576.00	137,021,477,201.00	13,45%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	178,489,208,018.09	165,761,282,338.96	-7,13%
1.3.1	Pendapatan Hibah	26,793,452,496.09	28,089,036,270.96	4,84%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	116,626,778,522.00	93,652,835,068.00	-19,70%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	31,846,958,000.00	40,907,528,000.00	28,45%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,222,019,000.00	3,111,883,000.00	-3,42%
1.3.6	Dana Insentif Daerah	0.00		

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 komponen pendapatan daerah mengalami perubahan menjadi (a) pendapatan asli daerah; (b) pendapatan transfer; dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama tahun 2021-2023, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar minus 0,99%. Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan karena rumah sakit yang sebelumnya banyak menangani pasien Covid-19 terdapat penurunan jumlah pasien yang cukup drastis seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	REALISASI ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2021	2022	2023 (UNAUDITED)	
4	PENDAPATAN DAERAH	1,508,822,569,048.64	1,453,556,698,954.24	1.478.072.530.266,00	-0,99%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	439,896,279,120.18	319,295,604,320.24	351.169.307.810,00	-8,72%
4.1.01	Pajak Daerah	115,831,411,161.66	137,509,757,025.00	139.623.096.743,00	10,13%
4.1.02	Retribusi Daerah	10,185,300,713.00	25,328,365,948.00	16.044.421.699,00	56,01%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	701,149,136.05	1,981,685,048.28	2.045.144.581,00	92,92%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313,178,418,109.47	154,475,796,298.96	193.456.644.787,00	-12,72%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,040,498,864,867.00	1,133,953,936,329.00	1.126.903.222.456,00	4,18%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	912,747,180,455.00	1,013,587,223,312.00	981.496.237.335,00	3,94%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127,751,684,412.00	120,366,713,017.00	145.406.985.121,00	7,51%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28,427,425,061.46	307,158,305.00	0,00	-99,46%
4.3.01	Pendapatan Hibah		242,450,000.00	0,00	0,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28,427,425,061.46	64,708,305.00		-99,89%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2021-2023

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pendapatan asli daerah terdiri atas (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, rata-rata persentase realisasi pendapatan sebesar 118,62%. Rata-rata persentase realisasi pendapatan asli daerah terbesar berasal dari komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 131,68% diikuti pajak daerah sebesar 108,063%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	101.659.200.000,00	101.550.323.000,00	111.581.773.554,00	125.355.000.000,00	132.760.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.144.009.000,00	9.427.273.000,00	13.199.829.500,00	32.715.788.500,00	28.815.890.590,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.635.440.464,53	1.209.685.603,43	1.195.475.204,00	1.959.290.344,00	2.045.144.582,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.319.201.933,00	127.577.359.410,08	135.487.653.913,00	156.035.493.823,00	163.376.638.793,00
	Pendapatan Asli Daerah	249.757.851.397,53	239.764.641.013,51	261.464.732.171,00	316.065.572.667,00	326.997.673.965,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2023

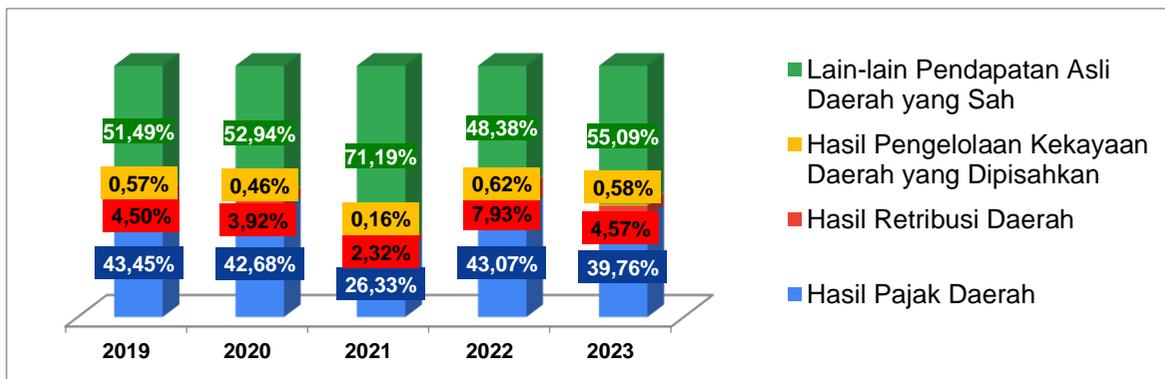
Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023 (UN AUDITED)	RATA-RATA PERSENTASE REALISASI
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	115.891.296.479,41	112.204.944.288,62	115.831.411.161,66	137.509.757.025,00	139.623.096.743,00	108,63%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.991.620.390,00	10.293.135.651,00	10.185.300.713,00	25.328.365.948,00	16.044.421.699,00	87,53%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.513.099.375,53	1.209.685.603,43	701.149.136,05	1.981.685.048,28	2.045.144.581,00	90,46%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	137.349.026.132,70	139.178.523.684,73	313.178.418.109,47	154.475.796.298,96	193.456.644.787,00	131,68%
	Pendapatan Asli Daerah	266.745.042.377,64	262.886.289.227,78	439.896.279.120,18	319.295.604.320,24	351.169.307.810,00	118,62%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2023

Adapun komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari lain-lain PAD yang sah dengan kontribusi tertinggi sebesar 71,19% pada tahun 2021.

Grafik 3. 1 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023



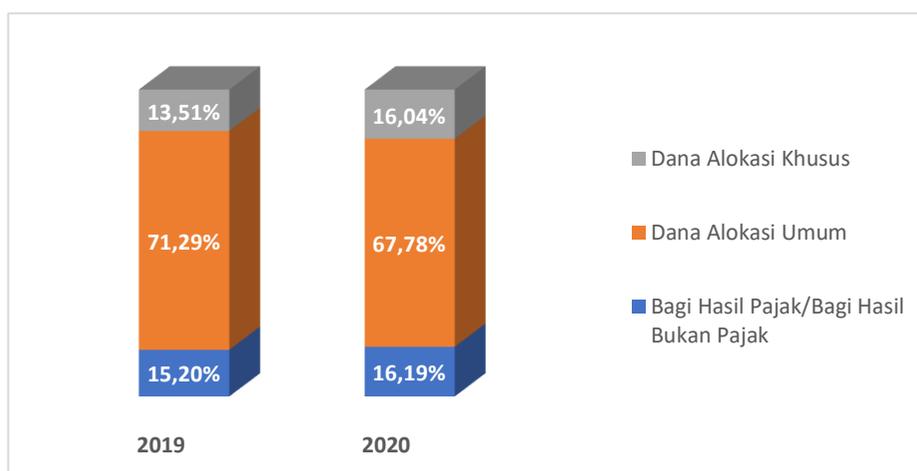
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2023

Pada tahun 2021 tersebut jumlah pasien Covid-19 sangat tinggi sehingga pendapatan BLUD Rumah Sakit meningkat signifikan. Di lain sisi proporsi pendapatan pajak daerah mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2020 sebesar 42,68% menjadi 26,33% pada tahun 2021. Namun seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19, proporsi pendapatan pajak daerah kembali meningkat secara fluktuatif menjadi 43,07% pada tahun 2022, namun turun pada tahun 2023 menjadi 39,76%.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dana perimbangan terdiri atas (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi Umum; dan (c) Dana Alokasi Khusus. Realisasi dana perimbangan tahun 2019-2020 disajikan pada tabel 3.5. Realisasi dana perimbangan selama tahun 2019-2020 cukup tinggi, dengan rata-rata persentase realisasi sebesar 100,40%. Persentase realisasi terbesar berasal dari komponen Dana Alokasi Khusus sebesar 102,75%.

Grafik 3. 2 Proporsi Dana Perimbangan Tahun 2019-2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2020

Dana alokasi umum memiliki Proporsi terbesar dari dana perimbangan dengan proporsi diatas 67%. Proporsi kedua berasal dari bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak dengan proporsi terbesar pada tahun 2020 sebesar 16,19 %. Sedangkan dana alokasi khusus yang mendukung pendanaan pembangunan yang bersifat khusus proporsi tertingginya sebesar 16,04% pada tahun 2020.

3. Pendapatan Transfer

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah yang sebelumnya dana perimbangan berubah menjadi pendapatan transfer. Komponen pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2021-2023 disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019-2020

KODE	URAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		RATA-RATA PERSENTASE REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	142.323.505.000,00	135.944.574.065,00	127.953.498.303,00	138.293.154.466,00	101,80%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	637.453.134.000,00	637.453.134.000,00	582.747.476.000,00	579.131.566.000,00	99,69%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	137.089.742.290,00	120.773.716.576,00	116.708.434.539,00	137.021.477.201,00	102,75%
	Dana Perimbangan	916.866.381.290,00	894.171.424.641,00	827.409.408.842,00	854.446.197.667,00	100,40%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2020

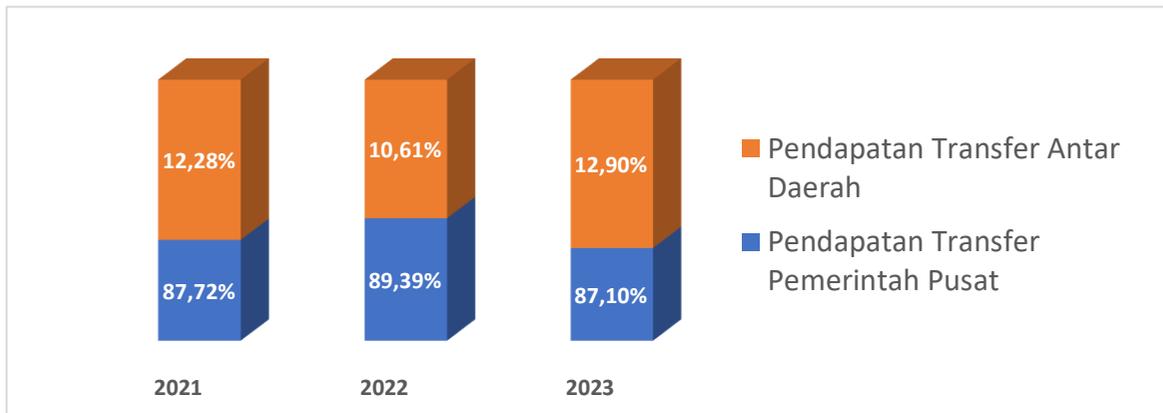
Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	2021		2022		2023		RATA-RATA PERSENTASE REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI (UN AUDITED)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	904.165.641.551,00	912.747.180.455,00	940.879.373.470,00	1.013.587.223.312,00	977.474.358.342,00	981.496.237.335,00	103,03%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.754.636.493,00	127.751.684.412,00	119.323.110.580,00	120.366.713.017,00	147.741.087.472,00	145.406.985.121,00	116,68%
	Pendapatan Transfer	988.920.278.044,00	1.040.498.864.867,00	1.060.202.484.050,00	1.133.953.936.329,00	1.125.215.445.814,00	1.126.903.222.456,00	104,11%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2021-2023

Realisasi pendapatan transfer selama tahun 2021-2023 melebihi target yang ditetapkan dengan rata-rata persentase realisasi sebesar 104,11%. Persentase realisasi terbesar berasal dari pendapatan transfer antar daerah sebesar 116,68%.

Grafik 3. 3 Proporsi Pendapatan Transfer Tahun 2021-2023



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2021-2023

Proporsi pendapatan transfer terbesar berasal dari pemerintah pusat, pada tahun 2021 proporsinya sebesar 87,72% kemudian meningkat menjadi 89,39% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami penurunan menjadi 87,10%.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 3. 7 Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023

Kode	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.236.820.296,00	28.215.200.000,00	242.450.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	77.250.000.000,00	68.106.744.050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	31.846.958.000,00	40.907.528.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.238.419.000,00	3.161.883.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,00	0,00	28.641.072.945,00	22.541.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	139.572.197.296,00	140.391.355.050,00	28.883.522.945,00	22.541.000,00	0,00

Tabel 3. 8 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023

Kode	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	%Peningkatan Realisasi
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.793.452.496,09	28.089.036.270,96	0,00	242.450.000,00	0,00	98,96%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	116.626.778.522,00	93.652.835.068,00	0,00	0,00	0,00	144,24%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	31.846.958.000,00	40.907.528.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.222.019.000,00	3.111.883.000,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
1.3.6	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.7	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,00	0,00	28.427.425.061,46	64.708.305,00	0,00	193,16%
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	178.489.208.018,09	165.761.282.338,96	28.427.425.061,46	307.158.305,00	0,00	426,76%

Rata-rata persentase realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama tahun 2019-2023 cukup tinggi, yaitu sebesar 426,76%. Salah satu faktor penyebab tingginya rata-rata realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah adanya realisasi pendapatan hibah pada tahun anggaran 2022 yang tidak dianggarkan sebelumnya.

Grafik 3. 4 Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2023

Pada tahun 2019-2020 proporsi realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah didominasi oleh dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dengan proporsi diatas 56,50%. Dengan adanya aturan yang baru, pada tahun 2021 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya berasal dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundangan. Selanjutnya pada tahun 2022 didominasi dari pendapatan hibah sebesar 78,93% sisanya adalah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundangan. Sedangkan pada tahun 2023 tidak ada anggaran maupun realisasi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.1.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa

Belanja Daerah terdiri dari (a) Belanja Tidak Langsung; dan (b) Belanja Langsung. Realisasi belanja daerah tahun 2019-2020 disajikan pada tabel berikut.

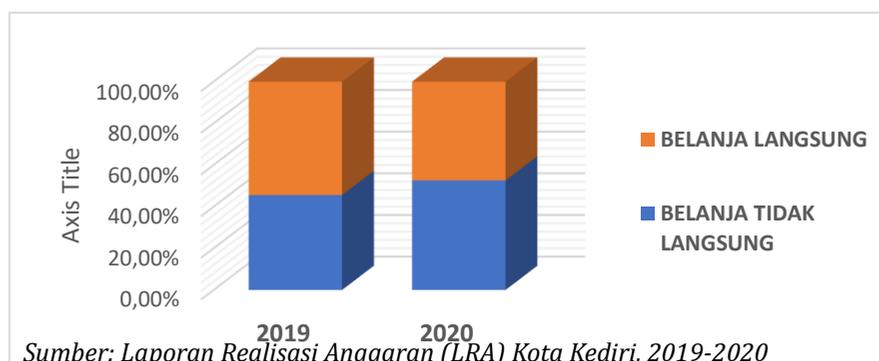
Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020

KODE	URAIAN	2019	2020	RATA RATA PERTUMBUHAN
2	BELANJA	1.312.905.390.345,00	1.207.691.610.980,16	-8,01%
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	598.343.394.474,94	635.236.290.211,89	6,17%
2.1.1	Belanja Pegawai	446.144.874.570,00	456.191.891.259,00	2,25%
2.1.4	Belanja Hibah	95.915.614.605,00	55.895.779.900,00	-41,72%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	55.499.603.639,94	18.778.921.155,89	-66,16%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00		0,00%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	726.827.727,00		-100,00%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	56.473.933,00	104.369.697.897,00	184710,39%
2,2	BELANJA LANGSUNG	714.561.995.870,06	572.455.320.768,27	-19,89%
2.2.1	Belanja Pegawai	134.661.143.735,00	122.262.463.839,00	-9,21%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	397.140.891.041,80	351.878.147.834,37	-11,40%
2.2.3	Belanja Modal	182.759.961.093,26	98.314.709.094,90	-46,21%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2020

Selama tahun 2019-2020, belanja daerah mengalami rata-rata penurunan sebesar minus 8,01%. Belanja tidak langsung memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,17% yang didominasi dari kenaikan belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020. Dampak dari kenaikan belanja tidak terduga tersebut adalah adanya penurunan belanja langsung sebesar minus 19,89%.

Grafik 3. 5 Proporsi Belanja Daerah Tahun 2019-2020



Proporsi belanja daerah tahun 2019 masih didominasi oleh belanja langsung dengan Proporsi sebesar 54,43%. Namun, dengan adanya Covid-19, Pemerintah Pusat menginstruksikan untuk mengalihkan anggaran pada belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 sehingga proporsi belanja daerah tahun anggaran 2020 didominasi oleh belanja tidak langsung.

Sedangkan realisasi belanja daerah tahun 2021-2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah berubah menjadi (a) Belanja Operasi; (b) Belanja Modal; (c) Belanja Tidak Terduga; dan (d) Belanja Transfer. Realisasi belanja daerah tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

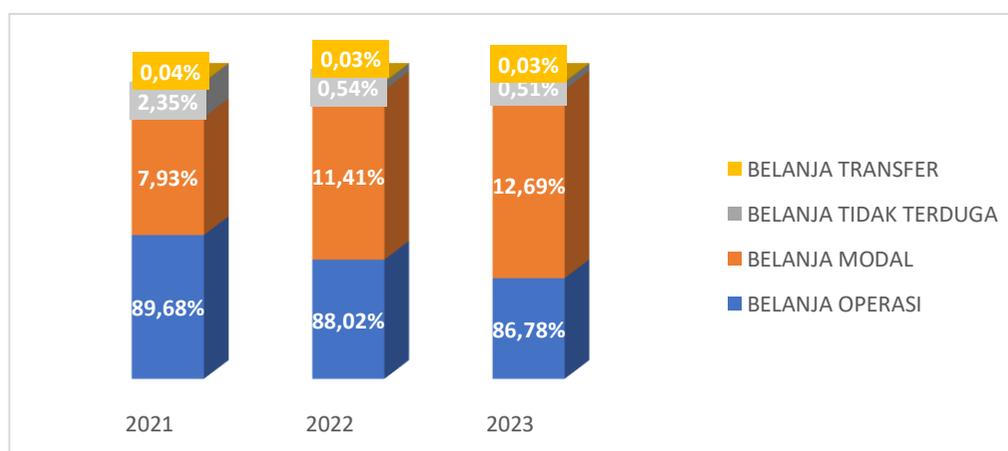
Tabel 3. 10 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	2021	2022	2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN
5	BELANJA	1.344.272.318.953,32	1.482.748.596.777,33	1.566.451.980.109,00	7,97%
5,1	BELANJA OPERASI	1.205.523.929.891,64	1.305.109.605.559,02	1.359.300.948.158,00	6,21%
5.1.01	Belanja Pegawai	535.870.253.053,00	552.280.945.341,00	541.448.969.486,00	0,55%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.206.125.637,64	649.565.074.610,02	676.487.486.838,00	10,89%
5.1.05	Belanja Hibah	85.721.120.296,00	88.107.794.384,00	126.902.034.027,00	23,41%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.726.430.905,00	15.155.791.224,00	14.462.457.807,00	-28,40%
5,2	BELANJA MODAL	106.605.344.496,68	169.126.180.227,31	198.705.950.406,00	38,07%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	94.158.250,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.922.917.276,00	56.854.857.481,31	78.861.326.286,00	29,94%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.809.531.027,68	63.432.531.263,00	58.526.443.295,00	64,44%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.787.858.358,00	46.990.651.598,00	60.315.466.025,00	40,49%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.990.879.585,00	911.543.385,00	1.002.714.800,00	-22,11%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		936.596.500,00	0,00	0,00%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.645.668.465,00	8.019.442.791,00	7.951.300.595,00	-37,75%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	31.645.668.465,00	8.019.442.791,00	7.951.300.595,00	-37,75%
5,4	BELANJA TRANSFER	497.376.100,00	493.368.200,00	493.780.950,00	-0,36%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	497.376.100,00	493.368.200,00	493.780.950,00	-0,36%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2021-2023

Realisasi belanja daerah tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 7,97% yang didominasi oleh peningkatan belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,07% dan penurunan belanja tidak terduga sebesar 37,75% sebagai dampak terkendalanya pandemi Covid-19 sehingga belanja tidak terduga semakin dikurangi.

Grafik 3. 6 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2021-2023

Proporsi realisasi belanja daerah tahun 2021-2023 didominasi oleh belanja operasi berturut-turut sebesar 89,68%, 88,02% dan 86,78%. Sedangkan rincian komposisi realisasi komponen belanja daerah disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Tahun 2019-2020

KODE	URAIAN	2019	2020
2.1.1	Belanja Pegawai	74,56%	71,81%
2.1.4	Belanja Hibah	16,03%	8,80%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9,28%	2,96%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00%	0,00%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,12%	0,00%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,01%	16,43%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2020

Dari komponen belanja tidak langsung pada tahun 2019-2020, proporsi realisasi belanja pegawai adalah yang terbesar, yaitu di atas 71,81%.

Sedangkan komponen belanja langsung tahun 2019-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 12 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2019-2020

KODE	URAIAN	2019	2020
2.2.1	Belanja Pegawai	18,85%	21,36%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,58%	61,47%
2.2.3	Belanja Modal	25,58%	17,17%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2020

Untuk realisasi komponen belanja langsung pada tahun 2019-2020, proporsi terbesar adalah belanja barang dan jasa, diatas 55,58%.

Tabel 3. 13 Komponen Belanja Operasi Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	2021	2022	2023
5.1.01	Belanja Pegawai	44,45%	42,32%	39,83%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45,81%	49,77%	49,77%
5.1.05	Belanja Hibah	7,11%	6,75%	9,34%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,63%	1,16%	1,06%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2021-2023

Pada tahun 2021-2023, realisasi belanja operasi terbesar dari belanja barang dan jasa dengan proporsi diatas 45,81% diikuti belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Tabel 3. 14 Komponen Belanja Modal Tahun 2021-2023

Kode	Uraian	2021	2022	2023
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,09%	0,00%	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,02%	33,62%	39,69%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,15%	37,51%	29,45%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28,88%	27,78%	30,35%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,87%	0,54%	0,50%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,55%	0,00%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2021-2023

Proporsi realisasi belanja modal tahun 2021-2023 terbesar adalah belanja peralatan dan mesin diikuti belanja gedung dan bangunan dan belanja jalan, jaringan dan irigasi.

3.1.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Penerimaan pembiayaan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 26,90 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Selama tahun 2019-2023, Pemerintah Kota Kediri tidak merealisasikan anggaran pada pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN
3	PEMBIAYAAN DAERAH	240.839.243.934,28	267.341.428.526,01	342.743.586.780,00	507.293.846.874,91	493.042.829.026,00	21,10%
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	240.839.243.934,28	267.341.428.526,01	342.743.586.780,00	507.293.846.874,91	493.042.829.026,00	21,10%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	240.839.243.934,28	267.341.428.526,01	342.743.586.780,00	507.293.846.874,91	478.101.949.046,00	20,37%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					14.940.879.980,00	0,00%
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri, 2019-2023

3.1.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal

neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat pada masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Rata-rata peningkatan Neraca Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 16 Rata-rata Peningkatan Neraca Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	SALDO (RP.)					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2023 (UN-AUDITED) *	
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	253.206.513.982,85	313.544.338.408,31	307.603.198.049,56	320.929.357.399,67	245.706.182.714,05	0,71%
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-					
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.048.905,00					
6	Kas di BLUD	13.093.166.270,27	28.812.138.395,80	197.665.164.296,51	157.168.467.254,33	133.322.862.626,79	167,61%
7	Kas Lainnya	-	387.109.975,48	25.474.528,84	4.124.397,82	634.333.849,72	5034,27%
8	Kas di Bendahara JKN/FKTP	-					
9	Kas di Bendahara BOS	1.039.798.191,89					
10	Investasi Jangka Pendek	-		2.000.000.000,00			
11	Piutang Pendapatan	77.134.383.904,00					
12	Piutang Pajak		29.795.252.079,00	35.456.842.511,00	37.171.405.082,00	38.897.062.002,00	9,49%
13	Piutang Retribusi		1.519.018.935,00	1.721.886.285,00	1.787.024.422,00	1.778.953.233,00	5,56%
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				0,00	0,00	
15	Piutang lain-lain PAD yang sah		12.377.362.858,00	8.031.319.838,00	1.677.920.633,00	1.618.007.135,00	-39,26%
16	Piutang transfer pemerintah pusat		11.197.353.805,00		0,00	0,00	
17	Piutang transfer pemerintah daerah lainnya (Antar Daerah)		6.178.755.281,00	5.947.245.094,00	6.902.220.800,00	0,00	6,16%
18	Piutang pendapatan lainnya		244.019.125,00		0,00	0,00	
19	Piutang Lainnya	-		244.019.125,00	244.019.125,00	244.019.125,00	
20	Penyisihan Piutang	-18.930.496.811,75	-20.440.014.102,52	-28.225.371.409,51	-26.228.722.549,00	-26.229.595.507,00	9,75%
21	Beban Dibayar Dimuka	842.934.517,00	287.456.525,00	482.789.156,00	834.901.558,77	849.258.799,17	19,18%
22	Persediaan	18.439.338.804,38	30.711.803.061,14	30.065.531.599,39	31.329.124.666,94	38.167.778.274,18	22,62%
23	Jumlah Aset Lancar	344.829.687.763,64	414.614.594.346,21	561.018.099.073,79	531.819.842.790,53	434.988.862.251,91	8,03%
24	INVESTASI JANGKA PANJANG						
25	Investasi Non Permanen						

NO.	URAIAN	SALDO (RP.)					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2023 (UN-AUDITED) *	
26	Investasi Non Permanen Lainnya	9.090.000.000,00	9.090.000.000,00	8.968.889.810,44	8.959.099.152,92	8.959.099.152,92	-0,72%
27	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-39.951.255,88	-36.791.781,20				-53,95%
28	Jumlah Investasi Non Permanen	9.050.048.744,12	9.053.208.218,80	8.968.889.810,44	8.959.099.152,92	8.959.099.152,92	-0,25%
29	Investasi Permanen						
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	207.842.786.348,00	207.200.663.995,00	203.292.016.718,00	203.513.245.733,00	203.513.245.733,00	-0,52%
31	Jumlah Investasi Permanen	207.842.786.348,00	207.200.663.995,00	203.292.016.718,00	203.513.245.733,00	203.513.245.733,00	-0,52%
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang	216.892.835.092,12	216.253.872.213,80	212.260.906.528,44	212.472.344.885,92	212.472.344.885,92	-0,51%
33	ASET TETAP						
34	Tanah	973.892.278.589,16	989.062.199.935,16	1.022.261.360.428,75	1.168.383.355.449,75	1.160.201.623.849,75	4,63%
35	Peralatan dan Mesin	666.015.241.341,11	750.896.833.980,24	801.059.784.589,86	855.104.968.164,70	928.231.988.016,23	8,68%
36	Gedung dan Bangunan	1.049.821.195.440,55	1.068.860.759.902,90	1.093.497.673.782,22	1.158.241.213.882,94	1.226.982.644.099,01	3,99%
37	Jalan, Jaringan dan Instalasi	775.330.555.442,66	806.447.626.275,66	838.599.711.693,25	885.547.055.952,25	926.720.558.509,34	4,56%
38	Aset Tetap Lainnya	47.440.678.905,68	46.810.838.629,69	46.720.357.671,02	47.402.938.858,20	67.268.354.462,11	10,46%
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.681.733.771,00	7.528.312.412,10	11.275.185.055,34	6.229.304.657,20	7.167.637.870,20	-0,54%
40	Akumulasi Penyusutan	-1.079.635.356.157,99	-1.210.079.463.828,00	-1.290.668.846.331,03	-1.389.399.378.222,37	-1.392.018.687.457,85	6,65%
41	Jumlah Aset Tetap	2.442.546.327.332,17	2.459.527.107.307,75	2.522.745.226.889,41	2.731.509.458.742,67	2.924.554.119.348,79	4,65%
42	ASET LAINNYA						
43	Tagihan Jangka Panjang	209.000.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00%
44	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.750.157.968,23	7.750.157.968,23	7.779.951.550,00	7.779.951.550,00	7.779.951.550,00	0,13%
45	Aset Tidak Berwujud	2.232.544.253,92	2.085.736.741,92	15.972.115.403,92	12.805.784.919,31	13.669.221.819,31	161,53%
46	Aset Lain-lain	23.823.104.410,10	23.798.333.531,42	28.149.508.321,24	52.154.908.201,42	31.277.283.852,64	15,86%
47	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			-13.844.567.478,42	-11.287.671.296,81	-11.287.671.296,81	-9,23%
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			-1.408.120.070,66	-2.184.054.042,88	-2.184.054.042,88	27,55%
49	Jumlah Aset Lainnya	34.014.806.632,25	33.843.228.241,57	36.857.887.726,08	59.477.919.331,04	39.463.731.882,26	9,03%
50	JUMLAH ASET	3.038.283.656.820,18	3.124.238.802.109,33	3.332.882.120.217,72	3.535.279.565.750,16	3.621.538.178.388,88	4,50%
51	KEWAJIBAN						
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						

NO.	URAIAN	SALDO (RP.)					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2023 (UN-AUDITED) *	
53	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3.297.360,00					
54	Pendapatan Diterima di Muka	7.274.398.866,07	7.507.664.264,23	7.643.597.068,34	8.092.732.605,11	6.334.433.666,11	-2,71%
55	Utang Belanja	8.826.944.916,30	12.289.985.881,00	59.918.812.890,24	16.312.868.721,00	11.619.614.383,00	81,31%
56	Utang Jangka Pendek Lainnya	452.817.950,00		131.343.150,00	18.578.095,00	0,00	-95,29%
57	Utang Pengadaan Aset Tetap	-					
58	Utang Beban						
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16.557.459.092,37	19.797.650.145,23	67.693.753.108,58	24.424.179.421,11	17.954.048.049,11	42,77%
60	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
61	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan						
62	Utang Dalam Negeri Obligasi						
63	Utang Pemerintah Pusat						
64	Utang Pemerintah Provinsi						
65	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota						
66	Utang Luar Negeri/Sektor Perbankan						
67	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang						
68	JUMLAH KEWAJIBAN	16.557.459.092,37	19.797.650.145,23	67.693.753.108,58	24.424.179.421,11	17.954.048.049,11	42,77%
69	EKUITAS						
70	EKUITAS						
71	EKUITAS	3.021.726.197.727,81	3.104.441.151.964,10	3.265.188.367.109,14	3.510.855.386.329,05	3.603.584.130.339,77	4,52%
72	JUMLAH EKUITAS	3.021.726.197.727,81	3.104.441.151.964,10	3.265.188.367.109,14	3.510.855.386.329,05	3.603.584.130.339,77	4,52%
73	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.038.283.656.820,18	3.124.238.802.109,33	3.332.882.120.217,72	3.535.279.565.750,16	3.621.538.178.388,88	4,50%

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

*) data diakses dari <https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap>, tanggal 16 Januari 2024

Aset Daerah Kota Kediri terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan), aset tetap lainnya (konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Pada tahun 2019-2023, rata-rata peningkatan aset lancar mencapai 8,03%. Peningkatan aset lancar tertinggi berasal dari kas lainnya sebesar 5.034,27%, kas di BLUD sebesar 167,61% dan persediaan sebesar 22,62%. Peningkatan kas BLUD yang tinggi menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terus meningkat sehingga perlu langkah-langkah untuk memanfaatkan dana SiLPA tersebut untuk peningkatan kualitas layanan BLUD. Sementara itu, penyisihan piutang juga mengalami peningkatan sebesar 9,75% sejalan dengan peningkatan piutang pajak sebesar 9,49% dan piutang retribusi sebesar 5,56%. Perlu peningkatan upaya untuk mengurangi jumlah piutang, khususnya piutang pajak dan retribusi.

Pada sisi investasi jangka panjang terdapat penurunan rata-rata sebesar minus 0,51%. Penurunan tersebut berasal dari koreksi ekuitas dan terdapat kerugian yang dialami oleh BUMD. Sedangkan pada aset tetap, selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebesar 4,65%. Persentase peningkatan aset tetap terbesar berasal dari aset tetap lainnya sebesar 10,46%, peralatan dan mesin sebesar 8,68% serta tanah sebesar 4,63%. Sementara itu, aset lainnya mengalami peningkatan sebesar 9,03% yang didominasi dari persentase peningkatan aset tidak berwujud sebesar 161,53% dan aset lain-lain sebesar 15,86%. Kewajiban Pemerintah Kota Kediri dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 42,77%, namun pada tahun 2021-2023 total kewajiban mengalami penurunan. Ekuitas Dana merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban Pemerintah Daerah, terdiri dari Dana Lancar dan Dana Investasi. Pertumbuhan rata-rata Ekuitas Dana Pemerintah Kota Kediri selama kurun waktu 5 tahun sebesar 4,52%.

3.1.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi, dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pemerintah Kota Kediri melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah terutama sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

a. Intensifikasi penerimaan PAD dengan beberapa pendekatan antara lain :

1. Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, membuka tempat-tempat pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat;
2. Melaksanakan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada sistem pembayaran pajak/retribusi secara non tunai dan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah;
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah baik secara langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi;
5. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dengan antar Organisasi Perangkat Daerah Penghasil;
6. Penyampaian SKPD dan SKRD tepat waktu;
7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan PAD;
8. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

b. Ekstensifikasi penerimaan PAD, dengan beberapa pendekatan yaitu :

1. Melaksanakan survey potensi wajib pajak/retribusi yang ditindaklanjuti dengan proses pendataan untuk pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
2. Penggalian sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang berpotensi serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
3. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala kepada Wajib Pajak;
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
5. Mengadakan penyuluhan, sosialisasi dan ledang secara langsung terhadap wajib pajak/wajib retribusi.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berdasar pada anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*), hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dan Belanja Publik. Belanja Aparatur dipergunakan untuk Belanja Gaji Pegawai, sedangkan kebijakan belanja daerah diarahkan pada pencapaian target sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
- c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat
- d. Meningkatnya penerapan *Smart City*
- e. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat
- f. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
- g. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- h. Meningkatnya produk domestik regional bruto terutama produk-produk unggulan daerah
- i. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif
- j. Meningkatnya jumlah investasi
- k. Meningkatnya kinerja BUMD
- l. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
- m. Meningkatnya daya tarik wisata
- n. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka
- o. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
- p. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang
- q. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan
- r. Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana
- s. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada program dan kegiatan.

3.1.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budgeting*) yaitu penganggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada kepentingan publik dapat dilihat pada proporsi belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran. Semakin besar belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur berarti semakin kecil alokasi dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik.

Proporsi Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Sebagai gambaran tentang Belanja Daerah sesuai proporsi belanja yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 17 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Kediri Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN- KEBUTUHAN APARATUR (RP)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)	PERSENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2019	605.052.960.670,00	1.312.905.390.345,00	46,09%
2	Tahun 2020	578.454.355.098,00	1.207.691.610.980,16	47,90%
3	Tahun 2021	535.870.253.053,00	1.344.272.318.953,32	39,86%
4	Tahun 2022	552.280.945.341,00	1.482.748.596.777,33	37,25%
5	Tahun 2023	541.448.969.486,00	1.566.451.980.109,00	34,57%

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pada tahun 2019 sebesar 46,09% menjadi 34,57% pada tahun 2023. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.1.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup selisih tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA). Selama tahun anggaran 2019-2020 mengalami defisit anggaran, realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja. Sedangkan tahun anggaran 2021-2022 mengalami surplus. Selanjutnya, pada anggaran 2023, realisasi APBD mengalami defisit kembali sebesar Rp88.379.449.843,00. Realisasi pendapatan dan belanja selama tahun 2019-2023 digambarkan pada tabel 3.16. Sedangkan surplus atau defisit anggaran ditutup dengan pembiayaan daerah tahun 2019-2023 sebagaimana tersaji pada tabel 3.17. Defisit anggaran tahun berjalan ditutup dengan Silpa tahun sebelumnya. Defisit tahun anggaran 2019-2023 ditutup dengan Silpa tahun anggaran 2018-2022 yang berasal dari pelampuan pendapatan dan efisiensi belanja. Rincian realisasi Silpa 2018-2022 diuraikan pada tabel berikut 3.18.

Tabel 3. 18 Suplus/Defisit Riil Anggaran Kota Kediri Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.179.920.839.071,41	1.239.131.382.633,36	1.278.488.601.890,94	1.339.405.675.036,73	1.478.072.530.266,00
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.484.725.405.962,16	1.269.944.308.580,97	1.237.745.256.862,92	1.312.905.390.345,00	1.566.451.980.109,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit) riil	(304.804.566.890,75)	(30.812.925.947,61)	40.743.345.028,68	26.500.284.691,73	(88.379.449.843,00)

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Tabel 3. 19 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Kediri Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL ANGGARAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	240.839.243.934,28	267.341.428.526,01	342.743.586.780,00	507.293.846.874,91	478.101.949.046,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940.879.980,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Tabel 3. 20 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Kediri Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022	
		RP	% DARI SILPA	RP	% DARI SILPA	RP	% DARI SILPA	RP	% DARI SILPA	RP	% DARI SILPA
1.	Jumlah SILPA	240.839.243.934,28	100	267.341.428.526,01	100	342.743.586.780,00	100	507.293.846.874,91	100	478.101.949.046,00	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	7.825.159.543,58	3,25	16.987.190.980,11	6,35	23.121.648.214,27	6,75	178.431.546.949,18	35,17	3.230.031.653,24	0,68
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan/ dama transfer	30.459.975.871,00	12,65	(22.694.956.649,00)	-8,49	52.582.879.843,00	15,34	51.578.586.823,00	10,17	73.751.452.279,00	15,43
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	15.072.297.253,11	6,26	38.917.010.722,09	14,56	(176.163.729,04)	-0,05	(456.097.883,54)	-0,09	284.617.305,00	0,06
5.	Sisa penghematan belanja atau pengeluaran pembiayaan atau akibat lainnya	187.480.360.273,77	77,85	234.128.783.572,81	87,58	267.213.322.551,36	77,96	277.739.800.986,68	54,75	400.835.837.814,67	83,84
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	-	0,00	-			0,00	-	0,00	-
7.	Kegiatan lanjutan	0,00	-	0,00	-			0,00	-	0,00	-

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Untuk pembiayaan sarana dan prasarana strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah serta penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat serta dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema, antara lain:

- a. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah; dan
- c. Kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Kebijakan umum kerjasama pembiayaan pembangunan tersebut, yaitu :

- a. Kebijakan umum kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*), kerjasama ini diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah serta menurunkan disparitas wilayah sekaligus meningkatkan perekonomian daerah;
- b. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan;
- c. Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

3.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025-2026

3.2.1 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada kerangka pendanaan ini akan dijelaskan berkaitan dengan pendapatan serta belanja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dan sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah.

3.2.1.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Analisis proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Kediri dalam 2 (dua) tahun kedepan. Proyeksi pendapatan, belanja serta pembiayaan ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 3. 21 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kota Kediri Tahun 2025-2026**

KODE	URAIAN	APBD 2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.424.240.071.694,00	1.463.468.790.571,01	1.497.363.596.501,45
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	341.655.946.093,00	438.709.283.412,41	460.644.747.583,03
4.1.01	Pajak Daerah	136.720.000.000,00	241.545.320.000,00	253.622.586.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	29.508.590.625,00	19.561.904.200,00	20.539.999.410,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.375.144.582,00	2.816.622.298,65	2.957.453.413,58
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	173.052.210.886,00	174.785.436.913,76	183.524.708.759,45
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.082.584.125.601,00	1.024.759.507.158,60	1.036.718.848.918,42
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	955.375.360.980,00	953.758.791.285,60	962.295.898.539,71
4.2.01.01	Dana Perimbangan	947.042.368.980,00	945.060.814.236,00	953.216.950.095,34
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	8.332.992.000,00	8.697.977.049,60	9.078.948.444,37
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.208.764.621,00	71.000.715.873,60	74.422.950.378,71
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	127.208.764.621,00	71.000.715.873,60	74.422.950.378,71
4.2.02.01	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah		0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan		0,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD 2024	2025	2026
	Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
5	BELANJA DAERAH	1.795.299.191.714,00	1.609.815.669.628,11	1.622.363.596.501,45
5.1	BELANJA OPERASI	1.603.506.279.016,00	1.385.098.595.044,88	1.407.455.131.397,12
5.1.01	Belanja Pegawai	725.292.844.506,00	609.004.887.044,88	639.455.131.397,12
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.347.197.990,00	656.593.708.000,00	651.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	121.694.566.520,00	100.000.000.000,00	97.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.171.670.000,00	19.500.000.000,00	20.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	179.097.487.198,00	212.021.649.083,23	202.213.039.604,33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	10.000.000.000,00	7.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.964.980.646,00	40.000.000.000,00	39.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.669.392.062,00	117.000.000.000,00	110.000.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.280.536.390,00	44.000.000.000,00	45.000.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	132.578.100,00	1.021.649.083,23	1.213.039.604,33
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	695.425.500,00	695.425.500,00	695.425.500,00
	Total Surplus/ (Defisit)	(371.059.120.020,00)	(146.346.879.057,10)	(125.000.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN	371.059.120.020,00	146.346.879.057,10	125.000.000.000,00
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	371.059.120.020,00	146.346.879.057,10	125.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	361,000,000,000,00	146.346.879.057,10	125,000,000,000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	10,059,120,020,00		
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00		

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Memperhatikan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2025-2026 diproyeksikan naik dibanding anggaran tahun 2024. Kenaikan tersebut salah satunya disebabkan adanya perubahan proporsi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pada sisi belanja, belanja pegawai tahun anggaran 2025-2026 dialokasikan dengan memperhatikan realisasi belanja pegawai tahun 2023 disesuaikan dengan potensi kenaikan/ penurunan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sedangkan belanja hibah dialokasikan lebih kecil dari tahun 2024 mengingat pada tahun 2024 terdapat alokasi hibah untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang tidak berulang pada tahun anggaran 2025-2026. Dalam rangka mengantisipasi adanya kejadian yang tidak terduga, Pemerintah Kota Kediri tetap mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyelenggaraan pembangunan Kota Kediri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah mencapai hasil yang memuaskan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Kediri dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kota Kediri sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Kediri adalah sebagai berikut.

4.1.1 PERMASALAHAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

1) Belum terintegrasinya data dan sistem tata kelola pemerintahan untuk mendukung penyusunan kebijakan

Integrasi aplikasi e-Gov adalah proses penyatuan data dan informasi dari berbagai aplikasi e-Gov yang berbeda, sehingga data dan informasi tersebut dapat diakses dan diolah secara bersama-sama. Integrasi aplikasi e-gov di Kota Kediri hingga tahun 2023 baru mencapai 64% sehingga diperlukan upaya-upaya untuk lebih mengintegrasikan dan meningkatkan kualitas serta kolaborasi antar perangkat daerah agar dapat mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov) yang terintegrasi.

2) Masih terdapat anak putus sekolah, balita stunting, kejadian perundungan terhadap anak serta kemiskinan ekstrim

Anak putus sekolah di Kota Kediri yang masih terdata sebanyak 73 anak. Balita stunting tahun 2023 sebanyak 860 balita dari jumlah total balita 20.678 jiwa. Jumlah tersebut turun dari tahun 2022 sebanyak 941 balita dengan sebaran yang

hampir merata di tiga kecamatan (Kota, Pesantren, Mojoroto). Selain kasus anak putus sekolah dan balita stunting, perundungan terhadap anak masih menjadi *issue* menarik di kalangan masyarakat. Kasus perundungan yang akhir-akhir ini terjadi termuat dalam beberapa surat kabar lokal, dan masih banyak lagi kejadian yang tidak terbuka di ruang publik. Kemiskinan Ektrem yang bersumber dari data P3KE tahun 2022 masih sebesar 5.442 jiwa, tersebar di beberapa wilayah utamanya yang perlu menjadi perhatian di wilayah Kecamatan Pesantren.

3) Ketergantungan pada sektor industri pengolahan menyebabkan ketimpangan pada sektor ekonomi lain

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 3,95% yakni mencapai 89,90 triliun rupiah dengan presentase menurut lapangan usaha terbesar di Industri pengolahan sebesar 81,04% . Hal ini mengakibatkan ketimpangan di sektor ekonomi lain. Peluang pembangunan skala besar di Kota Kediri maupun di sekitar Kota Kediri dapat dijadikan peluang untuk mengangkat sektor ekonomi lain yang ada di Kota Kediri.

4) Belum terintegrasinya upaya-upaya yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan

Angka kemiskinan Kota Kediri sebesar 7,69% pada tahun 2023, masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pemerintah kota di seluruh Jawa Timur, meskipun angka kemiskinan selama rentang tahun 2015 hingga 2023 mengalami penurunan sebesar 22.196 jiwa. Perlunya perhatian untuk pengentasan kemiskinan di Kota Kediri harus diintegrasikan dengan berbagai bidang tidak hanya level sektoral. Database kemiskinan yang ada masih perlu dilakukan *updating* secara berkala untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan.

5) Belum optimalnya penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanganan bencana

Berdasarkan Indeks Kota Layak Huni tahun 2023 sektor informal kota mendapatkan nilai “Cukup” yang didalamnya memuat preferensi masyarakat yang terbagi menjadi dua hal, yaitu pada ketidakteraturan dari pedagang kaki lima dan pemberian modal kepada UMKM. Permasalahan pertama tersebut terjadi karena masih terdapat banyak PKL yang berdagang di area trotoar. Hal tersebut sangat mengganggu masyarakat Kota Kediri yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Tidak hanya itu, masih semrawutnya PKL yang berjualan di beberapa kawasan

wisata di Kota Kediri sehingga mengurangi keindahan dan kenyamanan lokasi tersebut. Sebenarnya, pemerintah telah melakukan tindakan berupa razia oleh Satpol PP tetapi tak berselang lama lokasi tersebut dipenuhi kembali oleh para PKL. PKL memerlukan lokalisasi atau tempat penampungan sebagai *center market* yang tertata untuk mengoptimalkan penanganan ketertiban umum. Perlunya fasilitas parkir terpadu yang strategis di lokasi-lokasi penting dalam kota yang mudah diakses dan memiliki kapasitas yang mencukupi.

6) Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan penataan ruang

Berdasarkan Indeks Kota Layak Huni tahun 2023 bahwa terdapat tiga (3) indikator yang memiliki nilai “Cukup” dan perlu ditingkatkan yaitu sektor informal kota, fasilitas pejalan kaki, dan pengelolaan drainase. Berbanding lurus dengan hasil Indeks Infrastruktur yang terbagi menjadi infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih dan drainase pada tahun 2023. Dalam indikator infrastruktur jalan yang masih perlu menjadi perhatian yaitu prosentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5m) dengan persentase 51,90%. Indikator drainase juga masih perlu mendapat perhatian karena kurang memadainya drainase dalam kondisi baik, karena persentase drainase dalam kondisi baik masih mencapai 70,99%.

7) Masih terdapat kawasan pemukiman kumuh

Indikator kawasan kumuh terbagi menjadi tujuh:

1. Kondisi bangunan gedung
2. Kondisi jalan lingkungan
3. Kondisi penyediaan air minum
4. Kondisi drainase lingkungan
5. Kondisi pengelolaan air limbah
6. Kondisi pengelolaan persampahan
7. Kondisi proteksi kebakaran

Capaian pengurangan luasan kumuh tahun 2022 sebesar 58,2% dari luasan awal 535,78Ha menjadi 223,94Ha. Luasan kumuh di kota Kediri terdapat di berbagai lokus, salah satunya yang menjadi perhatian dengan luasan 33Ha terdapat di Kelurahan Ketami dengan tingkah kekumuhan “Kumuh Ringan” .

8) Masih rendahnya upaya pelestarian budaya lokal untuk melindungi perubahan akibat arus urbanisasi, globalisasi, dan modernisasi

Modernisasi mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah daerah atas pentingnya pelestarian budaya lokal untuk meningkatkan sektor pariwisata dan pendidikan sejarah. Kekayaan sejarah yang dimiliki Kota Kediri membutuhkan perhatian lebih. Salah satu kekayaan sejarah yang bisa diangkat adalah Goa Selomangleng, Museum sejarah, dan Kebudayaan lainnya.

4.1.2 ASPEK GEOGRAFIS

1) Terdapatnya Wilayah yang Memiliki Keterbatasan dalam Pengembangan

Berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung wilayah Kota Kediri terdapat kurang lebih 495,638 hektar atau sekitar 7,36% dari luas wilayah yang memiliki keterbatasan dalam pengembangan karena memiliki daya dukung dan daya tampung yang rendah.

2) Terdapatnya Lokasi Rawan Bencana

Berdasarkan data hasil kajian risiko bencana Kota Kediri tahun 2022 terdapat 2 (dua) jenis bencana alam di Kota Kediri yakni Bencana Longsor dan Bencana Banjir. Risiko tanah longsor terdapat pada kawasan bagian barat (Gunung Klotok) dengan kelerengan di atas 45% dan sedangkan resiko banjir terdapat pada kawasan sekitar sungai Brantas akibat luapan air sungai yang tidak ditunjang dengan sistem drainase yang memadai. Terdapatnya lokasi rawan bencana membuat adanya keterbatasan dalam pengembangan wilayah Kota Kediri.

4.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1) Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri yang belum Optimal

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif cenderung meningkat meskipun belum stabil dibandingkan sebelum terjadinya Covid-19. Kondisi tersebut menunjukkan tren yang relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional, meskipun di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mencapai angka 3,95% yakni lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Maka dari itu, masih diperlukan kebijakan dan program-program yang terpadu di berbagai bidang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

2) Penanganan Kemiskinan yang Masih Perlu Dioptimalkan

Tingkat kemiskinan Kota Kediri selama 5 (lima) tahun mengalami penurunan hingga 0,45%, dari 7,68% di tahun 2018 turun menjadi 7,23% di tahun 2022. Akan tetapi kondisi tersebut tidak diikuti dengan kondisi kesenjangan antar penduduk di Kota Kediri

yang mengalami fluktuatif cenderung meningkat dari 0,328 di tahun 2018 menjadi 0,371 di tahun 2022. Semakin tingginya gap antar penduduk miskin di Kota Kediri tersebut bisa disebabkan karena semakin meningkatnya garis kemiskinan Kota Kediri.

3) Kualitas Sumber Daya Manusia Perlu Terus Ditingkatkan untuk Mencapai Kesejahteraan, Terutama terkait dengan Pendidikan, dan Kesehatan

Permasalahan terkait kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan terangkum dalam salah satu indikator kinerja utama pembangunan daerah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di tahun 2022, IPM Kota Kediri mencapai nilai 79,59. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kota Kediri masih perlu ditingkatkan, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Capaian indikator komposit IPM Kota Kediri pada tahun 2022 adalah: (1) Umur Harapan Hidup sebesar 74,34 tahun; (2) Harapan Lama Sekolah sebesar 15,44 tahun; (3) Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,45 tahun; serta (4) Standar Hidup Layak sebesar Rp12.762 juta/tahun.

4) Upaya Penanganan Masalah Ketimpangan Gender Perlu Dioptimalkan, Utamanya dalam Hal Pemerataan Kesempatan Akses Pendidikan, Kesehatan, Politik, dan Ketenagakerjaan

Permasalahan terkait dengan ketimpangan gender idealnya diupayakan melalui pembangunan responsif gender. Semakin tinggi nilai IPM, IPG dan IDG, maka semakin rendah ketimpangan gender yang dilihat dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Capaian Indeks Ketimpangan Gender di Kota Kediri selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022, capaian IKG Kota Kediri berada di angka 0,109. Meskipun sudah relatif baik, ketimpangan gender Kota Kediri perlu terus ditekan. Adapun capaian IPM Kota Kediri pada tahun 2022 adalah 79,59, IDG berada di angka 85,03, serta IPG berada di angka 94,53. Salah satu komponen IPM adalah dimensi standar hidup layak, pada tahun 2022 jumlah penduduk yg bekerja bertambah 10.021 orang menjadi 156.641 orang (66,86 persen dari total penduduk usia kerja). Ini mengindikasikan bahwa sudah banyak angkatan kerja yang terserap ke pasar kerja. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan, hal ini tidak sebanding dengan kenaikan angkatan kerja. Artinya jumlah pengangguran akan tetap meningkat di tahun 2022.

4.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

1) Perubahan Struktur Ekonomi Kota Kediri Menuju Sektor Perdagangan dan Jasa yang Perlu Dioptimalkan

Selama kurun waktu 2018-2022, kontribusi PDRB ADHB berdasarkan lapangan usaha cenderung fluktuatif dan didominasi paling tinggi oleh Industri Pengolahan, pada

tahun 2022 Industri Pengolahan mencapai 81,04% diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 9,68%, dan selanjutnya Informasi dan Komunikasi sebesar 2,04%, kemudian disusul oleh Konstruksi sebesar 1,71% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,62%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 (sebelum pandemi Covid-19) menunjukkan bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan, dan Konstruksi cenderung mengalami penurunan kontribusi, sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Informasi dan Komunikasi cenderung mengalami peningkatan kontribusi. Maka perlu adanya kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan di bidang jasa dan perdagangan akibat adanya pergeseran kontribusi pengolahan yang semakin menurun.

2) Perlunya Promosi Investasi dalam Rangka Meningkatkan Sarana MICE untuk Mendukung Kota Kediri sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa

Realisasi investasi yang ada di Kota Kediri selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2022 nilai investasi daerah mencapai 2.357,05 Milyar Rupiah atau menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 2.378.15 Milyar Rupiah. Adapun untuk meningkatkan nilai investasi diperlukan peningkatan dan optimalisasi program inovasi yang dapat menarik minat masyarakat berinvestasi, terlebih lagi dengan adanya Pembangunan tol dan bandara Dhoho keberadaannya akan memberikan *multiplier effects* secara tidak langsung pada Kota Kediri. Menjelang beroperasinya bandara dan pembangunan jalan tol, Kota Kediri perlu menangkap peluang dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan menata kota dan kawasan seperti kawasan *Central Business District* (CBD), dan menyediakan fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE).

3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Masih Perlu ditingkatkan

Nilai IKM Kota Kediri dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan. Tahun 2022 Nilai IKM Kota Kediri mencapai 3,56 dengan kategori B. Angka tersebut masih perlu ditingkatkan lagi melalui perbaikan dan Pembangunan dari berbagai sektor agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas baik dari sisi akses dan infrastruktur pelayanan, sumber daya manusia, inovasi dan integrasi sistem agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan para *stakeholder* yang dilayani.

4.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

4.1.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan mencakup dua permasalahan, yaitu:

a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

Dalam pelaksanaan SPM bidang pendidikan masih terdapat penduduk Kota Kediri usia 4-6 tahun, dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 4,35 persen belum bersekolah pada jenjang PAUD atau capaian angka partisipasi sekolah sebesar 95,65 persen. Sedangkan APK jenjang SD dan SMP sudah di atas 100 persen.

Untuk data anak tidak sekolah (ATS) di Kota Kediri masih tergolong sangat tinggi (tercatat sebesar 1.067 anak). Dari jumlah tersebut setelah dilakukan verifikasi 73 anak berasal dari keluarga yang ber KTP Kota Kediri. Mengingat angka tidak sekolah yang cukup tinggi tersebut maka diperlukan verifikasi data dan selanjutnya diupayakan langkah untuk penuntasannya.

b. Peningkatan kualitas Pendidikan

Indikator yang menggambarkan kualitas pendidikan adalah guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 capaian pada tahun 2022 sebesar 89,69 persen. Sesuai data tersebut maka masih ada 388 orang guru belum memiliki ijazah S1/D4 dari 3780 orang guru keseluruhan.

Permasalahan yang lain yang berkaitan dengan kualitas pendidikan adalah capaian rapor pendidikan khususnya angka numerasi SD sebesar 65,88 dan SMP sebesar 66,24 persen. Dengan capaian tersebut, untuk angka numerasi Kota Kediri berada pada kategori tuntas muda. Selain itu capaian yang tergolong rendah adalah iklim inklusifitas sekolah. Iklim inklusifitas sekolah adalah kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas, cerdas istimewa, dan berbakat istimewa. Capaian pada tahun 2022 adalah 56,73 untuk SD dan 54,81 untuk SMP.

2) Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang Kesehatan:

- a. Sarana prasarana pelayanan kesehatan dan peralatan medis maupun non medis yang ada baik di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan poskeskel masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya
- b. Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan sesuai standar dan masih perlunya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan pada unit-unit pelayanan kesehatan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- c. Koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan
- d. Masih terdapat balita stunting di masyarakat

- e. Perlunya peningkatan layanan dan screening penyakit menular dan tidak menular

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a. Masih diperlukannya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaannya dan prasarana sumber daya air
- b. Belum adaptifnya Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap dinamika pembangunan di Kota Kediri
- c. Belum tercapainya layanan sanitasi aman. Belum memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu). Berdasarkan capaian SDG's terdapat 90,83% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak.
- d. Kurangnya kesadaran pengelolaan limbah domestik di Pondok Pesantren
- e. Masih kurangnya capaian layanan air minum layak (berdasarkan capaian SDG's masih 91%).
- f. Perlu peningkatan jalan dalam kondisi mantap.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- a. Belum optimalnya pelayanan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Masih Terdapat Rumah Dalam Kondisi Tidak Layak Huni (RTLH).
- c. Masih terdapat Kawasan kumuh.

5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, antara lain:

- a. Perlunya penguatan desa/ kelurahan Tangguh bencana;
- b. Perlu peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri;
- c. penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya/perizinannya berdasarkan kebijakan tata ruang dan peta risiko bencana;
- d. keterbatasan akses pelayanan kebencanaan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi terdampak bencana (warga di kawasan risiko tinggi bencana, kelompok rentan dan minoritas);
- e. Perlunya Peningkatan partisipasi unsur Pentahelix dalam penanggulangan bencana; dan
- f. Perlunya Penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat serta pemulihan pascabencana.

6) Bidang Sosial

Permasalahan bidang Sosial di Kota Kediri antara lain :

- a. Masih banyaknya masyarakat miskin ekstrem di kota Kediri;
- b. Database kemiskinan masih perlu dilakukan updating secara berkala;

- c. Belum tuntasnya penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Kediri. Berdasarkan data susenas jumlah penduduk miskin di Kota Kediri sebanyak 23.770 jiwa (2015) dan menurun menjadi 22.196 jiwa (2023). Angka tersebut masih cukup tinggi (7,69%) jika dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada wilayah kota di Jawa Timur;
- d. Belum Optimalnya Pelayanan PPKS (Shelter/Penampungan Sementara yang ada di Kelurahan Semampir);
- e. Data Penyandang Disabilitas di Kota Kediri sebanyak 1.800 orang, pelayanan rehabilitasi kepada para penyandang disabilitas hanya sebatas vokasional pada tingkat dasar (bansos biaya hidup dan alat bantu mobilitas) sehingga masih sulit menciptakan wirausaha mandiri dan masih sulit berkompetensi pada lapangan kerja;
- f. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum maksimal, khususnya dalam memberikan layanan penerima manfaat yang baru terdeteksi;
- g. Perlu adanya program pelatihan keterampilan bagi eks PPKS;
- h. Kompetensi Sumber Daya Manusia sosial belum merata dan tersertifikasi;
- i. Belum dibentuknya tim pengendali penggalangan dana dalam pengendalian penyelenggaraan dana bagi korban bencana alam dan bencana sosial;

4.1.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan Bidang Tenaga Kerja antara lain:

- a. Penyerapan tenaga kerja yang masih rendah akibat daya saing tenaga kerja belum sesuai dengan kondisi pasar, perlu *link and match* antara pencari kerja dengan Perusahaan;
- b. Belum optimalnya kualitas hubungan industrial yang kondusif
- c. Perlu peningkatan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat untuk penciptaan lapangan pekerjaan.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Belum optimalnya penyediaan data terpilah gender;
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi *Focal Point* dalam menginternalisasikan kebijakan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- c. Meningkatnya kasus perkawinan anak;
- d. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- e. Keterbatasan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- f. Minimnya SDM terlatih Konvensi Hak Anak di Kota Kediri;
- g. Belum maksimalnya fasilitasi peran anak dalam proses pembangunan Kota Kediri;

3) Bidang Pangan

Permasalahan Bidang Pangan di Kota Kediri yaitu bukan “produsen pangan”, banyak mendatangkan pangan dari luar daerah.

- a. Terdapatnya kawasan tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) yang bukan merupakan aset Pemerintah Kota Kediri, sehingga pemerintah daerah kesulitan menahan laju perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian.
- b. Terbatasnya kapasitas produksi tanaman pangan di Kota Kediri dikarenakan dari 2.196 Ha lahan baku sawah di Kota Kediri, terdapat 56% atau sekitar 1.230 hektar merupakan tanaman tebu.

4) Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Permasalahan di Ruang Terbuka Hijau
 - 1) Belum terpenuhinya luasan RTH publik perkotaan sebanyak 20%
 - 2) RTH yang dibangun masih belum sesuai standar ruang publik.
 - 3) Belum adanya kewajiban RTH privat pada kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, dan kawasan industri.
- b. Permasalahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup
 - 1) Belum optimalnya pengawasan pengelolaan limbah industri.
 - 2) Belum adanya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan rendah karbon.
- c. Permasalahan di bidang persampahan
 - 1) Masih rendahnya capaian pengurangan sampah di Kota Kediri.
 - 2) Belum optimalnya teknologi pengelolaan persampahan di TPA .
 - 3) Belum optimalnya penegakan peraturan daerah tentang persampahan
 - 4) Belum optimalnya penerapan retribusi sampah
 - 5) Belum optimalnya pengelolaan limbah spesifik dan limbah B3

5) Bidang Pertanahan

Permasalahan Bidang Pertanahan antara lain:

- a. Belum teridentifikasinya tanah eigendom, tanah terlantar dan tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan di Kota Kediri.
- b. Proses pengadaan tanah memerlukan waktu yang relatif panjang
- c. Pemahaman masyarakat terhadap bidang pertanahan masih perlu ditingkatkan
- d. Masih ada yang memiliki sertifikat ganda

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam menilai tertib administrasi kependudukan di Kota Kediri, indikator yang dapat digunakan adalah jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan akte nikah, Kartu Identitas Anak (KIA). Persentase penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2022 sebesar 97,49%, Kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa penduduk tersebut telah terdaftar sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil Kota Kediri sudah sangat baik, namun perlu peningkatan sehingga seluruh penduduk yang tinggal di Kota Kediri secara administrasi terdaftar dalam *database* kependudukan. Beberapa permasalahan di bidang catatan sipil dan kependudukan antara lain sebagai berikut :

- a. Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil penduduk Kota Kediri belum maksimal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu peristiwa penting;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana serta aparatur yang profesional sehingga menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan belum maksimal;
- c. Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis penerapan *Electronic know Your Customer* belum memenuhi target
- d. Digitalisasi layanan kependudukan dan catatan sipil belum terlaksana dengan maksimal.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah masih rendahnya kelurahan yang masuk dalam kategori kelurahan swasembada.

8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Kurang maksimalnya kualitas keluarga pada dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan pada perhitungan indeks pembangunan keluarga (IBANGGA);
- b. Tingginya kerentanan sosial akibat migrasi yang menyebabkan kepadatan penduduk semakin tinggi dan aglomerasi penduduk pada wilayah cepat tumbuh;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya remaja tentang kesehatan reproduksi dan resiko pernikahan dini;
- d. Belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan perekonomian keluarga peserta KB;

9) Bidang Perhubungan

Permasalahan yang ditemui pada bidang perhubungan diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Kurangnya sarana dan prasarana angkutan umum perkotaan

Sarana dan prasarana angkutan jalan dapat berupa armada angkutan umum perkotaan dan halte/bus stop. Berkurangnya jumlah armada angkutan umum perkotaan diakibatkan oleh perubahan fungsi angkutan umum perkotaan menjadi kendaraan pribadi. Sedangkan setiap tahunnya terdapat potensi peningkatan jumlah penumpang. Selain itu dibutuhkan integrasi antar moda sehingga meningkatkan konektivitas antar kawasan.

b. Belum adanya data volume lalu lintas harian secara berkala sebagai bahan evaluasi kinerja jalan

Volume lalu lintas merupakan sesuatu yang sangat dinamis. Perubahan volume lalu lintas dapat berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas. Tingkat pelayanan jalan Kota Kediri saat ini masuk ke dalam kategori “Sangat Baik” namun, adanya dinamika perencanaan seperti Jalan Tol Kediri - Tulungagung dan Bandar Udara Dhoho mengakibatkan munculnya kawasan strategis dan infrastruktur pendukung jalan tol dan bandar udara. Kawasan baru tersebut dapat mempengaruhi pola pergerakan di Kota Kediri. Monitoring dan evaluasi memerlukan data perhitungan volume lalu lintas secara berkala.

10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu nilai SPBE pada domain tata kelola, Domain layanan dan Domain Manajemen belum mencapai target.

11) Bidang Statistik

Permasalahan Bidang Statistik antara lain:

- a. Penyediaan data belum sinkron dengan kebutuhan data perencanaan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun dokumen perencanaan
- c. Belum terintegrasinya data pada aplikasi di masing-masing perangkat daerah
- d. Masih minimnya SDM statistisi di semua perangkat daerah

12) Bidang Persandian

Permasalahan Bidang Persandian yaitu penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan sudah dilaksanakan namun belum maksimal

13) Bidang Penanaman Modal

Permasalahan Bidang Penanaman Modal antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan di Mall Pelayanan Publik;

- b. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan secara periodik kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan dalam rangka pengkinian data investasi untuk tujuan pemantauan realisasi investasi, pembentukan strategi meningkatkan investasi dan memelihara iklim investasi yang kondusif;
- c. Perlu peningkatan promosi dan penciptaan iklim investasi di Kota Kediri.

14) Bidang Koperasi, Usaha Mikro

Permasalahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro antara lain:

- a. Belum optimalnya peningkatan kualitas usaha mikro sehingga daya saing usaha mikro rendah;
- b. Belum optimalnya peningkatan kualitas koperasi; dan
- c. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan usaha mikro belum optimal.

15) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

- a. Masih kurangnya penyelenggaraan *event* yang menjadi sarana dan wadah bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya seni, inovasi dan kreativitasnya; dan
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung *event* kepemudaan dan olahraga skala nasional.

16) Bidang Kebudayaan

Permasalahan Bidang Kebudayaan antara lain:

- a. Belum optimalnya integrasi pembangunan kebudayaan dengan pengembangan kepariwisataan;
- b. Belum optimalnya upaya pelestarian budaya lokal Kota Kediri;
- c. Masih kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal Kota Kediri;
- d. Kurangnya minat kunjungan di museum Selomangleng karena kualitas, penataan, fasilitas dan sarana prasarana museum belum memadai.

17) Bidang Perpustakaan

Permasalahan Bidang Perpustakaan antara lain:

- a. Kurangnya optimalnya sarana prasarana infrastruktur Perpustakaan Umum Daerah;
- b. Kurang masifnya gerakan gemar membaca masyarakat dalam kegiatan literasi;
- c. Minimnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan;
- d. Kualitas layanan penyelenggaraan perpustakaan belum terstandar nasional perpustakaan; dan
- e. Belum optimalnya pengembangan perpustakaan digital.

18) Bidang Kearsipan

Permasalahan Bidang Kearsipan antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan kearsipan;
- b. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia arsiparis dan pengelola arsip; dan
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah.

4.1.4.3 Urusan Pilihan

1) Bidang Perikanan

Permasalahan Bidang Perikanan antara lain:

- a. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya perikanan; dan
- b. Belum optimalnya pemasaran hasil budidaya perikanan.

2) Bidang Pariwisata

Permasalahan Bidang Pariwisata antara lain:

- a. Kurang optimalnya pengelolaan destinasi wisata;
- b. Belum tersedianya informasi dan kalender tahunan event kepariwisataan; dan
- c. Belum optimalnya pengembangan kelompok sadar wisata.

3) Bidang Pertanian

Permasalahan Bidang Pertanian antara lain:

- a. Semakin berkurangnya luas lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan;
- b. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- c. Belum optimalnya peningkatan produktivitas pertanian;
- d. Belum optimalnya pengelolaan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani.

4) Bidang Peternakan

Permasalahan Bidang Peternakan antara lain:

- a. Semakin berkurangnya luas lahan peternakan karena alih fungsi lahan menjadi permukiman dan industri serta komoditas lainnya dan intensitas pembangunan sektor non-pertanian yang sangat tinggi;
- b. Belum optimalnya peningkatan produktivitas peternakan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan hasil peternakan untuk meningkatkan nilai tambah bagi peternak

5) Bidang Perdagangan

Permasalahan Bidang Perdagangan antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas produk-produk lokal;
- b. Perlu peningkatan perlindungan konsumen melalui layanan kemetrolagian yang sesuai standar;

- c. Masih terjadinya fluktuasi harga barang pokok penting yang berdampak terhadap inflasi;
- d. Masih kurangnya penataan sektor perdagangan informal; dan
- e. Kurangnya pengawasan dan ketepatan penyaluran sasaran barang pokok penting.

6) Bidang Perindustrian

Permasalahan Bidang Perindustrian antara lain:

- a. Belum optimalnya daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) baik dalam hal standarisasi produk dan packaging, kemampuan mengakses modal maupun penerapan teknologi digital; dan
- b. Belum optimalnya peningkatan pemasaran produk IKM.

4.1.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain:

- a. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan perlu ditingkatkan sehingga menjadi feedback untuk perencanaan selanjutnya;
- b. Koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal serta lintas sektoral dalam perumusan rencana pembangunan daerah perlu ditingkatkan;
- c. Perlu peningkatan kualitas perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial.

2) Bidang Keuangan

Permasalahan Bidang Keuangan antara lain:

- a. Masih kurang optimalnya pencatatan, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
- b. Masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer sehingga memerlukan upaya peningkatan PAD yang signifikan.

3) Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan ASN baik dalam hal pelaksanaan kinerja, meritokrasi, kompetensi, jabatan fungsional dan peningkatan profesionalitas ASN;
- b. Belum meratanya distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kinerja Perangkat Daerah.

4) Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Penelitian dan pengembangan perlu diarahkan untuk penyediaan data perencanaan;
- b. Persentase hasil riset, penelitian, pengembangan yang diterapkan dan dimanfaatkan belum optimal.

5) Fungsi Lainnya

Permasalahan pada fungsi lainnya antara lain:

- a. Masih diperlukannya optimalisasi peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat
- b. Implementasi SAKIP pada beberapa perangkat daerah masih perlu dioptimalkan;
- c. Perlu peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- d. Belum semua kesepakatan kerjasama ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah terkait;
- e. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. Masih kurangnya ketaatan Obyek Pemeriksaan (Obrik) terhadap aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun kinerja, sehingga selama ini masih sering terjadi adanya temuan yang berulang;
- g. Terlalu lamanya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh objek pemeriksaan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan daya tanggap obyek pemeriksaan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. Belum efektifnya BUMD melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- i. Belum optimalnya peningkatan laba bersih BUMD;
- j. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- k. Perlu optimalisasi peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan
- l. Masih rendahnya penerapan reformasi hukum;
- m. Indeks Risiko Bencana Daerah (IRDI) di Kota Kediri perlu ditekan.

4.2 ISU STRATEGIS

4.2.1 Isu Internasional

1) Disrupsi Digital

Disrupsi digital merupakan suatu kondisi perubahan yang mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Dengan adanya disrupsi digital menjadikan segala hal instan, modern, dan cepat. Hal ini selaras dengan tujuan utama kehadiran teknologi, yaitu memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitas. Adanya disrupsi digital ini berpotensi untuk mengubah tatanan karena berpengaruh terhadap perubahan cara, norma, kebiasaan, serta gaya hidup.

Berikut ini adalah penyebab kemunculan disrupsi digital, antara lain:

- a. Perkembangan teknologi digital: revolusi 4.0, bukti perkembangannya adalah tersedianya jaringan internet yang mencapai pelosok negeri. Kehadiran jaringan

internet membuat penggunaannya dengan mudah mendapatkan juga berbagi informasi secara *real-time* dan tak terbatas;

- b. Pebisnis model baru yang mempunyai landasan kuat dengan basis teknologi juga membawa perubahan besar-besaran pada operasional pasar;
- c. Perilaku masyarakat, perubahan perilaku ini menyebabkan masyarakat mempunyai dua kehidupan, yakni kehidupan nyata dan dunia digital. Dan keduanya secara fleksibel terus berubah dan perubahan ini sukar untuk ditebak. Hasilnya, berbagai perubahan ini mampu untuk menghasilkan disrupsi teknologi.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk menghadapi era disrupsi teknologi antara lain:

- a. Transformasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah menghadapi disrupsi teknologi;
- b. Transformasi digital dengan mengadaptasi teknologi yang relevan terutama penerapan di pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas layanan dan cybersecurity.

2) Resesi Ekonomi dan Krisis Pangan

Resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Adapun dampak dari resesi ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Perlambatan ekonomi akan membuat sektor riil menahan kapasitas produksinya sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan sering terjadi bahkan beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi;
- b. Kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman; dan
- c. Ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu.

Sedangkan krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang. Melonjaknya harga pangan, energi, dan pupuk mendorong kekhawatiran akan ketahanan pangan secara global, terlebih adanya krisis iklim dan konflik yang berlangsung lama. Jika tidak ada tindakan yang diambil berisiko jumlah orang yang menghadapi kelaparan di seluruh dunia terus meningkat. Untuk mengatasi krisis pangan diperlukan tindakan nyata melalui produksi pangan yang lebih baik,

nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik. Gerakan ini sekaligus menyerukan solidaritas global kepada seluruh pemerintah di dunia untuk mengubah sistem pertanian dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengatasi ketidaksetaraan, meningkatkan.

3) Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan adalah kondisi turunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi sehingga berdampak pada menurunnya fungsi komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Kondisi ini disebabkan karena eksploitasi sumber daya yang ada secara berlebihan. Adapun faktor yang menyebabkan degradasi lingkungan dibedakan dalam 2 (dua) hal yakni faktor manusia dan faktor alam itu sendiri. Penurunan kualitas lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 yakni lingkup fisik dan non fisik.

a. Lingkup fisik

Degradasi lingkungan dalam lingkup fisik secara umum diakibatkan oleh adanya pencemaran. Pencemaran dapat terjadi pada medium air, udara dan tanah. Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena ulah tangan manusia, contohnya adalah pembuangan limbah, penggunaan bahan kimia, dan kebutuhan transportasi yang menyumbang polusi.

b. Lingkup non fisik

Manusia sebagai makhluk yang tidak dapat dipisahkan dengan alam memiliki ikatan kuat baik secara fisik maupun psikologisnya. Ketika lingkungan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan daya dukung komponen-komponennya, tentu akan mempengaruhi manusia. Mungkin dampak langsung ini tidak mengenai manusia, perlahan-lahan akan berdampak pada hewan dan tumbuhan. Kemudian secara pasti manusia akan menyadari bahwa lingkungan telah rusak atau degradasi lingkungan sudah tidak dapat terelakan lagi. Lingkungan memiliki peran besar untuk manusia baik secara psikologi dan spiritual. Dampak yang dapat ditimbulkan dari terjadinya degradasi lingkungan yakni perubahan iklim, keanekaragaman hayati terganggu bahkan menyebabkan kepunahan, berkurangnya air bersih, menimbulkan bencana.

Adapun cara untuk mengatasi degradasi lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Remediasi dan bioremediasi;
- b. Menyebarluaskan kampanye peduli lingkungan dan aksi nyata;
- c. Pembuatan kebijakan atau aturan yang mendukung pemulihan degradasi lingkungan dan memberikan sanksi; dan

- d. Penguatan program reboisasi, rehabilitasi lahan, reklamasi pantai dan yang lainnya.

4.2.2 Isu Nasional

Isu nasional yang tercantum dalam RPD Kota Kediri tahun 2025-2026 disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, sebagai berikut:

- 1) Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif;
- 2) Transformasi digital di tingkat pemerintah masih dihadapkan oleh tantangan mendasar: infrastruktur telekomunikasi;
- 3) Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang;
- 4) Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai;
- 5) Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan;
- 6) Belum meratanya kualitas pelayanan publik;
- 7) Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat;
- 8) Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;
- 9) Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
- 10) Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi;
- 11) Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat;
- 12) Rendahnya kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
- 13) Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal;
- 14) Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal;
- 15) Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
- 16) Kualitas pendidikan yang masih rendah;
- 17) Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jamsostek untuk pekerja informal dan tingkat kepatuhan iuran jaminan sosial masih rendah;
- 18) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;

- 19) Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya;
- 20) Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau;
- 21) Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; dan
- 22) Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.

4.2.3 Isu Regional

1) Optimalisasi upaya pencegahan gangguan ketertiban umum serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Isu ini menyoroti upaya untuk meningkatkan ketertiban umum dalam masyarakat dan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

2) Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas & Nilai

Isu ini menyoroti upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Memberdayakan dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar.

3) Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan

Isu ini utamanya dalam konteks peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

4) Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi

Isu ini mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat serta upaya optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan.

5) Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

Isu ini mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial.

6) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah

Isu ini merujuk pada tantangan dan kompleksitas dalam memastikan ketersediaan serta aksesibilitas layanan dasar yang diperlukan untuk mendukung perkembangan wilayah.

7) Peningkatan kapasitas terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Isu ini dalam konteks integrasi pengelolaan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Membangun infrastruktur dan menerapkan kebijakan pembangunan dengan memperhitungkan risiko bencana akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.

4.2.4 Isu Kota Kediri

Isu strategis pada perencanaan pembangunan di Kota Kediri tahun 2025-2026 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas birokrasi;
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- 3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa;
- 4) Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja;
- 5) Peningkatan daya tarik wisata melalui penyelenggaraan event seni, budaya, dan olahraga;
- 6) Peningkatan kualitas infrastruktur, transportasi, lingkungan hidup dan penataan kota; dan
- 7) Peningkatan ketertiban dan ketentraman umum serta kesiapsiagaan terhadap bencana

Adapun keterkaitan antara Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional dan Kota Kediri, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional dan Kota Kediri

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kota Kediri
Disrupsi digital	1. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif 2. Transformasi digital di tingkat pemerintah masih dihadapkan oleh tantangan mendasar: infrastruktur telekomunikasi 3. Belum efektifnya upaya menjaga	Optimalisasi upaya pencegahan gangguan ketertiban umum serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas birokrasi

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kota Kediri
	<p>konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang</p> <p>4. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai</p> <p>5. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan</p> <p>6. Belum meratanya kualitas pelayanan publik</p> <p>7. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat</p> <p>8. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas</p>		
<p>Resesi ekonomi dan krisis pangan</p>	<p>1. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah</p> <p>2. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>3. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat</p> <p>4. Rendahnya kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi</p> <p>5. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal</p>	<p>Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas & Nilai</p>	<p>Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa</p>
	<p>1. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal</p> <p>2. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan,</p>	<p>1. Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting</p>	<p>1. Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja</p> <p>2. Peningkatan kualitas</p>

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kota Kediri
	<p>pendidikan dan perlindungan sosial</p> <p>3. Kualitas pendidikan yang masih rendah</p> <p>4. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jamsostek untuk pekerja informal dan tingkat kepatuhan iuran jaminan sosial masih rendah</p>	<p>dan Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>2. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi</p>	<p>Pendidikan dan kesehatan masyarakat</p>
	<p>Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata</p>	<p>Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal</p>	<p>Peningkatan daya Tarik wisata melalui penyelenggaraan event seni, budaya, dan olahraga</p>
<p>Degradasi lingkungan</p>	<p>1. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya</p> <p>2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau</p>	<p>Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah</p>	<p>Peningkatan kualitas infrastruktur, transportasi, dan penataan kota</p>
	<p>1. Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan</p> <p>2. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan</p>	<p>Peningkatan kapasitas terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</p>	<p>Peningkatan ketertiban dan ketentraman umum serta kesiapsiagaan terhadap bencana</p>

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kota Kediri 2025-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu dua tahun. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2023, maka tujuan RPD ditetapkan dengan mengacu pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Selanjutnya, ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga dua tahun ke depan, dijabarkan pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal 2023	Target 2025	Target 2026			
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi			74,63	75	76		
				1	Meningkatnya Manajemen ASN	1	Indeks Sistem Merit	306	314	318
				2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,94	70	75
						3	Nilai SAKIP	71,98 (BB)	73	75
				3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	4	Indeks Reformasi Hukum	55,24 (CC)	57	60
				4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	5	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,54	3,70	3,80
						6	Indeks Inovasi Daerah	47,63	53	55
7	Indeks SPBE	3,65	3,7	3,8						
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia			80,97	81,47	82		
				5	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	8	Indeks Pendidikan	0,79	0,80	0,81

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal 2023	Target 2025	Target 2026
			6 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	9 Umur Harapan Hidup	74,67	74,97	75,27
			7 Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	10 Indeks Pembangunan Gender	94,54**	94,72	94,91
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	3 Pertumbuhan ekonomi			1,92	3,5-4,5	3,5-4,5
			8 Meningkatkan Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	11 Nilai Peningkatan PDRB	1,285 T	2,3T-3,2T	2,8T-3,8T
			9 Meningkatkan jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	12 Nilai Realisasi Investasi	1.347 M	1.414 M	2.898 M
			10 Terkendalinya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting	13 Tingkat Inflasi	2,64	3±1	3±1
				14 Indeks Ketahanan Pangan	73,95*	74	75
			11 Meningkatkan daya tarik wisata, budaya dan olah raga	15 Jumlah Kunjungan Wisata	1.695.361	1.750.000	1.925.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal 2023	Target 2025	Target 2026			
4	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	4	Tingkat Kemiskinan			7,15	6,9	6,85		
				12	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	16	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	100%	100%	100%
				13	Menurunnya angka pengangguran	17	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	4,03	4,01
5	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	5	Indeks Kerukunan Umat Beragama			4,55	4,55	4,56		
				14	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	18	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	86,65	88	89
				15	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	19	Indeks Ketahanan Daerah	0,77	0,78	0,80
6	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	6	Indeks Kota Layak Huni			79,83	80,5	80,9		
				16	Meningkatnya kualitas penataan ruang	20	%ketaatan terhadap rencana tata ruang	83,28%	84.60%	84.80%
				17	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	21	Indeks Infrastruktur	85,63	88	90
				18	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	22	%permukiman layak huni	89,08%	89,71%	90,34%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal 2023	Target 2025	Target 2026
			19 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,54	66,76	66,77

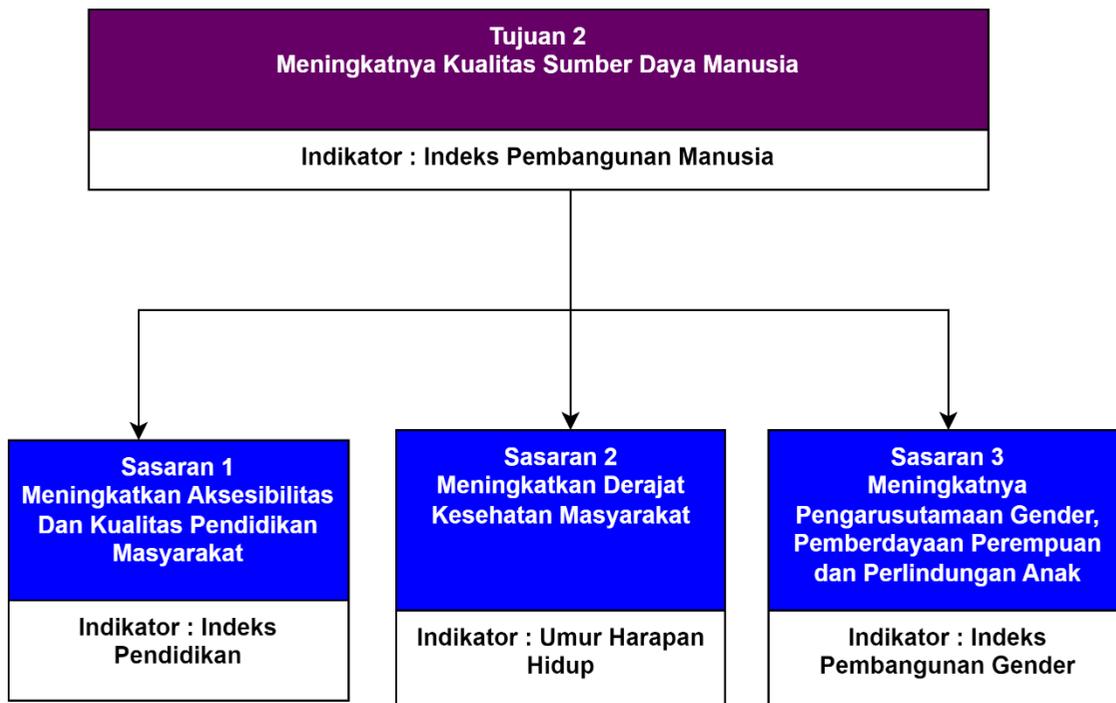
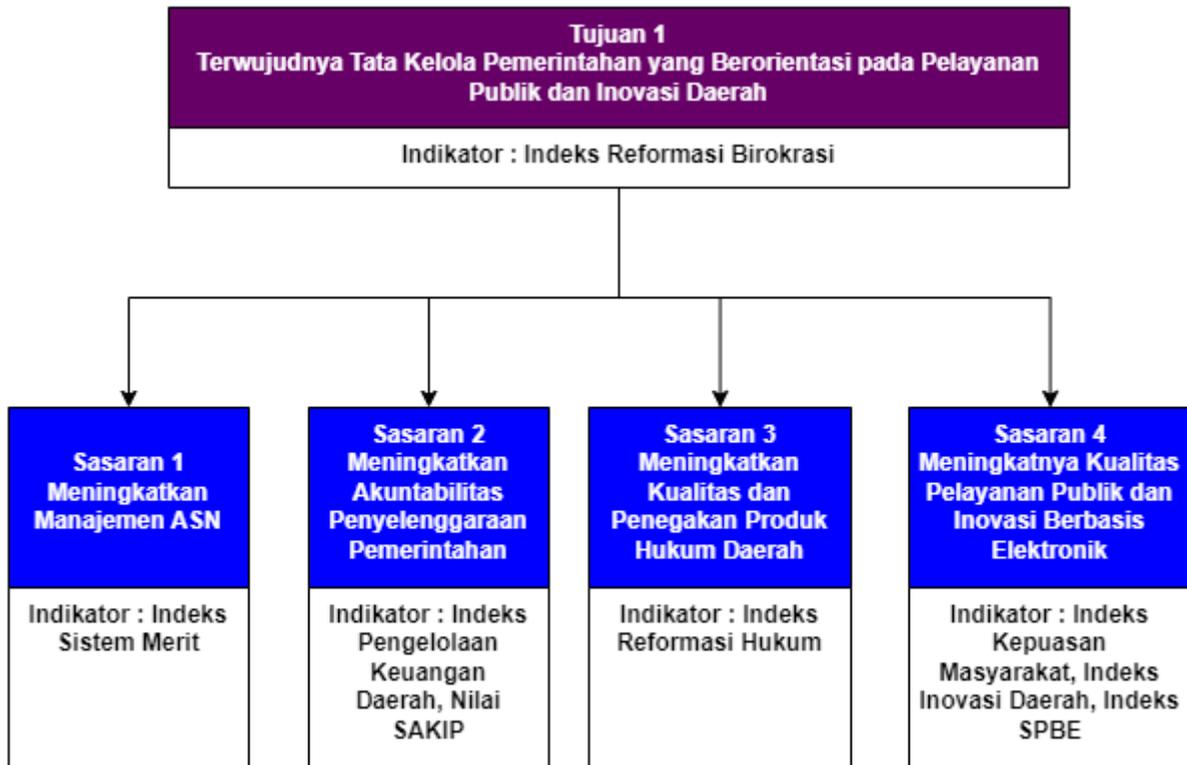
Keterangan:

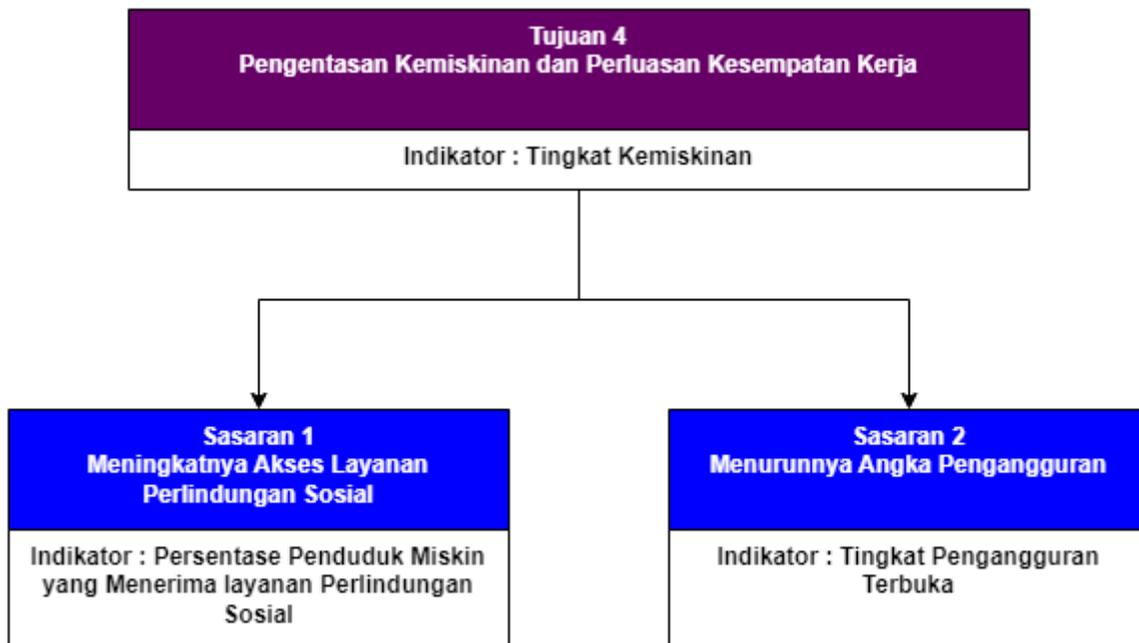
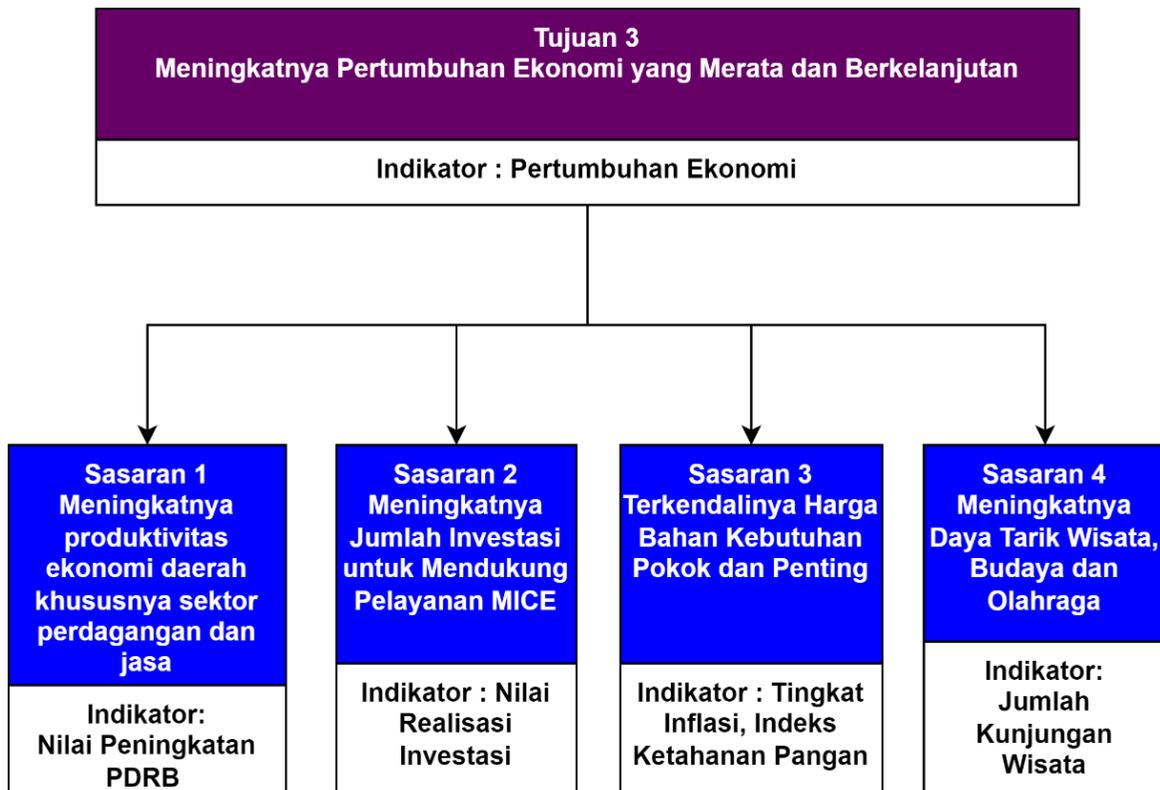
* = nilai sementara tahun 2023

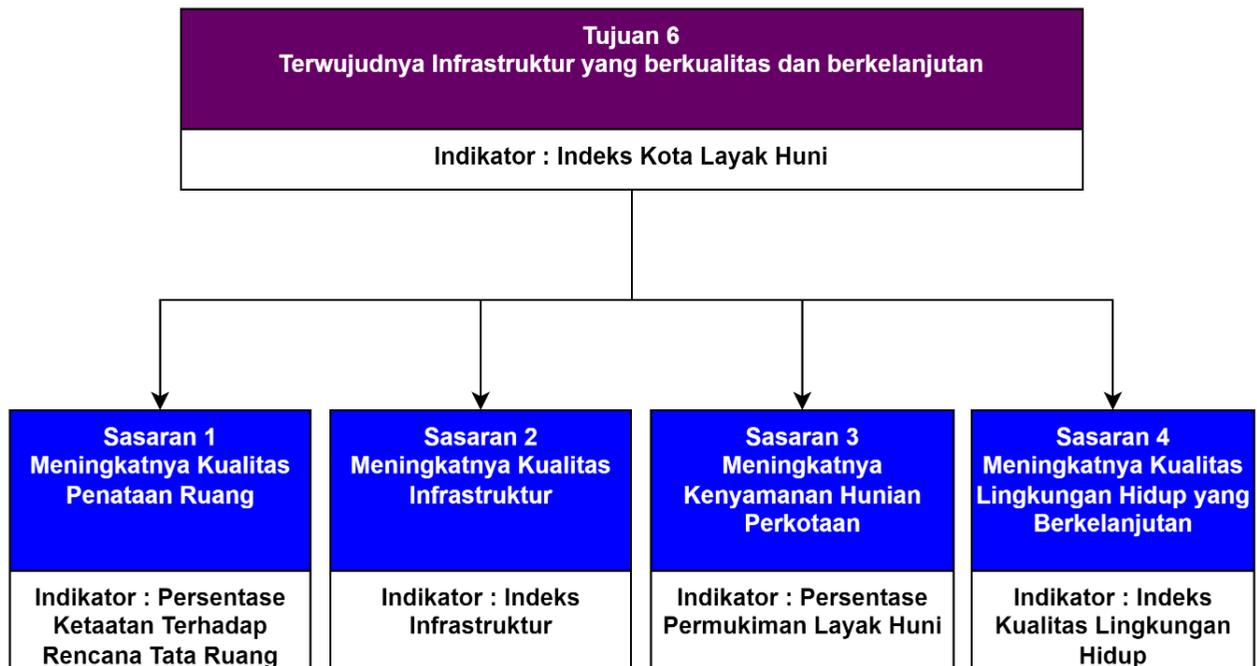
**= nilai target tahun 2023 dalam Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024

5.2 CASCADING KINERJA

Gambar 5. 1 Cascading Kinerja Pemerintah Kota Kediri







BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang efektif dan efisien dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada BAB V terdapat strategi - strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Tahun 2025-2026. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berikut rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan 2025-2026, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi Kota dan Arah Kebijakan Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		2025	2026
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah	1	Meningkatnya Manajemen ASN	1	Meningkatkan pengelolaan kepegawaian	1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengadaan ASN	✓	✓
						2	Meningkatkan kualitas pengembangan karir, promosi, dan mutasi	✓	✓
						3	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian	✓	✓
						4	Meningkatkan manajemen kinerja pegawai	✓	✓
		2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset, kualitas penyusunan regulasi daerah serta	5	Meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan	✓	✓
						6	Meningkatkan Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan dan BMD Kategori Baik	✓	✓
						7	Meningkatnya kinerja BUMD	✓	✓
						8	Optimalisi peningkatan PAD	✓	✓

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2025	2026			
			penegakan produk hukum daerah	9	Meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan	✓	✓		
				10	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	✓	✓		
		3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	11	Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi hukum	✓	✓		
				12	Meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian produk hukum	✓	✓		
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	3	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui penerapan <i>e-gov</i> dan inovasi daerah	13	Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	✓	✓
					14	Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal	✓	✓	
					15	Meningkatkan kualitas riset inovasi Perangkat Daerah	✓	✓	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2025	2026			
				16	Meningkatkan SDM pendukung digitalisasi layanan	✓	✓		
				17	Meningkatkan pengamanan persandian	✓	✓		
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	5	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	4	Meningkatnya kualitas dan jangkauan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal	18	Meningkatkan Penanganan Masalah Pendidikan	✓	✓
					19	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan	✓	✓	
					20	Meningkatkan akses pendidikan melalui pendidikan gratis dan berkualitas, bantuan pendidikan, pemberian beasiswa, dukungan sarana - prasarana dan angkutan sekolah gratis	✓	✓	
					21	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui standarisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang mengacu pada standar pendidikan nasional	✓	✓	

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		2025	2026
						22	Meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	✓	✓
						23	Meningkatkan bantuan keuangan bagi warga tidak mampu	✓	✓
						24	Meningkatkan pendampingan dan pengelolaan pendidikan non formal melalui: peningkatan kualitas pendidikan keagamaan non formal, peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan fungsional	✓	✓
						25	Meningkatkan ketersediaan Pendidikan Inklusi	✓	✓
		6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang merata serta peningkatan pola hidup bersih dan sehat	26	Peningkatan layanan kesehatan dan pengobatan murah dan berkualitas	✓	✓
						27	Meningkatkan pelayanan Edukasi Kesehatan Masyarakat	✓	✓

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		2025	2026
						28	Meningkatkan kualitas Fasilitas Kesehatan Masyarakat	✓	✓
						29	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat	✓	✓
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6	Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	30	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	✓	✓
						31	Meningkatkan perlindungan anak dan partisipasi anak dalam pembangunan	✓	✓
						32	Meningkatnya pembangunan ramah disabilitas dan kelompok rentan lainnya	✓	✓
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan	8	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro, wirausaha dan industri kecil menengah	33	Meningkatkan pembinaan dan akses lembaga keuangan bagi usaha mikro dan wirausaha	✓	✓
						34	Meningkatkan kualitas promosi dan sarana distribusi perdagangan	✓	✓

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2025	2026			
		9	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	8	Peningkatan kualitas layanan PTSP, iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi secara terpadu khususnya pelayanan MICE	35	Menyediakan layanan terpadu perizinan dan non perizinan secara terintegrasi	✓	✓
						36	Mengembangkan potensi dan promosi investasi	✓	✓
		10	Terkendalnya harga bahan kebutuhan pokok dan penting	9	Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk stabilisasi harga bahan pokok dan ketahanan pangan daerah	37	Meningkatkan kualitas distribusi bahan pokok	✓	✓
						38	Meningkatnya koordinasi <i>stakeholder</i> dalam peningkatan ketahanan pangan daerah	✓	✓
		11	Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga	10	Meningkatkan kunjungan wisata melalui kegiatan penyelenggaraan event dan daya tarik wisata	39	Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga olahraga, komunitas seni budaya, dan masyarakat baik regional maupun nasional	✓	✓
						40	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata dan fasilitasnya	✓	✓

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		2025	2026
						41	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya	✓	✓
						42	Meningkatnya daya tarik dan pengembangan wisata budaya	✓	✓
4	Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	12	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	11	Peningkatan keterpaduan penanganan dan penanggulangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem	43	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem	✓	✓
						44	Meningkatnya validitas database berbasis digital dan spasial untuk memastikan layanan perlindungan sosial tepat sasaran	✓	✓
		13	Menurunnya angka pengangguran	12	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan wirausaha	45	Melakukan pemetaan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja dan penyelenggaraan bursa kerja	✓	✓
						46	Menyelenggarakan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja	✓	✓

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		2025	2026
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	14	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	13	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana dan meningkatnya layanan kebakaran serta penanganan konflik sosial, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	47	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan revolusi mental	✓	✓
						48	Meningkatnya penanganan pelanggaran produk hukum	✓	✓
		15	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana			49	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kesiapsiagaan penanganan kedaruratan dan pemulihan pasca bencana yang tepat dan andal	✓	✓
						50	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan kebakaran	✓	✓
6	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	16	Meningkatnya kualitas penataan ruang	15	meningkatkan kualitas infrastruktur kebinamargaan, keciptakarya, sumber daya air dan pelayanan	51	Meningkatkan kualitas penyusunan rencana tata ruang	✓	✓
						52	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap ketaatan terhadap rencana tata ruang	✓	✓

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2025	2026		
		17	Meningkatnya kualitas infrastruktur	transportasi untuk kenyamanan hunian dan penataan ruang kota	53	Melaksanakan optimalisasi pengendalian pembangunan infrastruktur	✓	✓
					54	Meningkatnya kualitas perkantoran dan Fasilitas Publik	✓	✓
					55	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi	✓	✓
					56	Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur	✓	✓
		18	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan		57	Meningkatnya penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah	✓	✓
					58	Meningkatnya kualitas pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	✓	✓
					59	Meningkatnya layanan pengelolaan rusunawa dan pemakaman kota	✓	✓

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2025	2026			
				60	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta untuk penanganan dan pengurangan kawasan kumuh	✓	✓		
				61	Meningkatkan cakupan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	✓	✓		
				62	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana layanan sanitasi (limbah domestik, air bersih dan persampahan)	✓	✓		
				63	Meningkatnya upaya pengurangan sampah	✓	✓		
				64	meningkatnya kualitas pengelolaan RTH Publik	✓	✓		
		19	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	14	Meningkatkan kualitas air dan udara	65	Meningkatnya kualitas penanganan dampak lingkungan pelaku usaha	✓	✓

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2025	2026
				66 Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air	✓	✓
				Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan emisi karbon	✓	✓

6.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Berdasarkan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri tahun 2025-2026, maka dirumuskan program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH				
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Peningkatan kualitas manajemen ASN	1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian yang terintegrasi dengan database kepegawaian	BKPSDM		
									Persentase Promosi dan Mutasi sesuai Hasil Talenpool ASN			
									persentase ASN yang melaporkan kinerjanya tepat waktu			
			2	Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	% Penyelesaian dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	BPPKAD		
									% pemahaman OPD terhadap pengelolaan keuangan			
									% dokumen sistem informasi keuangan yang terbit tepat waktu			
									% penyelesaian penyajian informasi keuangan dan penyelesaian Laporan Keuangan yang tepat waktu			
									2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti	Inspektorat
									3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen perencanaan	BAPPEDA
											Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran	
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi penerimaan PAD yang dikelola BPPKAD terhadap PAD	BPKAD									

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	
				Nilai SAKIP	Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKJIP Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	Bagian Organisasi	
						2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP	Inspektorat	
						3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja perencanaan	BAPPEDA	
			3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	Peningkatan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum	1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase layanan hukum yang terfasilitasi	Setda-Bag. Hukum
						2 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	Satpol PP	
						3 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Persentase penerapan ketentuan perparkiran di Kota Kediri	Dinas Perhubungan	
			4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP	DPMPTSP
						2 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Dispendukcapil	
						3 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik yang berkualitas	Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren, Kecamatan Mojoroto	
						4 Program Penyelenggaraan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
						Urusan Pemerintahan Umum		
						5 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian indikator mutu pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan UKP / UKM	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD
				Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan inovasi daerah	1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tingkat kematangan inovasi daerah	BAPPEDA
				Indeks SPBE	Peningkatan kualitas e-government	1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik Persentase Aplikasi E-Gov Yang Terintegrasi	DISKOMINFO
						2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman	DISKOMINFO
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	5 Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat dan daya saing kepemudaan	1 Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan Indeks SPM (Rapor Pendidikan)	DINDIK
						2 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	DISARPUS
						3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DISBUDPARPORA
			6 Meningkatkan Derajat	Umur Harapan Hidup		1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase capaian indikator mutu pelayanan	DINKES

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH		
				Kesehatan Masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan UKP / UKM	DP3AP2KB	
			2			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat			
			3			Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertiflity Rate (TFR)			
			7	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Peningkatan PUG dan perlindungan anak	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	DP3AP2KB
2		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif							
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	8	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	Nilai Peningkatan PDRB	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah	1	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	DISPERDAGIN
							2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik	
							3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	
							4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	% koperasi mengalami peningkatan dalam tatakelola	DINKOP
							5	Program Pengembangan UMKM	Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	
			9	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	Nilai Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah investasi	1	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal								

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	
						3	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	
						4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	
		10	Terkendalinya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting	Tingkat Inflasi	Peningkatan pengendalian inflasi	1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bapokting	DISPERDAGIN
						2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindak lanjuti	Setda-Bag. Perekonomian
						3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Kediri	
				Indeks Ketahanan Pangan	Capaian Indeks Ketahanan Pangan	1	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	DKPP
						2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	
		11	Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga	Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah penyelenggaraan even wisata	DISBUDPARPORA
						2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Potensi wisata yang dipromosikan	
						3	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kegiatan Seni & Budaya Daerah yang diselenggarakan	
						4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH		
4	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kemiskinan	12	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	Peningkatan perlindungan sosial	1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	DINSOS
							2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	
			13	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan wirausaha	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dan masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan	DINKOP
							2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	
5	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	14	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	%penanganan potensi kasus SARA	Capaian penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Keagamaan dan Suku/Ras	Bakesbangpol
							2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan	
							3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Tingkat kewaspadaan dini masyarakat	
							4	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian ruang lingkup indeks ketenteraman dan ketertiban yang berkategori baik	Satpol PP
			15	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Peningkatan ketahanan daerah dan	1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian prioritas Indeks Ketahanan Daerah berkategori rendah dan sedang	BPBD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			menghadapi bencana		layanan kebakaran	2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Waktu Tanggap Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP
						3 Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standar	DINSOS
6	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	16 Meningkatnya kualitas penataan ruang	%ketaatan terhadap rencana tata ruang	Peningkatan penataan ruang kota	1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW / RDTK	DPUPR
			17 Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur dan pelayanan transportasi daerah	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	
						2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik	
						3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik	
							Persentase Trotoar Dalam Kondisi Baik	
						4 Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	
							Persentase bangunan yang memiliki PBG / SLF	
						5 Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	
							Proporsi jumlah jembatan kewenangan kota dalam kondisi baik	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	
						6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penerapan ketentuan perparkiran di Kota Kediri Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik Persentase sarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	DISHUB
			18	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	%permukiman layak huni	Peningkatan kualitas kebutuhan dasar hunian perkotaan	1 Program Pengembangan Perumahan 2 Program Kawasan Permukiman 3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan area perumahan Persentase Penurunan Kawasan Kumuh Persentase ketersediaan PSU di kawasan permukiman	DPKP
						4	Program Pengelolaan Persampahan	Timbunan sampah yang ditangani persentase pengurangan timbulan sampah	DLHKP
			19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	1 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi Karbon Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpelihara Persentase Lembaga Yang Memiliki Wawasan Lingkungan	DLHKP

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
						4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup	
						5 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kota Kediri menetapkan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dengan alokasi anggaran belanja daerah sebagai berikut.

**Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri
Tahun 2025-2026**

KODE	URAIAN	2025	2026
5	BELANJA	1.609.815.669.628,11	1.622.363.596.501,45
5.1	BELANJA OPERASI	1.385.098.595.044,88	1.407.455.131.397,12
5.2	BELANJA MODAL	212.021.649.083,23	202.213.039.604,33
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	695.425.500,00	695.425.500,00

Belanja pada kerangka pendanaan tersebut dijabarkan dalam program perangkat daerah. Uraian program yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif tahun 2025-2026 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1		Dinas Pendidikan										
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	171.315.164.348,00	100%	228.698.009.265,04	100%	230.542.274.265,45	100%	459.240.283.530,49	Dinas Pendidikan
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	95%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	83		83	-	83,5	-	83,5		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	95,65%	104.606.338.405,00	100%	111.328.932.047,00	100%	112.191.731.270,00	100%	223.520.663.317,00	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah (7-15)	99,49%		100%	-	100%	-	100%		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS)7-18 Kesetaraan	36,50%		100%	-	100%	-	100%		
				Indeks SPM (Rapor Pendidikan)	73,13%		73,15%	-	73,20%	-	73,20%		
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		100%		-	-	-	-	-		Dinas Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru Bersertifikasi	1373 orang (48.48%)	11.964.801.000,00	1416 orang (50%)	826.450.000,00	1477 orang (52%)	832.854.988,00	1477 orang (52)	1.659.304.988,00	Dinas Pendidikan
								-		-			
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-		-			

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2		Dinas Kesehatan						-				
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	295.335.666.574,00	100%	311.619.567.876,87	100%	314.034.619.528,00	100%	625.654.187.404,87	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	95%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80,3		80,3	-	80,8	-	80,8		
				Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	94%		90%	-	90%	-	90%		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian indikator mutu pelayanan	100%	114.130.002.587,00	100%	88.241.621.116,00	100%	88.925.493.680,00	100%	177.167.114.796,00	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD
				Cakupan pelayanan kesehatan UKP/UKM	97%		100%	-	100%	-	100%		
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100%	5.618.090.711,00	100%	7.067.618.000,00	100%	7.122.392.040,00	100%	14.190.010.040,00	Dinas Kesehatan, RSUD
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengusaha PIRT/UMOT/TPP/DAM yang mendapatkan layanan perizinan	80%	554.843.798,00	80%	935.996.293,00	90%	943.250.264,00	90%	1.879.246.557,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat	80%	7.691.746.464,00	90%	1.129.157.600,00	91%	1.137.908.571,00	91%	2.267.066.171,00	Dinas Kesehatan, Puskesmas
								-		-			
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						-				
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	16.741.188.544,00	100%	19.752.536.031,32	100%	19.905.618.186,00	100%	39.658.154.217,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	73,09%		96%		97%		97%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	82,16		83		84		84		
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	88,99%	16.131.932.020,00	68,00%	13.941.697.000,00	70,00%	14.049.745.152,00	70,00%	27.991.442.152,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Jaringan Air Minum Perpipaan	100,00%	1.357.646.100,00	16,42%	1.440.000.000,00	16,72%	1.451.160.000,00	16,72%	2.891.160.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan	17,39%	289.308.800,00	26,32%	630.000.000,00	28,95%	634.882.500,00	28,95%	1.264.882.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik	91,03%	2.724.920.500,00	91,31%	4.308.900.020,00	91,42%	4.342.293.995,00	91,42%	8.651.194.015,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase / gorong-gorong dalam kondisi baik	90,83%	14.061.205.882,00	91,63%	11.657.700.000,00	92,04%	11.748.047.175,00	92,04%	23.405.747.175,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase trotoar dalam kondisi baik	42,44%		46,40%		46,90%		46,90%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang memiliki PBG / SLF	61,95%	17.359.771.400,00	77%	29.160.131.760,00	84%	29.386.122.781,00	96%	58.546.254.541,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang tertata	NA	302.506.323,00	35,71	-	42,86	-	42,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	86,00%	20.666.709.924,00	86,75%	14.413.562.500,00	87,78%	14.525.267.609,00	87,78%	28.938.830.109,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Proporsi jumlah jembatan kewenangan kota dalam kondisi baik	96,61%		76,67%	-	79,17%	-	79,17%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat	NA	102.104.700,00	40,43%	550.000.000,00	49,13%	554.262.500,00	49,13%	1.104.262.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	89,33%	1.071.976.130,00	89,53%	1.419.116.000,00	89,73%	1.430.114.149,00	89,73%	2.849.230.149,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Penilaian Terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	32,18%		39,08%		43,10%		43,10%		
				Persentase Luas RTBL yang Tersusun	18,90%		19,44%		19,97%		19,97%		
								-		-			
1	4		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman					-		-			
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					-		-			
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	8.139.112.026,00	100%	10.045.868.786,12	100%	10.123.724.269,00	100%	20.169.593.055,12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	83**		83	-	83,5	-	83,5			
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan area perumahan	86,7	280.263.900,00	87,7	500.000.000,00	88,7	503.875.000,00	88,7	1.003.875.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	58,20%	4.586.286.716,00	63,80%	4.106.858.250,00	65,67%	4.138.686.401,00	65,67%	8.245.544.651,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU di kawasan permukiman	88,79%	6.537.259.515,00	89,79%	6.536.709.200,00	90,79	6.587.368.696,00	90,79	13.124.077.896,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	5		Satuan Polisi Pamong Praja										
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	9.127.650.555,00	100%	11.421.967.960,12	100%	11.510.488.212,00	100%	22.932.456.172,12	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	77,36		77,36	-	77,8	-	77,8		
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Ruang Lingkup Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang berkategori baik	100%	6.212.710.380,00	100%	7.995.836.700,00	100%	8.057.804.434,00	100%	16.053.641.134,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Penegakan Perda	100%		100%	-	100%	-	100%		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Waktu Tanggap Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Wilayah Managemen Kebakaran	71.37 %	2.117.523.270,00	72%	467.782.460,00	73%	471.407.774,00	73%	939.190.234,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	1.914.222.936,00	100%	3.293.338.845,56	100%	3.318.862.222,00	100%	6.612.201.067,56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	81,67		81,67	-	82,1	-	82,1		
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian prioritas Indeks Ketahanan Daerah berkategori rendah dan sedang	0	1.035.027.620,00	42%	1.137.912.120,00	43%	1.146.730.939,00	43%	2.284.643.059,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	6		Dinas Sosial										
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	6.023.519.118,00	100%	8.428.535.701,76	100%	8.493.856.853,00	100%	16.922.392.554,76	Dinas Sosial
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	83.31*		83,31	-	83,8	-	83,8			
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	83,09%	604.523.468,00	85%	592.701.700,00	86%	597.295.138,00	86%	1.189.996.838,00	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	93%	1.131.399.317,00	94%	1.558.025.000,00	95%	1.570.099.694,00	95%	3.128.124.694,00	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	97%	13.690.981.121,00	98%	13.965.220.000,00	99%	14.073.450.455,00	99%	28.038.670.455,00	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	100%	464.774.328,00	100%	543.000.000,00	100%	547.208.250,00	100%	1.090.208.250,00	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN yang dikelola	100%	29.351.852,00	100%	83.716.680,00	100%	84.365.484,00	100%	168.082.164,00	Dinas Sosial
									-	-			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-	-			
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						-	-			
2	7		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja						-	-			
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun	80%		80%	45.000.000,00	80%	45.348.750,00	80%	90.348.750,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	
				Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dan masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan	86%	10.450.762.198,00		9.964.010.000,00		10.041.231.078,00		20.005.241.078,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
				Persentase Angkatan Kerja yang terlatih			60%	-	62%	-	62%		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	75%	385.279.550,00	90%	345.000.000,00	92%	347.673.750,00	92%	692.673.750,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	79%	941.677.105,00		1.698.650.000,00		1.711.814.538,00		3.410.464.538,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
				Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan)			26%	-	27%	-	27%		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
								-		-			
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2	8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	5.832.269.479,00	100%	7.930.580.599,92	100%	7.992.042.600,00	100%	15.922.623.199,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	83,32		83,32	-	83,82	-	83,82		
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran responsif gender	60,04%	2.464.838.611,00	62%	2.253.680.450,00	65%	2.271.146.473,00	65%	4.524.826.923,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0.0079 (6/ 75,985 RT)		0.0065	495.000.000,00	0.006	498.836.250,00	0.006	993.836.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prevalensi Perkawinan Anak	0.018	173.866.896,00	0.016	25.000.000,00	0.015	25.193.750,00	0.015	50.193.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
					(16/ 88,110)			-		-			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
												Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan OPD yang menyajikan data sektoral terpilah gender	21.43% (6/28 OPD)	16.500.000,00	50% (14 OPD)	15.000.000,00	71.43% (20 OPD)	15.116.250,00	71.43% (20 OPD)	30.116.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kelurahan Layak Anak	10.87 (5/ 46Kel)	360.784.400,00	13.04 (6/ 46Kel)	35.000.000,00	15.22 (7/ 46Kel)	35.271.250,00	15.22 (7/ 46Kel)	70.271.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif	50% (16/32 pengaduan)	416.151.200,00	60	567.200.000,00	70	571.595.800,00	70	1.138.795.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								-		-			
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					-		-			
2	9		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					-		-			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	
				Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	11.297.376.156,00	100%	13.193.242.465,56	100%	13.295.490.095,00	100%	26.488.732.560,56	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80.65*		80,65	-	81,05	-	81,05		
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan infrastruktur pangan	0%	53.601.500,00	80%	46.888.000,00	85%	47.251.382,00	85%	94.139.382,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan PPH konsumsi	4,23%	109.630.459,00	8%	262.731.040,00	12%	264.767.206,00	12%	527.498.246,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PPH Ketersediaan	95.02 %		95.5 %	-	96%	-	96%		
				Penguatan Cadangan pangan	0%		25%	-	25%	-	25%		
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah kelurahan tahan pangan	14	34.629.995,00	20	34.915.000,00	25	35.185.591,00	25	70.100.591,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan pengajuan izin edar dan sertifikasi PSAT-PDUK	40%	21.671.900,00	50%	45.000.000,00	60%	45.348.750,00	60%	90.348.750,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
								-		-			
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					-		-			
1	4		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman					-		-			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	
				Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Tanah Kosong			33,33%	225.000.000,00	100%	226.743.750,00	100%	451.743.750,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				56.362.400,00						Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2	11		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan										
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	19.481.830.288,00	100%	21.552.751.320,40	100%	21.719.785.143,00	100%	43.272.536.463,40	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%		95%		95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80,26		80,26		80,76		80,76		
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	72%	464.186.437,00	90%	550.000.000,00	91%	554.262.500,00	91%	1.104.262.500,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Status Mutu Air	57%	207.091.500,00	57,10%	911.371.200,00	57,20%	918.434.327,00	57,20%	1.829.805.527,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
				Peningkatan Status Mutu Udara Ambien	100%		100%		100%		100%		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan RTH perkotaan	100%	8.251.277.615,00	100%	7.771.773.564,00	100%	7.832.004.809,00	100%	15.603.778.373,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase sampah B3 yang ditangani	86%	50.778.909,00	89%	78.552.200,00	90%	79.160.980,00	90%	157.713.180,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimonitoring	13,00%	620.047.662,00	15%	183.992.000,00	16%	185.417.938,00	16%	369.409.938,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga yang Memiliki Wawasan Lingkungan	13.31 %	125.201.800,00	17.34 %	138.200.000,00	21.37 %	139.271.050,00	21.37 %	277.471.050,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbunan sampah yang ditangani	79,32%	19.624.707.962,00	77,50%	20.070.081.236,00	76%	20.225.624.366,00	76%	40.295.705.602,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
				persentase pengurangan timbunan sampah	15,36%		17,50%	-	18,70%	-	18,70%		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					-		-			
2	12		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					-		-			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	6.173.782.538,00	100%	7.772.050.913,04	100%	7.832.284.308,00	100%	15.604.335.221,04	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	85%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	81,03*		81,03	-	81,53	-	81,53		
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase layanan dokumen kependudukan yang berkualitas	99,92%	695.433.123,00	100%	953.753.575,00	100%	961.145.165,00	100%	1.914.898.740,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase layanan dokumen pencatatan sipil yang berkualitas	96,44%	213.096.089,00	97,45 %	194.121.600,00	98%	195.626.042,00	98%	389.747.642,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas data kependudukan yang valid	93,47%	229.793.729,00	95%	198.246.500,00	96%	199.782.910,00	96%	398.029.410,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundangan	96%		98%	75.000.000,00	98,4 %	75.581.250,00	98,4 %	150.581.250,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
								-		-			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
4	1		Sekretariat Daerah										
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status kelurahan.	4%	234.990.311,00	5%	313.480.900,00	5%	315.910.377,00	5%	629.391.277,00	Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	70%	576.023.274,00	75%	160.000.000,00	78%	161.240.000,00	78%	321.240.000,00	Sekretariat Daerah
								-		-			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							-		-	
2	8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							-		-	
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total/Total <i>Fertiflity</i> Rate (TFR)	1,04	877.863.974,00	1,99	1.930.400.000,00	1,98	1.945.360.600,00	1,98	3.875.760.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu/ <i>Age</i> <i>Spesific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 tahun	19,163		19,163		19		19		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	71,8	3.394.897.740,00	71,85	1.793.666.000,00	71,9	1.807.566.912,00	71,9	3.601.232.912,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				<i>Unmeet Need</i> Pelayanan KB	25,3		16,4	-	16,1	-	16,1		
				Prevalensi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	37,3		37,5	-	38	-	38		
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23	1.692.110.680,00	23,2	2.801.900.000,00	23,3	2.823.614.725,00	23,3	5.625.514.725,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								-		-			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					-		-			
2	15		Dinas Perhubungan					-		-			
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	11.362.697.692,00	100%	20.532.256.332,96	100%	20.691.381.320,00	100%	41.223.637.652,96	Dinas Perhubungan
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95%		95%	-	95%	-	95%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	81.13*		81,13	-	81,63	-	81,63				
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penerapan ketentuan perparkiran di Kota Kediri	85,71%	18.196.588.269,00	85%	13.349.859.680,00	90%	13.453.321.093,00	90%	26.803.180.773,00	Dinas Perhubungan
				Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	87,69%		88%	-	90%	-	90%		
				Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik	54,26%		60%	-	65%	-	65%		
				Persentase sarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	52,39%		55%	-	60%	-	60%		
								-		-			
								-		-			
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-		-			
2	16		Dinas Komunikasi dan Informatika					-		-			
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	5.531.923.822,00	100%	7.422.207.041,68	100%	7.479.729.146,00	100%	14.901.936.187,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	83.59*		83,59	-	83,99	-	83,99		
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kebijakan Daerah yang Dipublikasikan	100%	3.743.642.132,00	100%	3.865.288.228,00	100%	3.895.244.212,00	100%	7.760.532.440,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	
				Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Informasi yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik	67%	4.346.539.616,00	75%	3.906.441.942,00	78%	3.936.716.867,00	78%	7.843.158.809,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Aplikasi E-Gov yang Terintegrasi	64%		64%	-	65%	-	65%		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2	17		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja										
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	5.877.933.914,00	100%	9.059.099.169,40	100%	9.129.307.188,00	100%	18.188.406.357,40	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	86,86		86,86	-	87,36	-	87,36		
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki legalitas	62,50%	65.476.100,00	62,70%	221.232.700,00	63,00%	222.947.253,00	63,00%	444.179.953,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi cukup sehat	66%	95.617.350,00	70%	300.490.000,00	75%	302.818.798,00	75%	603.308.798,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	% Koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian	18%	20.837.035,00	20%	355.095.000,00	22%	357.846.986,00	22%	712.941.986,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	% Koperasi mengalami peningkatan dalam tatakeola	50%	1.161.309.759,00	55%	968.148.000,00	60%	975.651.147,00	60%	1.943.799.147,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah		
					Baseline 2023		2025		2026			Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan	100	23.881.518.182,00	150	22.562.310.800,00	200	22.737.168.709,00	200	45.299.479.509,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
				Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	667 UM		675 UM		680 UM		680 UM		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	275%	367.102.588,00		-					Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					-		-			
2	18		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					-		-			
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	7.215.522.638,00	100%	8.608.697.833,56	100%	8.675.415.242,00	100%	17.284.113.075,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	81.13*		81	-	82	-	82		
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	2.3906 NIB	69.415.080,00	4.000 NIB	47.042.692,00	4.500 NIB	47.407.273,00	4.500 NIB	94.449.965,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	2 Kali	266.275.107,00	1 Kali	171.128.076,00	2 Kali	172.454.319,00	2 Kali	343.582.395,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP	95%	305.862.196,00	95%	418.500.000,00	96%	421.743.375,00	96%	840.243.375,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal	70%	362.887.428,00	75%	783.903.850,00	80%	789.979.105,00	80%	1.573.882.955,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	98%	429.124.680,00	94%- 98%	220.000.000,00	95%- 98%	221.705.000,00	96%	441.705.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								-		-			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					-		-			
2	22		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					-		-			
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pembinaan Kepemudaan	3 Kali	2.160.525.661,00	5 Kali	2.167.326.620,00	7 Kali	2.184.123.401,00	7 Kali	4.351.450.021,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang		250 orang	-	300 Orang	-	300 Orang		
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Kegiatan Olahraga yang diselenggarakan	7 Kegiatan	18.096.621.484,00	8 Kegiatan	15.830.000.000,00	9 Kegiatan	15.952.682.500,00	9 Kegiatan	31.782.682.500,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga	3000 orang		6000 orang	-	7000 orang	-	7000 orang			
							-		-				
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				-		-				
2	16		Dinas Komunikasi dan Informatika				-		-				
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral	93%	259.632.390,00	94%	307.265.000,00	95%	309.646.304,00	95%	616.911.304,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							-		-				
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				-		-				
2	16		Dinas Komunikasi dan Informatika				-		-				
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi yang Aman	83%	205.101.611,00	90%	121.414.000,00	95%	122.354.959,00	95%	243.768.959,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							-		-				
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				-		-				
2	22		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga				-		-				
2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	8.306.260.259,00	100%	10.020.555.505,96	100%	10.098.214.811,00	100%	20.118.770.316,96	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95%		95%		95%		95%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	82,18*		82,18	-	82,68	-	82,68		
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kegiatan Seni & Budaya Daerah yang diselenggarakan	90%	3.832.367.391,00	94%	2.702.671.560,00	96%	2.723.617.265,00	96%	5.426.288.825,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
								-		-			
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum	14907 orang	392.540.685,00	15000 orang	900.000.000,00	16000 orang	906.975.000,00	16000 orang	1.806.975.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
								-		-			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					-		-			
2	24		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					-		-			
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	2,92%	237.047.799,00	3,02%	316.328.750,00	3,12%	318.780.298,00	3,12%	635.109.048,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Alih Media dalam Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang ditemukan	20%		21,18%	50.000.000,00	22,57%	50.387.500,00	22,57%	100.387.500,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					-		-			
2	24		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					-		-			
2	24	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	5.066.773.483,00	100%	6.583.185.377,80	100%	6.634.205.064,00	100%	13.217.390.441,80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%			
			Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	78.18*		78,18	-	79,48	-	79,48			
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	50%	101.908.715,00	55%	92.877.500,00	60%	93.597.301,00	60%	186.474.801,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Unit Kearsipan yang arsipnya diselamatkan	20%	21.463.360,00	25%	21.546.000,00	30%	21.712.982,00	30%	43.258.982,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-		-			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					-		-			
2	9		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					-		-			
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan (ton)	186,1	157.059.000,00	191,57	270.078.200,00	193,49	272.171.306,00	193,49	542.249.506,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	34,8	37.922.525,00	35,6	442.500.000,00	38,45	445.929.375,00	38,45	888.429.375,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
								-		-			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					-		-			
2	22		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					-		-			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah penyelenggaraan even wisata	29 Kali	427.691.015,00	32 Kali	450.000.000,00	35 Kali	453.487.500,00	35 Kali	903.487.500,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase potensi wisata yang dipromosikan	93%	388.644.439,00	95%	550.000.000,00	97%	554.262.500,00	97%	1.104.262.500,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	69.832.654,00	70 orang	90.000.000,00	90 Orang	90.697.500,00	90 Orang	180.697.500,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
								-		-			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					-		-			
2	9		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					-		-			
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Produktivitas Padi (ton/ha)	7.35	373.852.950,00	7.35	677.582.500,00	7.35	682.833.764,00	7.35	1.360.416.264,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Nilai produktivitas jagung (ton/ha)	8,63		8,63	-	8,63	-	8,63		
				Nilai Produktivitas Tebu (ton/ha)	99		99	-	99	-	99		
				Produksi hasil peternakan (ton)	2946		2946	-	3000	-	3000		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.	100%	135.891.500,00	100%	209.070.000,00	100%	210.690.293,00	100%	419.760.293,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	0 unit		5 unit		6 unit		6 unit		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kehatan hewan dan masyarakat veteriner	20.40 %	78.796.070,00	50%	74.760.000,00	50%	75.339.390,00	50%	150.099.390,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan tehnologi	48%	29.801.210,00	50%	26.400.000,00	56%	26.604.600,00	56%	53.004.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang dibina	81%	118.519.620,00	83%	110.662.050,00	85%	111.519.681,00	85%	222.181.731,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
								-		-			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-		-			
3	30		Dinas Perdagangan dan Perindustrian					-		-			
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan			24%	50.000.000,00	26%	50.387.500,00	26%	100.387.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina		147.736.359,00	18%	250.000.000,00	20%	251.937.500,00	20%	501.937.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bapokting		219.893.556,00	100%	405.000.000,00	100%	408.138.750,00	100%	813.138.750,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	19,23%	543.136.764,00	24%	635.000.000,00	25%	639.921.250,00	25%	1.274.921.250,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	73%	288.242.528,00	75%	415.000.000,00	76%	418.216.250,00	76%	833.216.250,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	30	7	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kenaikan Omzet Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Kemitraan, Pameran dan Promosi lainnya	30%	618.807.373,00	35%	415.000.000,00	40%	418.216.250,00	40%	833.216.250,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3	30		Dinas Perdagangan dan Perindustrian										
3	31	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	6.005.017.213,00	100%	8.131.945.862,36	100%	8.194.968.443,00	100%	16.326.914.305,36	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80,24		81	-	82	-	82		
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memenuhi standar	30%	28.279.698.430,00	31%	16.608.208.400,00	32%	16.736.922.015,00	32%	33.345.130.415,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pemantauan dan pengawasan Izin Sektor Industri	-		75%	20.000.000,00	80%	20.155.000,00	80%	40.155.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	6%	1.142.630.714,00	9%	1.650.000.000,00	9,50%	1.662.787.500,00	9,50%	3.312.787.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	1		SEKRETARIAT DAERAH										

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	1		Sekretariat Daerah				-		-				
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	46.004.280.598,00	100%	49.516.009.163,56	100%	49.899.758.235,00	100%	99.415.767.398,56	Sekretariat Daerah
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	82,58*		82,58	-	82,98	-	82,98		
				Persentase OPD yang Telah Menyusun Peta Jabatan	100%		100%	-	100%	-	100%		
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Komponen Pelaporan	12,57		13	-	13,25	-	13,25		
				Persentase Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah yang Berkualitas	90%		95%	-	96%	-	96%		
				Persentase UPP yang telah menindaklanjuti rekomendasi PEKPPP mandiri			25%	-	45%	-	45%		
				Persentase Layanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan Dan Pendokumentasian Pimpinan yang berkualitas	97%		98%	-	99%	-	99%		
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan LPPD yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	27.968.500.570,00	100%	21.587.368.800,00	100%	21.754.670.908,00	100%	43.342.039.708,00	Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	75%		80%	-	85%	-	85%			
			Persentase layanan hukum yang terfasilitasi	97%		98%	-	100%	-	100%			
			Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	80%		85%	-	85%	-	85%			
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan	75%		80%	-	85%	-	85%			
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindak lanjuti	75%	2.063.335.224,00	80%	2.455.613.100,00	85%	2.474.644.102,00	85%	4.930.257.202,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan	82%		83%	-	85%	-	85%		
				Persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan	90%		92%	-	94%	-	94%		
								-		-			
								-		-			
4	2		SEKRETARIAT DPRD					-		-			
4	2		Sekretariat DPRD					-		-			
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	30.225.354.476,00	100%	32.290.068.977,64	100%	32.540.317.012,00	100%	64.830.385.989,64	Sekretariat DPRD
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80.93*		80,93	-	81,43	-	81,43				
		Persentase cakupan pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	93%		93%	-	94%	-	94%				
		Persentase cakupan pelayanan Administrasi DPRD	90%		93%	-	94%	-	94%				
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pembahasan Raperda	86%	47.971.355.049,00	86%	53.379.739.400,00	87%	53.793.432.380,00	87%	107.173.171.780,00	Sekretariat DPRD
				Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	86%		86%	-	87%	-	87%		
								-	-				
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					-	-				
5	1		PERENCANAAN					-	-				
5	1		Badan Perencanaan Pembangunan daerah					-	-				
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	7.971.887.568,00	100%	10.508.649.375,32	100%	10.590.091.408,00	100%	21.098.740.783,32	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur Bappeda	83,33		84	-	85	-	85		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah		
					Baseline 2023		2025		2026			Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen perencanaan	80%	2.442.719.436,00	86.67%	3.681.950.000,00	93.33%	3.710.485.113,00	93.33%	7.392.435.113,00	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
				Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran	75%		81.30%	-	87.50%	-	87.50%		
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja perencanaan	95%	1.658.428.727,00	95%	2.762.571.500,00	96%	2.783.981.429,00	96%	5.546.552.929,00	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5	2		KEUANGAN										
5	2		Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah										
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	23.038.370.445,00	100%	26.390.479.938,92	100%	26.595.006.158,00	100%	52.985.486.096,92	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	82		90	-	90,5	-	90,5		
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	% Penyelesaian dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	67%	10.320.263.931,00	100%	14.596.249.800,00	100%	14.709.370.736,00	100%	29.305.620.536,00	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
				% pemahaman OPD terhadap pengelolaan keuangan	73%		77%	-	80%	-	80%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		% dokumen sistem informasi keuangan yang terbit tepat waktu	92%		96%	-	98%	-	98%				
		% penyelesaian penyajian informasi keuangan dan penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu	100%		100%	-	100%	-	100%				
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Capaian Penyelesaian pengelolaan BMD	72%	1.203.845.016,00	81%	1.219.601.700,00	85%	1.229.053.613,00	85%	2.448.655.313,00	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi penerimaan PAD yang dikelola BPPKAD terhadap PAD	40%	4.663.375.797,00	55%	5.248.178.054,00	55%	5.288.851.434,00	55%	10.537.029.488,00	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
								-	-				
5	3		KEPEGAWAIAN										
5	3		Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia										
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	7.938.623.002,00	100%	9.745.583.180,68	100%	9.821.111.450,00	100%	19.566.694.630,68	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	83,43*		83,43	-	83,93	-	83,93		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Kepegawaian yang terintegrasi dengan database kepegawaian	70%*	2.672.987.519,00	85%	4.105.464.356,00	86%	4.137.281.705,00	86%	8.242.746.061,00	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Promosi dan Mutasi sesuai Hasil Talenpool ASN	60%*		90%	-	92%	-	92%		
				Persentase ASN yang melaporkan kinerjanya tepat waktu	90%*		90%	-	92%	-	92%		
								-		-			
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					-		-			
5	3		Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia					-		-			
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	61,67%	117.563.732,00	70%	112.640.000,00	73%	113.512.960,00	73%	226.152.960,00	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
								-		-			
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					-		-			
5	1		Badan Perencanaan Pembangunan daerah					-		-			
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat kematangan inovasi daerah	0	2.401.385.849,00	60%	2.366.235.620,00	70%	2.384.573.946,00	70%	4.750.809.566,00	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
								-		-			
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					-		-			
6	1		INSPEKTORAT DAERAH					-		-			
6	1		Inspektorat					-		-			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							-		-				
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	8.294.238.785,00	100%	11.640.301.132,56	100%	11.730.513.466,00	100%	23.370.814.598,56	Inspektorat
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	82,05		82,05	-	82,55	-	82,55		
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (internal dan Eksternal)	82,88%*	844.745.172,00	85%	1.409.100.300,00	86%	1.420.020.827,00	86%	2.829.121.127,00	Inspektorat
				Persentase pengawasan yang dilakukan sesuai rencana	100%		100%		100%		100%		
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan SPIP	100%	1.097.104.168,00	100%	1.196.410.000,00	100%	1.205.682.178,00	100%	2.402.092.178,00	Inspektorat
				Prosentase Tindakanj Rekomendasi pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100%		100%	-	100%	-	100%		
								-		-			
7			UNSUR KEWILAYAHAN					-		-			
7	1		KECAMATAN					-		-			
4	1		Sekretariat Daerah					-		-			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	
				Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Berhasil Dilaksanakan	93%	3.747.458.863,00	94%	1.714.378.600,00	95%	1.727.665.034,00	95%	3.442.043.634,00	Sekretariat Daerah
								-		-			
7	1		Kecamatan Mojoroto										
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	26.163.818.988,00	100%	32.082.191.993,20	100%	32.330.828.981,00	100%	64.413.020.974,20	Kecamatan Mojoroto
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	78,64		78,64	-	79,14	-	79,14		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan publik yang berkualitas	93%	99.626.600,00	94%	230.000.000,00	95%	231.782.500,00	95%	461.782.500,00	Kecamatan Mojoroto
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	95%	28.215.045.962,00	98%	11.202.363.004,00	99%	11.289.181.317,00	99%	22.491.544.321,00	Kecamatan Mojoroto
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	95%	55.887.800,00	97%	185.000.000,00	98%	186.433.750,00	98%	371.433.750,00	Kecamatan Mojoroto
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum	95%	536.152.000,00	97%	1.940.000.000,00	98%	1.955.035.000,00	98%	3.895.035.000,00	Kecamatan Mojoroto
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	87%	6.825.457.300,00	90%	5.491.776.509,00	91%	5.534.337.777,00	91%	11.026.114.286,00	Kecamatan Mojoroto
								-		-			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	1		Kecamatan Kota				-		-				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	27.985.056.952,00	100%	33.489.486.438,28	100%	33.749.029.958,00	100%	67.238.516.396,28	Kecamatan Kota
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95%		95%	-	95%	-	95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	79,23		79,23	-	79,73	-	79,73		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan publik yang berkualitas	95%	81.115.360,00	96%	120.000.000,00	98%	120.930.000,00	98%	240.930.000,00	Kecamatan Kota
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	100%	29.738.787.170,00	100%	18.345.008.300,00	100%	18.487.182.114,00	100%	36.832.190.414,00	Kecamatan Kota
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	100%	52.244.500,00	100%	200.200.000,00	100%	201.751.550,00	100%	401.951.550,00	Kecamatan Kota
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	886.611.896,00	100%	2.282.395.600,00	100%	2.300.084.166,00	100%	4.582.479.766,00	Kecamatan Kota
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	87%	7.207.127.696,00	90%	5.807.983.890,00	91%	5.852.995.765,00	91%	11.660.979.655,00	Kecamatan Kota
								-		-			
7	1		Kecamatan Pesantren					-		-			
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	26.181.306.173,00	100%	32.372.385.110,04	100%	32.623.271.095,00	100%	64.995.656.205,04	Kecamatan Pesantren

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95%		95%	-	95%	-	95%				
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	79,91		79,91	-	80,41	-	80,41				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan publik yang berkualitas	86%	96.000.137,00	87%	218.437.200,00	90%	220.130.088,00	90%	438.567.288,00	Kecamatan Pesantren
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	98%	27.596.651.876,00	98%	542.221.581,00	99%	546.423.798,00	99%	1.088.645.379,00	Kecamatan Pesantren
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	90%	50.807.950,00	95%	172.065.100,00	96%	173.398.605,00	96%	345.463.705,00	Kecamatan Pesantren
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum	93%	351.555.200,00	95%	2.188.853.960,00	96%	2.205.817.578,00	96%	4.394.671.538,00	Kecamatan Pesantren
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	90%	6.756.897.600,00	90%	5.797.615.300,00	91%	5.842.546.819,00	91%	11.640.162.119,00	Kecamatan Pesantren
								-		-			
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					-		-			
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					-		-			
8	1		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					-		-			
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	2.722.577.206,00	100%	4.162.399.545,48	100%	4.194.658.142,00	100%	8.357.057.687,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD				
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95%		95%	-	95%	-	95%				
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80.59*		80,59	-	85,59	-	85,59				
8	1	2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan	90%	194.411.450,00	95%	730.956.620,00	96%	736.621.534,00	96%	1.467.578.154,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya politik	90%	20.088.497.477,00	95%	8.375.211.970,00	96%	8.440.119.863,00	96%	16.815.331.833,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran organisasi masyarakat tentang pentingnya politik dan peraturan yang berlaku	90%	1.058.923.782,00	95%	1.117.430.000,00	96%	1.126.090.083,00	96%	2.243.520.083,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Keagamaan dan Suku/Ras	0%		85%	200.000.000,00	87%	201.550.000,00	87%	401.550.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat kewaspadaan dini masyarakat	95%	489.657.774,00	95%	819.308.360,00	96%	825.658.000,00	96%	1.644.966.360,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total				1.566.572.778.934,00		1.609.815.669.628,11		1.622.363.596.501,45		3.232.179.266.129,56			

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian dari indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Indikator Kinerja utama terdiri atas indikator tujuan dan indikator sasaran pembangunan daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Adapun IKU Pemerintah Kota Kediri tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Kediri Tahun 2025-2026

No.	IKU	Kondisi Awal 2023	Target	
			2025	2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	62,78*	63	64
2.	Indeks Pembangunan Manusia	80,97	81,5	82,5
3.	Pertumbuhan Ekonomi	1,92%	3,5-4,5	3,5-4,5
4.	Tingkat Kemiskinan	7,15	6,9	6,85
5.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	4,55	4,55	4,56
6.	Indeks Kota Layak Huni	79,83	80,5	80,9
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	4,03	4,01
8.	Indeks Sistem Merit	306	314	318
9.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,94	70	75
10.	Nilai SAKIP	71,98 (BB)	73	75
11.	Indeks Reformasi Hukum	55,24	57	60
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,54	3,70	3,80
13.	Indeks Inovasi Daerah	47,63	53	55
14.	Indeks SPBE	3,65	3,7	3,8
15.	Indeks Pendidikan	0,79	0,80	0,81
16.	Umur Harapan Hidup	74,67	74,97	75,27
17.	Indeks Pembangunan Gender	94,54**	94,72	94,91
18.	Nilai Peningkatan PDRB	1,285 T	2,3T-3,2T	2,8T-3,8T
19.	Realisasi Nilai Investasi Daerah (Milyar)	1.347 M	1.414M	2.898 M
20.	Tingkat Inflasi	5,76	3±1	3±1
21.	Indeks Ketahanan Pangan	73,95	74	75

No.	IKU	Kondisi Awal 2023	Target	
			2025	2026
22.	Jumlah Kunjungan Wisata	1.695.361	1.750.000	1.925.000
23.	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	100%	100%	100%
24.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	86,65	88	89
25.	Indeks Ketahanan Daerah	0,77	0,78	0,8
26.	%ketaatan terhadap rencana tata ruang	83,28%	84.60%	84.80%
27.	Indeks Infrastruktur	85,63	88	90
28.	%permukiman layak huni	89,08%	89,71%	90,34%
29.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,54	66,76	66,77

Keterangan:

* = nilai sementara tahun 2023

**= nilai target tahun 2023 dalam Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024

Sedangkan IKD Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025-2026 dari setiap aspek adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Kota Kediri Tahun 2025-2026**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target 2025	Target 2026
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Jumlah Penduduk Miskin	21.150	20.000	19.000
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	1,42	1,2	0,9
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,41	0,37	0,34
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Maturitas SPIP	3,20	3,22	3,25
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	63,16	70,00	75,50
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
C	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	LAYANAN WAJIB URUSAN DASAR			
1.1	BIDANG PENDIDIKAN			
	Rata-rata lama Sekolah	10,69	10,50	10,55
	Harapan lama Sekolah	15,45	15,5	15,55
1.2	BIDANG KESEHATAN			
	Indeks Keluarga Sehat	0,47	0,5	0,6
	Angka Kesakitan	5,65	5,5	5,3

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target 2025	Target 2026
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Utama / Paripurna	100%	100%	100%
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	83,28%	84,60%	84,80%
	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Mantap	80,51%	68,00%	70,00%
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	91,00%	91,80%	91,90%
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	50,85%	58,81%	60,18%
	Persentase Bangunan/Gedung Pemerintahan Dalam Kondisi Baik	32,52%	62,04%	68,00%
	Nilai kinerja infrastruktur drainase	63,98%	69,02%	69,47%
	Nilai kinerja infrastruktur Jalan dan Jembatan	92,42%	81,71%	83,47%
1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Persentase rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah	100%	100%	100%
	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0%	5,75%	11,52%
	Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0%	9,06%	18,12%
	Presentase PSU Perumahan yang yang terkelola	35%	40%	45%
	Persentase perumahan yang tertata	68%	70%	72%
1.5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan)	100%	100%	100%
	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan managemen kebakaran (WMK)	87,83%	96,8%	96,9%
	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	100%	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5%	13%	15%

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target 2025	Target 2026
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
	Persentase Pencegahan dan penanganan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kota Kediri	100%	100%	100%
1.6	SOSIAL			
	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar	99,03%	100%	100%
	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	83,10%	85%	86%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	100%	100%	100%
	Persentase TMP yang dikelola	100%	100%	100%
2	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR			
2.1	Bidang Tenaga Kerja			
	Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	451	460	470
	Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	2904	500	550
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Predikat Pengarusutamaan Gender	Nindya	Nindya	Utama
	Predikat Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya
2.3	Pangan			
	Ketersediaan energi dan protein per kapita	159.3	152.28	137.89
	Penanganan daerah rawan pangan	30	43	54
	Pengawasan pelaku usaha PSAT-PDUK	40	50	60
2.4	Pertanahan			
	Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Tanah Kosong	0%	33,33%	100%
2.5	Lingkungan Hidup			
	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	99,01%	99,02%	99,03%
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	17,03%	11,42%	11,44%
	Indeks Kualitas Air	67.42%	67.43%	67.44%
	Indeks Kualitas Udara	93.07 %	93.08%	93.09%
2.6	Kependudukan dan Catatan Sipil			
	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	92,82%	93,25%	93,35%
	Persentase Layanan Pencatatan Sipil	97,06%	97,45%	97,85%
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63%	70%	80%

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target 2025	Target 2026
	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	0%	98%	98,4%
2.7	Pengendalian Penduduk dan KB			
	Peningkatan kualitas Kampung KB	50% (23 dari 46 Kel)	56,52% (26 dari 46 Kel)	63,04% (29 dari 46 Kel)
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,65	67	68
2.8	Perhubungan			
	Persentase kegiatan penegakan peraturan dan penertiban parkir	62,50%	70%	80%
	Rasio Izin Trayek	66,67	75	78
	Indeks Fasilitas Pelengkap LLAJ	53,09%	55%	60%
2.9	Komunikasi dan Informatika			
	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	2,30	3,1	3,3
	Tingkat kematangan layanan SPBE	3,83	3,86	3,89
	Persentase Aplikasi e-Gov yang Terintegrasi	64%	64%	65%
	Persentase Aplikasi Informasi yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik	67%	75%	78%
	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Kebijakan Daerah yang Dipublikasikan	100%	100%	100%
2.10	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah			
	Persentase Koperasi Sehat	66.12%	70.60%	75.00%
	Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar NIB	10.375	2.500	2.700
	Pertumbuhan Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkat	7,28	7,4	7,45
2.11	Penanaman Modal			
	Jumlah WUB	23.906	4.000	4.500
	Skor PTSP	89,51**	90,00	90,50
2.12	Pemuda dan Olahraga			
	Pemuda Berprestasi (Prestasi Pemuda)	15	16	17
	Atlet Berprestasi (Prestasi Atlet)	46	50	55
2.13	Statistik			
	Persentase Data Sektoral yang Akurat	93%	94%	95%
2.14	Persandian			
	Persentase Informasi yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi yang Aman	83%	90%	95%
2.15	Kebudayaan			
	Persentase Destinasi Wisata yang Terpelihara dengan Baik	50%	52%	55%
2.16	Perpustakaan			

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target 2025	Target 2026
	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,06	1	2
	Tingkat Kegemaran Membaca	54,2	60,47	64,04
2.17	Kearsipan			
	Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang bernilai baik	50	55	60
3	URUSAN PILIHAN			
3.1	Kelautan dan Perikanan			
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	1%	1%	1%
3.2	Pariwisata			
	Persentase peningkatan even pariwisata, budaya dan olah raga	90%	92%	95%
	Persentase Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif yang dibina	75%	80%	85%
3.3	Pertanian			
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan (Padi, Jagung, Tebu)	1%	2%	2%
	Persentase peningkatan Produksi Peternakan	1%	2%	2%
3.4	Perdagangan			
	Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	12.25%	13.66%	15.08%
	Indeks Tertib Ukur	71,24	73	75
3.5	Perindustrian			
	Pertumbuhan Industri (%)	55,9%	12.8%	13%
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.1	SEKRETARIAT DAERAH			
	Skor EKPPD	3,23*	3,26	3,30
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	83,37 (Baik)	84 (Baik)	85 (Baik)
	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi	97%	98%	100%
	Persentase kelurahan dengan klasifikasi swasembada	21,74%*	26,09%	30,43%
	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Regulasi Penganggaran dan Pelaksanaan APBD	82%	83%	85%
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	11,16	12,5	13
	Persentase ketersediaan peta jabatan perangkat daerah yang sudah ditetapkan oleh PPK	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target 2025	Target 2026
	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang berkualitas	80%*	80%	85%
	Persentase kebijakan bidang pemerintahan	80%*	80%	85%
	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	80%*	80%	85%
	Persentase UPP dengan Indeks PEKPPP baik	25%*	25%	45%
	Indeks PEKPPP bidang Protokol dan komunikasi pimpinan	3,5*	3,5	4
	Indeks PEKPPP bagian umum	3,5*	3,5	4
4.2	PERENCANAAN			
	Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	74,42%	75%	75,50%
4.3	KEUANGAN			
	Persentase Peningkatan PAD	9,98%	28,41%	5%
4.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	75,81%	76%	77%
4.5	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	82,88%*	85%	86%
4.6	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	IKM Kecamatan Mojoroto	3,84	3,85	3,87
	IKM Kecamatan Kota	3,53	3,80	3,85
	IKM Kecamatan Pesantren	3,41	3,80	3,85
4.7	SEKRETARIAT DPRD			
	Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	93%	93%	94%
4.8	UNSUR KEPEGAWAIAN			
	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang terpenuhi	88%	91%	92%
	Persentase Pengembangan Karir ASN berdasarkan Hasil Talenpool ASN	88%*	90%	92%
	Persentase ASN yang berkinerja Baik	94,35%	94,80%	95,20%

Keterangan:

* = nilai sementara tahun 2023

**= nilai target tahun 2023 dalam Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan transisi pada masa berakhirnya RPJMD Tahun 2020-2024 dan menunggu terpilihnya Kepala Daerah periode 2025-2030. Dokumen ini menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025-2026 dan memastikan keselarasan serta keberlanjutan pencapaian sasaran pokok RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan RPD ini telah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta memperhatikan arahan dalam rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026.

9.1 Pedoman Transisi

- a. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan melalui RKPD Kota Kediri Tahun 2025 dan Tahun 2026;
- b. Setelah pelaksanaan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2030 sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka penyusunan dokumen tahunan selanjutnya akan mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPD Tahun 2025-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Kediri, masyarakat dan seluruh stakeholder terkait untuk melaksanakan pembangunan hingga tahun 2026 sambil menunggu peraturan Pemerintah Pusat. Diperlukan komitmen, kolaborasi, transparansi, inovasi dan tanggung jawab penuh untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Kediri dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026;

- b. Seluruh Perangkat pada Pemerintah Kota Kediri dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 dengan sebaik-baiknya;
- c. Setiap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Kediri berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pasca ditetapkannya RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 ini dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Setiap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Kediri wajib menjamin keselarasan dan konsistensi antara Renstra PD dengan RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026;
- e. Perangkat Daerah pelaksana urusan perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan/ implementasi RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022